

K U N T O W I J O Y O



M E T O D O L O G I
SEJARAH

Edisi Kedua



KUNTOWIJOYO

METODOLOGI SEJARAH

Edisi Kedua

**Diterbitkan atas kerjasama dengan
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada**

Kuntowijoyo
METODOLOGI SEJARAH
Edisi Kedua
Tiara Wacana Yogya, 2003
Indeks
Bibliografi
Ilustrasi
ISBN : 979-9340-47-0

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

Metodologi Sejarah

Pengarang • Kuntowijoyo

Penyunting • Muhammad Yahya

Penyusun teks • Rosidik

Tata letak • Ramyari

Desain Sampul • Wahyu Ong

Edisi Pertama • Juli 1994

Edisi Kedua • Agustus, 2003

Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya
Kopen Utama No. 16, Banteng, Jl. Kaliurang Km 7,8 Yogyakarta 55581
Telp./Fax. (0274) 880683
Website: <http://www.tiarawacana.co.id>
Email: yogya@tiarawacana.co.id

Anggota IKAPI

Dicetak oleh • PT. Tiara Wacana Yogya

Untuk
Bapak Drs. Dharmono Hardjowidjono
yang tanggal 29 Desember 1993
memasuki masa pensiun.

Untuk
Bapak Drs. Dharmono Hardjowidjono
yang tanggal 29 Desember 1993
memasuki masa pensiun.

Prakata

(Edisi Kedua, 2003)

Tidak semua buku mengalami proses cetak-ulang. Apalagi buku yang terbit dengan perbaikan dan penambahan materi, jumlahnya lebih sedikit lagi. Di antara yang sedikit itu, buku *Metodologi Sejarah* edisi kedua ini hadir dengan penambahan beberapa materi. Ada enam materi baru, yakni tentang Sejarah Agama, Sejarah Politik, Sejarah Pemikiran, Sejarah Mentalitas, Sejarah Kuantitatif, Biografi, dan satu materi sebagai sub bab tambahan pada pembahasan tentang Sejarah Wanita. Ini semua tidak mungkin terjadi tanpa dedikasi dan perhatian yang begitu besar sang penulis, Profesor Kuntowijoyo, pada metodologi sejarah.

Profesor Kuntowijoyo memberi batasan metodologi sebagai ilmu yang membicarakan jalan, bagaimana metodologi sejarah harus dilakukan. Di dalamnya diuraikan bagaimana menempatkan metodologi secara benar, membicarakan persoalan teori dan konsep-konsep, dan sumber sejarah yang akan digunakan. Di samping itu, Profesor Kuntowijoyo menguraikan berbagai metode sejarah, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik perihal bahan, kritik, dan interpretasi, serta penyajian sejarah. Lebih dari itu semua, dalam setiap bahasan, Profesor Kuntowijoyo menekankan penguatan 'jati-diri' keilmuan dari para sejarawan; dan 'seruan' untuk kesadaran keilmuan para sejarawan.

"... perlu disayangkan bahwa banyak sejarawan akademis yang berhenti menulis setelah mereka mendapatkan ijazah, sekalipun banyak alasan yang dapat menjadi kambing hitam untuk "kemalasan" itu." ("Penulisan Sejarah di Indonesia")

Dalam bagian lain, Professor Kuntowijoyo menggugah kesadaran para sejarawan, sebagaimana dikutip berikut ini.

“Masa kini kita memang masih menjadi milik banyak orang, tetapi sejarawanlah sebenarnya yang mempunyai posisi paling menguntungkan. Sebab, sejarawan dapat melakukan refleksi kritis melintas waktu; masa lalu, masa kini, dan masa depan.”
(“Sejarah Kebudayaan”)

Selaku penerbit, kami merasa sangat beruntung dapat ikut berkiprah dalam pengayaan kajian metodologi sejarah yang disampaikan Profesor Kuntowijoyo. Kami pun sangat berterima kasih atas perhatian dan koreksi beliau terhadap penerbitan buku ini, khususnya pada edisi kedua. Adanya penambahan materi memberi kesempatan kepada kami untuk menampilkan buku ini secara lebih baik, setidaknya secara fisik pada tata letak dan perwajahan.

Yogyakarta, Agustus 2003

Penerbit

Kata Pengantar Penulis (Edisi Kedua, 2003)

Saya mempunyai kesempatan untuk meninjau skripsi-skripsi S-1 Jurusan Sejarah, UGM. Sudah banyak kemajuan dalam variasi tema, deskripsi yang sistematis, penggunaan teori sosial, dan sumber sejarah yang memadai. Akan tetapi, ada satu-dua hal yang menggajal, yaitu adanya karya tulis yang berupa antikuarianisme dan salah pengertian mengenai ilmu sejarah (filsafat ilmu, epistemologi). *Kesalahan pertama* (antikuarianisme) terdapat dalam sebuah topik mengenai pelacuran di Batavia sebelum PD II, dan *kesalahan kedua* (filsafat ilmu, epistemologi) terdapat dalam topik mengenai tari tayub di Rembang pada tahun 2000.

Antikuarianisme itu pasti disebabkan oleh gagasan tentang sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu. Seolah-olah “masa lalu” itu harus jauh dari masa kini. Tidak. Sejarawan itu ibarat orang naik kereta api dengan melihat ke belakang. Ia dapat menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang tidak bisa dikerjakannya ialah melihat ke depan. Andaikata topik itu diubah ke topik pelacuran masa kini, karya tulis itu malahan sah sebagai topik sejarah. Misalnya, “Pelacuran di Jakarta: Pelacur, Tunasusila, dan Pekerja Seks.” Ada perkembangan sejarah yang penting: eufimisme, sekularisasi, dan desensitisasi. Cakupan temporalnya dapat antara 1945-2003. Topik itu bisa masuk dalam sejarah mentalitas (Bab 15). Metode : *content analysis* media massa setempat dengan interval 10-15 tahun.

Kesalahan epistemologis terjadi karena kacaunya pengertian antara sejarah dan ilmu sosial lain. Topik mengenai tari tayub di Rembang itu dilakukan dengan metode *participatory observation*.

Hasilnya sangat mengesankan. Bab-babnya berisi tentang gerakan-gerakan tari, lagu pengiring, syair lagu, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, dan fantasi seksual penari. Akan tetapi sayang, topik itu bukan topik sejarah. Bab 1 sampai Bab 3 adalah topik seni tari, Bab 4 sampai Bab 6 adalah sosiologi, dan Bab 7 adalah psikologi. Harus diingat: ilmu sosial meluas dalam ruang (sinkronis), sedangkan sejarah memanjang dalam waktu, diakronis. (Baca Bab 3, "Sejarah Sosial"). Topik mengenai tari tayub itu bisa diubah, "disejarahkan", misalnya, "Tari Tayub di Rembang: Dari Ledek sampai Waranggana, 1960-2000," yang menggambarkan evolusi tari tayub, dari seronok ke santun. Bisa ditulis seni populer (seni rakyat, hiburan), atau sejarah mentalitas. Metodenya ialah sejarah lisan. "Sejarah adalah ilmu tentang perubahan," kata Marc Bloch. Jadi, sejarah adalah proses, bukan struktur.

Selanjutnya, pendidikan sejarah di tingkat awal harus pula berupa pendidikan penalaran ilmiah. Pikiran bahwa sejarah adalah masa lalu tanpa peduli relevansi dengan masalah kontemporer akan merugikan mahasiswa dan menjadikan sejarah sebagai ilmu yang terpencil di tengah perjuangan bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Karenanya, kita perlu berusaha supaya lulusan sejarah mempunyai sumbangsih kepada bangsa dengan menjadikan ilmunya bagian dari kecerdasan bersama (*collective intelligence*) bangsa ini.

Salah satu cara ialah membiasakan mahasiswa untuk menulis topik-topik sejarah kontemporer (c. 1945-2000), baik makalah maupun skripsi. Penerbitan buku ini di antaranya ialah usaha untuk meyakinkan mahasiswa dan pencinta sejarah pada umumnya bahwa tema dan topik sejarah kontemporer itu masih terbuka luas. Penulisan tema-tema sejarah, seperti diplomasi, militer, kriminalitas, kesehatan masyarakat, dan keluarga (sebagai satuan), masih dinanti. Sementara itu untuk beberapa tema lain, seperti seni (adiluhung), seni populer, dan semua yang ada dalam buku ini, dapat dirunut metodologinya karena sudah ada tradisi, peristilahan, dan konvensi-konvensi.

akademik. Bagaimanapun, kesadaran keberagaman sejarah yang dipicu oleh tulisan-tulisan tentang metodologi dalam buku ini setidaknya menambah jelas betapa banyak yang bisa dikerjakan.

Adapun adanya ketakutan untuk menulis masalah-masalah kontemporer sering datang bersamaan dengan ketulusan akademis tentang bidang garapan ilmu. Sejarawan tidak suka menerabas rumah orang lain. Sejarah adalah sejarah, ilmu sosial adalah ilmu sosial. Sebenarnya, sejarah dan ilmu sosial (lain) mempunyai kesamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah keduanya harus memberikan deskripsi dan penjelasan. Perbedaannya ialah sama-sama memberi penjelasan (*explanation*) tapi keduanya berlainan dalam sudut pandang. Karena ada perbedaan itulah sejarah tidak akan bertabrakan dengan ilmu sosial, meskipun menulis mengenai topik yang sama.

Sejarawan, sama seperti ilmuwan lain, punya hak penuh berbicara masalah-masalah kontemporer. Dengan pikiran bahwa ilmu sejarahnya itu *contemporaneous* sejarawan-sejarawan muda akan melangkah ke dunia jurnalistik, politik, birokrasi, dan LSM dengan mantap. Mereka dapat terus menjadi sejarawan di tempatnya masing-masing. Bahkan, mereka yang bekerja di pengalengan ikan, pertukangan sepatu, perusahaan batik, pabrik biskuit, dan dunia usaha lain tetap dapat menjadi sejarawan. Sejarawan adalah penulis sejarah. *Titik*. ("Cerpenis adalah penulis cerpen, apa pun pekerjaannya"). Tanggalkan anggapan bahwa hanya mereka yang bekerja sebagai dosen universitas dan institusi-institusi ilmiah berhak disebut sejarawan!

Kuntowijoyo
Guru Besar Ilmu Sejarah
Universitas Gadjah Mada



Sambutan
Ketua Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
(Edisi Pertama, 1994)

Salam sejahtera, semoga rahmat dan barokah Allah melimpah kepada kita semuanya. Dengan penuh senang hati kami menyambut terbitnya karya DR. Kuntowijoyo, M.A., *Metodologi Sejarah* yang terbit atas kerjasama antara Jurusan Sejarah dengan Penerbit Tiara Wacana Yogya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak DR. Kuntowijoyo, M.A. yang telah menyumbangkan naskah buku ini kepada Jurusan Sejarah, kemudian mengamanatkan agar dapat diterbitkan oleh Jurusan Sejarah bekerjasama dengan salah satu penerbit. Sumbangan naskah itu sekarang telah terwujud menjadi buku di hadapan para pembaca, semoga dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah dari Bapak DR. Kuntowijoyo, M.A. Bersama ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Tiara Wacana yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku ini.

Dengan terbitnya buku *Metodologi Sejarah* karya DR. Kuntowijoyo ini, kami berharap dapat menjadi bekal yang berharga bagi para dosen dan mahasiswa sejarah pada khususnya, serta para ilmuwan dan pemerhati sejarah pada umumnya. Oleh karena itu kami menganjurkan kepada para dosen dan mahasiswa sejarah dapat membacanya dengan baik, sehingga akan dapat menambah luasnya wawasan pengetahuan keilmuan sejarah.

Di samping itu semua, buku ini oleh pengarang dimaksudkan juga sebagai penghargaan kepada Bapak Drs. Dharmono Hardjowidjono

yang pada tanggal 29 Desember 1993 menempuh “PURNA TUGAS”-nya sebagai pegawai negeri sipil di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM.

Atas perhatian para pembaca terhadap buku ini, kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Desember 1993

Adaby Darban

Kata Pengantar Penulis (Edisi Pertama, 1994)

Buku ini adalah pertanggungjawaban penulis yang selama ini memegang mata kuliah Teori dan Metodologi Sejarah pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada. Semula buku ini berbentuk esei yang ditulis untuk keperluan yang berbeda pada waktu yang berlainan pula. Oleh karena itu, buku ini mengandung sedikit kelebihan dan banyak kekurangan. Kelebihannya hanyalah bahwa ia jadi saksi perkembangan Ilmu Sejarah di Indonesia. Adapun kekurangannya ialah bahwa ia tidak sistematis. Ia juga tidak sempat diperbaiki sesuai dengan perkembangan. Selebihnya, tidak dibicarakan di sini hal-hal yang sebenarnya amat penting. Misalnya, Sejarah Politik, Biografi, Psikohistori (biografi dengan pendekatan psikoanalisis), Prosopografi (biografi kolektif), Sejarah Keluarga, Sejarah Intelektual, Sejarah Moralitas, Sejarah Kesehatan, Sejarah Diplomasi, Sejarah Perang, dan sebagainya. Spesialisasi sejarah sebenarnya menuntut lebih banyak lagi. Ada banyak cara untuk memajukan Ilmu Sejarah, yaitu dengan mengubah filsafatnya, teorinya, metodologinya, dan metodenya. Perubahan dalam filsafat kalau menyangkut pandangan hidup (*speculative philosophy of history*). Betapa banyak perubahan yang terjadi dalam sejarah di Blok Timur, Sejarah Kiri di Eropa Barat, dan Sejarah Kiri Baru di Amerika karena pengaruh Filsafat Kiri. Teori Sejarah menyangkut tiga hal, tergantung kepada sudut pandangnya. Pandangan ontologis menyatakan bahwa Teori Sejarah adalah dasar-dasar Ilmu Sejarah (*critical philosophy of history*), seperti apa Ilmu Sejarah itu, bagaimana mungkin masa lalu diketahui, bagaimana bentuk pengetahuan itu, apakah bisa orang menulis sejarah secara objektif,

apakah penjelasan sejarah itu, apakah kausalitas dalam sejarah, dan apakah ada determinisme ataukah sejarah itu terbuka. Penulis meletakkan perubahan dari Eropasentrisme ke Indonesiasentrisme di sini. Pandangan etis menanyakan hubungan Ilmu Sejarah dengan Ilmu-ilmu lain, terutama Ilmu-ilmu Sosial. Kajian yang membahas hubungan antara Sosiologi dan Ilmu Sejarah masuk di sini. Seminar Sejarah Lokal, 1984, di Medan adalah contoh bagaimana Antropologi telah mempengaruhi Ilmu Sejarah. Cara pandang estetis mempersoalkan bagaimana menulis sejarah yang baik dan benar, misalnya, tentang gaya, kuantifikasi, sejarah lisan, sepanjang itu semua bersifat teoretis.

Sering orang sangsi, apakah Ilmu Sejarah mempunyai teori. Seperti halnya teori dalam Ilmu-ilmu Sosial berbeda dengan teori dalam Ilmu-ilmu Alam dalam tingkat kepastiannya, Ilmu Sejarah juga mempunyai teori atau generalisasi. Teori/Ilmu-ilmu Sosial menekankan keumuman, generalisasi dalam Ilmu Sejarah sifatnya terbatas. Artinya, kalau kita berbicara tentang Revolusi Perancis maka generalisasinya hanya berlaku untuk Revolusi Perancis, tidak untuk Revolusi Indonesia. Keterbatasan generalisasi dalam Ilmu Sejarah itu dapat diatasi dengan bantuan Ilmu-ilmu Sosial yang menekankan keumuman, tetapi harus diakui bahwa semua ilmu ada batasnya.

Lalu, dengan apa Ilmu Sejarah mencoba berhubungan dengan masa sekarang? Perlu disadari terlebih dulu bahwa Ilmu Sejarah adalah Ilmu yang cukup diri, artinya sebagai lambang sebuah kesadaran ia mempunyai cara hidup sendiri. Soal bagaimana ia berhubungan dengan masa kini ada tiga cara. Pertama, pendekatan Ilmu Sejarah yang menekankan kesinambungan dan perubahan. Tidak ada gejala yang tidak mengalami pertumbuhan. Pendekatan genetis itu adalah milik khas sejarawan. Kedua, melalui paralelisme sejarah. Artinya kesejajaran masa kini dengan masa lalu. Ketiga, dengan kajian sejarah perbandingan. Bukankah Eropa mengalami lebih dahulu industrialisasi? Dengan mengkaji industrialisasi Eropa

kita mengetahui, dengan segala perbedaannya, industrialisasi di sini.

Sekarang tiba saatnya kita berbicara secara singkat tentang metodologi. Metodologi atau *science of methods* ialah ilmu yang membicarakan jalan. Di sini diuraikan berbagai jenis penulisan sejarah. Unit kajian, permasalahan, teori, konsep dan sumber sejarah. Sejarah Lisan kami masukkan di sini karena banyak mengandung permasalahan lebih daripada teori atau praktek.

Metode sejarah ialah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Misalnya, Sejarah Kuantitatif dan Sejarah Lisan.

Kuntowijoyo

Daftar Isi

Prakata

Kata Pengantar Penulis (edisi kedua)

Sambutan Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM

Kata Pengantar Penulis (edisi pertama)

Bab 1	Penulisan Sejarah di Indonesia	1
Bab 2	Sejarah Lisan	23
Bab 3	Sejarah Sosial	39
Bab 4	Sejarah Kota	59
Bab 5	Sejarah Pedesaan	73
Bab 6	Sejarah Ekonomi Pedesaan	91
Bab 7	Sejarah Wanita: dari Sejarah Androcentric ke Sejarah Androgynous	113
Bab 8	Sejarah Kebudayaan	133
Bab 9	Seminar Sejarah Lokal, 1984	145
Bab 10	Sejarah Agama	157
Bab 11	Sejarah Politik	173
Bab 12	Sejarah Pemikiran	189
Bab 13	Biografi	203
Bab 14	Sejarah Kuantitatif	219
Bab 15	Sejarah Mentalitas	235

Daftar Pustaka

Sumber Tulisan

Indeks Nama

Indeks Subjek

PENULISAN SEJARAH DI INDONESIA

Historiografi Indonesia modern baru dimulai sekitar tahun 1957, waktu diselenggarakannya Seminar Sejarah Nasional Indonesia Pertama di Yogyakarta. Tahun itu dianggap sebagai titik tolak kesadaran sejarah baru.¹ Sementara itu, kurun historiografi tradisional dapat dianggap berakhir dengan ditulisnya buku *Critische Beschouwing van de Sadjarah van Banten* oleh Hoesein Djajadiningrat pada tahun 1913.² Buku itu dengan cara kritis mengkaji tradisi penulisan *babad* dalam khasanah sastra. Namun, pertanyaan mendasar tentang historiografi Indonesia modern barulah untuk pertama kali muncul dalam Seminar Sejarah Nasional Pertama itu. Agenda seminar itu meliputi filsafat sejarah nasional, periodisasi sejarah Indonesia, dan pendidikan sejarah. Dari sinilah mulai “nasionalisasi” atau — untuk menggunakan istilah saat ini — “pribumisasi” historiografi Indonesia.

Perdebatan yang berkelanjutan sampai tahun 1970 ialah, pertama, pertanyaan tentang Neerlandocentrisme dan Indonesiacentrisme —

1 Lihat buku-laporan, *Seminar Sejarah* (Universitas Gadjah Mada, 1957). Isu dalam seminar itu dibicarakan kembali oleh Nugroho Notosusanto, “Problems in the Study and Teaching of National History in Indonesia”, *Journal of Southeast Asian History*, Vol. VI, No. 1, 1965, hlm. 1-16.

2 Hoesein Djajadiningrat, *Critische Beschouwing van de Sadjarah van Banten* (Leiden, 1913).

bagaimana meletakkan tekanan pada peranan sejarah orang Indonesia dalam sejarah Indonesia. Kepustakaan sejarah yang ada pada waktu itu lebih banyak menekankan peranan orang Eropa, dan melihat sejarah Indonesia sebagai sejarah ekspansi Eropa di Indonesia. Pertanyaan kedua ialah tentang objektivitas dan subjektivitas dalam historiografi, suatu perluasan dari pertanyaan pertama. Sue Nichterlein telah meringkaskan perdebatan itu dalam artikelnya, "Historicism and Historiography in Indonesia",³ sebuah pembicaraan yang meliputi periode sampai 1970. Banyak pikiran yang muncul dalam kurun itu direkam kembali dalam sebuah buku lain yang membicarakan alam pikiran sejarawan Indonesia, yaitu buku William H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*.⁴ Sebagaimana judulnya menunjukkan, buku ini meliputi periode yang lebih lama, dan mengandung permasalahan yang beragam mengenai sejarah Indonesia. Kita dapat melihat kembali panorama pemikiran sejarawan Indonesia melalui buku ini, baik sejarawan akademis, amatir, maupun sekedar kaum intelektual yang berminat.

Banyak perubahan telah terjadi pada tahun-tahun setelah 1970, tidak saja dalam arti pemikiran tentang bagaimana sejarah seharusnya ditulis, tetapi juga kegiatan dalam arti yang kongkret, seperti diwujudkan dalam perkembangan kelembagaan, ideologi, dan substansi sejarah. Bab ini akan mencoba melihat perkembangan pelembagaannya, yaitu bagaimana kepustakaan sejarah itu diproduksi, semacam "sosiologi historiografi". Masalah lain, ideologi dan substansi akan disinggung dalam konteks kelembagaan itu. Kategori pertama dari kepustakaan sejarah ialah yang ditulis oleh sejarawan akademis, kelompok yang sebenarnya mempunyai tanggung jawab terbesar dalam perkembangan historiografi.

3 Sue Nichterlein, "Historicism and Historiography in Indonesia", *History and Theory*, Vol. XIII, No. 3, 1974, hlm. 253-272.

4 William H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi* (Jakarta: LP3ES, 1982).

Alasannya cukup jelas, sejarawan akademis ialah mereka yang paling sadar tentang apa yang dikerjakan, mempunyai pendapat yang penuh pertimbangan tentang yang ditulis — sekalipun, sayang, mereka mungkin yang paling sedikit memproduksi. Kegiatan penulisan sejarah yang lain, dapat dianggap sebagai kepanjangan, tetapi juga kadang-kadang bebas, dari penulisan kategori pertama. Penulisan itu meliputi berbagai kegiatan yang disponsori pemerintah dalam bentuk proyek-proyek penulisan, sejarah militer, sejarah populer, sejarah lisan, dan macam-macam kegiatan lain yang akan diterangkan kemudian dalam makalah ini. Sebagai usaha tambahan terhadap penulisan sejarah, dapat disebutkan usaha-usaha penerbitan arsip yang dikerjakan oleh Arsip Nasional. Tulisan ini akan meliputi juga kegiatan-kegiatan penerbitan yang tidak secara khusus mengklaim sebagai penerbit sejarah, tetapi yang dalam kenyataannya menyumbang besar terhadap pemahaman sejarah, seperti penerbitan buku-buku “kenangan” ulang tahun tokoh-tokoh sejarah.

Sejarawan akademislah satu-satunya kelompok yang dengan sadar menyebut diri sebagai sejarawan, dan mendapat pengakuan demikian. Mereka inilah yang diundang untuk menghadiri seminar-seminar sejarah, dan kegiatan lain yang mengandung tujuan sejarah. Kegiatan mereka yang luas, bukan saja dalam penulisan, tetapi terlibat juga dalam pengajaran, penelitian, dan kegiatan yang didefinisikan sebagai “pengabdian masyarakat”. Sejak jurusan sejarah yang pertama didirikan pada tahun 1949, jumlah jurusan dan program ilmu sejarah terus berkembang, baik dalam wadah universitas maupun institut keguruan. Lulusan jurusan sejarah menjadi hampir-hampir tidak terhitung lagi, mengingat banyaknya lembaga yang mengelola. Dari para lulusan itu, hanya mereka yang kemudian menjadi pengajar di universitas atau menjadi peneliti di lembaga-lembaga penelitianlah yang masih memelihara hubungan dengan induk akademis mereka. Lulusan lainnya, banyak yang menghilang di tengah-tengah lapisan angkatan kerja. Sekalipun dari sejumlah itu hanya beberapa saja yang sudah mendapat derajat tertinggi dalam ijazah, tetapi semuanya telah

menyumbangkan karya tulisnya dalam perbendaraan sejarah Indonesia. Jika dihitung dengan angka tentulah karya-karya tulis, baik yang berupa skripsi sarjana muda, sarjana, sarjana utama, atau doktor, merupakan bagian terbesar dari historiografi Indonesia. Sayang, bahwa tidak ada usaha penerbitan skripsi-skripsi semacam itu, sehingga sejarah akademis tidak menjadi kegiatan yang dominan. Juga perlu disayangkan bahwa banyak sejarawan akademis yang berhenti menulis setelah mereka mendapatkan ijazah, sekalipun banyak alasan yang dapat menjadi kambing hitam untuk “kemalasan” itu. Betapa banyak sebenarnya informasi sejarah yang masih tersimpan di arsip jurusan dan perpustakaan, tanpa diketahui oleh khalayak pembaca yang lebih luas. Kiranya, sebuah pertemuan kerja dapat menjadi tempat untuk saling tukar informasi dan membentuk jaringan informasi penulisan sejarah, sehingga kita lebih tahu mengenai apa yang sedang dikerjakan oleh sejarawan akademis.

Satu hal perlu dicatat tentang nasib sejarawan akademis ini, yaitu ketergantungannya pada bantuan pemerintah sebagai sponsor bagi kegiatan-kegiatan mereka. Pemerintah, melalui lembaga-lembaga atau universitas telah menyokong sejarawan akademis dalam bentuk bantuan penelitian, seminar, dan pertemuan-pertemuan ilmiah. Pemerintah juga membantu sejarawan dengan melibatkan mereka dalam penelitian yang secara akademis di luar batas dinding ilmu sejarah, seperti penelitian mengenai pembangunan daerah, penelitian lingkungan hidup, penelitian budaya, dan sebagainya. Ketergantungan pada dana pemerintah ada manfaatnya, terutama dalam interaksi sejarawan dengan ilmuwan lain dalam proyek-proyek penelitian, sehingga mereka belajar ilmu-ilmu sosial. Akan tetapi, ketergantungan itu juga merugikan, sebab sejarawan tidak dapat memilih sendiri objek penelitiannya, satu hal yang menyebabkan jaranganya penelitian yang sifatnya murni sejarah.

Mengenai pendidikan sejarawan, ada kemajuan besar dalam dua dasawarsa terakhir. Tradisi pendidikan filologis dari pendidikan sejarawan sudah menjadi masa lalu. Sekarang, sejarawan belajar ilmu-

ilmu sosial, studi wilayah, bahkan statistik. Tema-tema yang dipilih untuk penulisan skripsi juga mulai menunjukkan arah baru. Sejarah sosial dalam arti yang luas merupakan tema yang paling banyak ditulis sejarawan akademis. Dengan perluasan teori dan metodologi, mereka yang menulis skripsi sudah mampu menjangkau topik-topik yang tidak terbayangkan tigapuluh tahun yang lalu. Dalam penulisan sejarah kontemporer, misalnya, penulis-penulis skripsi tidak saja ingat persoalan politik, tetapi sudah menjangkau masalah-masalah sosial, agama, budaya dengan pendekatan-pendekatan baru berdasar pengetahuan mereka mengenai ilmu-ilmu sosial. Keberanian semacam ini patut dipuji, karena merupakan langkah yang baik menuju penulisan sejarah yang baru. Mereka yang membuat disertasi, baik di dalam maupun di luar negeri sejak 1975 sampai 1987 hampir semuanya mengambil sejarah sosial sebagai garapan.⁵ Kekurangan terbesar dari tulisan-tulisan akademis itu ialah pembagian perhatian wilayah yang tak seimbang. Kebanyakan skripsi dan disertasi memusatkan perhatian pada daerah Jawa. Dalam pembagian waktu, perhatian utama ialah pada abad ke-19, hanya sedikit yang menaruh perhatian pada masalah kontemporer, barangkali sebab utamanya ialah faktor resiko “politik” yang terlalu besar dalam penggarapan periode kontemporer.

Mengenai tema penulisan masih sedikit sejarawan yang menulis sejarah ekonomi. Kelangkaan ini dapat ditinjau sebabnya pada kekurangan peralatan teori dan metodologi. Ilmu ekonomi ialah ilmu sosial yang relatif berkembang mendekati ilmu-ilmu eksakta, dengan terminologi teknis yang baku, sehingga sejarawan harus sungguh-sungguh menguasai teori ekonomi sebelum menulis sesuatu. Masalah metode juga menjadi hambatan. Pengajaran statistik — atau lebih lagi ekonometrik — belum menjadi bagian dari pendidikan sejarawan. Apalagi sumberdaya manusianya, mereka yang bergerak

5 Sampai 1988 baru tercatat sekitar 10 sejarawan dengan gelar doktor, lima dari universitas dalam negeri dan lima dari luar negeri.

dalam bidang sejarah berasal dari SLTA yang tidak banyak menggunakan matematika, atau mereka yang berasal dari SLTA IPA tetapi dengan minat matematika yang rendah. Selain itu, juga bidang-bidang sejarah budaya, kesenian, intelektual, dan biografi belum mendapat perhatian yang cukup dalam penulisan S-1, S-2, maupun S-3. Tradisi intelektual yang melahirkan sejarawan sudah cukup berakar, tetapi wawasannya masih perlu diperluas lagi.

Tradisi intelektual sejarawan Indonesia dapat dilacak pada Seminar Sejarah Pertama, tetapi untuk menunjuk buku yang paling dahulu berpengaruh barangkali publikasi Soedjatmoko, *An Introduction to Indonesian Historiography*, yang memuat berbagai keterangan mengenai sumber sejarah dan sumbangan berbagai disiplin untuk penulisan sejarah, merupakan landasan intelektual yang penting.⁶ Menjelang buku pengantar ke ilmu sejarah berdasar “ilmu sosial” itu, usaha untuk membuat sejarah Indonesia otonom — gema dari Seminar Pertama — dikerjakan secara baik oleh John R. Smail dalam artikelnya. “Towards an Autonomous History of Indonesia”.⁷ Tulisan ini berusaha melihat sejarah Indonesia dari pandangan orang dalam, dengan menekankan dinamika masyarakat Indonesia sendiri, sehingga Indonesia bukanlah hanya ajang dari permainan kekuatan luar semata-mata. Dengan munculnya sejarah yang “*social scientific*” lengkaplah sudah dianggap selesai. Dalam hal ini rupanya ilmu sejarah berada di depan ilmu-ilmu lain dalam proses “pribumisasi” itu, sekalipun dampak isu “pribumisasi” ilmu sosial barangkali juga akan mendapatkan ruang dalam penulisan sejarah selanjutnya. Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam penulisan sejarah — atau, apa yang disebut pendekatan multidimensional, pendekatan sejarah struktural, sejarah analitis — sangat dianjurkan oleh Sartono Kartodirdjo yang menjadi “sesepuh” bagi sejarawan-sejarawan yang lebih muda. Bukunya yang

6 Soedjatmoko et al. (eds), *An Introduction to Indonesian Historiography* (Ithaca: Cornell University Press, 1965).

7 John R. W. Smail, “On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia”, *Journal of Southeast Asian History*, Vol II, No. 2, 1961, hlm. 72-102.

baru-baru ini terbit, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*, telah membuka cakrawala baru dalam penulisan sejarah Indonesia dalam segi teori dan metodologi.⁸

Sungguh, sejak adanya Seminar Sejarah Nasional Kedua pada 1970, beberapa perkembangan baru telah tampak.⁹ Sekalipun Seminar itu masih juga bekerja keras untuk menuntaskan isu-isu awal yang dikerjakan secara deskriptif semata, beberapa makalah sudah menunjukkan minat yang besar pada pendekatan ilmu sosial dan analitik, dengan memakai teori-teori ilmu sosial untuk menjelaskan kejadian-kejadian sejarah. Sejak Seminar ini sebuah panitia dibentuk untuk memulai penulisan buku standar sejarah Indonesia. Buku standar itu bukan saja akan membawa ketegasan yang Indonesia-sentris, tetapi juga membawa kemajuan yang dicapai dalam Seminar Sejarah Nasional Kedua dengan cita-cita sejarah struktural dan analitik. Hasil yang dicapai ialah buku edisi pertama *Sejarah Nasional Indonesia* yang berjumlah enam jilid, yang tidak saja menekankan kronologi, proses, tetapi juga sejarah yang sinkronik-struktural. Sekalipun buku itu tidak sempurna sebagaimana diharapkan, karena banyaknya kendala, pekerjaan itu tetap terpuji sebagai satu-satunya buku yang lengkap dan komprehensif. Buku itu kemudian juga diringkaskan isinya untuk keperluan pengajaran di sekolah-sekolah menengah. Sekarang buku itu sudah mengalami cetak ulang dan edisi yang baru.

Jika Seminar Sejarah Nasional Kedua menjawab tantangan Seminar Sejarah Nasional Pertama, maka Seminar Sejarah Nasional Ketiga di Jakarta tahun 1981 menjawab tantangan ke arah sejarah dengan pendekatan ilmu sosial sebagaimana dijanjikan dalam Seminar Sejarah Nasional Kedua di Yogyakarta.¹⁰ Seminar Ketiga ini dengan

8 Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: PT. Gramedia, 1982).

9 Lihat buku-laporan Seminar Sejarah Nasional II (Yogyakarta, 1970).

10 Lihat buku-laporan Seminar Sejarah Nasional III (Jakarta, 1981).

jelas menunjukkan bahwa sejarawan Indonesia sudah sungguh sadar tentang perlunya kesadaran teoretik dan metodologis dalam penulisan. Bukan saja banyak sejarawan yang berani menggugat periode keramat seperti Revolusi Kemerdekaan, tetapi mereka maju dengan tujuan sejarah interdisipliner. Sejarah revolusi, misalnya, bukan lagi semata-mata sejarah kepahlawanan dan kejadian besar, tetapi juga studi tentang kelas sosial, konflik sosial, bahkan tentang perbanditan.

Kemajuan-kemajuan semacam itu dicatat pula dalam Seminar Sejarah Lokal Pertama tahun 1982.¹¹ Tidak seperti seminar sejarah nasional, yang diorganisasikan berdasar periode, Seminar Sejarah Lokal menekankan topik dan isu, sebuah sejarah yang “problem-oriented”. Tekanannya ialah pada sejarah pedesaan dan kota, dengan bandingan yang sama. “Perkembangan dan perubahan” menjadi isu sentral bagi banyak makalah, semuanya dengan perspektif sejarah. Sejarawan-sejarawan muda rupanya banyak yang berusaha agar supaya ilmunya berguna untuk para pengambil keputusan. Dengan kesadaran yang sama, Seminar Sejarah Lokal Kedua diselenggarakan pada tahun 1984.¹² Keinginan untuk adanya relevansi — kegunaan sejarah untuk pembangunan — menguasai suasana seminar. Seminar terakhir ini secara kualitatif dan kuantitatif adalah suatu prestasi tersendiri, sebuah langkah maju, bukan saja untuk sejarawan, tetapi juga untuk para ilmuwan sosial lainnya. Sekitar 130 sejarawan dan ilmuwan sosial dengan minat sejarah hadir dalam Seminar itu.

Rupanya tema sejarah lokal menawarkan banyak kemungkinan, baik dalam pemilihan topik maupun dalam wilayah yang dibicarakan. Seminar Sejarah Lokal Kedua itu telah mengundang banyak makalah mengenai sejarah lokal luar-Jawa, sehingga historiografi yang Jawa-sentris tidak terasa lagi. Selanjutnya, dengan tema sejarah lokal, banyak ilmuwan sosial di luar disiplin sejarah tertarik untuk

11 Lihat buku-laporan Seminar Sejarah Lokal I (Bali, 1982).

12 Lihat buku-laporan Seminar Sejarah Lokal II (Medan, 1984).

mengambil bagian. Ada makalah yang disajikan oleh ahli geografi, linguistik, antropologi, dan banyak lagi, sehingga seminar itu menuju ke sejarah interdisipliner yang sesungguhnya. Sayang bahwa sejarah ekonomi masih belum juga mendapat perhatian, baik dari ahli ekonomi maupun dari sejarawan sampai Seminar itu. Yang menarik dalam seminar itu ialah digunakannya banyak metode sejarah lisan oleh beberapa sejarawan muda yang menulis mengenai periode revolusi. Rupanya sejarah lisan semakin mendapat pengakuan sebagai kemungkinan baru, tidak saja bagi sejarawan muda yang mencoba menghindari pembacaan dokumen berbahasa Belanda, tetapi juga bagi mereka yang secara serius menerapkan metode itu. Sejarah lisan bahkan kadang-kadang menjadi satu-satunya jalan menuju penggalian sumber sejarah.

Hasil kerja Seminar 1984 itu menarik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk memprakarsai sebuah seminar lain, yang secara sadar ingin menggunakan sejarah untuk kepentingan pengambilan keputusan, sebuah seminar yang akan mempertemukan sejarawan dengan ilmuwan sosial lain untuk membicarakan soal relevansi sejarah dan pembangunan.¹³ Seminar itu direncanakan dalam beberapa tahapan, yang tahap awalnya sudah diselenggarakan akhir tahun 1984 itu juga, dan dihadiri oleh ahli filsafat, sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik.

Usaha untuk mencari relevansi dapat diartikan sebagai jalan supaya ilmu sejarah tidak menjadi anak tiri dalam negeri yang sedang membangun ini. Sejarah haruslah menjadi bagian dari pengetahuan kolektif yang menjelaskan kesinambungan dan perubahan di Indonesia untuk kepentingan pembangunan. Melalui studi tentang paralelisme sejarah dan sejarah komparatif, proses perubahan sosial di beberapa tempat di Indonesia dapat dijelaskan secara rinci, karena sejarah barangkali satu-satunya ilmu yang sangat memperhatikan

13 Lihat buku-laporan Seminar Persoalan-persoalan Masa Kini dalam Perspektif Sejarah (Jakarta: LIPI, 28-30 Maret 1985 dan 16-17 April 1986).

detil. Tujuan dari mencari relevansi itu di antaranya ialah supaya korban sosial dan manusia dapat dihindarkan dari laju pembangunan. Untuk keperluan itu juga, baru-baru ini, diselenggarakan sebuah seminar tentang desa dalam perspektif sejarah oleh Pusat Antar-Universitas Studi Sosial di Yogyakarta (Februari 1988), dalam skala yang lebih kecil.

Pekerjaan besar yang mutakhir dari sejarawan akademis ialah penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional Keempat di Yogyakarta 1985 yang ternyata mampu menyerap perhatian sejarawan dalam jumlah yang tidak kalah besarnya dari Seminar Sejarah Lokal Kedua. Seminar ini diorganisasikan berdasarkan pembagian periode, tetapi juga berdasarkan tema-tema.

Demikianlah, jika dihitung dari produktivitas, sejarawan akademis, melalui berbagai cara, yaitu penulisan skripsi, tesis, disertasi, seminar, musyawarah kerja, dan sebagainya, rasanya cukup besar. Patut kita sayangkan bahwa hasil-hasil yang cukup mengesankan itu masih tersimpan dalam lemari-lemari perpustakaan dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat pembaca yang lebih luas. Kita tak bisa membayangkan, bagaimana kalau semua pekerjaan itu dapat dipublikasikan keseluruhannya. Rupanya, sejarah masih terbatas untuk konsumsi sejarawan sendiri.

Dalam kesempatan ini kami ingin memuji pekerjaan dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah yang sudah berjalan agak lama, sudah banyak menghasilkan buku-buku sejarah yang layak baca. Sejak 1980 Direktorat itu sibuk dengan berbagai kegiatan, seperti penulisan biografi, penulisan sejarah perlawanan terhadap penjajah, penulisan sejarah-sejarah lokal, penulisan sejarah organisasi-organisasi massa, dan sebagainya. Sangat menarik ialah penulisan sejarah kota dan peta sejarah. Kebanyakan sejarawan akademis terlibat juga dalam kegiatan direktorat ini, tetapi tidak sedikit juga lembaga ini melibatkan ahli-ahli di bidang lain dan para pencinta sejarah sendiri.

Sebagai lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan skedul dan dana tahunan, sebenarnya tidak banyak yang dapat dikerjakan oleh direktorat itu dalam peningkatan kualitas penelitian. Namun, secara kuantitatif pekerjaan lembaga ini perlu dicatat. Sebelum melakukan penelitian biasanya partisipan-partisipan dari daerah-daerah akan diundang ke Jakarta untuk lokakarya tentang teori dan metodologi sesuai dengan topik yang akan ditulis. Kadang-kadang lokakarya semacam itu berhasil menyulap amatir menjadi profesional, tetapi tentu lebih banyak yang tidak. Dengan prosedur itu diharapkan bahwa partisipasi dari masyarakat terdidik akan lebih besar dalam penulisan sejarah daerah. Meskipun dalam kualitas, hasil dari pekerjaan direktorat itu perlu diperdebatkan, tetapi dari segi kuantitas sungguh mengagumkan. Banyak hasil kerja tentang sejarah sosial hanya bersifat deskripsi, bahkan kadang-kadang tidak berhasil mengungkapkan hal-hal baru. Namun, sebagai penyedia bahan bacaan tambahan bagi masyarakat dan guru sejarah, penerbitan-penerbitan lembaga itu besar jasanya.

Selain kendala dana dan waktu, sebagai proyek pemerintah selalu ada keterbatasan ideologis. Publikasi-publikasi lembaga itu tentu saja harus sesuai dengan ideologi negara sebagaimana diartikan secara resmi, sehingga tema-tema dan analisis akan lebih mementingkan makna konsensus dan nasionalisme daripada konflik dan realitas yang penuh dimensi. Namun, gambaran tentang keterbatasan semacam ini tidak boleh kita lebih-lebihkan, sebab masih banyak ruang bagi sejarawan yang sungguh-sungguh pintar untuk menerapkan analisis yang murni akademis. Tidak ada keharusan yang bertentangan antara ideologi negara dengan penulisan sejarah murni.

Dengan adanya proyek itu, dari tahun ke tahun, kualitas penelitian juga mengalami perbaikan, terutama berkat jasa para sejarawan akademis yang bersedia melibatkan diri dalam proyek itu. Seandainya dana pada Direktorat itu tidak berhenti tentulah lebih banyak lagi yang dapat dikerjakan, termasuk berbagai seminar sejarah yang selama ini selalu diselenggarakan. Direktorat itu dapat menjadi tempat untuk

berkomunikasi bagi sejarawan, selain memberikan pekerjaan bagi para lulusan jurusan sejarah yang semakin banyak.

Kami ingin menyebut pula kegiatan yang dikerjakan oleh Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata. Kantor sejarah militer itu didirikan di lingkungan ABRI pada tahun 1964.¹⁴ Sebagai bagian dari ABRI kantor itu mempunyai dasar ideologis yang jelas. Doktrin dari lembaga sejarah itu dirangkai dalam kata-kata yang indah, yaitu Catur Darma Ekakarma, atau “empat tugas satu tujuan”, sebuah doktrin yang menekankan kesatuan antara ABRI dan rakyat, kesatuan antara angkatan-angkatan di lingkungan ABRI, konsepsi tentang Dwifungsi ABRI, konsepsi tentang Sapta Marga, dan banyak lagi norma-norma formal yang lain.

Tradisi sejarah militer sebenarnya sudah diletakkan jauh sebelum adanya lembaga itu. Tokoh-tokoh militer yang penting seperti A.H. Nasution, T.B. Simatupang, dan Hasan Basry telah menulis pengalaman mereka sewaktu revolusi fisik dalam memoire mereka.¹⁵ Kantor yang semula bernama Lembaga Sejarah Hankam itu kemudian diperluas ke semua empat angkatan bersenjata, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Dari semua angkatan itu rupanya Angkatan Darat-lah yang sempat mengembangkan dirinya, sampai ke tingkat Kodam dan Korem. Publikasi dari sejarah militer meliputi peristiwa-peristiwa revolusi fisik dan dokumentasi operasi-operasi militer sesudahnya. Dalam setiap operasi militer, seperti misalnya ke Timor Timur, personil dari sejarah militer selalu diikutsertakan untuk merekam peristiwa.

Sekalipun sejarah militer dalam bentuknya yang sekarang sedikit saja memberi peluang untuk analisis ilmiah, selalu ada kemungkinan

14 Nugroho Notosusanto, *Sedjarah dan Hankam* (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Sedjarah Hankam, 1968).

15 A. H. Nasution, *Sedjarah Perdjjuangan Nasional Dibidang Bersendjata* (Djakarta: Mega Bookstore, 1966); Hasan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan* (1961); Tahi Bonar Simatupang, *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Pradjurit Selama Perang Kemerdekaan* (Djakarta: Pembangunan, 1960).

bagi sejarawan militer untuk memperbaiki kualitasnya. Sayang bahwa publikasi sejarah militer masih sedikit saja yang mempunyai selera tinggi dalam rekonstruksi peristiwa dengan mengangkat sejarah militer menjadi sejarah dalam arti sesungguhnya. Perlu dicatat di sini bahwa buku A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan*, patut dicatat sebagai penemuan penting dalam sejarah militer, baik dalam dokumentasi, perhatian pada rincian, dan peristiwa kemanusiaan,¹⁶ meskipun buku itu sendiri bukanlah penerbitan dari lembaga resmi. Seandainya sejarawan militer memakai saja kaidah-kaidah sejarah yang biasa — dan bukan sejarah militer dalam arti yang sempit — tentulah kita akan lebih beruntung. Partisipasi dalam seminar, konperensi, dan lokakarya bersama sejarawan non-militer kiranya kita anjurkan demi peningkatan karya sejarawan militer. Dengan kata lain, seandainya mereka keluar dari benteng, tentulah sejarah mereka dapat menjadi konsumsi bagi pembaca umum. Dan itu menguntungkan justru bagi tujuan sejarah militer sendiri.

Kami menduga bahwa kendala birokrasi sangatlah mempengaruhi hasil kerja sejarawan militer. Hirarki kedinasan terlalu ketat dalam sistem kerja mereka, sehingga karakteristik dan gaya pribadi sejarawan akan larut bersama aturan-aturan birokrasi itu. Dalam kedinasan, tidak selalu atasan yang berkuasa adalah mereka yang sungguh-sungguh mempunyai selera dan wawasan sejarah. Barangkali sistem kedinasan yang ganda, antara kedinasan sipil dan militer dalam kantor itu, mempengaruhi pekerjaan mereka. Kalau sistem birokrasi itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga penelitian yang biasa, sejarah militer akan menjadi tempat berkarya yang menarik dan penuh harapan. Bekerja dalam sebuah kantor yang impersonal semacam kantor sejarah militer memerlukan usaha psikologis yang luar biasa bagi lulusan sarjana sejarah untuk menyesuaikan diri. Usaha lembaga itu untuk mendapatkan penulis sejarah akademis ialah melalui wajib militer bagi lulusan sarjana, yang mewajibkan seorang lulusan untuk

16 A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan*.

“merasakan” kondisi kerja dalam beberapa waktu. Kiranya harus ada usaha yang sungguh-sungguh dari pihak ABRI untuk menarik sejarawan yang baik ke dalam dinas sejarah militer, agar supaya hasil lembaga itu dapat dibanggakan secara umum.

Di luar ketiga kategori yang sudah disebut — sejarah akademis, sejarah Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN), dan sejarah militer — masih perlu disebut sebuah kategori lagi, yaitu sejarah populer. Banyak penerbitan sekarang ini tertarik menerbitkan buku-buku sejarah, meskipun perhitungan untung-rugi usaha masih diragukan. Ada buku populer yang sungguh mengejutkan, seperti buku *Tuanku Rao* yang memperoleh sambutan hangat dari masyarakat karena isu-isunya yang menghebohkan. Selain itu, tulisan-tulisan Slamet Mulyono mengenai masa-masa Majapahit dan permulaan Islam juga banyak mendapatkan tanggapan. Akhir-akhir ini juga ada minat dari penerbit untuk menyebarluaskan disertasi-disertasi di universitas, jika diperkirakan akan banyak mendapat sambutan pemasaran, salah satunya — tentu saja — buku T. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, dan terjemahan buku Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani di Banten, 1888*. Tidak lagi perlu disebut banyaknya buku-buku terjemahan dari pengarang luar negeri, seperti Heather Sutherland, Peter Carey, Robert van Niel, dan sebagainya.

Buku sejarah yang patut dicatat sebagai karya yang memang khusus direncanakan untuk diterbitkan secara mandiri ialah biografi. Sekarang banyak sekali buku biografi yang beredar, hampir sebanyak tokoh-tokoh nasional kita. Bahkan dari seorang tokoh, masih banyak lagi diterbitkan “buku kenangan” 70 tahunan atau 80 tahunan. Buku jenis terakhir ini biasanya berisi riwayat singkat sang tokoh, dan selebihnya kesan-kesan dan kenangan dari orang-orang yang mengenal. Berbicara tentang pemasaran, rupanya biografi terjual dengan baik, sebab tentu setiap tokoh mempunyai “pasar”nya sendiri. Sebuah contoh dari biografi yang dengan cepat terjual habis ialah buku biografi Sultan Hamengkubuwana IX, *Tahta dan Rakyat*,

meskipun harganya cukup mahal.¹⁷ Banyak biografi — termasuk yang baru saja kami sebut — bukanlah buku sejarah yang baik. Banyak yang tidak memperhatikan sedikitpun aturan kerja yang benar, seperti data-data dokumentasi yang diperlukan. Seandainya penerbit berkeberatan dengan catatan-catatan kaki — karena terlalu banyak atau mengganggu pembacaan — dapat saja penulis membuat buku yang penuh dokumentasi selain yang diserahkan pada penerbit. Biografi sebenarnya merupakan kombinasi antara sejarah dan seni, artinya fakta-faktanya dijarah lewat prosedur ilmiah, sementara penyajiannya dikerjakan dengan prosedur kerja artistik. Contoh biografi yang penuh dokumentasi dan menarik untuk dibaca ialah tulisan Poeze tentang Tan Malaka.¹⁸

Tentu saja penulis biografi tidak bersalah. Kebanyakan mereka bukanlah sejarawan — sepanjang pengetahuan kami tidak seorang sejarawan pun pernah menulis biografi. Para jurnalis dan pengaranglah yang menulis biografi. Nama seperti Soebagjo I.N. adalah orang yang paling produktif dan berjasa dalam menyelamatkan riwayat hidup banyak tokoh nasional. Lebih dari sepuluh biografi telah ditulisnya dalam limabelas tahun terakhir, suatu kerja keras yang tak seorang sejarawan pun dapat menandinginya. Bukunya yang terakhir ialah tentang bapak jurnalisme Indonesia, Adinegoro. Ada lagi buku biografi yang ditulis oleh keluarga dekat tokoh politik dan militer yang sudah meninggal. Buku yang ada di pasaran misalnya ialah tulisan isteri dari almarhum Jenderal Ahmad Yani, Pahlawan Revolusi itu,¹⁹ dan buku yang ditulis oleh Rachmawati Soekarno Puteri yang melukiskan kehidupan Sukarno, sang ayah, dan ibundanya yang disingkirkan dari istana, Fatmawati.²⁰ Biasanya buku

17 Mohammad Roem et al. (eds). , *Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwana IX* (Jakarta: Penerbit P. T. Gramedia, 1982).

18 Harry A. Poeze, *Tan Malaka: Strijder voor Indonesie's Vrijheid, Levensloop van 1893 tot 1945* ('s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1976).

19 Ibu A. Yani, *Ahmad Yani: Sebuah Kenang-kenangan* (Jakarta: 1981).

20 Rachmawati Soekarno Puteri, *Bapakku Ibuku: Dua Manusia Yang Kucintai dan Kukagumi* (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1984).

kenangan semacam itu ditulis bersama seorang penulis tersamar dengan bantuan penuh dari keluarga mengenai riwayat, dan dokumen yang diperlukan. Sumbangan pengarang juga patut disebut. Ayip Rosyidi sudah menulis tentang Syafruddin Prawiranegara dan Ramadhan K.H. tentang Inggit Garnasih. Pada akhirnya, sekalipun ada kekurangan dalam beberapa hal, penulis-penulis biografi sungguh telah berbuat banyak dalam membantu pemahaman sejarah Indonesia. Dalam hal buku-buku otobiografi, sumbangan itu lebih banyak lagi, karena fakta-fakta baru yang diungkapkan. Buku terakhir ini, *Kuantar ke Gerbang* oleh Ramadhan menarik karena tidak mengklaim sebagai biografi sungguhan, tetapi lebih sebagai roman biografi.²¹ Dalam buku ini terselip imajinasi pengarang, sehingga buku itu enak dibaca seperti layaknya sebuah novel yang baik. Sayang, karena ditulis dari perspektif “seorang isteri” tidak banyak diungkapkan kehidupan politik Sukarno pada waktu awal karirnya. Barangkali bukan itu memang maksud pengarangnya.

Salah satu produksi buku yang luas pemasarannya rupanya ialah buku-buku tentang sejarah Islam. Nama-nama seperti Taufik Abdullah dan Deliar Noer patut disebut sebagai pengarang yang produktif. Kadang-kadang penerbitan buku sejarah diambil dari disertasi, seperti misalnya buku H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*.²² Buku itu diterbitkan tentu dengan harapan akan menarik minat pembaca, karena keingintahuan pembaca tentang paralelisme dalam sejarah. Selain buku tentang Islam, yang menarik juga ialah buku dengan latar belakang etnis. Sebuah buku tentang Sumatera Barat yang ditulis oleh Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang* dan *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, dengan cepat terjual karena pembaca terpelajar Sumatera Barat cukup banyak.²³ Sekalipun buku

21 Ramadhan K. H. , *Kuantar ke Gerbang: Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).

22 H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta, LP3ES, 1985).

23 Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981); *Sumatera Barat Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).

itu hanya deskriptif sifatnya, tetapi penulis telah berhasil mengumpulkan banyak keterangan dari sumber-sumber perpustakaan dan arsip. Buku lain yang perlu disebut ialah karangan W.B. Sidjabat, *Ahu Sisingamangaraja*.²⁴ Konon buku itu ditulis karena penulis merasa bahwa tempat bagi Sisingamangaraja XII dalam *Sejarah Nasional Indonesia* tidak mendapat alokasi yang cukup, sehingga pahlawan dari tanah Batak itu seolah tak ada pengakuan nasional. Buku itu juga mendapat sambutan yang baik di masyarakat, karena rangsangan etnis, atau karena dedikasi yang tulus kepada pahlawan tanah Batak itu.

Sekalipun para penulis buku untuk pasar banyak yang tak berasal dari sejarawan akademis, tidak ada alasan untuk tidak menjadi buku yang bermutu. Dalam banyak hal penerbit Indonesia beruntung menemukan orang-orang yang penuh dedikasi menulis tanpa mengharapkan subsidi, tetapi lebih sebagai pengabdian. Untuk buku-buku yang serius kebanyakan penerbit tidak akan bersedia menanggung resiko pemasaran yang kering, kecuali penerbit besar yang sudah mempunyai kalkulasi pasar yang cermat. Dalam hal ini disertasi dan terjemahan menempati porsi paling banyak, terutama buku-buku yang membicarakan isu-isu yang strategis. Seandainya jurusan-jurusan sejarah menerbitkan sendiri hasil-hasil skripsi yang layak, dengan biaya serendah-rendahnya, kiranya langkah ini akan merupakan terobosan bagi kemacetan sejarah akademis, yang seolah berdiri di luar masyarakat.

Sumbangan yang penting bagi sejarawan datang dari Arsip Nasional. Arsip Nasional yang mengerjakan kearsipan statis dan dinamis mempunyai cabang-cabangnya di tingkat lebih bawah, sekalipun sekarang masih dalam tingkat rintisan. Kegiatan Arsip Nasional tidak dapat dilupakan oleh sejarawan yang sedang

24 W. Bonar Sidjabat, *Ahu Si Singamangaraja: Arti Historis, Politis, Ekonomis dan Religius Si Singamangaraja XII* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982). Buku ini lebih berupa esai daripada biografi secara kronologis.

melakukan penelitian. Dari hari ke hari pekerjaan Arsip Nasional dan pelayanan semakin baik, sehingga memudahkan bagi sejarawan untuk melakukan pembongkaran kembali sejarah. Kantor-kantor arsip di Jakarta dan Bogor, belum terhitung arsip-arsip yang tersimpan di daerah-daerah, merupakan sumber kekayaan yang tak ada habisnya.

Proyek sejarah lisan yang dirintis oleh Arsip Nasional sejak tahun 1970 sekarang telah banyak menghasilkan. Wawancara dengan tokoh-tokoh nasional, maupun dengan rakyat kebanyakan, menjanjikan banyak kesempatan bagi penulisan sejarah sosial, politik, militer yang belum terjangkau sampai saat ini. Ada beberapa wawancara yang sudah diterbitkan, tetapi lebih banyak lagi yang masih tersimpan sebagai kaset. Publikasi Arsip Nasional, *Buletin Sejarah Lisan*, menyebarkan hasil-hasil pekerjaan lembaga itu, sekaligus meyakinkan publik mengenai pentingnya sejarah lisan. Pengalaman mereka yang lebih dua dasawarsa itu patut menjadi bahan kajian untuk merintis kegiatan yang sama bagi jurusan di daerah-daerah, terutama karena begitu banyak tokoh, peristiwa, yang akan lenyap dari memori saksi mata dalam waktu dekat ini. Sepatutnya jika melalui musyawarah kerja ini kita mencoba mengingatkan pentingnya “pusat” sejarah lisan untuk daerah-daerah. Untuk keperluan itu tentulah ada baiknya jika sejarah lisan menjadi bagian dari kurikulum jurusan sejarah. Yang masih terasa berat barangkali ialah “keabsahan” sumber lisan sebagai sumber sejarah. Akan tetapi, itu permasalahan metode sejarah yang dapat dipecahkan.

Kegiatan lain dari Arsip Nasional ialah penerbitan sumber sejarah. Banyak yang sudah diterbitkan, di antaranya ialah surat-surat perjanjian antara pemerintah kolonial dengan raja-raja lokal, memori serah jabatan, laporan pedesaan, laporan-laporan politik. Bagi sejarah penerbitan itu merupakan jalan pintas menuju arsip, dan bagi sejarawan muda yang tidak begitu menguasai Bahasa Belanda ada beberapa bagian yang sudah diterjemahkan sekaligus, atau diberi uraian mengenai isi singkat masing-masing sumber. Penerbitan *Memorie van Overgave*, misalnya, akan memberikan gambaran

mengenai keadaan suatu daerah pada periode kerja pejabat, yang meliputi masalah sosial, politik, ekonomi. Ada pejabat yang begitu cermat dalam laporan, dengan melampirkan laporan dari bawahan secara detil. Selain itu publikasi *Sarekat Islam Lokal* juga memberikan banyak informasi mengenai gerakan nasionalis itu sampai tingkat bawah. Jika pekerjaan-pekerjaan arsip itu kesemuanya masih dilanjutkan alangkah beruntungnya sejarawan di masa mendatang, sehingga mungkin orang tidak perlu lagi pergi ke Negeri Belanda untuk mencari kemudahan-kemudahan dalam penelitian arsip.

Dalam kesempatan ini perlu juga dikemukakan jasa dari Perpustakaan Nasional yang menyimpan banyak buku-buku lama. Akan tetapi, jasa yang paling besar ialah tersimpannya majalah dan surat-surat kabar dari seluruh Indonesia. Koleksi mereka semakin menjadi penting, dan akhir-akhir ini sudah banyak koleksi surat kabar yang dibuat mikro film, sehingga kemungkinan untuk mengalami kerusakan menjadi kecil. Mikro film itu disimpan dalam kamar dijaga dengan penyejuk dan penjaga kelembaban udaranya. Akses terhadap khasanah lembaga ini juga semakin mudah, karena mereka sudah melayani reproduksi mikrofilm-mikrofilm, sekalipun harganya masih cukup mahal.

Mengenai perpustakaan, perlu disebut pula adanya pembukaan untuk umum, kekayaan yang ada pada perpustakaan di kerajaan-kerajaan Vorstenlanden di masa lalu. Perpustakaan Kraton Yogyakarta, Pakualam, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran juga sudah terbuka untuk umum. Selain itu banyak lembaga-lembaga di daerah mendirikan museum yang mengurus pelestarian sumber-sumber sejarah, seperti di Bali, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Kita menjadi optimis bahwa pekerjaan sejarawan di masa yang akan datang akan dipermudah dengan bantuan banyak pihak.

Sejarawan sungguh berbahagia dengan semua perkembangan itu. Bahkan pemerintah-pemerintah daerah sekarang ini banyak memerlukan bantuan sejarawan untuk menulis sejarah lokal.

Pemerintah daerah di Bali, misalnya, juga banyak menulis sejarah daerah dengan bantuan para sejarawan. Di samping sejarah daerah, setidaknya pemerintah-pemerintah daerah sekarang banyak meminta bantuan sejarawan untuk mencari hari lahir dari pemerintah daerah. Semua kegiatan ini menunjukkan bahwa sejarah semakin dihormati sebagai disiplin ilmu. Banyak sejarawan juga mengambil bagian dalam berbagai kepanitiaan, terutama untuk penulisan buku-buku sejarah. Sayang bahwa tidak semua panitia *ad hoc* yang dibentuk oleh badan-badan pemerintah maupun semi-pemerintah mempunyai selera yang cukup tinggi dalam memilih sejarawan akademis.

Yang kami maksud dengan panitia-panitia itu ialah penelitian yang dilakukan oleh departemen-departemen. Baru-baru ini kita mendengar Kantor MENPORA mengusahakan penulisan sejarah perjuangan pemuda. Kantor ini rupanya lupa untuk mengikutsertakan sejarawan akademis dalam urusan ini, dan hanya menggantungkan diri pada para pelaku dan sedikit penulis. Kegiatan-kegiatan yang sama juga dikerjakan oleh Departemen Penerangan, Departemen Kehutanan, dan bahkan PERTAMINA. Sekalipun keterlibatan sejarawan akademis minimal dalam usaha-usaha itu, kita ikut bergembira bahwa sejarah mendapat tempat dalam masyarakat. Dari semua itu yang paling menonjol tentulah usaha-usaha dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola pendidikan sejarah. Kami tidak ingin mengulang kembali soal PSPB, tetapi sekadar menunjukkan betapa perhatian orang kepada sejarah.

Sebagai kesimpulan, kita mencatat bahwa selama ini kegiatan sejarah masih terlalu banyak bergantung pada dukungan dari pemerintah. Bagian dari “usaha swasta” dalam penulisan sejarah sudah cukup banyak, tetapi masih belum mampu untuk menarik perhatian sejarawan melepaskan diri dari ketergantungan pada uluran tangan pemerintah. Barangkali hal ini disebabkan oleh masih langkanya publik pembaca sejarah, karena tingkat baca secara nasional masih rendah. Dalam hal ini sejarawan rupanya lebih dibatasi

oleh kelangkaan dana yang mandiri, lebih daripada keterbatasan ideologis. Pertumbuhan pasar untuk tulisan sejarah masih terbatas. Pembaca belum bersedia mendukung pertumbuhan historiografi Indonesia. Tidak ada jurnal sejarah yang terbit secara teratur, baik yang akademis maupun yang populer. Sejarah masih merupakan barang mewah yang sedikit peminatnya.

Dalam segala keterbatasannya, sejarawan sebenarnya mempunyai tanggung jawab sosial yang besar. Para ahli sosiologi, ekonomi, dan pembangunan banyak dipekerjakan di BAPPENAS, sedangkan sejarawan tidak. Kenyataan ini tentu tidak berarti bahwa sejarawan tidak dapat berbicara mengenai isu-isu nasional, bahkan sejarawanlah sebenarnya yang harus mempunyai wawasan ke depan yang jauh. Bagi sejarawan, kita ingat kata-kata G.J. Resink, bahwa yang diperlukan bukanlah ilmuwan *pamong* yang hanya dapat melaksanakan perintah-perintah dari pemerintah, tetapi sejarawan yang mempunyai kebijaksanaan, keberanian, dan sikap kritis.²⁵ Datang atau tidak datang undangan untuk berperan, sejarawan haruslah dapat memainkan peranan itu.

Akhirnya, kami ingin menyarankan tiga hal. Pertama, marilah kita jadikan pertemuan ini sebagai sebuah jaringan kerja, yang secara teratur menjadi wadah saling menukar informasi kesejarahan. Dengan saling menginformasikan hasil-hasil penelitian skripsi mahasiswa, misalnya, kita dapat mengetahui apa yang sedang dikerjakan orang di tempat lain, selain kita juga dapat menghindari duplikasi atau — maaf — kemungkinan penjiplakan skripsi. Duplikasi sebenarnya dalam sejarah bukan hal yang buruk, tetapi rasanya saat ini masih suatu kemewahan bagi tingkat perkembangan kita. Kedua, dalam kapasitas kita masing-masing, marilah kita menyumbangkan usaha-usaha kesejarahan untuk mengungkapkan sebanyak mungkin sejarah lokal di tempat kita masing-masing bekerja, sehingga “sejarah dari

25 G. J. Resink, “Eoropocentric, Regiocentric, and Indocentric Historiography”, *Indonesian History Between the Myth* (The Hague: W. van Hoeve Publishers, Ltd. , 1968), hlm. 9.

bawah” ini akan menumpuk menjadi sejarah nasional yang lengkap. Banyak tokoh, kejadian, dan keunikan daerah belum terungkap dalam sejarah nasional kita. Ketiga, sebagai bagian dari kebijaksanaan kolektif, sejarawan hendaknya berusaha untuk melibatkan diri dalam pergulatan intelektual untuk menyumbangkan gagasan-gagasan bagi kepentingan nasional kita.

SEJARAH LISAN

I

Penulisan sejarah nasional Indonesia telah menempuh berbagai jalan. *Pertama*, adanya keinginan untuk menuliskan sejarah Indonesia yang nasionalistik sebagaimana dicanangkan dalam Seminar Sejarah Nasional I di Yogyakarta pada tahun 1957. Keinginan itu telah banyak melahirkan, terutama buku-buku pelajaran sejarah Indonesia yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan nasionalisme. Bersamaan dengan kecenderungan ke arah dekolonisasi dalam penulisan sejarah Indonesia itu, di kalangan penulis-penulis sejarah tentang Indonesia timbul gagasan untuk berpindah dari penulisan sejarah yang "*Europe-centric*" ke sejarah yang "*Asia-centric*".¹ *Kedua*, keinginan untuk adanya suatu sejarah Indonesia yang ilmiah seperti dinyatakan dalam Seminar Nasional II di Yogyakarta pada tahun 1970. Keinginan itu telah memperluas ruang lingkup penulisan sejarah dengan masuknya pendekatan-pendekatan baru. Sekalipun gema dari seruan sejarah ilmiah itu kebanyakan masih terbatas pada penulisan-penulisan skripsi dan tesis di perguruan-perguruan tinggi, kiranya kesadaran baru

¹ Untuk perkembangan masalah "*Europe-centric*" dan "*Asia-centric*" dalam penulisan sejarah Indonesia, serta usul ke arah pandangan sejarah yang otonom, lihat John R. W. Smail, "On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia", *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 2, No. 2 (July 1961), hlm. 72-102.

tentang penulisan sejarah sudah mendapatkan momentumnya. *Ketiga*, masih dalam dekade 1970-an, ada usaha untuk menyelenggarakan suatu program sejarah lisan yang dikelola oleh Arsip Nasional bekerja sama dengan para sejarawan dan perguruan tinggi. Hasil dari usaha terakhir ini sudah tampak sekalipun belum banyak benar.²

Kalau jalan pertama yaitu permintaan untuk adanya suatu sejarah nasionalistik merupakan pembaharuan dalam tingkat teori sejarah, dan jalan kedua yaitu sejarah yang ilmiah merupakan pembaharuan dalam pendekatan metodologi maka jalan ketiga yaitu sejarah lisan ialah pembaharuan dalam metode. Jalan pertama yang menanyakan makna dan tujuan dari penulisan sejarah ternyata telah dijawab oleh tulisan sejarah yang melihat sejarah Indonesia dari dalam.³ Jalan kedua telah menawarkan perluasan penulisan sejarah secara substantif, sebab dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, ruang lingkup sejarah Indonesia tidak lagi dibatasi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang proses, tetapi juga mulai memikirkan mengenai struktur. Sejarah yang semula bersifat cerita yang semata-mata deskriptif dan diakronik mulai menuju ke arah tulisan yang analitis dan sinkronis.

Dengan demikian penulisan sejarah mencoba memperluas dimensi-dimensi yang disoroti, sehingga istilah sejarah multi-dimensional hampir-hampir tercatat dalam setiap tesis mahasiswa sejarah.⁴

2 Proyek Sejarah Lisan Arsip Nasional Republik Indonesia melaporkan usaha-usahanya melalui *Lembaran Berita Sejarah Lisan* yang dapat diperoleh pada alamat Arsip Nasional RI, jalan Ampera Raya, Cilandak III, Jakarta-Selatan, Telepon 781851.

3 Sebagai contoh dapat disebut tulisan M. C. Ricklefs, *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java* (London, 1974). Dalam buku ini proses sejarah, termasuk campur tangan Belanda di Kejawen, dipandang dan dicakup dalam alam pikiran Jawa tentang sejarah.

4 Lihat Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequences* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966), terutama hlm. 11-14; dari pengarang yang sama, "Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah Indonesia", *Lembaran Sejarah*, No. 4 (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, 1969).

Jalan ketiga yang berupa pembaharuan dalam metode sebenarnya masih membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Sejarah kuantitatif sama sekali belum mendapat perhatian dari penulis-penulis sejarah. Barangkali keterbatasan kebanyakan penulis sejarah dalam pengetahuan statistik masih melangkakan kemajuan di bidang ini. Dibandingkan dengan sejarah kuantitatif, sejarah lisan dapat dipastikan akan mendapat pasaran yang lebih luas. Wawancara sebagai sebuah kecakapan tampaknya tidak banyak memerlukan kenjlimetan berpikir. Teknik ini dipakai hampir-hampir oleh semua cabang ilmu sosial, termasuk jurnalistik.

Kiranya perlu dipaparkan terlebih dahulu tentang perbedaan sejarah lisan dari tradisi lisan. Jan Vansina memberi batasan tradisi lisan (*oral tradition*) sebagai *oral testimony transmitted verbally, from one generation to the next one or more*.⁵ Dalam tradisi lisan tidak termasuk kesaksian mata yang merupakan data lisan. Juga di sini tidak termasuk *rerasan* masyarakat yang meskipun lisan tetapi tidak ditularkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tradisi lisan dengan demikian terbatas di dalam kebudayaan lisan dari masyarakat yang belum mengenal tulisan. Sama seperti dokumen dalam masyarakat yang sudah mengenal tulisan, tradisi lisan merupakan sumber sejarah yang merekam masa lampau. Namun kesejarahan tradisi lisan barulah sebagian dari isi tradisi lisan itu. Selain itu mengandung kejadian nilai-nilai moral, keagamaan, adat-istiadat, cerita-cerita khayali, peribahasa, nyanyian, mantra.

Tradisi lisan, dengan demikian, menjadi sumber penulisan bagi antropolog dan sejarawan. Dalam ilmu antropologi tradisi lisan sebagai sumber data bagi penelitian sudah dipergunakan sejak awal timbulnya ilmu itu, tetapi dalam ilmu sejarah penggunaan tradisi lisan masih merupakan hal yang baru. Usaha untuk menarik minat kepada

5 Jan Vansina, "Once Upon a Time: Oral Traditions as History in Africa", dalam Felix Gilbert and Stephen R. Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W. W. Norton & Company, 1972), hlm. 413-439, terutama hlm. 415. Untuk pembahasan lebih luas mengenai *oral tradition* baca buku dari pengarang yang sama, *Oral Tradition: A Study in Historical Methodology* (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1965).

penulisan sejarah dengan memakai sumber tradisi lisan dalam Seminar Sejarah Nasional III digarap secara khusus dalam Panel Etno-histori, sehingga dalam tulisan ini tidak akan dibahas lagi.

Berbeda dengan tradisi lisan, sejarah lisan tidak didapatkan tetapi dicari dengan kesengajaan. Penggalan sumber sejarah melalui teknik wawancara sudah lama dikenal, bahkan Herodotus pada abad ke-5 SM telah menggunakan saksi-saksi mata dengan menanya silang mereka. Sejarah lisan sebagai teknik dan metode kemudian juga digunakan oleh penulis-penulis sejarah dari zaman Romawi, zaman Pertengahan, dan zaman Modern.

Pada pertengahan pertama abad ke-19 sejarah lisan mendapat kritikan tajam dari Leopold von Ranke yang mementingkan kesaksian-kesaksian dokumenter.⁶ Meskipun demikian penggunaan sejarah lisan masih terus berjalan. Dalam abad ke-20 ini sejarah lisan memperoleh kembali kekuatannya setelah adanya teknologi baru dalam perekaman suara dengan munculnya pita *tape*. Dengan teknologi baru ini menjadi mudahlah pencatatan wawancara. Kesulitan teknik dalam merekam dan menyimpan sumber lisan sudah teratasi.

Tulisan ini akan mencoba untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang diperoleh lewat sejarah lisan, bagaimana sejarah lisan memperkaya metode penelitian, menambah pengadaan sumber sejarah, dan terutama bagaimana memperkaya penulisan sejarah secara substantif. Selanjutnya akan dicoba pula memberi gambaran tentang usaha-usaha untuk mengembangkan sejarah lisan dalam rangka penulisan sejarah nasional.

II

Sejarah lisan mempunyai banyak kegunaan. Sejarah lisan sebagai metode dapat dipergunakan secara tunggal dan dapat pula sebagai bahan dokumenter.

6 Untuk penggunaan sejarah lisan di Eropa, lihat Paul Thompson, *The Voice of the Past: Oral History* (Oxford: Oxford University Press, 1978), hlm. 19-90.

Sebagai metode tunggal, sejarah lisan tidak kurang pentingnya jika dilakukan dengan cermat. Banyak sekali permasalahan sejarah, bahkan dalam zaman modern ini yang tidak tertangkap dalam dokumen-dokumen. Dokumen hanya menjadi saksi dari kejadian-kejadian penting menurut kepentingan pembuat dokumen dan zamannya, tetapi tidak melestarikan kejadian-kejadian individual dan yang unik yang dialami oleh seseorang atau segolongan. Apalagi minat dan perhatian sejarawan akan berbeda dengan minat dan perhatian pembuat dokumen sehingga sejarawan masih harus mencari sendiri cara untuk mendapatkan keterangan, dengan teknik wawancara yang benar keabsahan keterangan-keterangan lisan pun dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai gambaran, banyak sekali ditemukan jenis pekerjaan yang di masa yang lampau merupakan pekerjaan penting tetapi sekarang sudah punah. *Abdi-abdi dalem* kerajaan kejawen misalnya, masing-masing masih mempunyai kenangan tentang masa lampau pekerjaannya, keahliannya, hubungan sosialnya, kehidupan ekonominya. Untuk menulis sebuah sejarah mengenai budaya istana dan sejarah sosial pada umumnya, sejarah lisan dari lingkungan terdekat akan sangat bermanfaat. Selain ketepatan dan kejelasan keterangan, sejarah lisan juga dapat dengan cermat melukiskan kandungan emosional dari penutur sejarah. Bagaimana seorang *kemit* di istana masa yang lalu merasakan hidupnya, pekerjaannya, dan pengabdianya kepada istana tentulah tak dapat dilukiskan dengan dokumen.

Dalam hubungan ini *life-history* dalam ilmu antropologi telah menyaingi kegiatan dari sejarawan.⁷ Di Amerika Serikat sebuah proyek untuk menuliskan pengalaman dari para budak telah dilancarkan pada zaman New Deal pada tahun 1930-an.⁸ Orang-orang semacam para bekas-budak dan *abdi dalem* itu tentulah tidak akan

7 Contoh yang paling sering disebut dari *life-history* ialah Oscar Lewis, *The Children of Sanchez: Autobiography of a Mexican Family* (New York: Vintage Book, 1961).

8 Louis M. Starr, "Oral History", *Encyclopedia of Library and Information Science*, Vol. 20, hlm. 440-463.

menyimpan dokumen mengenai dirinya atau sanggup membuat catatan-catatan.

Sebagai metode pelengkap terhadap bahan dokumenter, sejarah lisan sudah lama dipergunakan, juga di Indonesia. Hampir semua penulis sejarah mempergunakannya dengan kadar yang berbeda. Dalam penulisan biografi metode ini sudah sangat banyak dipakai. Sayang bahwa kalangan sejarawan sendiri belum melahirkan penulis biografi atau otobiografi “sebagai diceritakan-kepada”. Para jurnalistah, seperti Soebagjo IN, yang sempat menulis banyak buku dengan menggunakan bahan-bahan dokumenter dan lisan. Sejarawan akademis yang mempunyai kesempatan terhadap bahan-bahan dokumenter dan sumber lisan dapat diharapkan akan menulis biografi dengan corak lain karena perspektif kesejarahannya akan sanggup menampilkan pelaku-pelaku sejarah di tengah-tengah masyarakat dan zamannya. Dalam hal ini, yaitu dalam penulisan sejarah kontemporer terutama sejak 1945, penulis-penulis sejarah, baik sejarah militer, sejarah dinas, sejarah perang, dan sejarah yang ditulis untuk skripsi, semuanya telah menggunakan sejarah lisan sebagai pelengkap dari bahan dokumenter. Untuk menyusun daftar kegiatan ini saja tentulah memerlukan waktu.

Selain sebagai metode, sejarah lisan dapat dipergunakan sebagai sumber sejarah. Kegiatan sejarah lisan sebagai usaha untuk menyediakan sumber bagi peneliti sejarah sudah mendapatkan tempat di Amerika sejak 1948 ketika Allan Nevins mendirikan “The Oral History Project” di Columbia University, New York. Hasil wawancara lembaga ini disediakan dalam bentuk tape atau transkrip. Juga publikasi-publikasi sumber telah menarik sejarawan untuk menggunakan sumber sejarah lisan tersebut. Koleksi Sejarah Lisan Columbia merupakan pusat penelitian penting bagi penerbitan di berbagai bidang, seperti sastra, seni, usaha, sejarah, hubungan internasional, jurnalistik, ilmu politik, ilmu pengetahuan, dan penelitian kota.⁹

9 Khazanah program ini dimuat dalam Elizabeth B. Mason dan Louis M. Starr (eds.) *The Oral History Collection of Columbia University*, Edisi 1979.

Kegiatan penyediaan sumber berbeda dengan sejarah lisan sebagai metode dalam hal bahwa yang pertama kegiatan dilakukan secara terpisah dari penulisan, sedangkan dalam hal yang kedua pemakai sejarah lisan ialah pewawancara sendiri. Untuk membantu pengadaan tenaga pewawancara di Universitas Columbia tersebut, sebuah mata kuliah sejarah lisan diberikan di lingkungan ilmu perpustakaan. Rupa-rupanya sekalipun cita-cita mendirikan pusat sejarah lisan ini datang dari seorang sejarawan, jangkauannya tertuju ke bidang yang sangat luas.

Di Indonesia kegiatan sejarah lisan sebagai penyediaan sumber dimulai oleh Arsip Nasional RI sejak 1973. Penataran-penataran untuk melatih pewawancara sudah sering diadakan. Pengumpulan sumber sejarah lisan mempunyai teknik-teknik dan prasarana tersendiri. Pekerjaan yang terpenting, yang langsung mengenai pengumpulan sejarah lisan ialah wawancara, menyalin, dan menyunting. Selanjutnya sebagai sumber, sama halnya dengan bahan arsip atau perpustakaan ialah sebagaimana dapat memberikan pelayanan kepada peminat dan publik.¹⁰ Tidak diragukan lagi sejarawanlah yang paling beruntung dengan tersedianya bahan-bahan itu.

III

Selain sebagai metode dan sebagai penyediaan sumber, sejarah lisan mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan substansi penulisan sejarah. *Pertama*, dengan sifatnya yang kontemporer sejarah lisan memberikan kemungkinan yang hampir-hampir tak terbatas untuk menggali sejarah dari pelaku-pelakunya.

10 Untuk langkah-langkah dan teknik sejarah lisan, Willa K. Baum, *Oral History for the Local Historical Study* (Nashville, Tennessee: American Association for State and Local History, 1971); Cullom Davis, Kathryn Back, dan Maclean, *Oral History: From Tape to Type* (Chicago: American Library Association, 1977).

Kedua, sejarah lisan dapat mencapai pelaku-pelaku sejarah yang tidak disebutkan dalam dokumen. Dengan kata lain, dapat mengubah citra sejarah yang elitis kepada citra sejarah yang egalitarian. *Ketiga*, sejarah lisan memungkinkan perluasan permasalahan sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis.

Sejarah Indonesia kontemporer, terutama di masa revolusi 1945-1950, banyak yang masih tersimpan dalam ingatan para pelakunya. Dokumen-dokumen sejarah hanya meliputi bagian kecil dari sejarah perjuangan kemerdekaan yaitu mengenai diplomasi, kepartaian, perubahan kabinet, kemiliteran. Di balik itu seolah-olah segalanya masih gelap, padahal masih begitu banyak yang belum dituliskan. Badan-badan perjuangan, perebutan kekuasaan dari Jepang, pertempuran-pertempuran di daerah-daerah belum diungkapkan. Dalam hal ini tampaknya ada usaha keras dari para pelaku sendiri untuk menuliskan kenang-kenangan di masa perjuangan, namun buku-buku sejenis *Laporan dari Banaran* oleh T.B. Simatupang belum lagi menampilkan peristiwa-peristiwa di luar jangkauan penulis. Dokumen perang revolusi dari pihak Belanda sudah sebagian diterbitkan sebagai *Officiële Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*,¹¹ tetapi masih lebih banyak lagi dokumen yang tertimbun di arsip di Den Haag. Dengan sejarah lisan akan banyak sekali keterangan-keterangan baru diungkapkan sekitar para pelaku, peristiwa, kegiatan, badan-badan perjuangan. Salah satu contoh mutakhir, bagaimana sejarah lisan membantu sekali untuk mengungkapkan sejarah revolusi tentang peristiwa Tiga Daerah, suatu revolusi sosial di zaman awal kemerdekaan.¹² Kejadian-kejadian dalam peristiwa itu tidak terungkap dalam dokumen-dokumen resmi, tetapi masih tersimpan dalam ingatan para pelakunya.

11 S. L. van der Wal, *Officiële Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950* (s-Gravenhage, 1971), Vol. I-VII.

12 Lihat ringkasan disertasi Anton E. Lucas dan Abdurrahman Surjomihardjo, "Peristiwa Tiga Daerah: Sebuah Interpretasi Sejarah. Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan". *Prisma*, No. 8 (Agustus 1981), hlm. 52-61.

Bagaimana bergairahnya para partisipan di zaman revolusi untuk mengutarakan pengalaman-pengalamannya dapat dirasakan dalam setiap pertemuan yang berupa ceramah, undangan khusus, pertemuan veteran, dan pertemuan “kangen-kangenan” di antara para pelaku. Di Yogyakarta, misalnya, pernah sebuah panitia mengadakan undangan khusus bagi para pelaku penyerbuan Kotabaru pada akhir pemerintahan Jepang awal kemerdekaan yang dihadiri oleh begitu banyak pelaku yang berminat untuk mengutarakan pengalamannya. Demikian pula acara ceramah mengenai badan-badan perjuangan di kota yang diselenggarakan baru-baru ini di Museum Sana Budaya di Yogyakarta mendapat kunjungan dari para pelaku. Dalam pertemuan semacam itu juga terungkap hal-hal lain di luar peristiwa manusiawi dan non-manusiawi selama masa-masa perjuangan itu. Sejarah yang lebih humanistik, artinya yang lebih dekat ke pengalaman sehari-hari para pelakunya, dapat terungkap lewat sejarah lisan. Rupanya tidak satu sejarah pun pernah mengungkapkan peristiwa LASWI yang mendapat “kecelakaan”. Hal-hal semacam ini pastilah menambah kekayaan revolusi sebagai peristiwa manusia biasa, di samping peristiwa yang serba besar. Biasanya sejarah akan menjadikan manusia lebih bijaksana andaikata sejarah menjadi manusiawi, termasuk tragedi, ironi, dan humornya. Dengan demikian sejarah bukan saja akan benar secara faktual, tetapi juga benar secara filsafati.

Sumbangan sejarah lisan dalam penulisan sejarah yang lebih *egalitarian* tampak dalam kemampuannya untuk menjangkau pelaku-pelaku dengan peranan kecil. Sampai sekarang sejarah yang kita kenal hanyalah sejarah dari tokoh-tokoh dan kelompok yang karena posisinya dapat terjangkau oleh dokumen resmi. Dengan hanya menyuguhkan sejarah tingkat atas tidak akan terjelaskan bagaimana rakyat bergerak di zaman revolusi membantu penyediaan *nuk* atau makanan untuk makan para pejuang. Tugas-tugas palang merah, dapur umum, mata-mata, cegatan, dan puluhan lainnya yang dapat dibayangkan tidak dapat tertangkap oleh dokumen. Untuk memberikan perlakuan yang sewajarnya kepada para pejuang itu,

sejarah lisan dapat berbuat banyak. Sejarah “dari bawah ke atas” ini berlaku pula untuk tokoh-tokoh kecil. Tokoh *jago* ternyata mempunyai andil dalam sejarah revolusi — apa pun juga peranan yang dimainkannya.¹³ Kita tak pernah tahu bagaimana sebuah desa mengalami revolusi, perubahan-perubahan apa yang terjadi. Sejarah sampai sekarang hanya bergerak di tingkat nasional atau semujur-mujurnya di tingkat daerah propinsi. Desa yang sering disebut sebagai basis gerilya, petani yang selalu disebut sebagai kawan seperjuangan gerilyawan, ibu-ibu yang mengirimkan anaknya ke medan perang perlu mendapat perhatian. Sejarah hanya akan berbuat adil jika mampu mengungkapkan gambaran total tentang masa lampau — termasuk sejarah revolusi. Sejarah, seperti sastra, mampu menciptakan sebuah epos revolusi — tidak melalui imajinasi, tetapi melalui fakta.

Dalam memperluas ruang lingkup telaah sejarah, sejarah lisan tidak berdiri sendiri. Pendekatan-pendekatan baru dalam sejarah seperti sejarah kejiwaan (*psychohistory*), biografi kolektif (*prosopography*), sejarah keluarga, sejarah desa, sejarah kota — untuk menyebut beberapa saja — tentulah memerlukan sejarah lisan pada waktunya. Dengan bekal kerangka teoretis, sejarawan dapat menggunakan wawancara secara lebih sempurna. Daftar pertanyaan yang menjadi pegangan sejarawan pewawancara dipersiapkan sesuai dengan kerangka. Tentu saja harus diingat ketentuan-ketentuan tentang yang benar. Di sini wawancara dapat sebagai metode tunggal, dapat pula sebagai metode tambahan.

Salah satu dari sejumlah pendekatan sejarah yang memerlukan wawancara ialah sejarah kejiwaan.¹⁴ Sampai sekarang sudah banyak biografi ditulis, tetapi kebanyakan merupakan biografi politik. Dalam sejarah kejiwaan pengamatan terhadap seorang tokoh dititikberatkan

13 Lihat penggunaan wawancara pada Riyadi Gunawan, “Jagoan dalam Revolusi Kita”, *Prisma*, No. 8 (Agustus 1981), hlm. 41-50.

14 Tentang pendekatan *psychohistory* secara singkat lihat Frank E. Manuel, “The Use and Abuse of Psychology in History”, Gilbert and Graubard, *Historical Studies Today*, hlm. 211-239.

pada masalah kejiwaannya. Wawancara langsung dengan pelaku atau dengan orang-orang yang mengenalinya dimaksudkan untuk melihat bawah-sadar pelaku sejarah. Tingkah laku pelaku sejarah dapat dianggap sebagai gejala dari bawah-sadar yang oleh sejarawan kejiwaan harus dicari. Motivasi dan konflik-konflik kejiwaan seorang pelaku sejarah akan tampak di permukaan dalam keputusan-keputusan politik, tingkah laku sosial, dan pandangan-pandangan hidupnya. Seorang sejarawan dapat menarik pelaku untuk menceritakan masa kecilnya ketika proses pembentukan kepribadiannya dimulai. Kalau Freud mewawancarai pasien di kamar kerjanya yang tenang sambil pasien berbaring santai di atas *couch*, barangkali seorang sejarawan pun harus membuat suasana serupa. Menyoroti seorang pelaku sejarah dari bawah sadarnya tentu saja bukan satu-satunya jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sejarah. Dengan menyadari sepenuhnya kesepihakan ini, seorang sejarawan kejiwaan dalam usahanya untuk menerangkan gejala sejarah melalui kejiwaan pelakunya harus sanggup bukan saja menerapkan psikoanalisis terhadap pelaku sejarah, tetapi memadukan psikoanalisis dan sejarah ke dalam wawasan baru.¹⁵

Demikianlah misalnya, dengan seperangkat teori dan konsep psikoanalisis Freud, Jung, atau Neo-Freudian, sejarawan mulai mengumpulkan keterangan. Memoire merupakan sumber yang penting, namun dalam hal kelangkaan memoire, wawancara menjadi sarana yang penting dalam mengisi kesenjangan antara teori dan data sejarah. Menghubungkan kepribadian seseorang dengan lingkungan sosialnya, keputusan-keputusan politik dengan kepribadiannya merupakan tugas sejarawan kejiwaan. Tujuan terakhir dari psikohistori seperti juga ilmu sejarah lisan, mengambil bagian yang penting dalam pengadaan sumber.

15 Bruce Mazlish, *In Search of Nixon: A Psychohistorical Inquiry* (New York: Basic Books, Inc. Publishers, 1972).

Berbeda dengan psikohistori, prosopografi atau biografi kolektif merupakan usaha untuk “menyelidiki ciri-ciri latar belakang yang umum dari sebuah kelompok pelaku sejarah dengan cara meneliti bersama-sama riwayat hidup mereka.”¹⁶

Dalam prosopografi terdapat dua kecenderungan yaitu yang mementingkan pelaku-pelaku sejarah elite dan yang mementingkan pelaku-pelaku massa. Jelas bahwa kedua-duanya memerlukan sejumlah riwayat hidup untuk ditelaah. Juga karena kelangkaan dokumen dan memoir tertulis sejarah lisan diperlukan dalam penelitian. Tidak seperti psikohistori, prosopografi mempunyai jangkauan yang lebih kompleks sifatnya, karena latar belakang umum yang dimaksudkan bukan saja yang bersifat psikologis, tetapi juga politik, sosial, ekonomi, dan budaya para pelaku. Usaha seperti yang dikerjakan oleh James L. Peacock mengenai “psikologi pembaharu” pada K.H.A. Dahlan dan Haji Rasul dalam antropologi dapat dipakai sebagai contoh ke arah prosopografi.¹⁷ Biografi kolektif para kyai dapat ditelaah untuk melihat nilai-nilai yang mereka miliki bersama sehingga mereka menjadi pendukung gerakan Nahdlatul Ulama (NU), akan memberikan penerangan tentang masalah keagamaan dan politik di Indonesia. Dalam sejarah ekonomi kita dapat melihat perkembangan kewiraswastaan di Indonesia melalui biografi kolektif para pengusaha: siapakah pengusaha Indonesia, bagaimana mereka mendapatkan kekuatan ekonominya, kemudahan dan kesukaran apa yang mereka alami. Juga riwayat bersama para pemuda pemberang dapat menjadi bahan yang baik untuk memahami perkembangan politik mutakhir. Sejarah lisan mempunyai kemungkinan untuk menjangkau sumber-sumbernya, tanpa menunggu lengkapnya dokumentasi.

16 Baca Lawrence Stone, “Prosopography”, Gilbert and Graubard, *Historical Studies Today*, hlm. 107-139.

17 James L. Peacock, “Dahlan and Rasul: Indonesian Muslim Reformers”, dalam A. L. Becker dan Aram A. Yengoyan (eds.), *The Imagination of Reality: Essays in Southeast Asian Coherence System* (Norwood, N. J. : Ablex Publishing Corporation), hlm. 245-268. Peacock menganalisis psikologi pembaharu pada kedua tokoh itu melalui telaah Erikson tentang Luther.

Sejarah lisan juga mempunyai sumbangan dalam penulisan sejarah keluarga. Sejarah keluarga mempunyai dua arti. Pertama, sebagai sejarah kelembagaan, sejarah keluarga meneliti kelembagaan keluarga sebagai unit sosial ekonomi dan perubahannya dari waktu ke waktu. Kedua, sehubungan dengan perkembangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, sejarah keluarga dapat berarti sejarah *trah*.¹⁸ Dalam kedua-duanya sejarah lisan amat penting. Di sini dibicarakan sejarah keluarga dalam arti yang kedua — sambil mengenalkan kemungkinan baru dalam penulisan sejarah di Indonesia. Berbeda dengan peneliti *trah* dari ilmu antropologi, sejarah *trah* berusaha melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Setelah sejarawan mempunyai *trah* yang akan diselidiki, ditemukanlah *cakal-bakal* dari *trah*. Perkembangan demografi dari *trah* akan menjadi bahan penting untuk melihat proses pembauran anggota *trah* dalam masyarakat. Demikian pula kalau kita telah dapat meletakkan *cakal-bakal trah* dalam stratifikasi sosial, kemudian kita telusur mobilitas sosial dari masing-masing anggota *trah* akan kita peroleh gambaran yang lebih dekat bagaimana perubahan-perubahan sosial pada umumnya mempengaruhi keluarga-keluarga. Cara yang dipakai untuk meneliti satu persatu anggota *trah* ialah dengan mengedarkan pertanyaan tertulis digabungkan dengan wawancara. Untuk mengukur mobilitas sosial dapat digunakan pendekatan kuantitatif seperti pemakaian komputer dalam menganalisis data keluarga. Dalam sejarah keluarga ini sejarah lisan jelas diperlukan, baik sebagai pengganti maupun sebagai tambahan dari dokumen.

Demikian juga sejarah desa memerlukan sejarah lisan. Desa-desa kita tidak banyak yang menyimpan dokumen lebih tua dari 1950. Kekurangan itu tentu harus diisi oleh sejarah lisan. Perubahan-perubahan sosial di desa tidak sampai dicatat oleh statistik di kelurahan. Misalnya kita akan menulis sejarah agraria di desa:

18 Untuk pengantar tentang *trah*, lihat Sjafrin Sairin, "Organisasi Trah: Pelukisan Awal Sebuah Organisasi Sosial Orang Jawa", stensil ceramah pada Pusat Penelitian dan Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 30 Juni 1981.

pembagian tanah, pemilikan tanah, peralihan tanah, jual-beli, dan gadai. Dalam soal-soal semacam itu penelitian berdasarkan daftar di catatan agraria saja tentu tidak cukup. Masih ada kebiasaan di desa dengan pemilikan tanah secara bersama oleh keluarga meskipun dalam *pethuk* pajak hanya tercantum satu nama saja. Sejarah lisan akan sanggup memverifikasikan hal semacam itu. Masih terjadi di Jenggawah yang merupakan peristiwa diungkapkan semata-mata dari dokumen. Demikian juga masalah desa yang lain seperti terbentuknya desa-desa yang lain di daerah transmigrasi masih banyak yang bisa dikerjakan oleh sejarawan dengan peralatan sejarah lisan. Lebih makro sebuah sejarah, lebih banyak ia memerlukan sumber lisan. Terhadap tulisan seperti karya Karl J. Pelzer, *Planter and Peasant: Colonial Policy and Agrarian Struggle in East Sumatra, 1863-1947*,¹⁹ jika ingin memperunik, mendalam, dan kontemporer tentu memerlukan sejarah lisan.

Sama seperti sejarah desa, sejarah kota memerlukan jasa sejarah lisan. Sejarah geografi tempat tinggal, demografi, dan fisik kota mungkin dapat ditemukan dalam dokumen dinas-dinas kota. Tetapi sejarah sosial budaya kontemporer kota barangkali dapat dilihat terutama melalui ingatan warga kotanya. Bahan-bahan seperti koran, majalah, dan buku-buku tidak dapat sepenuhnya memberi kesaksian tentang kehidupan kota yang kompleks. Kota-kota tradisional seperti Surakarta dan Yogyakarta masih menyimpan sisa-sisa masyarakat masa lampau ketika kerajaan masih jaya. Hubungan sosial antar bangsawan, antar status, dan antar kelas sosial di masa lampau, pergeseran dari *bendara* ke *priyayi* pegawai negeri hanya dapat ditangkap melalui kesaksian-kesaksian.²⁰ Demikian pula hubungan sosial antara penduduk Belanda dengan pribumi. Juga keadaan kota di zaman Jepang banyak dijumpai dalam sumber lisan. Setiap orang,

19 Karl J. Pelzer, *Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra 1863-1947*, VKI Vol. 84, (s-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1978).

20 Lihat Selo Soemardjan, *Social Changes in Jogjakarta* (Ithaca, N. Y. : Cornell University Press, 1962).

setiap kelompok sosial, dan setiap kurun sejarah akan melihat kotanya dengan pandangan berbeda. Bagaimana warga kota di masa lalu memandang lingkungan hidupnya merupakan pertanyaan penting yang mungkin dapat mempengaruhi kebijaksanaan pengembangan kota. Apalagi jika mengingat sebuah kota tradisional akan menarik wisatawan lebih banyak pastilah citra kota di masa lalu mendapat tempat kembali dalam perencanaan retradisionalisasi kota — kalau mungkin. Di sini belum lagi kita melihat kota sebagai unit penelitian sejarah politik, ekonomi, kesenian, intelektual, dan budaya yang tertentu memerlukan begitu banyak wawancara.

Contoh-contoh bagaimana sejarah lisan memperkaya penulisan sejarah secara substantif dapat diperpanjang lagi kepada sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah intelektual, sejarah budaya, sejarah kesenian, sejarah perang, sejarah diplomasi, sejarah lisan membantu mengatasi keterbatasan sumber, terutama sumber kualitatif.

IV

Setelah mengutarakan pentingnya sejarah lisan bagi penulisan sejarah, perlu pula disampaikan beberapa hal tentang prospek sejarah lisan. Yang sudah kita miliki ialah sebuah Arsip Nasional yang memang selama ini mengurus sejarah lisan sebagai salah satu kegiatannya. Dalam hal ini tentulah perluasan kelembagaan sampai ke daerah-daerah sangat diharapkan. Demikian juga mengenai prioritas kerja, tiap daerah tentu mempunyai kepentingan-kepentingan yang mendesak untuk segera direkam. Dengan hanya sebuah rencana terpusat tentulah tidak akan sempat terpikirkan kepentingan-kepentingan “sejarah dari bawah ke atas”. Kiranya pemerintah-pemerintah daerah dapat menunjang usaha Arsip Nasional itu melalui arsip daerah. Kelembagaan sejarah lisan dapat juga dikelola oleh universitas, seperti terjadi di negara-negara di Amerika Serikat dan Inggris.

Selain kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga pemerintah, juga kegiatan masyarakat sendiri perlu digalakkan. Dengan partisipasi masyarakat kumpulan sejarah lisan akan menjadi wakil dari masyarakat itu dalam sejarah. Gerakan-gerakan politik, buruh, nelayan, koperasi, pengusaha, agama — untuk menyebut beberapa — dapat memulai sejarah lisan mereka sendiri. Para santri dapat meminta kepada kyai untuk menjawab pertanyaan dan bercerita, para *murid* kepada *guru* dan *dukun*, dan seterusnya. Sebuah alat perekam, beberapa kaset, dan sedikit teknik cukuplah bagi kegiatan-kegiatan semacam itu.

Bagaimana mendidik dan menggairahkan sejarah lisan? Melalui pondok, sekolah, institut dan universitas. Sebuah mata-pelajaran sejarah lisan akan mempunyai manfaat ganda. Pertama, memupuk kesadaran sejarah dan *historical mindedness* di kalangan penuntutnya. Kedua, sejarah lisan akan memasyarakat dengan cepat. Ketiga, menambah khazanah sejarah lisan, sebagai pengumpulan sumber. Lebih dulu dari yang lain, kiranya universitas — yaitu Jurusan Sejarah — dapat memulai sebuah mata kuliah Sejarah Lisan, lebih baik lagi kalau memulai Program Sejarah Lisan.

SEJARAH SOSIAL

Sekalipun sejarah sosial sudah merupakan gejala baru dalam penulisan sejarah sejak sebelum Perang Dunia II, tetapi sebagai sebuah gerakan yang penting baru mendapat tempat sekitar tahun 1950-an. Di Perancis aliran penulisan sejarah *Annales* yang dipelopori oleh Lucien Febvre dan Marc Bloch menjadi modal bagi generasi baru penulis sejarah sosial yang semakin kuat kedudukannya dalam dunia penulisan sejarah. Sejak 1958 dengan terbitnya majalah *Comparative Study on Society and History* lengkaplah sudah pengaruh aliran *Annales* terutama di Amerika. Barangkali tradisi sejarah sosial yang berbeda muncul di Inggris, sebagai sumber inspirasi yang kuat dalam penulisan sejarah di luar daratan Eropa, tetapi kehormatan terbesar sebagai pelopor sejarah sosial rupanya masih saja dipegang oleh sarjana-sarjana Perancis itu. Penulis-penulis sejarah sosial di Amerika biasanya mengakui lebih banyak mencapai pengaruh dari Perancis daripada dari Inggris.

Sejarah sosial mempunyai bahan garapan yang sangat luas dan beraneka-ragam. Kebanyakan sejarah sosial juga mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah ekonomi, sehingga menjadi semacam sejarah sosial-ekonomi. Tulisan Marc Bloch, *French Rural History*, misalnya, bukan semata-mata sejarah dari petani, tetapi juga masyarakat desa dalam arti sosial-ekonomi. Tradisi tulisan semacam ini, yang menjadikan masyarakat secara keseluruhan sebagai bahan

garapan, hanyalah salah satu macam saja dari sejarah sosial. Dalam pengertian sejarah sosial masih banyak lagi yang dapat dikerjakan, selain yang meneliti masyarakat secara total atau global itu. Tema-tema seperti sejarah sebuah kelas sosial, terutama sejarah kaum buruh, menjadi tema yang penting dalam sejarah sosial di Inggris, dan tentu saja juga bagi kebanyakan penulis sejarah yang berhaluan Marxis. Sejarah peranan sebuah kelas, sepanjang ia tetap merupakan sejarah dari sebuah unit masyarakat dengan ruang lingkup dan waktu yang tertentu dapat digolongkan dalam sejarah sosial. Namun, sebuah tulisan tentang kelas sosial, misalnya kelas menengah, yang tanpa ruang dan waktu yang jelas tidak akan menjadi tulisan sejarah. Tulisan sejarah masih harus mempertimbangkan segala keunikan, dengan membatasi diri pada lingkup ruang dan waktu yang tertentu. Demikianlah misalnya buku Heather Sutherland *The Making of Bureaucratic Elite* merupakan sebuah karya sejarah karena ia tidak membicarakan keumuman yang ada pada kelas elite birokrasi, tetapi keunikan-keunikan yang terdapat di dalamnya terutama karena ruang lingkup waktu dan ruang yang terbatas. Generalisasi yang mungkin terdapat dalam buku itu masih mempunyai derajat keberlakuan yang terbatas, jadi bukan membicarakan kelas birokrat pada umumnya. Selanjutnya, pembicaraan mengenai sebuah kelas sosial tidak selalu hanya terbatas dalam pengungkapan mengenai kelas itu sendiri. Tulisan Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Peasants of Languedoc*, misalnya, tidak hanya membicarakan mengenai petani, tetapi juga mengenai masyarakat pedesaan pada umumnya. Jadi tulisan Ladurie itu juga dapat digolongkan dalam sebuah sejarah total atau global.

Tema lain yang dapat digarap oleh sejarah sosial ialah tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Tulisan-tulisan Mousnier tentang pemberontakan petani adalah salah satu contohnya. Demikian juga tulisan Sartono Kartodirdjo *Peasants' Revolt of Banten in 1888* barangkali merupakan sejarah sosial pertama yang ditulis dalam historiografi Indonesia. Dalam tulisan Sartono itu, sebagaimana pada umumnya "sejarah baru", telah digunakan pendekatan-pendekatan

yang memanfaatkan teori dan konsep ilmu-ilmu sosial. Dengan penggunaan ilmu-ilmu sosial, sejarawan mempunyai kemampuan menerangkan yang lebih jelas, sekalipun kadang-kadang harus terikat pada modal teoritisnya. Keterikatan ini dapat mempunyai akibat pada rekonstruksi yang tidak lengkap, sebab harus menuruti logika dan seleksi sebuah model yang eksplisit.

Institusi sosial juga merupakan bahan garapan bagi sejarah sosial. Termasuk di sini ialah tulisan Philippe Aries, *Centuries of Childhood* yang membicarakan mengenai lembaga keluarga, terutama mengenai bagaimana anak-anak dibesarkan pada abad ke-17 dan ke-18. Tema semacam ini sangat menarik karena dapat mengungkapkan asal usul sejarah dari kelembagaan dunia modern yang tentu mempunyai perspektif ke depan yang penting. Transformasi masyarakat dengan adanya pembagian kerja sosial yang semakin rumit dan diferensiasi sosial yang semakin bercabang. Dalam sejarah Indonesia kita belum banyak mengerti misalnya bagaimana anak-anak dibesarkan pada abad-abad yang lalu, bahkan dari keluarga-keluarga yang mungkin menyimpan banyak keterangan sejarah seperti kaum bangsawan. Sumber sejarah mengenai keluarga bangsawan di masa lalu masih cukup banyak dan tersimpan dengan baik, sehingga dapat merupakan bahan kajian sejarah sosial.

Akhirnya, sejarah sosial dapat mengambil fakta sosial sebagai bahan kajian. Tema seperti kemiskinan, perbanditan, kekerasan, kriminalitas dapat menjadi sebuah sejarah. Demikian juga sebaliknya kelimpah-ruahan, kesalehan, kekesatriaan, pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, dan sebagainya. Demikianlah misalnya karya Peter Laslett, *Family Life and The Illicit Love in Earlier Generation* yang mengungkapkan mengenai lahirnya anak-anak haram pada masyarakat Inggris pada zaman Victorian yang terkenal dengan ketertiban moralnya. Dengan data-data dari catatan-catatan gereja terungkaplah ikhwal sosial tentang percintaan yang tersembunyi itu. Sumber-sumber sejarah Indonesia sebenarnya juga sangat kaya dengan bahan-bahan sejarah sosial yang termasuk kelompok ini.

Dari semua tema penulisan itu akan dibahas di sini tema yang pertama, yaitu sejarah sosial yang menjadikan masyarakat sebagai bahan kajian. Kalau kita menulis tema-tema lain, baik mengenai kelas sosial, peristiwa sosial, institusi sosial maupun fakta sosial, seolah-olah kita mengadakan sebuah spesialisasi dengan cara mengisolasi tema garapan kita dari permasalahan yang sebenarnya sangat kompleks. E.J. Hobsbawm berusaha untuk mengesahkan apa yang disebut “societal history” atau “history of society” untuk membedakan dengan sejarah sosial yang menulis mengenai hal-hal yang sebagian-sebagian itu.¹ Sejarah societal demikian — selanjutnya akan disebut saja sejarah sosial — memerlukan usaha yang membuat kerangka utuh mengenai masyarakat, dengan kata lain yang total atau global, sejarah masyarakat sebagai keseluruhan. Sejarah kota termasuk dalam kategori sejarah sosial ini. Penelitian dan penulisan sejarah sosial ini memerlukan strategi yang berbeda dengan penulisan sejarah sosial yang lainnya.

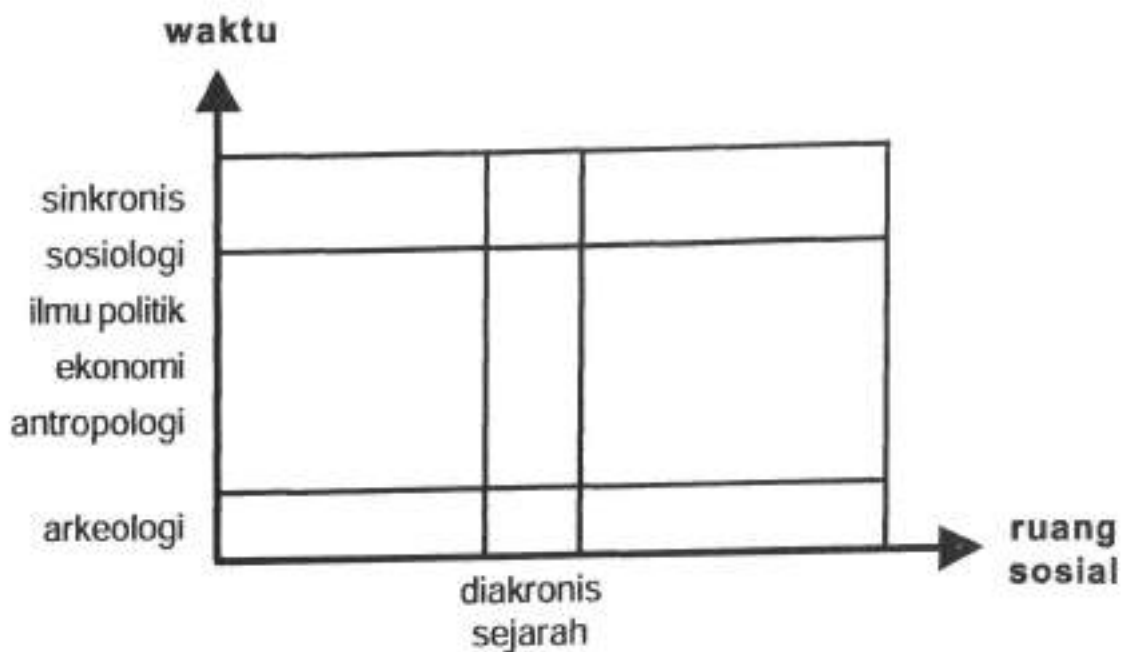
Dalam hubungan strategi penulisan sejarah sosial inilah tulisan ini berusaha untuk menjelaskan beberapa model yang dapat dipakai dalam mengorganisasikan dan mensintesis tulisan sejarah itu. Model sangat penting dalam setiap penulisan, baik ilmu-ilmu alam ataupun ilmu sosial. Untuk sejarah, model akan memberikan inspirasi heuristik yang berguna dalam pencarian dan pengumpulan bahan serta penyusunan. Seperti dikatakan oleh Hobsbawm, setiap penulisan sejarah sosial memerlukan sebuah model, yang sekalipun tidak sangat formal dan terperinci strukturnya, setidaknya sebagai sebuah kerangka akan tampak lingkaran pusat (*central nexus*) atau lingkaran hubungan dari permasalahan yang akan digarap. Seperti diketahui bahwa sebuah sistem sosial merupakan kesatuan dari unit-unit yang saling berhubungan, demikian juga sebuah “sistem sejarah”

1 E. J. Hobsbawm, “From Social History to the History of Society”, dalam Felix Gilbert and Stephen R. Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1972), hlm. 1 26. Kutipan selanjutnya juga diambil dari karangan ini.

merupakan hubungan dari unit-unit yang menjadi satuan yang lebih besar. Lingkaran sebab-akibat, pengaruh, dan perbuatan dapat merupakan sebuah sistem apabila strukturnya menjadi jelas.

Untuk melukiskan sebuah sistem sosial dari suatu kurun sejarah, seperti misalnya tulisan Marc Bloch mengenai feodalisme Eropa, model sangat penting. Sekarang saatnya kita membedakan antara model yang bersifat sinkronis dan diakronis. Dalam sebuah model yang sinkronis masyarakat digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari struktur dan bagiannya. Pendekatan struktural dan fungsional dalam ilmu-ilmu sosial menyarankan pada model sinkronis yang melihat potret masyarakat dalam keadaan statis, dalam keadaan waktu nol. Dalam penelitian etnografis misalnya kita temukan lukisan deskriptif tentang pola integrasi yang terperinci dari suatu masyarakat sama seperti halnya orang membuat tata bahasa deskriptif untuk melukiskan bentuk-bentuk bahasa. Sebuah model sinkronis lebih mengutamakan lukisan yang meluas dalam ruang dengan tidak memikirkan terlalu banyak mengenai dimensi waktunya. Sebaliknya, model yang diakronis lebih mengutamakan memanjangnya lukisan yang berdimensi waktu, dengan sedikit saja luasan ruangan. Model sinkronis kebanyakan digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan juga arkeologi, sedangkan model diakronis digunakan oleh ilmu sejarah. Untuk menggambarkan hubungan antara ilmu sosial yang sinkronis dengan yang diakronis kami kutipkan gambar dari buku Johan Galtung, *Theory and Method of Social Research*,² sebagai berikut:

2 Johan Galtung, *Theory and Methods of Social Research* (New York: Columbia University Press, 1969).



Gambar 1 : Hubungan ilmu sosial sinkronis dan diakronis

Suatu model yang umum bagi lukisan sinkronis biasanya dimulai dengan gambaran tentang lingkungan material dan historis, kemudian sumber-sumber produksi, konsekuensinya dalam struktur ekonomi seperti masalah pembagian kerja, tukar-menukar barang, akumulasi, distribusi dari surplus, dan sebagainya, serta hubungan sosial yang timbul karena latar-belakang itu. Model yang umum ini dapat dipakai sebagai ancar-ancar dalam penulisan, tetapi sejarawan juga seharusnya memakai model-model dari ilmu sosial yang diakronis. Model diakronis yang menawarkan bukan saja sebuah struktur dan fungsinya, melainkan suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian yang kongkret harus menjadi tujuan utama dari penulisan sejarah. Dengan lain perkataan, model diakronis adalah sebuah model dinamis. Namun perlu pula diingatkan bahwa dalam model diakronis pun sejarawan tidak seharusnya memakai model-model pertumbuhan yang umum, seperti misalnya model materialisme historis dari Marxisme atau model pertumbuhan dari kaum non-Marxis semacam Rostow dengan tingkatan-tingkatan perkembangannya. Sejarawan harus mencari model perkembangan diakronis dengan melihat kepada bahan-bahan dan aktualitasnya, daripada menerapkan dengan paksa suatu model pada lukisan sejarahnya. Oleh karena

pertumbuhan sejarah suatu masyarakat tertentu tentu mempunyai jalan yang berbeda, di samping persamaan yang mungkin ada, maka untuk setiap masyarakat perlu adanya model tersendiri.

Model diakronis akan menunjukkan bagaimana “evolusi dari sebuah bentuk budaya dan menghilangkan rekaan waktu nol”, demikian Jan Vansina, tokoh sejarawan yang banyak menggunakan tradisi lisan dalam mengungkapkan masa lalu dari masyarakat yang belum mengenal huruf.³ Model diakronis akan menjadi pelengkap yang sempurna bagi penulisan yang sinkronis. Bagi sejarawan yang selalu melihat sekaligus kepada *structure* dan *conjuncture*, bahwa struktur bukan suatu gejala pada waktu nol yang tak berubah, tetapi sesuatu yang selalu mengalami transformasi sepanjang waktu. Rangkaian kejadian yang susul-menyusul tidak saja menjawab mengenai apa yang ada, tetapi juga mengapa sesuatu itu ada dan bagaimana terjadinya. Hubungan kausal, pengaruh, perbuatan-perbuatan dengan kesengajaan, merupakan esensi dari penulisan sejarah. Sejarah bukannya suatu susunan sinkronis dari kejadian, atau korelasi antara variabel yang merupakan urutan sebuah situasi, tetapi suatu urutan dinamis atau dialektis dengan waktu yang jelas.

Mengenai bagaimana model diakronis atau dinamis itu ditulis, Jan Vansina dalam tulisan yang sama menyebutkan dua macam model. Pertama ialah model yang *narrative*. Dalam model ini masyarakat atau budaya digambarkan secara evolusi, bagaimana ia tumbuh dari awal sebagai suatu gejala yang unik dengan mengingat kepentingan dari semua detilnya. Perkembangan sejarah dilihat sebagai sebuah rangkaian mata-rantai kausalitas yang secara turun temurun menumbuhkan gejala baru dalam masyarakat atau budaya. Kedua, sebuah model diakronis dapat bermula dari sebuah situasi secara sinkronis, dan melalui situasi antara menuju kepada situasi terakhir.

3 Jan Vansina, "Culture Through Time", dalam Raoul Naroll dan Ronald Cohen (eds.), *A Handbook of Method in Cultural Anthropology* (New York: Columbia University Press, 1970), hlm. 165-179.

Tentu saja untuk setiap situasi yang sedang dilukiskan seluruh bukti-bukti harus dikemukakan dengan jelas, sehingga tampak perkembangannya. Model dinamis yang demikian ini dapat tampak sebagai berganti-gantinya situasi, atau model sinkronis yang dibuat berurutan. Untuk model dinamis yang pertama, masyarakat atau budaya dilihat perkembangannya dari tingkat yang paling sederhana menuju kepada tingkat yang semakin kompleks, sedangkan untuk model yang kedua tekanan terletak dalam situasi yang merupakan potongan-potongan. Dalam kedua-duanya sebenarnya model sinkronis dan diakronis selalu merupakan kelengkapan, dan hubungan antara kedua model itu merupakan sebuah dialog yang berjalan dalam bentuk dialektik. Artinya, sebuah keadaan yang mapan dan terstruktur selalu dinegasikan oleh perkembangan sendiri.

Perkembangan sejarah yang tampak dalam dinamika masyarakat timbul karena adanya kekuatan-kekuatan sejarah, baik yang berupa kekuatan alam, seperti misalnya ada dan tidaknya sumber-sumber ekonomis, pertumbuhan penduduk, kepentingan-kepentingan sebuah kelas, grup dan individu, penemuan teknologi baru, ideologi, kepercayaan, pengaruh-pengaruh luar, dan sebagainya. Dalam model yang dinamis ini, hal yang sangat penting ialah adanya *duration*, kelangsungan dalam waktu, jadi bukan semata-mata *function*. Sejarah berupa urutan, kejadian yang mengawali, dan rangkaian sebab akibatnya. Oleh karena itu sejarah bukan hanya mengemukakan keumuman dari ilmu yang nomotetis, tetapi keunikan-keunikan dari ilmu yang ideografis. Maka sangat perlu bagi sejarawan untuk menciptakan sendiri modelnya yang paling tepat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam dinamika sosial-sejarah suatu masyarakat.

Oleh karena itu tulisan ini bermaksud untuk mengemukakan beberapa contoh model yang telah dipakai oleh sejarawan dalam merekonstruksikan masa lalu. Maksud dari tulisan ini ialah supaya dengan pemakaian model, rekonstruksi masa lalu dapat mempunyai daya menerangkan yang lebih kuat tanpa adanya penyebarluasan

sebagaimana sering terjadi dalam penulisan ilmu-ilmu sosial yang lebih cenderung kepada generalisasi. Dari hasil pembacaan sejarah sosial, setidaknya dapat ditemukan enam model yang masing-masing kami beri nama (1) model evolusi, (2) model lingkaran sentral, (3) model interval, (4) model tingkat perkembangan, (5) model jangka panjang-menengah-pendek, dan (6) sistematis.

MODEL EVOLUSI

Model yang pertama ini disebut model evolusi untuk menunjukkan jenis penulisan yang melukiskan perkembangan sebuah masyarakat itu berdiri sampai menjadi sebuah masyarakat yang kompleks. Tentu saja model ini hanya dapat diterapkan pada bahan kajian yang memang mencoba mengkaji masyarakat dari permulaan berdirinya, yaitu jika memang sumber-sumber sejarahnya memungkinkan untuk penulisan yang begini. Kebanyakan kota-kota di Amerika Serikat memenuhi kriteria tersedianya bahan untuk jenis penulisan ini. Karya Kenneth A. Lockridge, *A New England Town: The First Hundred Years, Dedham, Massachusetts, 1636-1736*, adalah salah satu contoh dari tulisan dengan model evolusi.⁴

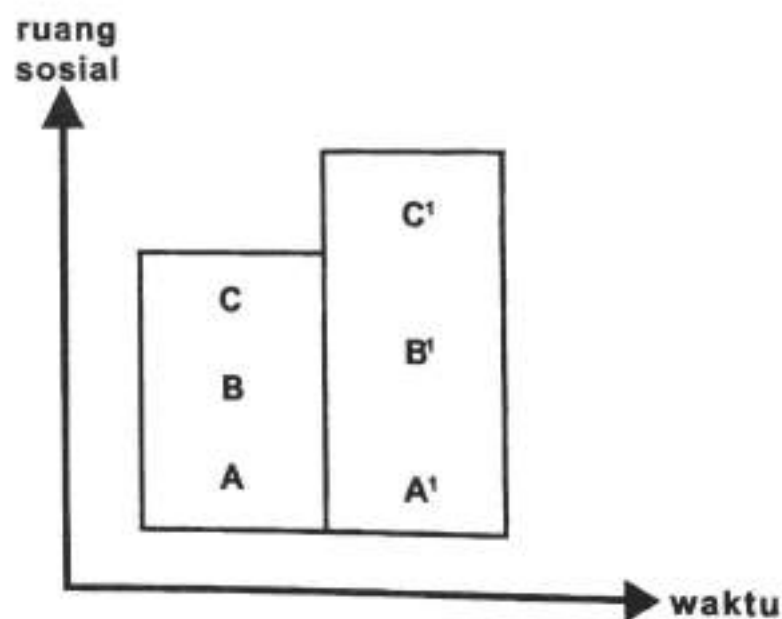
Dalam buku itu kota Dedham yang merupakan sebuah kota di New England tempat para imigran dari Eropa datang ke Amerika digambarkan pada mulanya adalah sebuah *utopian commune*. Ketika kota itu masih muda dan lembaga-lembaganya masih serba sederhana, kehidupan masyarakat berpusat pada kegiatan keagamaan di gereja, pada kehidupan politik yang bersifat komunal. Masyarakat komunal itu kemudian mengalami kemunduran dengan adanya kekuatan sejarah baru yang masuk berupa kegiatan komersial dan industri dan menjadikan Dedham sebagai pinggir dari kota Boston yang sedang berkembang. Dedham yang semula adalah desa yang statis dengan

4 Kenneth A. Lockridge, *A New England Town: The First Hundred Years, Dedham Massachusetts, 1636-1736* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1970).

kehidupan ekonominya yang agraris mulai runtuh. Pusat keagamaan gereja tidak lagi merupakan jantung-hati kesempurnaan, sebab kota sudah menggantikan desa. Kehidupan komunal, egalitarian, digantikan oleh perbedaan-perbedaan sosial dan penyimpangan politik. Proses ini terjadi dari tahun 1646 sampai 1686 selama limapuluh tahun dari kehidupan kota kecil itu.

Sebagai gantinya Dedham menjadi sebuah kota provinsial, dengan adanya komunitas baru, politik baru, dan masyarakat baru. Di kota yang baru itu muncul bentuk demokrasi baru yang sedang mengalami perkembangan, demokrasi yang bermula dari hak-hak individu dan menjadi ideologi yang berpengaruh sejak revolusi Amerika serta menjadi semakin kuat dalam abad ke-19 menggantikan "demokrasi" yang disebut sebagai "conservative corporate voluntarism" yang menjadi ciri pokok masyarakat komunal para pendatang baru di Amerika.

Untuk jelasnya model evolusi itu dapat digambarkan demikian:



Gambar 2 : Model Evolusi

Gambar itu menjelaskan bahwa semakin jauh waktu berjalan, semakin kompleks kehidupan masyarakat. Dalam waktu pertama, dengan masyarakat yang mempunyai komponen (A, B, C) dengan subkomponen misalnya (x, y, z) pada komponen A, dan sub-

komponen (k, l, m) pada komponen B, dan sub-komponen (r, s, t) pada komponen C, masih menunjukkan ciri-ciri yang sederhana. Dengan adanya kemajuan dalam perdagangan dan industri komponen itu menjadi (A^1 , B^1 , C^1), masing-masing dengan sub-komponen yang lebih banyak, dan berbeda secara kualitatif. Misalnya komponen A^1 terdiri dari sub-komponen (x^1 , y^1 , z^1 , ... x^n , y^n , z^n), demikian pula untuk komponen-komponen yang lainnya. Pada buku Lockridge digambarkan bahwa (A, B, C) berlangsung kurang lebih selama 50 tahun dan (A^1 , B^1 , C^1) selama 50 tahun kemudian. Dan kota itu akan terus berkembang menjadi bagian dari kesibukan kota Boston. Dedham sebenarnya menunjukkan gambaran yang umum dari pengalaman sejarah dengan Amerika, dan karena itu membaca sejarah Dedham juga membaca sejarah Amerika.

Sekalipun untuk sebuah kota di Indonesia model penulisan yang mengikuti dari awal pertumbuhan merupakan pekerjaan yang tak mudah, misalnya melihat evolusi dari sebuah desa yang semakin ramai menjadi kota hampir-hampir tidak mungkin, kota-kota yang sengaja didirikan seperti Batavia yang kemudian menjadi Jakarta, atau kota-kota pelabuhan, kota-kota stasiun kereta api dan semacamnya dapat ditulis dengan model ini.

MODEL LINGKARAN SENTRAL

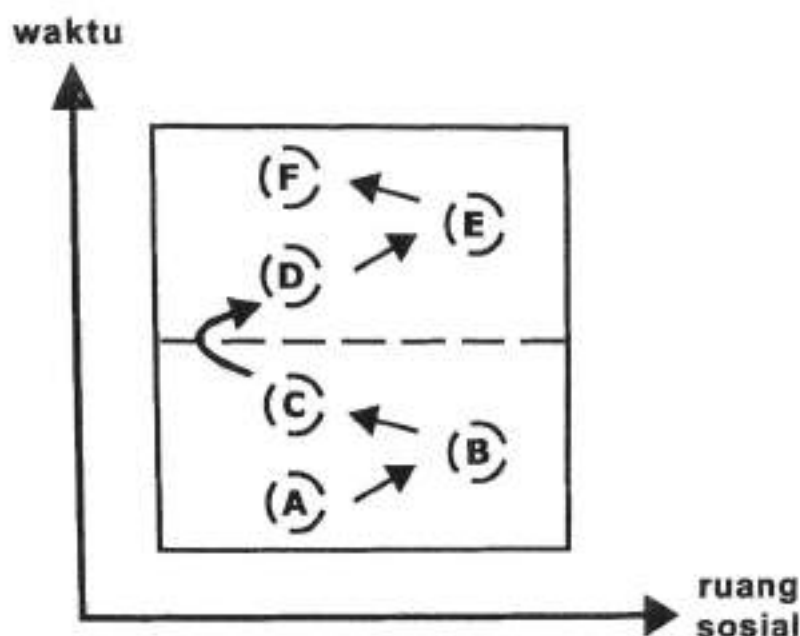
Model ini tidak menulis mengenai kota atau masyarakat dari awal, tetapi dari titik yang sudah menjadi. Setiap penulisan yang bertolak dari titik sejarah di tengah-tengah demikian biasanya selalu mulai dengan lukisan sinkronis tentang masyarakat itu, baru kemudian secara diakronis ditunjukkan pertumbuhannya. Model lingkaran-sentral ini diambil dari telaah atas tulisan LeRoy Ladurie, *The Peasants of Languedoc*⁵ yang melukiskan masyarakat petani di

5 Emmanuel LeRoy Ladurie, *The Peasants of Languedoc* (Chicago: University of Illinois Press, 1976).

Languedoc, Perancis. Dengan studi tentang arsip-arsip tanah, *compoix*, Ladurie mengungkapkan perkembangan sosial-ekonomi sejak akhir abad ke-15 sampai akhir abad ke-17. Fase pertama (abad ke-11 sampai abad ke-15) ialah prakondisi pertumbuhan, fase kedua (akhir abad ke-15 dan sepanjang abad ke-16) ialah pertumbuhan, fase ketiga (setelah 1600) ialah kematangan, dan fase terakhir (mulai akhir abad ke-17) ialah masa resesi.

Ladurie memulai dengan adanya gejala baru dalam pemilikan tanah dan konsekuensi sosial-ekonominya, sebagai basis dari uraian diakronisnya kemudian. Kemudian tulisan itu dilanjutkan dengan mengemukakan eksplosi penduduk dan akibat-akibatnya pada ekonomi, pembagian tanah, konsentrasi tanah, pemiskinan penduduk. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya ekonomi baru yang berupa persoalan upah, sewa, laba, dan pemiskinan golongan penerima upah di pedesaan. Secara progresif masing-masing kekuatan sejarah mentransformasikan Languedoc. Semua itu dalam pembagian buku Ladurie memasukkan dalam bab “Malthusian Renaissance” untuk menekankan pengaruh dari pertumbuhan penduduk pada sejarah sosial-ekonomi. Dalam kerangka pemikiran demografis ini, terdapat urutan dinamika sejarah yang secara bergantian berpusat pada lingkaran tertentu, dan merupakan hubungan sebab-akibat yang tak terelakkan setiap perkembangan baru berpusat pada satu gejala pokok, dan membentuk suatu gerakan tersendiri yang membuat sejarah maju secara diakronis dan sekaligus menjadi lebih maju secara sinkronis. Demikianlah maka setelah adanya “Malthusian Renaissance” timbul gejala besar yaitu timbulnya kesadaran baru dan perjuangan sosial, “New States of Conciousness and Social Struggle”. Kegagalan surplus pertanian untuk menopang pertumbuhan penduduk sudah mencapai tingkat kematangan dan menghasilkan kesadaran baru, yang berupa reformasi agama yang pada taraf tertentu menggugat sistem sosial yang tak lagi mendukung kesejahteraan sosial ekonomi itu, menyebabkan timbulnya keresahan sosial dan pemberontakan.

Tentu saja penuturan dalam buku Ladurie tersebut jauh lebih kaya dan tak dapat disederhanakan dalam tulisan ini. Namun sebagai sebuah gambaran visual, gambar di bawah ini barangkali akan menerangkan lebih banyak dari cara Ladurie menggarap tulisannya.



Gambar 3 : Model Lingkaran Sentral

Kejadian A mempunyai akibat-akibat di sekitarnya karena A merupakan pusat dari sebuah lingkaran. Pada gilirannya A dan lingkarannya menyebabkan terjadinya pusat B yang juga di sekitarnya ada sejumlah gejala lagi. Dan seterusnya, sampai sejarah masyarakat mencapai lingkaran yang berpusat pada F. Dinamika sejarah merupakan perkembangan logis dari serentetan gejala sejarah yang saling berpautan. Dalam sejarah pertanian, perkembangan penduduk yang memiskinkan masyarakat itu telah dicoba diatasi dengan usaha mengubah lembaga-lembaga sosial melalui bermacam ideologi baru dan kekerasan. Perkembangan sejarah babak berikutnya ialah Revolusi Industri yang membawa masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dan menjawab secara memadai tantangan perkembangan penduduk yang sudah terjadi sejak permulaan abad ke-16 itu. Dalam sejarah Indonesia barangkali sulit untuk mencari yang sepadan dari model ini, karena perkembangan sejarah Indonesia banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar, seperti

imperialisme. Tetapi, jika kita melihat lebih dalam lagi, barangkali perkembangan sejak zaman Mataram Lama sampai Mataram dapat dilihat dari perspektif semacam ini. Apakah hipotesa demografi memang berlaku untuk sejarah Indonesia dalam menerangkan jatuh bangunnya kerajaan dan sistem sosial, tentu sangat tergantung kepada tersedianya sumber dan kemudian menafsirkan sumber itu.

MODEL INTERVAL

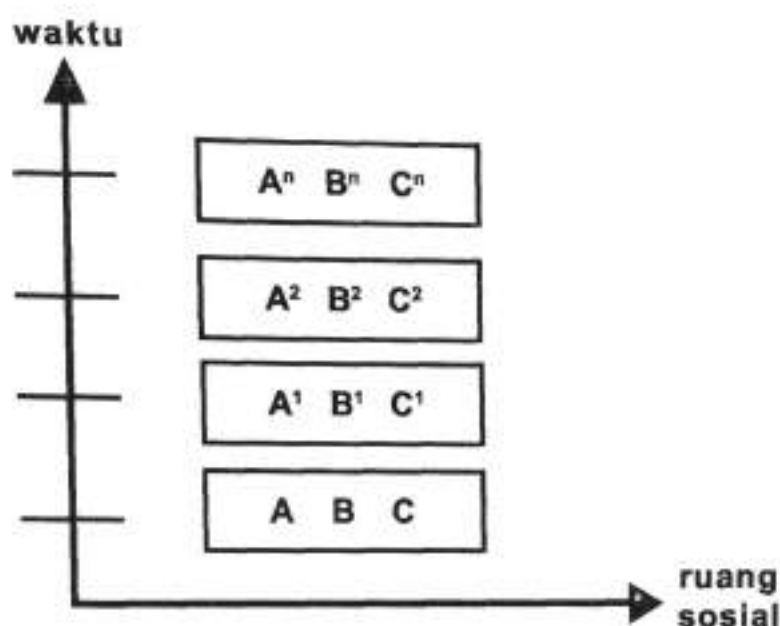
Model ini merupakan kumpulan dari lukisan sinkronis yang diurutkan dalam kronologis sehingga tampak perkembangannya, sekalipun tidak tampak benar hubungan sebab akibat. Model ini terpikirkan misalnya ketika kita mendapatkan keterangan dari suatu zaman pada periode tertentu mengenai suatu masyarakat tertentu. Kemudian secara kebetulan ada pula keterangan mengenai masyarakat itu pada periode yang lain, tanpa adanya mata rantai yang menghubungkan antara dua periode itu. Demikian seterusnya sehingga urutan lukisan sinkronis itu dapat menunjukkan secara tak sempurna perkembangan diakronisme. Dalam sejarah Indonesia misalnya, kita ingat bahwa pada tahun 1868 pemerintah kolonial mengadakan survai pedesaan di Jawa dan Madura yang sebagian hasilnya diterbitkan dalam Bergsma, *Eindresumé*, yang banyak menjadi sumber penulisan sejarah pedesaan itu. Untuk daerah Pati Jawa Tengah, kebetulan Burger yang melihat pentingnya laporan 1868 membuat laporan tentang desa-desa tertentu di Pati pada tahun 1928 dengan perbandingan tahun 1868 itu.⁶ Kebetulan pula Bachtiar Rivai tertarik untuk menulis daerah yang sama pada tahun 1958,⁷ dan selanjutnya Frans Hüsken tertarik untuk menulis daerah yang sama pada tahun 1976.⁸ Dengan tidak sempurna sebenarnya kita

6 D. H. Burger, "Report over de Desa Pekalongan in 1868 en 1928" *Economische Beschrijving*, I, hlm. 1-12.

7 Bachtiar Rivai, "Bentuk Milik Tanah dan Tingkat Kemakmuran: Penyelidikan Pedesaan di Daerah Pati, Djawa Tengah." (Disertasi, 1958).

8 Frans Hüsken, "Perkembangan Historis di Daerah Pedesaan Pantai Utara Jawa", *Cakrawala Majalah Penelitian Sosial*, 8, 5, hlm. 441-462.

mendapatkan beberapa lukisan sinkronis, 1868, 1928, 1958, dan 1976. Orang dapat dengan mudah menangkap perubahan-perubahan masyarakat dengan membaca secara kritis analisa-analisa tahun-tahun itu. Dengan kata lain, kita dapat memperoleh sebuah model diakronis yang berupa tahun-tahun tertentu secara interval. Untuk menggambarkan dalam bentuk visual kiranya adalah sebagai berikut:



Gambar 4 : Model Interval

Prospek dari pendekatan ini dapat dilihat dari kemungkinan tersedianya sumber sejarah, terutama kalau kita mengingat bahwa sensus penduduk di Indonesia tidak secara teratur. Ada sejumlah bahan-bahan statistik yang memungkinkan untuk menulis secara ini, setidaknya karena adanya sensus pada tahun 1905, 1920, 1930, 1960, dan seterusnya. Dari data-data sensus ini tentu dapat dilihat perkembangan suatu unit geografis tertentu seperti sebuah kota atau daerah.

MODEL TINGKAT PERKEMBANGAN

Model ini adalah penerapan dari teori perkembangan masyarakat yang diangkat dari sosiologi. Model-model yang banyak dipakai dalam menerangkan perkembangan sejarah ialah Marx atau Rostow. Di sini

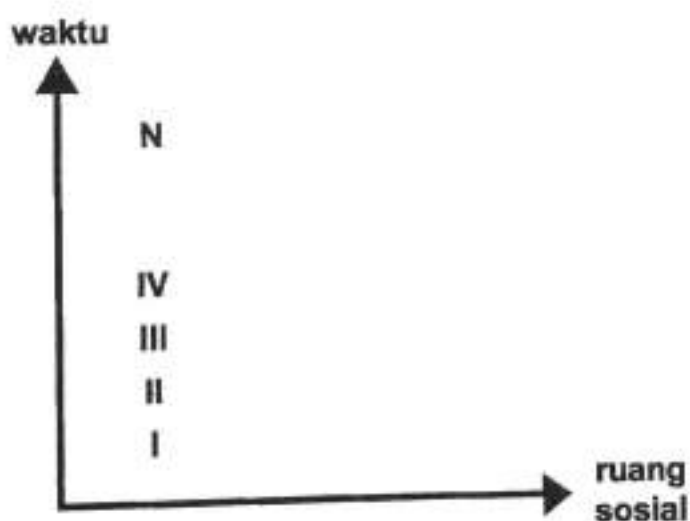
akan dikemukakan tulisan Neil J. Smelser tentang Revolusi Industri sebagai contoh, yaitu "Sociological History: The Industrial Revolution and the British Working-Class Family."⁹ Dalam tulisannya yang dengan tegas dinyatakannya sebagai sejarah sosiologis itu, sosiolog Smelser memakai model diferensiasi struktural untuk melukiskan tahap-tahap perkembangan Revolusi Industri dan masyarakat Inggris, khususnya golongan pekerjaannya. Berbeda dengan pendekatan sejarah yang deskriptif dan bercorak unik, Smelser dengan sengaja mendekati Revolusi Industri sebagai sebuah ilustrasi dari sebuah model konseptual yang formal dan eksplisit yang diambil dari pemikiran sosiologis. Dengan singkat model ini mengatakan bahwa dalam sebuah kondisi tertentu dari suatu dis-equilibrium sosial, struktur sosial akan berubah sedemikian rupa sehingga peranan yang semula meliputi berbagai tipe kegiatan menjadi semakin terspesialisasi; dengan kata lain, struktur sosial menjadi semakin kompleks dan dipilah-pilahkan. Dengan model analitis yang abstrak inilah dapat disoroti perkembangan ke arah masyarakat industri di manapun dan kapanpun. Kunci dari pendekatan Smelser ialah *structural differentiation*, yaitu proses semakin menuju kepada spesialisasi.

Untuk menerangkan tingkatan-tingkatan perkembangan, Smelser memakai model tujuh tingkat. Tingkat pertama ialah adanya ketidakpuasan dengan peranan yang sudah dilembagakan, atau dengan organisasi dari peranan itu sendiri. Misalnya ialah ketidakmampuan dari sistem pasar untuk membagi kemakmuran, ketidakmampuan keluarga untuk mendapatkan upah yang layak, dan sebagainya. Tingkat kedua, gejala yang bersumber pada ketidakpuasan itu, seperti kekhawatiran, permusuhan, dan fantasi tentang keruntuhan. Di sini juga tampak adanya konflik-konflik sosial. Ada juga fantasi tentang sebuah utopia yang mengagungkan masa lalu, yang dapat berupa sebuah ideologi yang melahirkan gerakan sosial.

9 Neil J. Smelser, "Sociological History: The Industrial Revolution: and the British Working Class Family", dalam bukunya sendiri, *Essays in Sociological Explanation* (Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, Inc. , 1968), hlm. 76-91.

Tingkat ketiga, penanganan dan penyaluran gejala kerusakan sosial. Agen-agen dari kontrol sosial, seperti polisi, jaksa, pers, pemimpin masyarakat, dan sebagainya mulai aktif dalam kampanye untuk menahan gejala yang mengancam kestabilan sosial itu. Tingkat keempat, munculnya gagasan baru yang mencoba menunjukkan jalan ke luar dari ketidakpuasan itu. Tingkat kelima, usaha dalam bentuk yang institusional yang mungkin akan meredakan ketidakpuasan itu. Di sini proses perubahan bergerak dari general ke yang khusus. Dalam bidang ekonomi, arah ini dapat tampak dalam usaha untuk mengadakan pembaharuan untuk mengatur ketenagakerjaan melalui peraturan-peraturan yang meringankan problem-problem sosial. Tingkat keenam, usaha untuk mengukuhkan bentuk-bentuk lembaga yang baru dengan berbagai macam inovasi. Tingkat ketujuh, bentuk kelembagaan yang baru itu dikonsolidasikan sebagai ciri yang permanen dari struktur sosial. Selanjutnya, Smelser membagi pembabakan waktu berdasarkan ketujuh tingkat perkembangan itu.

Untuk mudahnya, secara umum model itu dapat digambarkan di bawah ini:



Gambar 5 : Model Tingkat Perkembangan

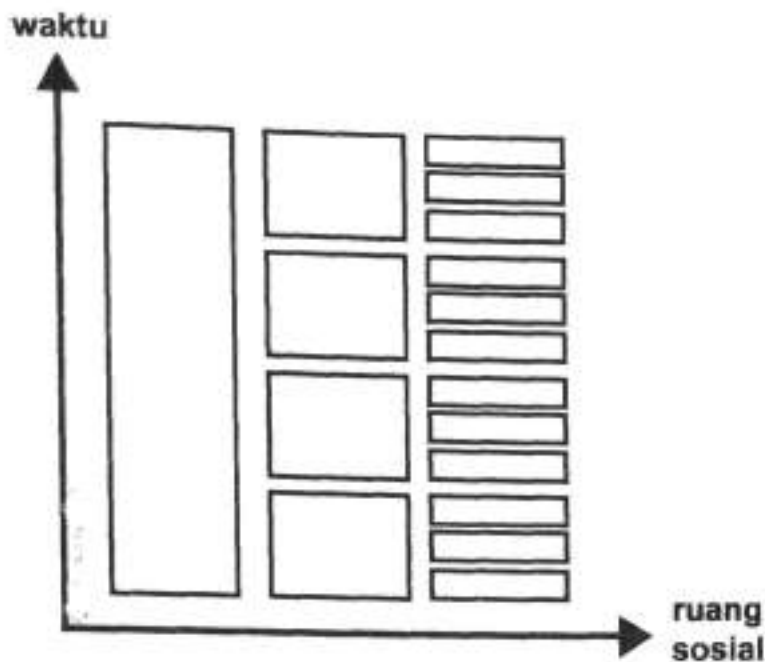
Untuk Indonesia, pengenalan industrialisasi terjadi dalam sebuah masyarakat kolonial, dan rupa-rupanya perkembangan setelah itu tidak sepenuhnya memenuhi model yang dilukiskan oleh Smelser

itu. Oleh karena itu tentu saja untuk menerapkannya dalam sejarah sosial Indonesia model yang lebih tepat harus lahir dari kenyataan sejarah atau sosiologi masyarakat Indonesia sendiri. Modifikasi diperlukan mengingat misalnya adanya struktur sosial ekonomi yang dualistis, atau plural, dalam masyarakat Indonesia, sehingga industrialisasi yang menimpa satu sektor sosial ekonomi dapat mempunyai implikasi lain bagi sektor yang lain. Modifikasi yang sama harus dilakukan bagi model-model perkembangan lainnya.

MODEL JANGKA PANJANG — MENENGAH — PENDEK

Model ini diambil dari cara Fernand Braudel menangani sejarah sosial. Dalam bukunya yang merupakan karya utama, yaitu *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II* yang terbit dalam dua jilid tebal dan merupakan hasil kerja selama 20 tahun, Braudel membagi sejarah dalam tiga macam keberlangsungan. Pertama, ialah sejarah jangka panjang yang perubahannya sangat lamban, merupakan perulangan yang konstan dan perkembangan waktu yang tak dapat dilihat. Sejarah ini terutama mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya, atau apa yang disebutnya sebagai *geographical time*. Kedua, ialah perkembangan yang lamban, tetapi dapat dirasakan ritmenya. Di sinilah letak sejarah sosial itu sendiri. Braudel menyebutnya sebagai sejarah jangka menengah yang menempati sebuah *social time*. Ketiga, ialah sejarah jangka pendek, yaitu sejarah dari kejadian-kejadian, *l'histoire événementielle*. Di sini sejarah berjalan dengan serba cepat, pendek-pendek, dalam fluktuasi yang menggelisahkan. Braudel menyebutnya sebagai sejarah yang berdimensi individual, atau *individual time*. Khusus mengenai sejarah dari struktur, dikatakannya bahwa dalam setiap struktur ada elemen perubahan, gerakan, sehingga struktur juga tampak sebagai konjunktur.

Dalam bentuk gambar, pendekatan Braudel akan berupa sebagai di bawah ini:



Gambar 6 : Model Jangka Panjang - Menengah - Pendek

Dalam sejarah Indonesia banyak sekali kemungkinan untuk menggarap sejarah sosial dengan model ini. Sebagai contoh misalnya disertasi Soetjipto Tjiptoatmodjo (1983) mengenai selat Madura tampak sedikit banyak usaha ke arah penulisan sejarah yang demikian.

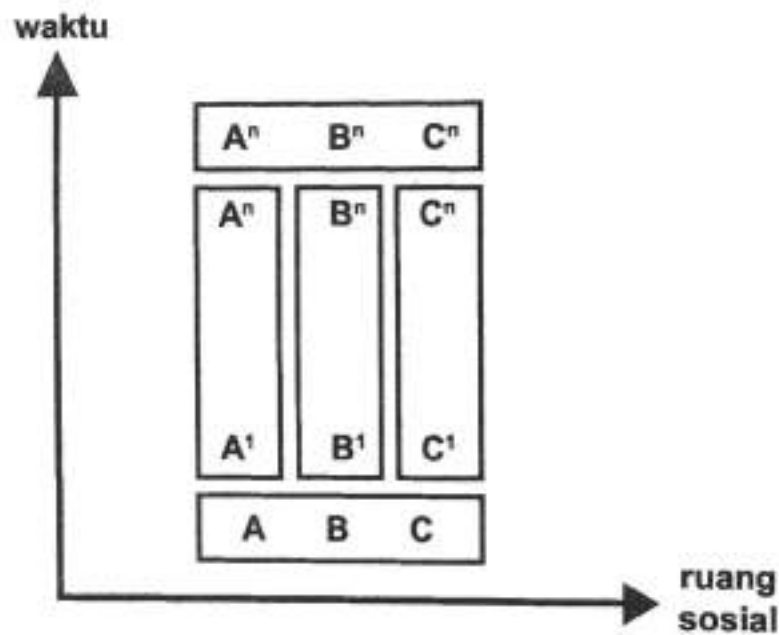
MODEL SISTEMATIS

Model ini terutama sangat sesuai untuk menelusuri sejarah sosial dalam arti perubahan sosial. Model ini diambil dari membaca buku Thomas C. Cochran, *Social Change in America*,¹⁰ yang mencoba membuat pendekatan yang sistematis terhadap perubahan sosial di Amerika dalam abad ke-20. Ia memulai bukunya dengan mengemukakan elemen-elemen sosial yang akan dijadikannya ukuran bagi perubahan sosial itu. Ia mencoba menerapkan pendekatan *behavioral sciences* untuk sejarah, dan mencoba melihat sejarah Amerika dengan cara demikian. Hasilnya ialah sebuah sejarah institusional, yang menekankan lebih banyak pada perubahan dalam perilaku yang terkondisi daripada pada uraian sejarah yang melukiskan kejadian

10 Thomas C. Cochran, *Social Change in America: The Twentieth Century* (New York: Harper & Row, Publishers, 1972).

politik, orang-orang besar, dan kejadian-kejadian yang menarik. Dari lukisan itu ia ingin memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial dari zaman yang terdahulu telah mengalami perubahan yang radikal pada tahun 1900 sampai 1970. Untuk itu ia menguraikan masing-masing lembaga sosial, dan akhirnya ia membuat analisa mengenai ciri-ciri pokok masyarakat Amerika dalam abad ke-20 ini.

Untuk menunjukkan secara jelas, kiranya gambar di bawah ini dapat direnungkan.



Gambar 7 : Model Sistematis

Sistematika penulisan semacam ini tentu banyak menjadi model bagi penulisan mengenai perubahan sosial. Tulisan W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition* juga memakai model semacam ini.

Akhirnya, sebuah penulisan sejarah sangat tergantung kepada kondisi objektif, berupa tersedianya sumber, dan kondisi subjektif, berupa kemampuan penulis sejarah. Maksud dari uraian mengenai model ini kiranya jelas, yaitu meningkatkan ketrampilan sejarawan dalam menentukan strategi penulisan yang paling tepat sesuai dengan kondisi objektif dan subjektif, serta tujuan dari penulisan itu sendiri.

SEJARAH KOTA

I

Sejarah kota belum banyak mendapat perhatian kalangan sejarawan akademis. Juga skripsi-skripsi di perguruan tinggi yang mengajarkan sejarah tidak menunjukkan adanya perhatian terhadap kota sebagai bidang kajian sejarah yang tersendiri. Barangkali hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan terhadap kekayaan dan kemungkinannya, padahal sejak abad ke-20 kota-kota di Indonesia sudah mengambil alih banyak kegiatan dari pedesaan. Pergeseran dari desa ke kota terjadi bersamaan dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, misalnya, pusat perlawanan tidak lagi di desa dengan pemimpin pedesaan sebagai penggerak, tetapi di kota dengan kaum terpelajar dan kelas menengah. Pergerakan sosial yang berkembang di kota-kota mempunyai ciri-ciri yang berbeda pula dengan pergerakan-pergerakan sebelumnya. Sementara itu juga terjadi pergeseran dalam budaya ketika budaya kota menggantikan budaya desa, setelah kota-kota banyak terpengaruh oleh masuknya unsur-unsur budaya modern. Kelas menengah kota merupakan kelompok sosial tersendiri, keluar dari kerangka masyarakat tradisional dan budaya pedesaan. Dapat dikatakan, bahwa pada awal abad ke-20 kota muncul sebagai suatu

kategori dalam sejarah Indonesia. Kota dapat disebut sebagai sebuah kesatuan yang secara sah berdiri sendiri, dan patut menjadi bidang kajian yang tersendiri pula.

Dengan tumbuhnya kota-kota tidak berarti hilangnya *rural-urban continuum* atau *folk-urban continuum*, dan sekaligus terjadi *rural-urban contrast* secara menyeluruh.¹ Dalam sejarah Indonesia proses urbanisasi tidak terjadi secara mendadak dan menyeluruh. Banyak ciri-ciri pedesaan masih terdapat dalam masyarakat kota, bahkan batas geografis antara kota dan desa kadang-kadang sukar ditegaskan. Hanya dalam ketentuan administratif, batas antara kota dan desa menjadi jelas. Pada abad ke-19 wilayah yang dianggap kota negara biasanya di bawah pengawasan langsung oleh pejabat tinggi administratif, seperti misalnya *patih*.² Dalam kajian mengenai kota, batas administratif ialah yang sering dijadikan dasar strategi penelitian, terutama jika menyangkut masalah kependudukan.³ Untuk penelitian sejarah, batas wilayah kota tentu saja mengikuti perkembangan kota itu sendiri, tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan administratif. Sering terjadi pemukiman-pemukiman penduduk yang secara sosiologis bisa disebut urban, tetapi terletak jauh dari kota induk sehingga menjadi kota satelit. Mereka yang tinggal di kota-kota satelit itu kebanyakan secara ekonomis, sosial dan kultural termasuk dalam lingkungan kota induknya, tetapi secara administratif masuk daerah lain. Inilah yang terjadi dengan banyak pembangunan pemukiman baru oleh orang-orang Eropa dan Cina pada abad ke-19 dan oleh Perumnas akhir-akhir ini. Gejala terjadinya kota satelit ada sejak awal abad ke-20, yaitu jika terjadi pengelompokan kelas menengah dalam

1 Konsep tentang *rural-urban continuum* atau *folk-urban continuum* dan *rural-urban contrast* termuat di antaranya dalam Gideon Sjoberg, *The Preindustrial City: Past and Present* (New York: The Free Press, 1965).

2 Distrik Bangkalan, misalnya, yang menjadi tempat ibukota kerajaan Madura-Bangkalan berada di bawah seorang patih yang membawahi 13 *mantri kepala kampung*; atau kepala desa yang seorang diantaranya berpangkat *demang* dan menjadi pemuka dari *kepala kampung* yang lain.

3 Lihat misalnya Pauline Dublin Milone, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts* (Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1966).

locus tertentu di luar batas administratif kota. Kota Gede yang berada di luar kota Yogyakarta misalnya mulai tumbuh sebagai kota-satelit tempat golongan kelas menengah.⁴ Baik kota induk maupun kota satelit secara gradual memisahkan diri dari lingkungan pedesaan sekitar, dan menjadi lingkungan ekologi baru.

Pemisahan secara ekologis antara desa dengan kota tidak terjadi dalam pola pemukiman kota praindustri. Tata kota tidak lahir karena maksimisasi teknologi atau ekonomi, tetapi karena suatu pola sosio-kultural. Memang benar bahwa pemilihan pemukiman kota dapat berdasarkan alasan-alasan ekonomis, seperti misalnya kesuburan tanah sekitar, kemudian irigasi, tetapi pembentukan kota selalu dengan pertimbangan-pertimbangan sosio-kultural. Sebagai pusat dari kota tradisional ialah *kraton*. Di sekitar *kraton* dapat dibangun rumah-rumah para *sentana* dan *abdi dalem*, tempat ibadah, dan pasar. Kadang-kadang *kraton* juga merupakan benteng dengan tembok yang melingkar, lengkap dengan lapangan dan tempat ibadah. Bahkan kota-kota administratif di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Surakarta menunjukkan pola yang sama di masa lampau. Nama-nama kampung dalam kota sering disesuaikan dengan *abdi dalem* yang tinggal di kampung itu.⁵

Ketentuan di atas tidak berlaku untuk kota-kota perdagangan di tepi laut. Palembang, misalnya, meskipun merupakan kota administratif yang mengatur perdagangan antara penduduk sekitar dengan dunia luar, tidak mengikuti pola tata kota sosio-kultural. Peta kota Palembang pada abad ke-19 tidak terbagi karena pemusatan magis-religius dengan *kraton* sebagai pusat. Jalan-jalan dan fasilitas dalam kota tidak semata-mata ditujukan ke pusat, tetapi tersebar secara natural. Barangkali bahkan kedudukan *kraton* mengikuti perdagangan, dan bukan sebaliknya, karena kota-kota itu sudah ada

4 H. J. van Mook, "Kota Gede", *KT*, XV: 1926, hlm. 353-400.

5 Nama-nama kampung di kota seperti Yogyakarta kebanyakan masih memakai nama seperti Suronatan, Bugisan, Daengan, Patehan. Juga nama-nama tempat diambil dari nama bangsawan yang tinggal di kampung, seperti Yudonegaran, Wijilan, Suryodiningratan.

sebelum pusat-pusat administratif didirikan. Ditambahkannya pemukiman orang-orang asing di kota praindustrial menegaskan sifat kekotaan kota-kota praindustrial. Di pusat-pusat perdagangan seperti Banten, orang-orang asing mendapatkan tempat tersendiri. Juga di kota-kota Indonesia Timur banyak perkampungan orang Jawa menjadi bagian dari peta kota sampai sekarang. Di Jakarta, perkampungan etnis dalam kota masih dapat dilihat dari nama-nama bagian kota seperti Manggarai, yang sejarahnya dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan Belanda sejak VOC. Berbeda dengan kota-kota pedalaman, kota-kota pantai lebih cepat menunjukkan sifat kotanya. Perkembangan Jakarta atau Medan sebagai kota metropolitan yang menampilkan budaya plural sudah dapat dilihat jauh sebelum kota-kota pedalaman mengalami proses pengotaan. Jika di kota pedalaman, adanya perkampungan Arab atau Cina masih merupakan *enclave* dalam lingkungan kota tradisional, di kota-kota pantai pemukiman orang asing menjadi bagian integral dari kota itu sendiri. Oleh karena itu sejarah kota di Indonesia tidak dimulai pada waktu yang sama. Ancar-ancar bahwa kota muncul sebagai sebuah kategori dalam sejarah Indonesia pada awal abad ke-20 semata-mata didasarkan lebih pada sudut-pandang sosio-kultural daripada ekologis.

Penegasan munculnya kota ditandai pula dengan munculnya kelas-kelas baru yang sama sekali lepas dari pertanian, orang kota yang sebenarnya. Pada awal abad ke-20 kelas baru muncul dari sektor industri dengan ciri-ciri yang berbeda dengan kelas-kelas sosial lain yang ada karena ketergantungannya yang tak terelakkan dari modal para investor, terutama investor asing. Meninggalkan pertanian berarti lepas dari kerangka masyarakat tradisional, ikatan dana, dan budaya pedesaan. Sementara itu dari sektor pendidikan muncul kelas baru golongan berpendidikan, yang meskipun sebagian masuk dalam birokrasi dan karena itu menjadi *priyayi*, tetapi mereka menunjukkan semangat baru sebagai sebuah kelas yang mencari tempat dalam masyarakat. Pertemuan antara golongan kelas menengah lama pribumi, golongan terpelajar, dan golongan pekerja di kota-kota

menjadi tumpuan bagi timbulnya gerakan nasional. Dapat dikatakan bahwa pergerakan nasional adalah hasil budaya kota itu, yaitu ketika kelas-kelas baru memerlukan ideologi baru yang membenarkan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat tradisional dan kolonial.

Pada awal abad ke-20 sebuah kota Indonesia yang ideal akan mempunyai ciri-ciri tersendiri yang sekaligus menunjukkan sejarah kota itu. Pertama, sektor kota tradisional yang ditandai dengan pembagian spatial yang jelas berdasarkan status sosial dan dekatnya kedudukan pemukim dengan *kraton*. Kedua, sektor pedagang asing, terutama pedagang Cina, yang mewarnai kehidupan kota dengan gaya bangunan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial-budaya tersendiri. Ketiga, sektor kolonial dengan benteng dan barak, perkantoran, rumah-rumah, gedung *societeit*, rumah ibadah *vrijmetselarij*. Keempat, sektor kelas menengah pribumi yang kadang-kadang mengelompok dalam kampung-kampung tertentu, seperti Kauman di kota Yogyakarta dan Surakarta, atau di bagian lain. Kelima, sektor imigran yang menampung pendatang-pendatang baru di kota dan berasal dari pedesaan di sekitar. Di sela-sela tempat-tempat ini terdapat gedung-gedung sekolah, pasar, stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya. Kita dapat membayangkan bagaimana pertemuan sosial-budaya dari bermacam sektor kota itu.

II

Permasalahan yang menjadi bidang kajian sejarah kota sesungguhnya sangat luas sekali, seluas sejarah sosial sendiri, sehingga kadang orang menjadi heran apa saja yang tidak termasuk sejarah kota. Keluasan itu mendorong penulisan sejarah kota untuk memikirkan definisi bidangnya. Dari satu segi, sejarah kota dapat dimasukkan ke dalam sejarah lokal; dan dari segi lain dapat dimasukkan ke dalam sejarah lainnya, seperti sejarah ekonomi, politik,

demografi, dan sebagainya. Di semua jenis penulisan itu kota hanyalah merupakan lokasi bagi kajian yang bermacam-macam. Jika semua yang mengenai kota, orang kota, kejadian di kota, dapat menjadi bidang sejarah kota, kiranya semua hal termasuk di dalamnya. Untuk menghindari kekacauan itu, dan untuk menghindarkan diri dari tumpang-tindih dengan bidang sejarah lainnya, orang mencoba membatasi bidang garapan sejarah kota. Dalam perkembangan penulisan sejarah di Amerika, Eric Lampard mencoba mendefinisikan sejarah kota dengan sejarah dari “urbanisasi sebagai proses kemasyarakatan”, bukan sejarah dari “kota”. Hasil dari sejarah kota yang demikian itu kemudian diberi nama *the new urban history*.⁶ Maksud dari pembatasan ini ialah untuk mengembalikan bidang sejarah kota kepada gejala kekotaan yang khas, yang menekankan kekotaan sebagai pusat perhatian sejarah. Pembatasan-pembatasan tentu saja tidak dimaksudkan untuk mempersempit bidang kajian, tetapi sekadar untuk membuatnya jelas dan mengukuhkan keabsahan sejarah kota sebagai suatu jenis penulisan sejarah. Oleh karena sejarah kota di Indonesia masih merupakan bidang yang belum digarap, biarlah sejarah kota dibuat seluas-luasnya, dengan catatan bahwa kekhasan kota hendaklah menjadi permasalahan yang pokok.

Pertama, bidang garapan sejarah kota ialah perkembangan ekologi kota. Ekologi ialah interaksi antara manusia dan alam sekitarnya, dan perubahan ekologi terjadi bila salah satu dari komponen itu mengalami perubahan. Penggunaan tanah kota untuk berbagai keperluan telah mengubah keadaan alamiah lahan ke dalam bermacam sektor. Ada tanah yang disediakan untuk pemukiman penduduk, untuk perdagangan dan industri, untuk keperluan rekreasi, untuk perkantoran, dan sebagainya. Perubahan ekologi manusiawi terjadi sesuai dengan perkembangan penduduk, secara etnis, secara status, secara kelas, secara kultural, sehingga pola pemukiman mengalami pemisahan. Di beberapa kota di Indonesia, pemisahan

⁶ Stephan Thernstrom, "Reflections on the New Urban History", *Daedalus*, 100: Spring 1971, hlm. 359-75.

secara etnis masih sangat tampak sebagai akibat dari politik pemukiman di masa lampau, atau sebagai perkembangan natural dari pemukiman kota sendiri. Pemukiman karena status sudah tampak dalam kota-kota tradisional, demikian juga pemolaan secara kultural, konon tampak dalam pembagian dua pemukiman Hindu dan Buddha di zaman Majapahit — sekalipun yang terakhir ini kita tidak lagi melihat peninggalan yang lengkap. Dalam kota modern pola pembagian pemukiman kebanyakan berdasarkan kelas sosial. Kita melihat makin tergesernya penghuni kota yang lama oleh penghuni baru yang menempati bagian-bagian kota yang strategis. Bangunan fisik kota juga mengalami perubahan sesuai dengan pergeseran kelas itu. Terjadinya kampung-kampung dalam kota dengan ciri-cirinya yang penuh kesedihan disebabkan di antaranya oleh pergeseran pemukiman atas dasar kelas itu. Mengikuti perubahan pola pemukiman dengan sendirinya ialah kondisi lingkungan kota. Lingkungan elite kota akan menunjukkan diri sebagai simbol dari dominasi elite atas orang kebanyakan yang tinggal di tempat-tempat yang tidak menguntungkan. Perubahan ekologi juga terjadi karena kemajuan teknologi. Pembuatan jalan, jembatan, bangunan, saluran air, dan pembangunan perumahan semuanya mengubah lingkungan kota. Kemajuan dalam transportasi, seperti digantikannya kendaraan dengan tenaga manusia oleh kendaraan dengan tenaga hewan, dan digantikannya kendaraan dengan tenaga hewan oleh kendaraan dengan tenaga mesin mempengaruhi kesibukan lalu-lintas yang menjadi salah satu faktor dari ekologi kota. Demikian juga pendirian industri-industri adalah akibat langsung dari kemajuan teknologi itu. Ekologi juga berubah dengan adanya perubahan dalam organisasi masyarakat. Pertumbuhan sistem produksi industri kecil di rumah ke sistem produksi industri besar di pabrik adalah contoh yang jelas dari perubahan organisasi. Demikian juga pasar, warung, toko, *department store*, *shopping centre* adalah bentuk organisasi tukar-menukar ekonomi. Perubahan-perubahan dalam pola tukar-menukar itu tampak dalam bangunan fisik kota. Timbulnya birokrasi,

perbankan, sekolah, semuanya mempengaruhi ekologi kota. Untuk menyebutkan satu contoh saja dalam kajian tentang perkembangan ekologi kota di Amerika ialah buku Sam Bass Warner, Jr., *Streetcar Suburbs: The Process of Growth in Boston* yang meneliti mengenai pengaruh dari perkembangan teknologi transportasi kepada pemencaran pemukiman.⁷ Dengan kemajuan transportasi para pekerja tidak perlu lagi bermukim di dekat pabrik-pabrik tempat mereka bekerja, sehingga kota dapat berkembang keluar.

Kedua, bidang garapan sejarah kota ialah transformasi sosial ekonomis. Industrialisasi dan urbanisasi adalah bagian dari perubahan sosial. Sebagai lembaga masyarakat, dinamika sosial kota berbeda dengan kota praindustrial. Ungkapan, *Desa mawa cara, negara mawa tata*, dalam bahasa Jawa dapat diartikan bahwa masyarakat kota praindustrial atau tradisional sebagai pusat kerajaan mempunyai aturan-aturan tersendiri berbeda dengan masyarakat desa. Perwujudan yang jelas dari konsep *negara* ialah *kraton* dan lingkungan kota-negara yang secara sosial, ekonomis, dan kultural memisahkan diri dengan desa. Sistem status yang ketat mewarnai pergaulan di kota tradisional, karena dekatnya masyarakat dengan raja menyebabkan pengaruh kesaktian raja terasa. Aturan-aturan yang keras dikenakan ketika orang berada di sekitar istana, dalam pakaian, sopan-santun, tutur-kata, yang semuanya menunjukkan status masing-masing dalam tata kerajaan. Dalam kota tradisional terdapat simbol-simbol dari kekuasaan raja, diwujudkan dalam bangunan fisik, upacara-upacara, dan hak-hak istimewa seperti *sengkeran*, *klangenan*, *pesanggrahan*. Kraton juga merupakan perwujudan dari birokrasi tradisional yang mengatur kekuasaan ekonomi dan sosial, tempat surplus produksi dibagikan kepada pembantu-pembantu raja. Berbeda dengan kota tradisional-praindustrial, kota-kota modern-industrial ialah pengelompokkan keluarga ke dalam *nuclear family*, pembagian penduduk berdasarkan kelas sosial dengan mobilitas sosial

⁷ Sam Bass Warner, Jr., *Streetcar Suburbs: The Process of Growth in Boston* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962).

yang kurang lebih lentur, ditinggalkannya cara memproduksi manusia oleh mesin yang memproduksi barang-barang secara massal dengan pelayanan dan kualitas yang baik, organisasi produksi dipegang oleh unit-unit ekonomi yang cenderung besar dengan standarisasi dalam harga, timbangan, dan takaran, dan adanya birokrasi yang diangkat secara rasional. Barangkali kota-kota di Indonesia belum dapat dimasukkan ke dalam tipe ideal itu, apalagi kota yang relatif kecil. Namun adanya golongan pengusaha di kota yang menjadi penggerak bagi kemajuan sosial-ekonomi kota sejak awal abad ke-20 tidak diragukan lagi adanya. Clifford Geertz telah mempelajari sejarah sosial-ekonomi kota dalam dua bukunya, *Peddlers and Princes*⁸ dan *The Social History of an Indonesian Town*,⁹ yang dapat menjadi contoh bagi usaha-usaha penulisan tentang transformasi masyarakat kota.¹⁰

Ketiga, bidang garapan sejarah kota ialah sistem sosial. Kota sebagai sebuah sistem sosial menunjukkan kekayaan yang tak pernah habis sebagai bidang kajian. Kegiatan masyarakat kota, seperti kegiatan domestik, agama, rekreasi, ekonomis, politis, kultural, dan hubungan antar warga secara struktural antara lembaga-lembaga masyarakat, hubungan kategorikal antara kelompok-kelompok etnis, status dan kelas, dan bahkan hubungan personal antara sesama warga kota dapat dijadikan bahan kajian. Mungkin untuk meneliti tema ini bahan-bahan dokumenter tidak mencukupi, tetapi jika mengingat banyak tulisan-tulisan di surat-kabar, majalah, dan buku-buku sastra kiranya gambaran mengenai kota dapat menjadi lengkap. Juga kemungkinan mengadakan penggalian sumber melalui sejarah lisan akan sangat berguna. Setidak-tidaknya mengenai hubungan sosial di kota sejak awal abad ke-20 masih banyak sumber yang belum digarap,

8 Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns* (Chicago: The University of Chicago Press, 1963).

9 Clifford Geertz, *The Social History of an Indonesian Town* (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1965).

10 Lihat bahasan singkat mengenai kedua buku itu dalam Koentjaraningrat, *Anthropology in Indonesia: A Bibliographical Review* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975), hlm. 204-205.

lebih lagi masih ada kemungkinan sumber lisan. Dari laporan-laporan pejabat-pejabat Belanda kita dapat tahu kehidupan kraton dan kota tradisional, juga hubungan antara para bangsawan, bupati, dan pejabat dengan Belanda. Demikian pula dari novel-novel sastra Belanda-Indonesia tampak selain kehidupan para keluarga Belanda, juga hubungan mereka dengan para *priyayi* pribumi. Kota-kota karesidenan di zaman sebelum perang banyak menunjukkan aktivitas sosial dan kultural yang menandainya sebagai sebuah kota kolonial. Rekonstruksi kehidupan kota, dari kota sebesar Kupang sampai kota sebesar Jakarta sebelum kemerdekaan akan mengingatkan banyak hal mengenai *tempo doeloe* yang banyak penggemarnya di kalangan generasi tua, karena nostalgia dan romantisme. Di satu pihak, sejarah yang demikian akan mempunyai nilai estetik, dan di lain pihak nilai akademis. Barangkali sebagai contoh dapat disebutkan buku Kenneth A. Lockridge, *A New England Town: The First Hundred Years*,¹¹ yang mengungkapkan perkembangan kota sebagai sebuah lembaga demokrasi di Amerika Serikat. Buku ini mempunyai banyak keuntungan, karena sumber-sumber penulisan cukup banyak, bahkan sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Sebuah kota kecil di Massachusetts, Dedham, diteliti sejarahnya dari 1636 sampai 1736, dan ditunjukkan bagaimana kota itu berevolusi dari sebuah kota utopia dari kaum Puritan menjadi sebuah kota provinsial, termasuk di dalamnya perkembangan birokrasi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat. Sungguhpun untuk Indonesia penulisan semacam ini tidak mudah, tetapi masih bisa dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian yang tepat.

Keempat, bidang garapan sejarah kota ialah problem sosial. Perkembangan ekologi, termasuk di dalamnya masalah kepadatan penduduk, mobilitas horisontal, dan heterogenitas dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. Di antara masalah itu ialah disparitas dan pemisahan pemukiman secara ekonomis dan sosial, ketimpangan

¹¹ Kenneth A. Lockridge, *A New England Town: The First Hundred Years* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1970).

demografis, dan masalah lingkungan fisik, sosial, dan psikologis. Mengenai yang terakhir ini hampir-hampir perhatian peneliti tidak pernah ditujukan. Seperti diketahui, kepadatan penduduk semacam yang terjadi di setiap kampung dengan nama Kauman di kota mana saja di Jawa selalu terjadi. Lingkungan kampung dalam kota yang sepadat itu tentu saja menimbulkan suasana psikologis tertentu bagi penghuninya. Dengan membandingkan perkembangan lingkungan fisik dan perkembangan lingkungan sosial-manusiawi kita akan mendapatkan bahwa ada perbedaan psikologis antara generasi tua dan muda di kampung yang sama. Kampung Kauman di Yogyakarta yang melahirkan seorang KH Ahmad Dahlan di masa lampau tentu berbeda secara psikologi lingkungannya dengan kampung yang sama sekarang.¹² Dengan sejarah lisah kiranya masalah ini akan dapat dikerjakan. Masalah-masalah sosial apakah yang dapat timbul dari lingkungan kota? Jelas bahwa adanya kampung-kampung dengan standar lingkungan yang rendah terdapat di mana saja di kota-kota Indonesia. Kapan perkampungan *slum* itu mulai ada? Masalah sosial apa yang ditimbulkan? Selain masalah yang termasuk dalam kategori kemasyarakatan tentu masih banyak lagi masalah ekologis, seperti soal pembuangan air, sampah, kepadatan lalu-lintas, yang semuanya dapat menjadi bidang kajian sejarah. Mengapa kota-kota gagal untuk menyenangkan warganya? Kegagalan warga kota untuk memanusiawikan kota tampak dalam perkembangan kota yang tak terkendalikan lagi. Dalam penelitian sejarah tentang kota Philadelphia, Sam Bass Warner, Jr., *The Private City*, meletakkan kesalahan pada privatisme orang Amerika yang selalu ingin mengejar kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.¹³

Sejalan dengan transformasi sosial-ekonomis terdapat problem sosial yang sangat menarik. Pergeseran antara kelas-kelas sosial dalam

12 Lihat skripsi Ahmad Adaby Darban, "Sejarah Kauman Yogyakarta Tahun 1900-1950: Suatu Studi Terhadap Perubahan Sosial" (Universitas Gadjah Mada, 1980).

13 Bass Warner, Jr., *The Private City: Philadelphia in Three Periods of Its Growth* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973).

masyarakat merupakan contoh yang mudah. Ketika golongan bangsawan mengalami kemunduran, baik karena menurunnya pendapatan secara natural maupun karena reformasi administrasi, proses pemiskinan bangsawan tidak lagi terhindarkan. Di Madura, misalnya, kasus kejahatan sosial dari yang ringan sampai yang memalukan muncul dalam laporan-laporan pemerintah kolonial pada awal abad ke-20 ketika golongan bangsawan tidak lagi memegang pemerintahan. Adanya kerusuhan di kota akibat bermacam-macam ketegangan antara orang asli dengan pendatang antara orang pribumi dengan orang asing, dan antara kampung satu dengan lainnya banyak dijumpai. Demikian juga berita-berita di surat kabar sensasional mengenai perkelahian antara kelompok-kelompok bawah-tanah sering kita dengar. Masalah prostitusi, pengangguran, pengedaran obat-obatan terlarang, dan sejenisnya, yang sumber-sumbernya dapat dicari dalam arsip kepolisian dan badan lain yang mengurus, sama sekali belum digarap oleh sejarawan. Tindakan-tindakan kekerasan banyak terjadi di kota, baik secara individual maupun berkelompok. Dalam perkembangan terakhir gejala kekerasan itu semakin menonjol, dan hanya sebuah sejarah kriminalitas akan dapat mengungkapkan itu. Sebuah penulisan kriminalitas dari tangan sejarawan tentu akan lain bentuknya dengan penulisan dari polisi atau krimonologis. Di Amerika penelitian sejarah kriminalitas sudah banyak dikerjakan.¹⁴

Demikian pula terjadi problem sosial dalam sistem sosial. Masalah yang banyak menjadi perhatian sejarawan, terutama sejarawan Amerika, ialah kekuasaan seorang *boss* di kota-kota besar. Seorang *boss* biasanya menjadi tulang punggung bagi sistem kepartaian di kota itu, menjadi pelopor bagi pembangunan kota, menjadi pemberi pelindung dari suatu tindak korupsi atau kejahatan yang terorganisir.

14 Sebagai contoh, lihat Humbert S. Nelli, "The Italians and Organized Crime", dalam Alexander B. Callow, Jr. (ed.), *American Urban History: An Interpretive Reader with Commentaries* (New York: Oxford University Press, 1973).

Lyle W. Dersott, misalnya, menulis *The Pendergast Machine*¹⁵ yang mengungkapkan boss Pendergast yang menguasai Kansas City, Missouri, dan berhasil membangun kota itu. Ia juga yang berhasil memunculkan Harry Truman dalam politik. Akhir riwayat dari keluarga Pendergast sama dengan akhir riwayat banyak boss yang lain, yaitu masuk penjara karena adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem kota. Barangkali karena untuk Indonesia tidak banyak yang melihat bahwa di setiap kota sebenarnya selalu ada semacam boss atau *cukong* yang dalam banyak hal mirip dengan kegiatan boss di Amerika, tentu sangat sulit untuk mengadakan penelitian mengenai percukongan itu, karena sifatnya yang rahasia. Namun dengan terbukanya berkas-berkas pengadilan, laporan pajak, dan kesaksian-kesaksian akan banyak yang dapat ditulis.

Kelima, bidang garapan sejarah kota ialah mobilitas sosial. Kita sudah menyaksikan adanya kemajuan dari golongan kelas menengah pribumi pada awal abad ke-20 ini, tetapi tidak seorang sejarawan pun pernah meneliti mengenai bangkitnya kelas itu secara kuantitatif. Andaikata catatan-catatan tentang pendapatan — yang dapat diukur dari banyaknya pajak yang dibayarkan — tersedia, catatan dalam lalu-lintas uang pada Bank, catatan mengenai pekerjaan warga kota, dan hasil-hasil dari sensus penduduk kota dapat diperoleh, tentu akan banyak yang dapat diungkapkan. Sementara catatan kuantitatif tidak mudah didapat, perkembangan kelas menengah tampak dalam gaya-hidup. Di Kota Gede, Yogyakarta, misalnya, bangunan-bangunan yang didirikan pada awal abad ini menunjukkan naiknya kaum pedagang pribumi. Demikian juga di kota-kota lain selalu ada kelompok pribumi yang secara bersama seluruh kampung, seperti Laweyan di Surakarta, mengalami mobilitas sosial. Indikator dari mobilitas sosial kadang-kadang dapat dilihat dalam jumlah *haji* yang ada di suatu tempat. Dalam pernyataan budaya, golongan kelas menengah juga mengalami perkembangan. Dapat dibayangkan bahwa kelas menengah terpelajar

15 Lyle W. Dersott, *The Pendergast Machine* (New York: Oxford University Press, 1968).

atau kelas menengah *santri* mempunyai pernyataan budaya sendiri-sendiri. Kalau masih mungkin didapatkan, daftar pelanggan majalah dan surat kabar akan memberi petunjuk mengenai mobilitas sosial. Dalam keadaan semuanya tidak tersedia, untuk meneliti mobilitas sosial menyusut tiga generasi ke belakang kiranya dapat dikerjakan dengan mengedarkan kuisioner. Tentu saja ini menyangkut masalah metode penelitian sosiologis yang cukup rumit. Kesulitan semacam ini tidak terdapat di Amerika. Di negara yang sudah maju seperti itu, setiap kota mempunyai *city directory* yang merupakan buku induk warga kota yang memuat semua data yang diperlukan untuk setiap orang dalam kota. Jika seseorang warga kota pindah, selalu ada keterangan di dalamnya. Dan mobilitas sosial tiap-tiap penduduk, termasuk pendapatan dan pekerjaannya, termasuk dalam buku itu.

Demikianlah Stephan Thernstrom menulis *Poverty and Progress: Social Mobility in a Nineteenth Century City*¹⁶ Dengan menggunakan penghitungan melalui komputer, mobilitas sosial dari sejumlah besar sampel dapat dihitung. Sekalipun untuk Indonesia rupanya tidak mungkin semacam ini dikerjakan, tetapi tidak tertutup kemungkinan pendekatan lainnya.

Kiranya dengan peralatan teoretis dan metodologis yang memadai, kekurangan-kekurangan dalam sumber-sumber sejarah akan dapat di atasi. Sejarah kota sungguh merupakan garis depan dari penulisan sejarah nasional kita.

16 Stephan Thernstrom, *Poverty and Progress: Social Mobility in a Nineteenth Century City* (New York: Athonoum, 1970).

SEJARAH PEDESAAN

PENGERTIAN

Pengertian sejarah pedesaan barangkali menimbulkan banyak pertanyaan. Oleh karena hampir semua peristiwa sejarah di Indonesia terjadi di daerah pedesaan, apakah masih perlu kita membicarakan sejarah pedesaan sebagai pengkhususan dalam penelitian sejarah? Kiranya keraguan semacam ini dapat dijelaskan dengan menunjuk adanya pengkhususan ilmu seperti *rural sociology* dalam sosiologi yang ternyata juga secara sah berdiri sebagai bagian dari disiplin kelompoknya. Namun untuk sejarah, penjelasan mengenai pengertian dan cakupannya masih perlu diberikan, karena sejarah juga telah mempunyai banyak bidang pengkhususan. Diantaranya, dan yang terdekat dengan sejarah pedesaan, ialah sejarah sosial dan sejarah lokal.¹ Antara sejarah sosial, sejarah lokal, dan sejarah pedesaan tentu saja saling berbaur dalam pengertian, satuan penelitian, dan permasalahannya.

Pertama, sejarah pedesaan ialah sejarah dalam arti yang seluas-luasnya. *History is above all a science of change*, demikian kata Marc

¹ Untuk penjelasan tentang bermacam-macam pendekatan sejarah, lihat, Felix Gilbert and Stephen R. Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W. W. Norton Company, Inc., 1972); khusus untuk sejarah lokal, lihat juga Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1979).

Bloch.² Di sini dimensi waktu menjadi sangat penting, sebab perubahan ialah sebuah proses dalam waktu. Kronologi masih tetap menjadi ciri pokok dari penelitian sejarah; dengan kata lain, aspek prosedural dari sejarahlah yang membedakannya dari ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi dan antropologi. Selanjutnya perubahan berarti perpindahan dari sebuah keadaan menuju ke keadaan yang lain. Keadaan mengandung makna aspek struktural dari sejarah, yang menunjukkan bahwa pada suatu momen tertentu terdapat sejumlah kejadian yang berhubungan secara struktural dan membentuk sebuah keadaan. Aspek struktural inilah yang tampak dalam tulisan D.H. Burger, *Rapport over de desa Pekalongan in 1869 en 1928*, dan *Desa Ngablak (Regentschap Pati) in 1869 en 1928*.³ Kedua tulisan itu mengambil momen-momen dalam sejarah dengan maksud membandingkan keadaan sejarah pada dua waktu yang berlainan. Maksudnya tentu saja untuk melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Andaikata data-data sejarah memungkinkan tentulah aspek kronologis perubahan-perubahan itu dari waktu ke waktu dapat diungkapkan sebagai sebuah proses yang bertahap, dan tidak saja sebagai perbandingan antara dua momen yang berjarak waktu.

Kedua, sejarah pedesaan ialah sejarah yang secara khusus meneliti tentang desa atau pedesaan, masyarakat petani, dan ekonomi pertanian. Desa sebagai kesatuan teritorial dan administratif yang terkecil di Indonesia sudah banyak mendapat perhatian dari para peneliti di luar ilmu sejarah. *Villages in Indonesia* suntingan Koentjaraningrat merupakan contoh terbaik di bidang antropologi.⁴ Demikian juga hasil hasil riset dan survei lembaga-lembaga swasta

2 Marc Bloch, *French Rural History: An Essay on Its Basic Characteristics* (Berkeley: University of California Press, 1970), hlm. xxv.

3 D. H. Burger, *Rapport over de desa Pekalongan in 1869 en 1928* (Weltervreden: Folif, 1928), lihat juga terjemahan Indonesia *Laporan Mengenai Desa Pekalongan dalam Tahun 1869 dan 1928* (Jakarta Bhratara, 1971); *Desa Ngablak Regentschap Pati in 1869 en 1928*, dalam *oloniale Studien*, 17: 1933, dimuat dalam Taufik, 1979; hlm. 129-144.

4 Koentjaraningrat (ed.), *Villages in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1967).

dan pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.⁵ Namun hasil-hasil itu, kebanyakan sedikit saja menggunakan pendekatan sejarah, dalam arti melihat proses perubahan-perubahan sosial dalam kurun waktu. Semuanya masih merupakan hasil penelitian sebuah momen tertentu. Dengan melihat perubahan dari sudut pandang sejarah, seperti perkembangan demografi, laju proses monetisasi, laju proses proletarianisasi, sejarawan pengamat pedesaan kiranya akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai prospek pembangunan pedesaan. Misalnya, bukan saja penelitian bagaimana cara untuk mengenalkan pembaharuan teknologi dan kelembagaan di pedesaan di masa depan. Dari penelitian mikro mengenai desa tertentu dan dari penelitian makro mengenai pedesaan pada umumnya dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kecenderungan perkembangan masyarakat dalam jangka panjang, justru dengan harapan pragmatis bahwa sejarah dapat menjadi petunjuk dalam perencanaan, barangkali menyumbang melalui “ramalan” sejarah. Ilmu sejarah atau sejarah pedesaan khususnya, dapat menjadi bagian dari *organized intelligence* sumber dari perencanaan perubahan-perubahan daerah pedesaan.

Selanjutnya sejarah pedesaan mempunyai garapan masyarakat petani. Untuk membedakan sejarah pedesaan yang menggarap masyarakat petani dengan sejarah sosial, sejarah pedesaan harus selalu dapat mengembalikan permasalahan sejarah kepada desa dan pedesaan, atau kepada ekonomi agraria pedesaan. Dalam hal ini buku Sartono Kartodirjo, *Peasants Revolt of Banten in 1888*,⁶ barangkali lebih merupakan sejarah sosial daripada sejarah pedesaan, sebab jangkauan garapannya meliputi juga masalah politik kolonial, hal yang termasuk dalam lingkup supra-desa. Demikian juga masalah ideologi milenarianisme agak sulit dimasukkan dalam sejarah

5 Untuk daftar sosiologis dan antropologis tentang desa, lihat Koentjaraningrat, *Anthropology in Indonesia* ('s Gravenhagen Martinus Nijhoff, 1975).

6 Sartono Kartodirdjo, *Peasants Revolt of Banten in 1888. Its Conditions, Course and Sequel. A Case Study of Social Movements in Indonesia* ('s Gravenhagen Martinus Nijhoff, 1966).

pedesaan, sekalipun pelakunya adalah petani di desa tetapi jangkauannya tidak dapat semata-mata dikembalikan kepada susunan masyarakat desa dan ekonomi agraris. Dengan demikian pembatasan masalahnya harus kembali kepada masyarakat petani di dalam atau di lingkungan pedesaan, dengan desa atau pedesaan sebagai tolok ukurnya.

Ekonomi agraris tentu saja menjadi bagian dari sejarah pedesaan. Perubahan-perubahan yang terjadi di desa dan di masyarakat petani biasanya menyangkut perubahan ekonomi dari sebuah ekonomi *subsistence* ke ekonomi *exchange*. Dalam hal ini kelompok-kelompok sosial di desa, seperti pamong praja, pedagang, dan buruh dapat dimasukkan ke dalam kategori ekonomi pertanian, sepanjang masih berbasiskan kepada sumber-sumber pertanian. Sebuah perkebunan *rural industrial estate*, atau *raneh* yang berada di desa dan mempunyai pengaruh dalam kehidupan ekonomi desa, dapat dimasukkan ke dalam sejarah pedesaan yang dimaksud di sini. Sepanjang *exchange economy* itu mempengaruhi desa dan petani, sejarah pedesaan dapat pula menjadikannya sebagai bidang garapan, tentu saja dengan penekanan kepada lingkungan desa dan petani. Contoh yang patut disebutkan di sini ialah perubahan dalam hubungan kerja pertanian di desa sebagai akibat masuknya lembaga pesantren di desa desa di Jawa Timur selatan, seperti pada tulisan G.H. van der Kolff tentang timbulnya sistem *ngedok* di pedesaan.⁷ Demikian juga sejarah tentang *particuliere landrijen* di beberapa tempat dapat menjadi bidang garapan sejarah pedesaan.

SEJARAH PENELITIAN

Desa atau pedesaan sebagai bidang penelitian tentu dapat dimasukkan dalam satuan tertentu. Dalam sejarah pedesaan, desa

7 G. H. van der Kolff, "De Historische Ontwikkeling van de Arbeidsverhoudingen bij de Rijscultuur in een Afgelegen Streek op Java: Voorlopige Resultaten van Platselijk Onderzoek", *oikscredietwezen*, 1937, hlm. 3 70.

dapat dimasukkan dalam satuan-satuan: (1) ekosistem, (2) geografis, (3) ekonomis, dan (4) budaya. Dalam tiap-tiap satuan itu desa mempunyai ciri-ciri natural yang tak terdapat dalam satuan lain. Dengan adanya hubungan antara berbagai satuan tentu saja terdapat saling mempengaruhi, tetapi selalu pengaruh-pengaruh itu dapat dilihat dengan jelas dari mana datangnya.

Satuan ekosistem ialah hasil perpaduan antara aktivitas manusia, keadaan biologis dan proses fisik. Clifford Geertz dalam *Agricultural Involution* membedakan dua macam ekosistem di Indonesia, yaitu ekosistem ladang di Indonesia luar dan ekosistem sawah di Indonesia dalam.⁸ Dalam deretan ekosistem masih dapat ditambahkan ekosistem sagu di Indonesia Timur, dan ekosistem *tegalan* di Madura.⁹ Dari penelitian G.J.A. Terra, *Some Sociological Aspects of Agriculture in S.E. Asia*,¹⁰ ditunjukkan bahwa organisasi sosial dan pola tingkah-laku masyarakat dipengaruhi oleh ekosistemnya. Hal ini juga disinggung oleh W.F. Wertheim ketika menguraikan perbedaan antara masyarakat dengan sistem perladangan dengan masyarakat persawahan.¹¹ Seperti diketahui, di daerah perladangan pembentukan suku-suku merupakan hasil-hasil natural dari teknik perladangan dengan *slash and burn* atau *shifting agriculture*.¹² Gejala ini terdapat pada perladangan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah sagu di Indonesia Timur. Daerah persawahan, sebaliknya, tidak menunjukkan ikatan genealogis dalam suku-suku, tetapi lebih condong kepada ikatan desa. Ini terjadi karena pembukaan hutan, pembakaran pohon-pohon, dan pekerjaan perladangan adalah kerja

8 Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1974).

9 Untuk ekosistem *tegalan* dan dampaknya kepada susunan masyarakat dan sejarah, lihat Kuntowijoyo, "Social Change in an Agrarian Society: Madura, 1850 1940" (Disertasi Ph. D, Columbia University, 1980).

10 G. J. A. Terra, "Some Sociological Aspects of Agriculture in S. E. Asia", *Indonesia*, VI 1952 53, hlm. 297 315, 437 463.

11 W. F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* (The Hague: van Hoove, 1956), Chapter I, *passim*.

12 Baca J. L. Spencer, *Shifting Cultivation in Southeastern Asia*. (Barkleys University of California Press, 1977).

keluarga besar, sedangkan pekerjaan sawah dengan pengairannya ialah kerja sama antar desa tempat sumber dan alirannya lewat. Berbeda dengan daerah ladang dan sawah, daerah tegalan menunjukkan lemahnya baik ikatan keluarga besar maupun ikatan desa. Sebab utamanya ialah tidak adanya keharusan kerja sama dalam pertanian dan pengairan, karena tegalan merupakan pertanian lahan kering, dan satuan tegal berdiri sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada keperluan untuk membentuk sebuah desa. Di Madura hanya upacara-upacara keagamaan dan adat yang menumbuhkan kerja sama sosial di masa lampau. Sejarah dari desa-desa di masing-masing satuan ekosistem itu pastilah berlainan ketika mereka mengalami perubahan-perubahan.

Dalam satuan-satuan geografis terdapat berbagai macam hubungan antar pedesaan. Satuan geografis seperti perbukitan, daerah aliran sungai, pantai, teluk, selat, dan pedalaman desa desa mempunyai hubungan-hubungan tertentu satu dengan lainnya. Hubungan antara pedesaan di perbukitan dengan di lembah, misalnya, dapat menjadi satuan penelitian, sebagaimana dalam bidang antropologi telah dikerjakan oleh E. Leach, *Political Systems of Highland Burma*.¹³ Sejarah pedesaan, dengan menitikberatkan penelitiannya pada perubahan-perubahan yang terjadi di pedesaan, misalnya, dapat mempelajari hubungan sosial, ekonomi, demografis antara desa-desa di sekitar daerah tandus di bagian selatan pulau Jawa dengan desa-desa di lembah sekitarnya. Demikian juga mengenai hubungan antara daerah selat Madura, yaitu antara pulau Madura dengan daerah daerah pedesaan di Jawa Timur, ternyata kaya dengan kemungkinan-kemungkinan. Masuknya budaya dan adat-istiadat Madura di Jawa Timur, misalnya, telah menimbulkan pemindahan budaya rakyat dari daratan Madura ke Jawa, sehingga terjadi percaturan antara adat Madura dengan Adat Osing di Jawa Timur.¹⁴

13 E. Leach, *Political Systems of Highland Burma* (Cambridge: Harvard University Press, 1954).

14 Raden Slamet Prajoedi Atmosoedirdjo, *Urgensi kende Adatrechtelijke Studie van Oost-avaansche Madoerezen en Oesinger* (Amsterdam: Studentendrukkerij "Poortpers", N. V., 1952).

Dekat pengertiannya dengan satuan geografis ialah satuan ekonomis. Satuan ekonomis dapat atau tidak menjadi bagian dari satuan geografis, dan sebaliknya. Desa-desa di Banten ternyata mempunyai hubungan ekonomis dengan desa-desa di daerah Lampung, dalam arti bahwa banyak orang Banten bekerja di desa-desa di Lampung. Dalam hal ini, Selat Sunda dapat menjadi sebuah satuan ekonomis dan sekaligus satuan geografis. Desa-desa di Jawa di masa lampau mempunyai pembagian *mancapat* dan *mancalima* yang di antaranya dimaksudkan untuk pembagian hari-hari pasar di antara satuan ekonomis sebelum ada pasar yang menetap seperti terjadinya warung dan toko permanen yang menggantikan pasar, yang hanya bertemu pada hari-hari tertentu. Satuan ekonomis ini pastilah merupakan lembaga yang penting di pedesaan dengan lembaga ekonomi subsistensi, yang penukaran barang-barangnya hanya terjadi dalam bentuk skala kecil. Lebih lagi di suku suku yang tinggal di pedalaman. Sebuah satuan ekonomis yang mencukupi kebutuhan diri akan berubah bila *commercial crops* masuk ke pedesaan. Masih perlu dikaji, misalnya, apakah perkawinan sepupu silang asimetris di beberapa suku sebenarnya ada hubungan dengan sebuah sistem penukaran ekonomis. Jika demikian halnya, dengan masuknya ekonomi penukaran ke pedesaan sistem perkawinan demikian mengalami perubahan, lalu bagaimana akibatnya pada organisasi desa, masyarakat petani, dan ekonomi pertaniannya. Hanya dengan penelitian sejarah pedesaan, transformasi sosial itu dapat diterangkan secara empiris dan faktual.

Dalam hubungan dengan persoalan adat, satuan penelitian pedesaan dapat berupa daerah hukum adat atau suatu *cultural area*. Di Indonesia kita mengenal setidaknya sembilan belas hukum adat, seperti dikemukakan oleh C. van Vollenhoven.¹⁵ Masing-masing daerah hukum adat mempunyai sistem sosio-ekonomis dan budaya tersendiri. Dengan mengambil *locus* penelitian sebuah satuan daerah

15 Lihat Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (New York: Institut of Pacific Relation, 1946).

hukum adat, kita dapat melakukan sebuah penelitian yang mendalam mengenai transformasi sosial ekonomi dan kultural di dalamnya. Kiranya dapat disebut di sini sebuah buku lama suntingan B.J.O. Schrieke, *The Effect of Western Influence on Native Civilization in the Malay Archipelago*.¹⁶

Setelah melihat kemungkinan-kemungkinan satuan penelitian, baik mengenai desa tertentu atau mengenai pedesaan secara lebih luas dari berbagai satuan penelitian, kiranya kita dapat menuju kepada penelitian perbandingan dengan menyilangkan berbagai satuan penelitian. Selanjutnya perlu penajaman pada gambaran prosesus tentang struktur masing-masing satuan penelitian dalam berbagai periode yang berbeda, katakanlah periode prakolonial, kolonial, dan nasional. Dengan demikian penelitian tentang struktur dan evolusi sosial, ekonomi dan kultural pedesaan di Indonesia akan memperkaya khasanah sejarah.

PERMASALAHAN

Memberikan pokok-pokok permasalahan sejarah pedesaan sebenarnya sama saja dengan menguraikan sejarah pada umumnya. Dengan pengertian bahwa sejarah pedesaan ialah sejarah tentang apa saja dengan bidang garapan desa, masyarakat petani, dan ekonomi pertanian, di bawah ini akan dicoba menunjukkan permasalahan-permasalahan. Dengan catatan bahwa sejarah ialah ilmu tentang perubahan-perubahan, kita dapat menggolongkan masalah ke dalam berbagai kelompok: (1) bangunan fisik, (2) satuan sosial, (3) lembaga sosial, (4) hubungan sosial, dan (5) gejala psiko-kultural.

Sejarah bangunan fisik pedesaan belum banyak mendapat perhatian dari sejarawan, sekalipun dalam sumber-sumber tradisional dan Belanda banyak keterangan mengenai pedesaan. Sejarah

16 B. J. O. Schrieke, (ed), *The Effect of Western Influences on Native Civilization in the Malay Archipelago* (Batavia: G. Holff Co., 1929).

pedesaan di sini dapat berupa monografi tentang sebuah satuan penelitian atau khusus mengenai satu desa tertentu, kalau memang sumber-sumbernya memungkinkan. Perubahan ekologi, pemukiman, jalur komunikasi, dan penduduk dapat termasuk kelompok ini. Pembangunan saluran irigasi, waduk-waduk, perkebunan, dan akibat-akibatnya menjadi masalah yang menarik, terutama setelah Geertz menulis tentang involusi pertanian. Sekalipun tesis Geertz ini sekarang telah banyak dibantah oleh penemuan data-data baru, seperti dikerjakan oleh R.E. Elson tentang Pasuruhan,¹⁷ dan akan lebih banyak lagi yang meragukannya, kiranya sejarah ekologis kemudian telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Pembukaan perkebunan di daerah-daerah Kejawaen pada pertengahan kedua abad ke-19 dapat menjadi bahan kajian sejarah pedesaan, bila permasalahan selalu dikembalikan kepada desa dan bukan kepada gejala-gejala supra-desa. Perkenalan jenis tanaman baru di desa seperti kopi, tembakau, dan gula telah mengubah tata ekologis desa, yang pada gilirannya akan mengubah juga masyarakat desa secara menyeluruh. Data-data sejarah menunjukkan bahwa dengan masuknya perkebunan gula, pola pemukiman desa dapat berubah. Desa dapat mengalami reorganisasi, sehingga misalnya desa yang semula terpecah (*fragmented*) dapat menjadi desa yang memusat (*clustered*). Perubahan pemukiman, seperti dalam pembangunan daerah transmigrasi, dengan jelas merupakan perubahan ekologi yang disengaja. Tulisan Pelzer, *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropic*, dapat menjadi contoh perubahan pemukiman demikian.¹⁸ Kemajuan dalam jalur komunikasi, dengan pembuatan jalan-jalan baru, seperti peletakan rel-rel kereta api dan jalan raya, pengenakan alat-alat transportasi baru, merupakan dorongan untuk suatu perubahan sosial. Pembukaan jalur komunikasi ini biasanya merupakan

17 R. E. Elson, "Sugar and Peasants: The Social Impact of Western Sugar Industry on the Peasantry of the Pasuruan Area, East Java, From the Cultivation System to the Great Depression" (Disertasi Ph. D. Monash University, 1979).

18 K. J. Pelzer, *Pioneer Settlement in Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia* (New York: American Geographical Society, 1945).

kelanjutan dari pembukaan perkebunan perkebunan, selain semata-mata dimaksudkan sebagai pelancar hubungan. Ternyata sarana komunikasi mengubah susunan sosial ekonomi dana. Masuknya sarana kereta api dan kendaraan bermotor di Madura misalnya telah menyebabkan mundurnya populasi ternak, terutama kuda tunggang dan beban. Sejarah transportasi belum ditulis, demikian pula sejarah pedesaan yang berhubungan dengan perkembangan transportasi. Pembukaan jalur baru jalan raya menggantikan transportasi sungai tentu mengakibatkan mati dan tumbuhnya desa-desa di sekitar sungai dan jalan raya. Demikian pula perkembangan demografis dari suatu satuan pedesaan, sangat dipengaruhi oleh struktur fisik daerah itu. Menyusutnya lahan pertanian karena pemukiman penduduk dan pertambahan penduduk sendiri merupakan sebab dari perpindahan penduduk; begitu pula sebaliknya, pembukaan tanah-tanah pertanian baru seperti di ujung timur Jawa Timur menyebabkan perpindahan penduduk dan pemukiman secara besar-besaran pada abad ke-19. Pendekatan sejarah fisik dari desa-desa di Indonesia belum mendapat perhatian.

Satuan sosial di lingkungan desa dan masyarakat petani sangat kaya dengan permasalahan sejarah. Keluarga, kesatuan desa, kelas sosial, kelompok agama dan budaya, dan kelompok etnis, termasuk di sini. Sejarah keluarga, baik sebagai lembaga maupun sebagai kesatuan yang kongkret, belum mendapat perhatian. Di Perancis, sejarah keluarga sudah mendapat kedudukan yang penting. Tulisan Philippe Aries, *Centuries of Childhood*,¹⁹ dan David Hunt, *Parents & Children in History*,²⁰ dapat menjadi contoh bagaimana sejarah keluarga ditulis. Dalam sejarah keluarga dapat dibicarakan tentang sosialisasi, pendidikan seks, permainan, kebudayaan anak, jenjang-jenjang umur, hubungan antar remaja, perkawinan, dan sistem

19 Philippe Aries, *Centuries of Childhoods: A Social History of Family Life* (New York: Alfred A. Knopf, 1965).

20 David Hunt, *Parents & Children in History: The Psychology of Family Life in Early Modern France* (New York: Harper Row, Publishers, 1972).

keluarga. Sedangkan keluarga sebagai sebuah kesatuan yang kongkret dapat dipelajari mengenai perkembangan dan penyebaran demografisnya, mobilitas sosial antar generasi di lingkungan sebuah keluarga besar, pertengkaran antar keluarga. Barangkali penulisan mengenai keluarga yang kongkret ini hanya dimungkinkan jika ada catatan keluarga atau metode sejarah lisan.

Desa sebagai sebuah kesatuan sosial, teritorial, dan administratif *per se* juga belum diteliti secara khusus. Perang desa, sistem pemerintahan desa, sistem sosial desa, sistem keamanan desa, pasar desa, semuanya dapat diteliti lewat hasil-hasil sastra tradisional, aturan aturan (seperti pada *angger*), tradisi lisan, serta laporan-laporan lain. Mengenai transformasi desa sebagai akibat dari masuknya kapitalisme di pedesaan pada abad ke-19 yang telah dikemukakan secara garis besar perubahan-perubahan strukturnya oleh D.H. Burger²¹ belum banyak memperoleh penegasan secara faktual empiris dalam penelitian sejarah mengenai wilayah tertentu.

Masalah pengelompokkan penduduk ke dalam status dan kelas sosial, kelompok agama budaya, dan etnis seperti dikerjakan oleh G.W. Skinner, *Local, Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia*,²² patut mendapat perhatian dari sejarawan pedesaan. Politik nasional yang masuk ke daerah selalu mendapatkan wujud baru, sebab masyarakat petani menterjemahkan cita-cita nasional itu ke dalam dinamika mereka sendiri. Demikianlah misalnya ketegangan sosial di antara elite agama dan pemerintahan di desa dapat menjelma ke dalam wujud politik yang bersifat nasional di tingkat desa menjadi politik desa, tempat para keluarga, kelompok-kelompok desa, dan kekuatan sosial lain dalam desa menyatakan diri. Demikianlah misalnya konflik-konflik di desa di masa pra-1965 tidak selalu dapat dikembalikan kepada perbedaan politik di tingkat nasional, tetapi

21 D. H. Burger, "Structuurveranderingen in de Javaanse Samenleving", *Indonesië*, II: hlm. 381-398, 521-537; III: hlm. 118, 101-123, 225-250, 381-389, 512-534.

22 G. W. Skinner, *Local, Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium* (New York: Harper Row, Publishers, 1972).

bahkan sering sebaliknya. Apa yang penting bagi desa kadang-kadang bukan apa yang bermakna dalam skala nasional. Perbedaan antara aliran reformis dan tradisional dalam Islam misalnya, tidak selalu berupa perbedaan ideologi, tetapi sering hanya perwujudan dari pengelompokan sosial atau bahkan pengelompokan lokasi di pedesaan. Dengan melihat desa dari “bawah” semacam ini pemahaman kita terhadap sejarah nasional akan lebih jelas. Tidak saja masuknya ideologi dan politik ke pedesaan, tetapi lebih-lebih lagi masuknya ekonomi uang sangat mempengaruhi kelompok-kelompok desa. Ada mobilitas kelompok sosial, seperti tampak dalam munculnya kelas menengah di desa yang menggantikan pengaruh dan prestise elite pemerintahan dan para pemilik tanah.

Lembaga-lembaga desa yang berupa pola hubungan sosial dan organisasi-organisasi sosial merupakan tema yang kaya untuk dijadikan kajian. Termasuk di sini lembaga pemerintahan, keagamaan, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Mengenai sistem pemerintahan desa, meskipun lebih merupakan garapan sejarah sosial yang lebih luas daripada sejarah pedesaan, sebab menyangkut juga wewenang yang dimiliki oleh kekuatan supra-desa, sejarah pedesaan masih dapat melihatnya dalam hubungannya dengan masyarakat petani dan ekonomi pertanian. Masalah kepamongan dalam hubungan dengan pajak pertanian dan non-pertanian, kerja wajib, lembaga *perdikan*, pembagian *percaton*, perubahan perangkat desa dari waktu ke waktu, semuanya dapat termasuk sejarah pedesaan.

Sejarah pedesaan sebagai pengkajian mengenai desa pada umumnya dapat pula membicarakan mengenai lembaga keagamaan di dalam desa. Lembaga lembaga sosial seperti *dayah* dan *meunasah*, pesantren, masjid, surau, dan perkembangannya ke dalam madrasah pada abad ke-20 merupakan lembaga pendidikan dan sosialisasi di tingkat desa. Demikian juga adanya perkumpulan-perkumpulan agama seperti gerakan *tarekat*, barzanji, pengajian, hubungan antara kyai santri, masalah zakat, nikah-talak-rujuk, dan sebagainya, serta

perkembangannya masih belum diungkapkan. Penelitian antropologis semacam disertasi Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*,²³ patut ditiru oleh sejarawan, dengan penekanan pada segi sejarahnya. Masalah serupa tentu saja bisa dikemukakan untuk berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia lainnya.

Dekat dengan masalah keagamaan ialah masalah lembaga politik di desa. Sudah disinggung di atas bahwa dinamika politik di desa kadang-kadang lain dengan dinamika politik di tingkat nasional. Dengan politik di sini tidak selalu harus berarti gerakan politik formal, tetapi dapat merupakan fraksi-fraksi perorangan atau keluarga. Dalam pemilihan lurah di desa misalnya, seorang calon dapat dianggap sebagai kekuatan politik di tingkat desa. Apakah politik di desa itu merupakan kelanjutan saja dari politik nasional, ataukah dinamika yang khusus berlaku untuk desa itu, dapat dilihat dari proses pemilihan lurah itu. Di sini dapat dilihat pula masalah-masalah kepemimpinan politik di desa, musyawarah desa, patronase, pergeseran politik antar generasi, naik dan turunnya partisipasi warga desa dalam lembaga-lembaga politik.

Masalah lembaga ekonomi desa menjadi permasalahan yang penting barangkali sejak adanya penelitian mengenai menurunnya kemakmuran bumiputera pada awal abad ke-20, ketika *Mindere Welvaart Commissie*,²⁴ melakukan penelitian menyeluruh mengenai desa-desa. Masalah pertanian, perikanan, peternakan, pinjam-meminjam, tingkat kemakmuran dan kemiskinan desa, sumber-sumber ekonomis desa, dan sebagainya. Dengan masuknya ekonomi uang di desa, sistem *sambatan* digantikan oleh hubungan kerja-upah, yang pada gilirannya akan mengubah bentuk solidaritas golongan kelas menengah baru yang kadang-kadang sama sekali lepas dari ekonomi pertanian setempat. Percaturan antara lembaga-lembaga

23 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup* yai (Jakarta: LP3ES, 1982).

24 Mindere Welvaart Commissie, *Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche evolkung op Java en Madoera* (1906 1916).

ekonomi baru, seperti bank, koperasi, toko, dengan lembaga ekonomi lama, seperti rentenir, *bakulan*, *mindring*, menarik untuk dipelajari. Pergeseran sosial apakah yang terjadi di desa sejak masuknya lembaga-lembaga ekonomi dan kekuatan ekonomi baru ke desa? Mungkin masalah-masalah ini menarik bagi perencanaan pembangunan desa, dan sejarawan pedesaan dapat mengambil bagian di dalamnya, dengan caranya sendiri. Berdirinya sebuah pabrik di tengah-tengah lingkungan pedesaan tentu mengubah perekonomian desa, baik pabrik-pabrik gula pada abad ke-19 atau pabrik-pabrik baru sekarang ini. Apalagi jika pabrik-pabrik itu memerlukan bahan mentah dari desa-desa sekitarnya, seperti pabrik gula, tembakau, rosella, agave, minyak tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Perubahan ekonomi desa pastilah mengakibatkan pula perubahan sosial di desa, yang dalam jangka panjang dapat pula mengubah pola budaya desa.

Di desa juga terdapat perkumpulan-perkumpulan sosial, seperti *sinoman*, perkumpulan pencak silat, dan akhir-akhir ini banyak berdiri perkumpulan-perkumpulan dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti kelompok pendengar acara-acara siaran pembangunan. Ada dan tidaknya kelompok itu di desa-desa merupakan gejala perubahan sosial di daerah pedesaan, yang dapat diketahui melalui penelitian. Dalam hal ini perlu diselidiki apakah desa-desa cenderung membentuk lembaga-lembaga yang menyangkut kepentingan-kepentingan rasional ekonomis sebagai layaknya proses menuju masyarakat ekonomis. Tingkat kemajuan desa dapat diukur dari jenis-jenis perkumpulan sosial yang ada di desa itu — tentu saja dengan mengingat pola kemajuan apa yang diinginkan.

Demikian pula masalah pendidikan di desa. Jika kita melihat pada sejarah abad ke-19, seperti tampak dalam perjalanan pendidikan pujangga Surakarta, Ranggawarsita,²⁵ di Jawa terdapat setidaknya dua macam lembaga pendidikan, yaitu pendidikan pesantren dan

25 Lihat *Serat abad Carios Lelampahipun Suwargi Raden Ngabehi Ranggawarsita Pu angga Ageng ing Nagari Surakarta* (Surakarta: Komite Ranggawarsitan, 1931 1932), 2 jilid.

pendidikan padepokan. Dalam pesantren para santri belajar ilmu-ilmu agama, seperti membaca Al Qur'an, sedangkan di padepokan murid belajar ilmu *kanuragan*, seperti berbagai macam kesaktian. Di samping itu tampaknya ada juga kepercayaan, bahwa puncak kepandaian hanya dapat diperoleh melalui *pulung*, yaitu anugerah yang istimewa. Memudarnya sistem padepokan ini adalah akibat masuknya sistem pemasaran kerja baru yang mencari tenaga pengajar terlatih di pamong praja dan pabrik-pabrik. Sementara itu sistem pesantren, sebagai lembaga yang mengelola pendidikan agama, masih tetap bertahan, tanpa terpengaruh oleh pemasaran kerja.

Lembaga kesehatan di desa sampai sekarang masih menjadi bahan penelitian bagi para ahli *medical anthropology*. Sejarawan dapat berusaha untuk meneliti, tidak saja dari bahan-bahan bacaan seperti buku-buku *usada* di Bali, tetapi juga melalui penelitian. Dengan metode *oral history*, sejarawan dapat menelusuri bagaimana para pekerja kesehatan tradisional itu melaksanakan tugasnya, bagaimana mereka memperoleh keahliannya, peralatan yang dimiliki, pemasaran keahliannya, perekonomian rumah-tangganya, dan pewarisan ilmunya. Banyak pekerja kesehatan yang sudah hilang, tetapi belum ditulis *life history*-nya, misalnya tentang *tukang pangur*, yaitu pemotong gigi yang mematutnya supaya tampak rapi. Buku *oral history* seperti tulisan George Ewart Evans, *Tools of Their Trade*,²⁶ dapat dijadikan model untuk penelitian ini. Bagaimana mereka sebagai "endangered species" mencoba untuk hidup di masa kini merupakan pertanyaan sejarah dan kemanusiaan yang menarik.

Hubungan sosial di pedesaan juga kaya akan tema penelitian. Di antaranya ialah masalah stratifikasi, integrasi, konflik, mobilitas sosial, migrasi, dan hubungan desa-kota. Stratifikasi sosial merupakan gejala yang penting dalam masyarakat. Sistem kasta seperti di Bali, sistem status seperti pada zaman masyarakat tradisional, dan sistem kelas

26 George Ewart Evans, *Tools of Their Trade: An Oral History of Men at Work c. 1900* (New York: Taplinger Publishing Company, 1971).

seperti sedang terjadi prosesnya sekarang ini, merupakan bahan penting. Di Bali selalu terdapat pertanyaan bagaimana percaturan antara ketiga sistem stratifikasi itu terjadi dalam sebuah masyarakat yang aktual. Begitu juga di Jawa sedang terjadi pergeseran dari sistem status yang mementingkan darah dan keturunan menuju sistem status yang mementingkan ukuran kekayaan sebagai cara meletakkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam pergeseran ini pastilah terjadi pertentangan-pertentangan sosial karena perbedaan nilai dan pola tingkah-laku warga desa. Bagaimana antara golongan yang sedang bertentangan itu saling berhubungan, mengadakan aliansi dan pengucilan atau saling mengadakan akomodasi. Bagaimana cara golongan pendeta dan ksatria di Bali, golongan priyayi di Jawa mempertahankan kedudukannya ketika mereka terancam oleh golongan kelas menengah pedesaan? Barangkali tulisan R.R. Jay, *Javanese Villagers* dapat membantu dengan pendekatan ke arah ini.²⁷ Integrasi desa kadang-kadang terganggu dengan munculnya kelas ekonomi baru di pedesaan yang barangkali akan sanggup mendominasi desa. Solidaritas desa, seperti tampak dalam acara *bersih desa* dan acara berkala lainnya, dapat dipandang tidak perlu oleh golongan kelas menengah yang lebih rasional dan individualistis. Jika demikian halnya integrasi desa tidak lagi terjamin. Apalagi dengan masuknya kekuatan dan pengaruh kota ke desa, seperti timbulnya organisasi massa sebelum tahun 1965. Masalah ini juga dapat berlaku untuk periode pergerakan nasional, misalnya bagaimana Sarekat Islam pada waktu itu telah mempengaruhi penduduk pedesaan. Dari banyak laporan mengenai Sarekat Islam Lokal kiranya dengan jelas tampak bahwa desa pada waktu itu mulai tersentuh pertentangan, yang semula pertentangan kultural menjadi pertentangan politik, bahkan di beberapa tempat menuju kepada kekerasan.

27 R. R. Jay, *Javanese Villagers: Social Relations in Rural Modokerto* (Cambridge, Mass. : The M. I. T. Press, 1969).

Dalam abad ke 20 pengaruh kota ke desa mulai kuat, beberapa gerakan yang berasal dari kota, bukan saja yang bersifat politik, tetapi juga gerakan sosial, agama, dan budaya. Yang terakhir ini tampak pada hubungan kota-desa yang semakin dekat berkat kemajuan transportasi dan komunikasi sehingga perbedaan antara desa dan kota mulai kabur. Desa dan kota mulai mempunyai budaya yang sama. Adanya mobilitas sosial, baik vertikal-horisontal, adanya migrasi, semakin menegaskan mengaburnya batas desa-kota. Di sinilah pentingnya dibicarakan mengenai gejala psiko-kultural pedesaan.

Barangkali para ahli sosiologi dan antropologi, terutama yang bergerak di bidang pengenalan teknologi baru ke pedesaan, lebih peka dengan masalah psikis dan budaya pedesaan.²⁸ Nilai, norma, dan simbol yang melekat pada masyarakat desa mulai kehilangan makna. Proses akulturasi, asimilasi, akseptansi, adaptasi, dan reaksi terhadap masuknya unsur-unsur baru itu bukan saja terjadi pada abad ke-20 ini, tetapi sudah terjadi sebelumnya. Bagaimana penduduk pedesaan melakukan adaptasi kepada masuknya tanaman tebu dalam abad ke-19, melakukan hubungan kontraktual dengan pabrik, mengubah jadwal kerja, belajar teknologi pertanian baru, barangkali tidak ada data data sejarahnya. Namun dari sejarah pergerakan nasional, misalnya, tampak bahwa kesadaran kelas dapat tumbuh dari petani petani di pedesaan, seperti di daerah Klaten, Surakarta, ketika terjadi perlawanan terhadap wewenang Belanda dan Susuhunan, bahwa rakyat keturunan Kromo dan Suto bangkit melawan Susuhunan yang mengaku keturunan Adam dan Arjuna.²⁹ Nilai nilai berubah dengan perubahan dalam bidang sosial-ekonomi. Demikian pula munculnya gerakan Jowodipo, gerakan yang mencoba mendemokratisasikan

28 Lihat Koentjaraningrat, *Rintangan rintangan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1969); George M. Foster, *Traditional Societies and Technological Change* (New York: Harper Row, Publishers, 1973).

29 Lihat R. C. Kwanten, *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsche Indie: een monografie* (Groningen: H. D. Tjeenk Willink, B. V. ; 1975), I, hlm. 291.

30 *Ibid*, hlm. 507.

Bahasa Jawa menjadi satu tingkat saja (*ngoko*), mendapat tanggapan dari penduduk pedesaan.³⁰ Dengan cita-cita demokrasi, simbol yang berupa bahasa ingin pula diganti. Tentu proses demokratisasi dari simbol ini terjadi terutama di daerah kejawen tempat dua kerajaan Jawa berkuasa. Perubahan mental dan budaya semacam ini barangkali hanya dapat ditangkap melalui ungkapan-ungkapan bahasa, hasil sastra, dan dari ingatan-ingatan langsung para saksi zaman. Dalam hal ini kita dapat bertumpu pada hasil sastra tulisan, tradisi lisan, dan sejarah lisan.

PENUTUP

Setelah beberapa hal tentang pengertian, satuan penelitian, dan permasalahan diterangkan, kiranya kita dapat menulis apa saja berdasarkan batasan dan luasan sejarah pedesaan itu. Kita dapat memilih satu desa, satu masalah, satuan desa, atau pedesaan pada umumnya. Tinggal lagi kita belajar dari ilmu-ilmu sosial untuk memperoleh petunjuk-petunjuk teoretis mengenai pedesaan, karena pemikiran tentang sejarah pedesaan sendiri sangat kuat dipengaruhi oleh pemikiran dari ilmu-ilmu sosial itu.

SEJARAH EKONOMI PEDESAAN

Dalam perjalanan dari Dili ke Baucau melalui perjalanan mobil di pantai utara Timor Timur, penulis memperoleh pengalaman yang memberi ilham pada penulisan ini. Di pinggiran jalan, seorang laki-laki bertelanjang bulat sedang merendam diri di pantai yang airnya tenang itu, dengan sebuah tombak di tangan. Air merendamnya setinggi dada. Rupa-rupanya sudah agak lama ia berada di sana. Orang lain sedang memegang seonggok ikan besar di tangan, berdiri di tepi jalan raya. Sedikit di kejauhan beberapa atap rumah rumbia berbentuk bulat-lancip tampak sepi di tengah tumbuhan yang tidak rimbun. Saya hampir-hampir tidak percaya bahwa memang kami sedang berada di Indonesia, kalau seandainya tidak tahu bahwa hari itu tahun 1980.

Pengantar kami, yang lama menjabat sebagai camat di Timor Timur dan menguasai sebelas dari 32 bahasa daerah, ternyata gagal berkomunikasi dengan orang itu. Kami ingin membeli ikan-ikan itu untuk makan sore di hotel. Penterjemah kami mengulurkan selebar uang ribuan. Penjual ikan itu menggelengkan kepalanya. Kemudian lembaran lima ratusan, tetapi masih juga ikan belum berpindah tangan. Ketika lembaran ribuan yang lain dikeluarkan, maka ikan-ikan pindah tangan.

Pengantar menerangkan bahwa mereka ingin dua lembar uang ribuan, tidak lebih atau kurang. Kami meninggalkan tempat itu dengan sebuah pertanyaan mendasar tentang sejarah ekonomi. Kaitan sejarah ekonomi tingkat lokal dan sejarah ekonomi tingkat nasional. Dari sejarah ekonomi, Indonesia pun juga sebuah keragaman. Tetapi apakah ia juga sebuah ketunggalan, seperti semboyan politik kita? Kiranya studi mikro dalam sejarah ekonomi kita, lebih dari ketunggalannya. Di tempat seperti pantai antara Dili dan Baucau itu bahkan pertanian belum dikenal. Pertanian sebagai usaha manusia untuk mengubah lingkungan, menguasai iklim, membuat irigasi, menanam tanaman, menjinakkan binatang, dan merawat tanah belum menjadi bagian dari budaya sederhana mereka. Kita hanya dapat membayangkan apa yang terjadi apabila perekonomian primitif yang bahkan belum menjadi perekonomian itu tiba-tiba dikenalkan dengan ekonomi pasar yang kapitalistis, seperti pengalaman beberapa negara di Afrika.¹

Jelaslah bahwa pengalaman sejarah ekonomi Indonesia memberi kemungkinan terbuka untuk studi sejarah mikro, karena begitu banyaknya variasi kedaerahan. Variasi kedaerahan ini disebabkan oleh perbedaan-perbedaan ekologi, struktur sosial, pengaruh luar, dan budaya setempat. Di setiap daerah pun tidak selalu ada keseragaman tingkat perkembangan ekonomi, seperti banyaknya ekonomi *enclave* di beberapa tempat. Kita ingat bahwa di tengah-tengah pertanian tradisional dapat saja terdapat sebuah perkebunan besar atau *ranch*, seperti kita saksikan akhir-akhir ini. Untuk beberapa daerah, barangkali tidak cukup menyebut ciri-ciri ekonomi dengan dualistis saja. Ekonomi kita barangkali plural, baik dalam tingkat perkembangan maupun kelembagaan, sehingga sukar untuk mengadakan generalisasi secara nasional dan makro. Penelitian terhadap proses sejarah ekonomi yang kongkret akan menunjukkan betapa variasi itu ada,

1 Rene Dumont, "Agriculture as Man's Transformation of the Rural Environment", dalam Theodor Shanin, *Peasant and Peasant Societies* (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd; 1973), hlm. 141-149.

dan betapa keunikan-keunikan terdapat di tingkat lokal. Sejarah ekonomi yang mempelajari faktor-faktor yang menentukan jalannya perkembangan ekonomi-ekonomi akan mempunyai sumbangan sewajarnya pada penetapan kebijakan perencanaan ekonomi, baik secara nasional maupun daerah. Tentu saja sumbangan sejarah ekonomi tidak lebih daripada sebagai bagian dari pemikiran kolektif ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan. Tidak seorang perencana pun yang sadar akan kompleksitas hal-hwal ekonomi dapat meninggalkan sumbangan sejarah ekonomi dalam pekerjaannya. Sejarah ekonomi yang sanggup mengkaitkan studi mikro dengan studi mikro, studi sejarah dengan studi ekonomi teoretis, dan studi akademis dengan keperluan praktis akan sangat banyak kegunaannya.²

BIDANG DAN MASALAH

Sejarah ekonomi masih merupakan daerah yang relatif asing bagi sejarawan Indonesia, sekalipun sejarah ekonomi diajarkan di jurusan-jurusan sejarah. Di negeri-negeri Barat sendiri sejarah ekonomi juga merupakan disiplin yang relatif baru. Meskipun sejarah ekonomi sudah ditulis orang jauh sebelumnya, tetapi *chair* untuk sejarah ekonomi yang pertama di dunia baru ada di Harvard pada tahun 1892, dan *chair* serupa di Inggris baru ada pada tahun 1910.³ Sejarah ekonomi yang secara formal berdiri sendiri lepas dari subordinasi pada sejarah politik itu ingin mencari maknanya sendiri dalam mempelajari corak dan penjumlahan dari hubungan manusia yang bersifat ekonomi, sosial dan budaya. Pada kurun-kurun sebelumnya *political economy* lebih berpengaruh dalam penulisan-penulisan sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi yang telah melepaskan diri dari ekonomi politik itu terus berkembang dan mencapai puncaknya dalam studi yang semakin canggih, dengan penggunaan metode *quatitatis* yang maju dalam gerakan the *New Economic History*.

2 FW. A. Cole, "Economic History as a Social Science", dalam N. B. Harte (ed.), *The Study of Economic History: Collected Inaugural Lectures, 1893-1970* (London: Frank Cass) hlm. 253.

3 Lihat Harte dalam pengantar bukunya, *ibid.*, hlm. xxi, xxvi.

Meskipun akhir-akhir ini ada minat kembali untuk mempelajari sejarah ekonomi dari sudut pandang ekonomi politik, terutama di negara-negara sedang berkembang seperti di Indonesia, kiranya masih perlu diperkenalkan sejarah ekonomi yang lebih konvensional. Banyak definisi sudah dikemukakan oleh banyak sarjana, dengan batasan yang kurang lebih sama. Barry E. Supple dalam *The Experience of Economic Growth: Case Studies in Economic History* menulis sebagai berikut:

Economy History is the historical study of man's efforts to provide himself with goods and services, of the institutions and relationship which resulted from those efforts, of the changing technique and outlooks associated with his economic endeavor, and of the results (is social as well as economic terms) of his striving, or his failure to strike.⁴

Secara singkat sejarah ekonomi mempelajari manusia sebagai pencari dan pembelanja. Jadi sejarah ekonomi bukanlah interpretasi ekonomis terhadap sejarah, yang termasuk dalam sejarah pada umumnya. Sejarah ekonomi haruslah spesifik, sejarah dari satuan yang kongkret dan khusus. Untuk lebih menjelaskan pembidangan sejarah ekonomi dan garapannya, ada baiknya dikutip di sini pendapat W.J. Ashley dalam pidato pengukuhanannya sebagai pemegang *chair* sejarah ekonomi di Harvard 1893 sebagai berikut:

It (economic history) asks what has been the material basis of social existence; how have the necessities — and conveniences of human life been produced; by what organization has labor been provided and directed; how have the commodities thus produced been distributed; what have been the institutions resting on this direction and distribution; what changes have taken place in the methods of agriculture, of industry, of trade; can any intelligible development be traced; and, if so has it been from worse to better.⁵

4 Barry E. Supple (ed.), *The Experience of Economic Growth: Case Studies in Economic History* (New York: Random House, 1963), hlm. 4.

5 W. J. Ashley, "On the Study of Economic History", dalam Harte, *The Study of Economic History*, hlm. 12-13.

Semua itu mengenai sejarah ekonomi pada umumnya, terutama dalam konteks ekonomi industrial. Untuk sejarah ekonomi pedesaan, batasan-batasan itu tentu saja harus diletakkan dalam lingkungan ekonomi pedesaan, atau ekonomi petani.

Ekonomi pedesaan dan ekonomi petani tidak selalu searti, namun dalam tulisan ini, keduanya dipersamakan dan dapat ditukarkan peristilahannya khusus untuk keperluan seminar sejarah lokal dengan cakupan dinamika pedesaan ini. Ciri-ciri ekonomi petani sebagaimana dikemukakan Daniel Thorner, seorang antropolog yang menganggap ekonomi petani sebagai sebuah kategori dalam sejarah ekonomi, ialah:

1. Dalam bidang produksi, masyarakat terlibat dalam produksi agraria;
2. Penduduknya harus lebih dari separohnya terlibat dalam pertanian;
3. Ada kekuasaan Negara dan lapisan penguasanya;
4. Ada pemisahan antara desa dengan kota, jadi ada kota-kota dengan latar belakang desa-desa; dan
5. Satuan produksinya ialah keluarga rumah-tangga petani.⁶

Ekonomi petani diusulkannya sebagai sebuah kategori tersendiri dalam sejarah ekonomi dengan maksud untuk memenuhi kekurangan dalam analisa tentang perkembangan ekonomi, terutama dari kalangan ilmuwan Marxis yang hanya melihat urutan sejarah itu sebagai cara produksi perbudakan, feodalisme, kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi petani, menurut Thorner yang mengukuhkan pendapat ahli ekonomi Rusia, Chayanov, tidak termasuk dalam salah satu kategori yang sudah ada, hingga sepantasnya kalau ekonomi petani yang banyak terdapat di negara-negara yang sedang berkembang itu mendapat tempat yang tersendiri. Ia juga tidak puas

⁶ Daniel Thorner, "Peasant Economy as a Category in Economic History", dalam Shanin (ed.), *Peasants and Peasant Societies*, hlm. 203.

dengan semata-mata menyebut ekonomi petani sebagai perwujudan cara produksi Asia.⁷

Perbedaan antara ekonomi petani dengan ekonomi kapitalis, menurut Basile Kerblay, yang juga menganut pendapat Chayanov, ialah jika ekonomi kapitalis tanah dan kerja merupakan variabel atau faktor yang oleh penguasa dikombinasikan untuk memperoleh perolehan yang maksimum dari kapital dianggap sebagai faktor yang tetap, sedangkan dalam ekonomi petani kerjalah yang merupakan elemen yang tetap menentukan perubahan dalam volume dari modal dan tanah. Ekonomi kapitalis berdasarkan pada modal, ekonomi petani berdasarkan pada kerja.

Di lingkungan ekonomi petani perluasan tenaga kerja keluarga, seperti tampak dalam banyak jumlah anak-anak, dianggap sebagai faktor yang menguntungkan dan merupakan investasi. Pendekatan terhadap ekonomi petani melalui kalkulasi untung-rugi secara kapitalistis tidak akan mampu menjelaskan perilaku ekonomi petani, sebab tidak ada cara kerja upahan, semua kerja adalah kerja keluarga yang tidak mengenal bayaran.

Pertemuan antara ekonomi ekspor, baik melalui Peraturan Tanam Paksa maupun perkebunan swasta pada abad ke-19, merupakan pertemuan antara dua cara produksi dengan akibat-akibat yang menarik perhatian sejarah ekonomi. Tidak kurang dari itu sebenarnya ialah pertemuan antara dua sistem ekonomi sebagai dikemukakan oleh Boeke sejak lama, yang sampai sekarang pun masih berlaku dalam pengertian-pengertian tertentu. Terbukanya pedalaman Jawa dan sebagian daerah luar Jawa untuk perekonomian ekonomi Indonesia, terutama yang menyangkut sektor agraria. Demikian juga tinjauan terhadap pengaruh perkebunan-perkebunan di beberapa tempat di daerah Jawa. Kebanyakan para penulis tidak membatasi penelitiannya pada bidang ekonomi, tetapi juga termasuk akibat-

7 Basile Kerblay, "Chayanov and the Theory of Peasantry as a Specific Type of Economy", dalam Shanin (ed.), *ibid.*, hlm. 154).

akibat sosialnya. Kiranya perlu kesempatan tersendiri untuk dapat membahas tulisan-tulisan semacam itu, baik yang membicarakan Indonesia secara keseluruhan maupun yang membicarakan sejarah ekonomi lokal.

Sejarah ekonomi lokal sangat penting, karena tiap-tiap daerah di Indonesia menempuh jalan sendiri-sendiri dalam perkembangan ekonomi. Perbedaan regional itu disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, ada atau tidak adanya organisasi kenegaraan. Dalam hal ini perbedaan terjadi antara berbagai daerah yang disebabkan oleh corak kerajaan-kerajaan atau organisasi sosial setempat yang berbeda.

Daerah kerajaan Kejawen berbeda dengan daerah-daerah seperti Sumatera Barat dan Minahasa dalam organisasi ekonominya. Perbedaan yang menarik perhatian penelitian, baik penelitian tentang periode kerajaannya maupun tentang transformasinya. Faktor kedua ialah ada atau tidak adanya kelas menengah yang asli. Tidak semua tempat di Indonesia mempunyai kelas pedagang sejak awal. Hanya daerah-daerah yang berada di tepi pantai, atau secara tradisional merupakan kerajaan maritim mempunyai lapisan *orang kaya* sebagai kelas menengah yang berada di luar aristokrasi dan petani. Kerajaan pedalaman seperti Mataram tidak menunjukkan adanya kelas menengah yang kuat. Ketiga, ialah adanya kekuasaan kolonial ialah di Jawa, sedangkan daerah-daerah di luar Jawa tidak demikian. Keempat, ada dan tidaknya kelas menengah asing, terutama Cina dan Arab. Sangat menarik di sini pengaruh perekonomian orang-orang Cina di beberapa tempat di Indonesia. Mereka tidak saja merupakan kelas menengah, tetapi juga banyak yang menjadi petani, suatu kenyataan yang membuat menarik studi lokal.⁸ Mengenai peranan orang-orang Cina sudah banyak ditulis oleh para peneliti, namun peranan ekonomisnya belum banyak yang diketahui secara

8 Menarik sekali misalnya masalah kongsi-kongsi Cina di Kalimantan Barat di masa lalu yang merupakan campuran dari usaha ekonomi dan sebuah komunitas sosial. Lihat skripsi S-2 Universitas Gadjah Mada oleh Harlem Siahaan "Kolonisasi dan Kongsi Cina di Kalimantan Barat: Pembentukan dan Perkembangannya, 1772-1854."

rinci. Dengan demikian kita tahu bahwa suatu daerah sebenarnya juga merupakan sebuah wilayah ekonomi yang tersendiri, dipandang dari berbagai faktor yang mempengaruhi itu. Oleh karena itu satuan kajian sejarah ekonomi yang memusatkan perhatian pada proses ekonomi di tingkat lokal banyak memberi harapan.

Pembatasan satuan wilayah dapat mempergunakan berbagai cara. Di antara kemungkinan itu ialah pendekatan wilayah produksi, wilayah pemasaran, wilayah penukaran, wilayah geografis, wilayah administratif, dan wilayah adat.

Wilayah produksi dapat berupa daerah yang diliputi oleh produksi sejenis, seperti misalnya daerah nelayan di pantai utara Jawa, Sumatera Timur, dan sebagainya. Dalam batasan ini dapat pula diambil pantai-pantai selatan Madura yang menghasilkan garam sebagai satuan wilayah produksi. Dekat hubungannya dengan wilayah produksi ialah pemasaran. Di masa lalu, dapat dibayangkan, pemasaran produksi sangat terbatas, mengingat prasarana jalan dan teknologi transportasi yang berbeda. Lingkaran pemasaran yang mempergunakan kerja orang, lain dengan lingkaran kuda beban, lain dengan lingkaran kereta api dan truk. Tentu saja setelah desa-desa terbuka untuk pasaran baru berkat adanya transportasi kereta api, sulitlah untuk membatasi wilayah pemasaran ini. Namun, sebuah studi bagaimana produksi itu dipasarkan dan bagaimana penyebarannya akan sangat menarik. Sehubungan dengan ini wilayah penukaran juga menjadi penting. Antara desa-desa sekitar dan kota-kota, selalu terjadi penukaran barang dan jasa. Gerakan barang dan jasa merupakan studi yang menarik jika dapat mengungkapkan luasan daerah ekonomi pada suatu saat dalam sejarah. Dengan wilayah geografis dimaksudkan sebagai sejumlah daerah yang disatukan oleh ciri-ciri geografis yang kurang lebih sama, seperti misalnya daerah sebuah lembah sungai, sekitar danau, atau daerah-daerah sekitar jalur jalan atau aliran sungai. Dalam hal ini kita teringat daerah aliran sungai Bengawan Solo yang terkenal dalam nyanyian, tetapi belum mendapat perhatian dari penulis sejarah. Pembatasan wilayah

administratif barangkali cara yang praktis untuk mencari unit wilayah ini. Namun kesulitan selalu terjadi, sebab selalu wilayah administratif sama dengan wilayah ekonomi, kecuali barangkali ekonomi formal, seperti tampak dalam sistem pajak yang tentu saja menjadi bagian dari pekerjaan administratif. Yang terakhir, wilayah adat atau budaya. Dalam hal ini secara hipotetis kita dapat menduga bahwa kesembilanbelas hukum adat itu di masa lalu juga sebenarnya merupakan wilayah ekonomi tersendiri, terutama yang berhubungan dengan soal-soal peraturan agraria dan perwarisan tanah. Semua pendekatan ini selalu akan tumpang-tindih satu dengan lainnya.

Selanjutnya, sangat penting dalam sejarah ialah satuan waktu. Dalam sejarah ekonomi, terutama yang mementingkan soal pertumbuhan ekonomi, masalah tahapan perkembangan selalu menjadi perhatian yang utama. Tidak saja dalam skala makro kita dapat berbicara tentang sistem ekonomi atau cara produksi, tetapi juga dalam lingkup mikro. Tahapan-tahapan yang berlaku secara nasional, tidak selalu berlaku untuk daerah-daerah. Generalisasi yang menyangkut seluruh negara tidak akan mampu menerangkan perkecualian-perkecualian dan kekhususan regional. Hanya dengan pengamatan secara lokal pertumbuhan ekonomi dapat memperhitungkan akibat-akibat dari sebuah kebijakan ekonomi tingkat nasional.

Untuk penelitian sejarah, pendekatan terhadap tahapan ekonomi tidak perlu harus menggunakan ukuran-ukuran ekonomi. Tahapan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Rostow dalam *The Stages of Economic Growth* yang menggunakan ukuran produktivitas sebagai kriteria untuk tahapan,⁹ kiranya hanya dapat berlaku bagi masyarakat industrial, dan sedikit saja relevansinya dengan sistem ekonomi pedesaan atau petani di masa lampau. Dalam

9 Walt W. Rostow, *The Stages of Economic Growth* (Cambridge: Cambridge University Press, 1959). Disebut oleh Rostow lima tahap perkembangan yaitu 1) *the traditional society*, 2) *the precondition for take-off*, 3) *the take off*, 4) *the drive to maturity*, dan 5) *the age of high mass consumption*.

pendekatan Rostow, secara kasar masyarakat tradisional hanya disebutnya sebagai masyarakat tradisional, yang sedikit saja menjelaskan kompleksitas ekonomi tradisional itu sendiri. Tahapan dan tipologi ekonomi yang dibuat oleh Heilbroner lebih menjangkau masa lalu sejarah manusia.¹⁰ Dikemukakannya tiga sistem ekonomi, ekonomi berdasarkan tradisi, perintah dan pasar. Tetapi ia membicarakan lebih banyak tentang ekonomi pra-pasar dan ekonomi pasar sebagai perkembangan yang terakhir.

Tipologi dan tahapan Karl Polanyi mempertimbangkan juga sistem sosial. Polanyi membagi sistem ekonomi ke dalam tiga jenis, yaitu resiprositas, redistribusi, dan penukaran.¹¹ Pembagian ini memudahkan kita memahami sistem ekonomi primitif dan sistem ekonomi petani di masa kerajaan patrimonial kita yang lalu. Diakui pula bahwa tipologi itu merupakan abstraksi dari proses ekonomi yang kongkret, yang dalam kenyataannya selalu mengandung unsur-unsur yang tercampur, tidak pernah murni.

Setelah kita mendapatkan satuan wilayah dan satuan waktu, kita perlu juga memahami satuan permasalahan dalam sejarah ekonomi pedesaan. Permasalahan ekonomi pedesaan atau ekonomi petani tentu tidak sama dengan ekonomi industrial atau ekonomi kota. Dalam pengertian kita di sini, ekonomi pedesaan memasukkan juga ekonomi primitif sekaligus ekonomi petani, yang kedua-duanya masih terdapat dalam masyarakat dengan kerangka ekonomi pasar sekarang ini. Beberapa kemungkinan permasalahan yaitu tentang faktor-faktor ekonomi, sektor-sektor ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi, komoditi, pertumbuhan, dan problem-problem.

Faktor-faktor ekonomi pedesaan meliputi tanah, kerja, kapital upah, harga dan sewa. Peranan dari masing-masing faktor itu berbeda

10 Robert L. Heilbroner, *The Making of Economic Society* (Englewood Cliff, N. J. : Prentice Hall, Inc, 1962) Chapter I.

11 Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press 1957), Chapter 4.

dalam berbagai tipe ekonomi. Perbedaan itu terletak dalam konsep tentang apa yang menjadi modal utama sebuah sistem, apa yang harus diekonomisasikan dan apa yang dimaksimalisasikan. Dalam masyarakat primitif dan petani konsep tentang *scarcity*, sebagaimana dalam masyarakat ekonomi pasar, tidak dikenal. Sektor ekonomi yang dikenal dalam ekonomi pedesaan tentu saja yang berhubungan dengan pertanian, perdagangan, peternakan, dan industri rumah-tangga. Lembaga-lembaga ekonomi seperti kredit, koperasi, lumbung desa, bank, sudah banyak dikenal dalam ekonomi pedesaan, terutama atas campur tangan kekuasaan negara. Lembaga-lembaga ini telah sedikit banyak mengubah ekonomi petani. Demikian juga berbagai peraturan dalam Tanam Paksa di masa yang lalu merupakan usaha untuk mengenalkan lembaga ekonomi baru di tengah masyarakat petani. Termasuk di sini munculnya pabrik-pabrik di tengah-tengah sistem ekonomi tradisional. Sejarah mengenai sebuah komoditi tertentu, seperti beras, merupakan bagian sejarah ekonomi yang penting, sekalipun dapat diduga bahwa sejarah yang demikian akan melampaui batasan sejarah lokal dalam penggarapannya. Bagian beras di masa lalu diproduksi, dijual, dan ditukarkan dari pulau ke pulau merupakan sejarah tersendiri. Demikian pula komoditi yang penting seperti batik, umpamanya. Pertumbuhan ekonomi, perjalanan sebuah lokalitas dari tahap ke tahap merupakan tema yang menarik. Kita dapat membayangkan sebuah sejarah lokal Sulawesi Selatan dari tahap ke tahap lain, yang diambil dari sumber-sumber lokal maupun dari sumber kolonial. Akhirnya problem-problem ekonomi, seperti paceklik, turun-naiknya harga, kepadatan penduduk, migrasi, terutama yang menyangkut sebuah lokalitas belum mendapat perhatian juga.

Dengan banyaknya kemungkinan permasalahan sejarah ekonomi yang masih terbuka untuk digarap, masih banyak lagi kemungkinan dan keterbukaannya jika kita mengingat bahwa semua itu dapat dihubungkan dengan setting sejarah sosialnya, sehingga menjadi sejarah sosial ekonomi. Sejarah ekonomi yang peka dengan masalah-

masalah non-ekonomis akan menjadi lebih daripada semata-mata sejarah ekonomi murni. Clifford Geertz telah memberi contoh bagaimana sejarah kewiraswastaan dapat menggabungkan sejarah sosial dengan sejarah ekonomi di tingkat lokal. Dikatakannya bahwa dalam pertumbuhan ekonomi, kedua kota Tabanan dan Mojokuto mempunyai perbedaan. Di Tabanan para bangsawan yang mengalami dislokasi melakukan pembangunan kembali sebuah ekonomi agraris, sedangkan di Mojokuto pembaharuan itu dilakukan oleh kaum reformis Muslim yang mengadakan reorganisasi terhadap pasar.¹²

Untuk menjamin ketrampilan penulisan sejarah ekonomi, kerangka teori sangat penting. Tanpa kerangka teori, penulisan sejarah hanya akan menjadi kronologi yang tak bermakna. Berbeda dengan sejarah jenis lainnya, rupanya sejarah ekonomi lebih banyak memerlukan penggunaan teori, model dan konsep-konsep ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi sendiri. Model tentang pertumbuhan ekonomi, misalnya, akan mampu menerangkan peristiwa dan struktur secara jelas. Teori, model dan konsep itu dapat diambil dari ilmu ekonomi konvensional yang terutama sangat baik untuk menganalisa sektor komersial dari organisasi ekonomi petani. Juga ilmu ekonomi konvensional dapat berguna dalam menghitung penampilan ekonomi, baik yang primitif, petani, industri kapitalis, maupun industri komunis. Pendekatan kuantitatif dalam ekonomi dapat menjelaskan bagaimana variabel-variabel berhubungan satu dengan lainnya, bagaimana sumbangan masing-masing variabel itu dalam keseluruhan situasi ekonomi. Bahkan dalam perkembangannya yang terakhir sejarah ekonomi menggunakan model-model yang canggih dari ekonometrika, dan tulisan sejarah yang demikian sering disebut sebagai *cliometrics*. Mereka membuat model-model yang eksplisit, kemudian mengetes hipotesa-hipotesa untuk mencari kontribusi masing-masing variabel. Penganut Sejarah Ekonomi Baru bahkan membuat model-

12 Clifford Geertz, *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns* (Chicago: of Chicago Press, 1963).

model yang kontrafaktual untuk menjelaskan sumbangan dari sebuah variabel dalam pertumbuhan ekonomi. Fogel, misalnya menulis tentang sumbangan kereta api dalam kemajuan ekonomi dengan mengajukan sebuah model kontrafaktual dengan mengandaikan sebuah ekonomi tanpa kereta api.¹³ Ambisi sejarawan ekonometriks ialah untuk mempelajari sejarah perilaku ekonomi di masa lampau untuk kemudian melakukan proyeksi ke masa depan. Sejarah ekonomi dari sejak mula rupa-rupanya cenderung kepada penggunaan ukuran-ukuran matematis.¹⁴

Untuk Indonesia sebenarnya sumber-sumber statistik cukup banyak. Laporan-laporan Kolonial Verslah yang terbit tiap tahun sejak pertengahan abad ke-19 cukup memberi keterangan angka-angka. Juga penerbitan-penerbitan statistik lain dari Kantor Pusat Statistik. Literatur mengenai statistik di Indonesia dapat diambil dari penerbitan E.A. Van de Graaf, *De Statistiek in Indonesia*.¹⁵ Kemudian untuk teori dan konsep-konsep ekonomi, terutama ekonomi di dunia yang sedang berkembang, dapat diambil dari dua buku karangan Michael Todaro, *Economic Development in the Third World* dan *Economic for a Developing World*.¹⁶

Bagi mereka yang melihat teori ekonomi murni dan statistik merupakan daerah terlarang, seperti sejarawan yang dihasilkan oleh fakultas-fakultas Sastra di Indonesia, sejarah ekonomi masih tetap terbuka. Seperti sudah disinggung, aktivitas ekonomi masih tetap merupakan aktivitas manusia, sehingga sejarah ekonomi pun tidak lepas dari setting sosial dari pengalaman manusia dan imajinasi manusia. Di sini motif, nilai, dan sikap masih merupakan hal yang

13 Lihat tulisan-tulisan dalam Robert P. Swierenga (ed.), *Quantification in American History: Theory and Research* (New York: Atheneum, 1970), Part. V.

14 J. H. Clapham, "The Study of Economic History", dalam Harte (ed.), *The Study of Economic History*, hlm. 68.

15 Ir. E. A. Van de Graaf, *De Statistiek in Indonesia* ('s Gravenhage: N. V. Uitgeverij W. van Hoeve, 1955).

16 Michael Todaro, *Economic Development in the Third World* (New York: Longman, 1982) dan *Economica for a Developing World* (New York: Longman, 1982).

penting. Sejarah ekonomi dapat diletakkan dalam kerangka sejarah interdisipliner.¹⁷ Untuk keperluan itu di bawah ini akan dikemukakan berbagai permasalahan sejarah ekonomi pedesaan yang dibicarakan oleh ahli-ahli ilmu sosial di luar ilmu ekonomi.

SEJARAH EKONOMI PEDESAAN DAN TEORI SOSIAL

Sejarawan selalu sadar bahwa ada proses sejarah yang dapat diterangkan dengan faktor tunggal. Faktor-faktor ekonomis dan non-ekonomis jalin-menjalin, dan kadang-kadang tidak dapat dilacak lagi mana yang menjadi bagian yang mana. Terlebih lagi hal ini tampak dalam ekonomi pedesaan, dalam ekonomi primitif dan ekonomi petani. Ekonomi primitif, misalnya, mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang bersifat ekologis, teknologis dan sosial.¹⁸ Kita tidak dapat memahami ekonomi primitif tanpa memahami keterbatasan-keterbatasan itu. Hal serupa juga terjadi dengan ekonomi petani, sekalipun dalam tingkatan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ekologi ladang, sawah, dan sagu dalam sejarah ekonomi Indonesia cukup menunjukkan bahwa dari ekologi yang berbeda lahir struktur ekonomi yang berbeda, sekalipun masih dalam kerangka sistem ekonomis agraris.

Feodalisme merupakan contoh dari sebuah sistem yang memadukan ekonomi dan sosial. Heilbroner menyebutnya sebagai campuran dari ekonomi berdasarkan adat dan ekonomi berdasar perintah, dengan adat menduduki tempat yang dominan. Ekonomi berdasarkan adat ialah ekonomi yang dibentuk dari bawah, dan ekonomi perintah ialah ekonomi yang dibentuk dari atas.¹⁹

Ekonomi adat didasarkan atas seperangkat tradisi. Kiranya desa-desa di Indonesia pada abad-abad yang lalu dengan kerangka

17 Cf. W. Ashworth, "The Study of Modern Economic History", dalam Harte (ed.) *The Study of Economic History*, hlm. 213.

18 George Dalton, "Theoretical Issues in Economic Anthropology", dalam George Dalton (ed.), *Economic Development and Social Change* (Garden City, New York: Natural History Press, 1971), hlm. 189.

19 Heilbroner, *The Making of Economic Society*, hlm. 21.

patrimonial mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan tipe campuran itu. Masuknya ekonomi kolonial dapat dianggap sebagai masuknya ekonomi berdasarkan perintah, terutama pada zaman Tanam Paksa, sehingga ekonomi Indonesia di pedesaan merupakan campuran dengan adat yang dominan, tetapi di tingkat atas mirip dengan birokrasi klasik dengan perintah yang dominan. Dualisme ekonomi terjadi lagi ketika ekonomi pasar mulai menempatkan diri. J.H. Boeke sudah membahas hal itu sejak lama.²⁰ Demikian juga konsep "attribute paying mode of productions" menunjukkan dengan jelas bahwa ekonomi di masa lalu sangat erat kaitannya dengan sistem sosial secara keseluruhan.²¹

Munculnya antropologi dan sosiologi ekonomi merupakan usaha untuk menjembuhkan antara ekonomi dengan sistem budaya dan sosial. Teori-teori ekonomi biasanya hanya berlaku untuk masyarakat industrial, sedangkan untuk masyarakat non-pasar, bahkan ahli-ahli ekonomi harus melihat secara antropologis. George Dalton membedakan ekonomi primitif, menyebutkan tanda-tandanya seperti *Gemeinschaft*, status, *community*, dan terkaitnya ekonomi dengan masyarakat yang masing-masing dikemukakan oleh Toennies, Aine, Weber dan MacIver, serta Polanyi. Bagi ekonomi primitif berlaku rumus yang dikemukakan oleh Firth, "*From According to his status of legations in the social system, to each according to his rights in the system.*"²² Analisa dari ekonomi primitif dan ekonomi petani bukanlah dalam soal output atau produktivitas serta penampilan-penampilan lain yang dapat dikuantifikasikan, tetapi dalam sejumlah peraturan dari organisasi sosial dan struktur sosio-ekonomis. Tanpa kuantifikasi, pembicaraan dalam sebuah ekonomi non-moneter,

19 Heilbroner, *The Making of Economic Society*, hlm. 21.

20 Lihat J. H. Boeke, *Economic and Economic Policy in Dual Societies as Exemplified by Indonesia* (Haarlem: Tjeenk Willink and Zoon, 1953). Lihat juga tulisannya tentang "Ekonomi Timur", dalam *Oosterse Economie* (Den Haag: Servire: 1955).

21 Samir Amin, *Unequal Development: An Essay on the Social Formation of Peripheral Capitalism* (New York: Monthly Review Press, 1976), Chapter 1.

22 Dalton "Theoretical Issues", dalam Dalton (ed.), *Economic Development and Social Change*, hlm. 204.

demikian Manning Nash, dapat mengemukakan masalah-masalah yang menarik yaitu tentang: 1) teknologi dan pembagian kerja, 2) struktur dan keanggotaan dari unit produksi, 3) penguasa atas kekayaan dan kapital, 4) sistem dan media penukaran, serta 5) perubahan-perubahan budaya dan ekonomi, di antaranya sebagai akibat dari monetisasi. Selanjutnya juga dikemukakannya masalah-masalah pasar dan petani yang dapat meliputi soal-soal pasar dan organisasi ekonomi, sistem quasi-tribal, sistem pasaran regional, mekanisme pemetaan (*leveling mechanisme*) dan penguasaan atas kekayaan, potensi ekonomi petani, dan datangnya ekonomi ekspor.²³

Dalam sosiologi ekonomi, tokoh seperti Neil J. Smelser, telah berusaha untuk mempertemukan antara sosiologi dan ekonomi.²⁴ Tulisannya terutama menarik untuk studi mengenai masyarakat industrial, sekali pun juga banyak hal dikemukakannya mengenai perubahan ekonomi dari ekonomi petani ke ekonomi industri dan hubungannya dengan struktur sosial. Di sini patut dikemukakan peringatan R.H. Tawney mengenai hubungan sejarah ekonomi dan sosiologi. Dikatakannya bahwa sosiologi menaruh perhatian terutama pada hal-hal yang umum, klasifikasi dari masyarakat dan lembaga-lembaganya, sedangkan sejarawan menaruh perhatian terutama dengan hal-hal yang khusus, sekalipun tidak hanya sampai di situ saja. Sejarawan pun juga harus mampu mensistematisasikan semesta fakta-fakta kongkret yang kacau dengan menggunakan hipotesa-hipotesa. Sejarawan berhubungan dengan *sequences* (urutan kejadian), bukan semata-mata dengan peristiwa-peristiwa lepas, tetapi sebagai fase-fase atau tingkatan dalam perkembangan ekonomi.²⁵

Dalam hal hubungan antara faktor ekonomi dan non-ekonomis, patut disebut di sini nama Max Weber yang menulis *The Protestant*

23 Manning Nash, *Primitive and Peasant Economic Systems* (San Fransisco, California: Chandler Publishing Company, 1966).

24 Neil J. Smelser, *The Sociology of Economic Life* (New Delhi Prentice Hall of India Ltd. , 1965).

25 R. H. Tawney, "The Study of Economic History", dalam Harte (ed.) *The Study of Economic History*, hlm. 104.

Ethics and the Spirit of Capitalism yang kontroversial itu. Tulisan inilah yang mengilhami Geertz dalam mengulas mengenai peranan kaum Muslim reformis dalam mengorganisasikan kembali ekonomi pasar menjadi ekonomi toko, semacam revolusi komersial. Selain etika agama, juga faktor psikologis mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. David C. Clelland dalam *The Achieving Society* melihat faktor keinginan untuk mencapai sesuatu (*need for achievement* atau *n-ach*) sebagai faktor utama yang menggerakkan manusia untuk maju dalam semua bidang, termasuk ekonomi.²⁶ Tulisan ini bahkan sudah mempengaruhi banyak program pengembangan kewiraswastaan di negeri-negeri berkembang, termasuk di Indonesia. Bahwa faktor budaya mempunyai pengaruh pada kemajuan ekonomi dikemukakan juga oleh Nash yang melihat bahwa inovasi di Mojokuto dan Tabanan itu bisa terjadi oleh karena terdapatnya hubungan yang luas dari pedagang pasar di Mojokuto dan budaya istana yang cangguh di istana-istana Bali.²⁷ Kita teringat bagaimana istana-istana di Jawa dan Sumatera Utara bereaksi terhadap pembangunan perkebunan di daerahnya di masa lalu.

Sekalipun sejarawan akan menggunakan teori dalam penulisan-nya, tetapi sejarawan lain dengan teori sosial dalam banyak hal. Teori sosial hanya menaruh perhatian pada segmen waktu yang singkat, mengasumsikan bahwa sistem hukum dan politik tetap, sedangkan sejarawan terutama membicarakan periode yang lebih panjang dengan tekanan pada struktur institusional. Mengenai sistem pasar misalnya, sejarawan juga ingin melihat kekuatan-kekuatan apa yang ada di belakangnya. Sejarawan mempelajari kondisi, struktur kelas, dan kebijakan dari negara.²⁸ Namun sejarawan juga menjadi teori sosial pada waktu ia membicarakan proses jangka pendek dan melakukan seleksi, klasifikasi, dan memberi makna. Berbeda dengan teori sosial,

26 D. C. Clelland, *The Achieving Society* (New York: Collier Macmillan, 1967).

27 Nash, *Primitive and Peasant Economic System*, hlm. 133.

28 Tawney, "The Study of Economic History," dalam Harte (ed.), *The Study of Economic History*, hlm. 102.

atau teori ekonomi yang membicarakan tentang bentuk, sejarahwan ekonomi menjadi semacam ekonomi terapan.²⁹ Tetapi lebih dari itu, sejarahwan selalu merasa perlu untuk mencari struktur yang mendasari permukaan kejadian-kejadian, dan struktur itu selalu lebih dari semata-mata bersifat ekonomis, dan itulah sebabnya sejarahwan dapat kembali pada "*political economy*". Kita ingat definisi Polanyi bahwa ekonomi adalah *instituted process*.³⁰

Sejarahwan yang sanggup mengangkat diri dari tingkat mikro ke pemahaman masalah ekonomi makro tidak akan menjadi sekadar antikuarianisme. Pengangkatan diri "ke atas" ini dapat dikerjakan melalui tiga cara. Pertama, sejarah yang sifatnya lokal dapat diangkat menjadi sejarah yang nasional, dengan menjadikan lokalitas sebagai bagian dari keseluruhan sistem ekonomi nasional. Kedua, sejarah yang membicarakan masalah-masalah khusus, seperti misalnya sebuah komoditi tertentu, dapat diangkat sebagai bagian dari keseluruhan sistem ekonomi. Dan ketiga, dan ini sangat penting, mengangkat sejarah ke arah pembentukan teori, hitungan terakhir sejarah ekonomi merupakan bagian dari sejarah. Sejak lama, G.N. Clark, yang memegang *chair* sejarah ekonomi di Oxford pada 1932 mengatakan bahwa sejarah ekonomi bagi sejarah adalah sebagai manusia ekonomis bagi kemanusiaan. Nilai praktis dari studi sejarah bersifat tidak langsung. Sejarah tidak lebih sebagai bagian, bagian yang tak dapat ditinggalkan, dari usaha bersama manusia dan ilmu-ilmu sosial.³¹

Studi-studi mikro dalam tingkat lokal merupakan sumbangan dari pemahaman sejarah nasional. Sejarah ekonomi di tingkat lokal akan dapat menunjukkan bagaimana nasib dari berbagai daerah dan

29 T. S. Ashton, "The Relation of Economic History to Economic Theory," dalam Harte, *ibid.*, hlm. 171.

30 Karl Polanyi, "The Economy as Instituted Process," dalam Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg, dan Henry W. Pearson (Eds.), *Trade and Market in Early Empires* (Chicago: Henry Regny Company, 1971), hlm. 243-270.

31 G. N. Clark, "The Study of Economic History," dalam Harte (ed.), *The Study of Economic History*, hlm. 85.

berbagai sektor,³² ternyata perkembangan tiap daerah memang tidak merata. Dalam hubungannya dengan sektor ekonomi modern, misalnya, ada daerah-daerah yang masih bersifat perifer yang belum mengalami ekspansi dari organisasi ekonomi Barat, yang *mediated* yaitu organisasi ekonomi Barat yang sudah melibatkan diri dalam ekonomi primitif dalam hal pertanahan dan sumber alam, dan yang sudah mengalami kontak langsung, yaitu adanya usaha-usaha ekonomi Barat dan sejumlah personilnya bertempat tinggal di tempat yang sama dengan ekonomi primitif dan petani.³³ Dengan adanya hubungan semacam itu maka terjadilah perubahan-perubahan. Mengenai perubahan juga tidak semua masyarakat mengalami gejala yang sama. Smelser menyebutkan tiga macam kemungkinan perubahan, yaitu perubahan dalam proses sosial, segmentasi, dan perubahan struktural. Perubahan proses sosial ialah perubahan yang terjadi masih terdapat dalam struktur yang ada, perubahan segmentasi yaitu adanya perembesan struktur baru ke dalam unit-unit tetapi tidak menyebabkan perubahan struktur yang ada secara kualitatif, dan perubahan struktural ialah yang menyangkut perubahan kualitatif dari organisasi dan peranannya. Perubahan struktural dapat terjadi dengan masuknya industri transportasi baru seperti usaha kereta api di daerah pedalaman.³⁴ Perubahan-perubahan itu akan mempengaruhi soal tenaga kerja, akumulasi, kapital, perubahan demografis. Sering dalam perubahan itu masih dicobakan juga mempertahankan ciri-ciri ekonomi lama, seperti misalnya penyewaan tenaga kerja keluarga di pabrik-pabrik adalah sisa dari produksi rumah tangga dari industri kecil. Demikian juga adanya tenaga kerja yang melajo ke tempat kerjanya dapat dianggap sebagai usaha menyesuaikan diri ke dalam sistem kerja-upahan secara penuh, tetapi masih tetap menjadi anggota dari komunitasnya yang lama.

32 Peter Mathias, "Economic History-Direct and Obligue," dalam Martin Ballard (ed.), *New Movements in the Study and Teaching of History* (Bloomington: Indiana University Press, 1971), hlm. 89.

33 Nash, *Primitive and Peasant Economic System*, Chapter 6.

34 Smelser, *The Sociology of Economic Life*, hlm. 99-100.

Transformasi ekonomis di daerah-daerah tidak selalu sama dengan transformasi ekonomis di tingkat nasional. Perubahan ekonomi dari ekonomi tradisional yang bersifat pedesaan, primitif dan petani, menuju ke ekonomi kolonial dengan masuknya peraturan-peraturan ekonomi kolonial, dan pada akhirnya ekonomi kapitalistis tidak menunjukkan tingkatan yang sepadan. Perubahan dari ekonomi pasar ke ekonomi warung, ke ekonomi toko, dan ke ekonomi toserba (*department store*) tidak mempunyai laju yang sama di setiap lokalitas. Bahkan di satu lokalitas ciri-ciri ekonomi agraris seperti dalam hubungan kerja, *bakulan*, *ngempit*, *mendring* masih berlaku di tengah-tengah kota. Demikian pula perubahan pasaran masing-masing tergantung seberapa jauh derajat penguasaan dari pasar yang didominasi oleh usaha-usaha besar dan kapital besar jika dibandingkan dengan operasi dari usaha kecil dengan kapital rendah. Dalam hal pasar, Alice G. Dewey telah menulis mengenai pasar di Jawa, *Peasant Marketing in Java* yang mengemukakan adanya dualisme pasar semacam itu.³⁵

Penelitian sejarah ekonomi semacam ini akan merupakan sumbangan bagi penelitian ekonomi yang dapat membantu memecahkan masalah-masalah masa kini, atau setidaknya dapat memformulasikan masalah-masalahnya, demikian Fernand Braudel. Untuk keperluan itu sebuah dialog sejarah ekonomis dan ekonomi perlu diadakan. Meskipun demikian, menurut Clark, sungguh tidak mungkin dan tidak diharapkan bahwa teori sosial dapat menunjukkan pada sejarawan apa yang harus dicari, demikian pula sejarawan tidak dapat memenuhi sepenuhnya informasi apa yang diperlukan oleh teori sosial secara pasti.³⁶ Dengan mengetahui sejarah pertumbuhan ekonomi di satu masa, ahli ekonomi dapat melihat waktu kontemporer dalam sebuah kerangka masa depan yang panjang, dan dapat

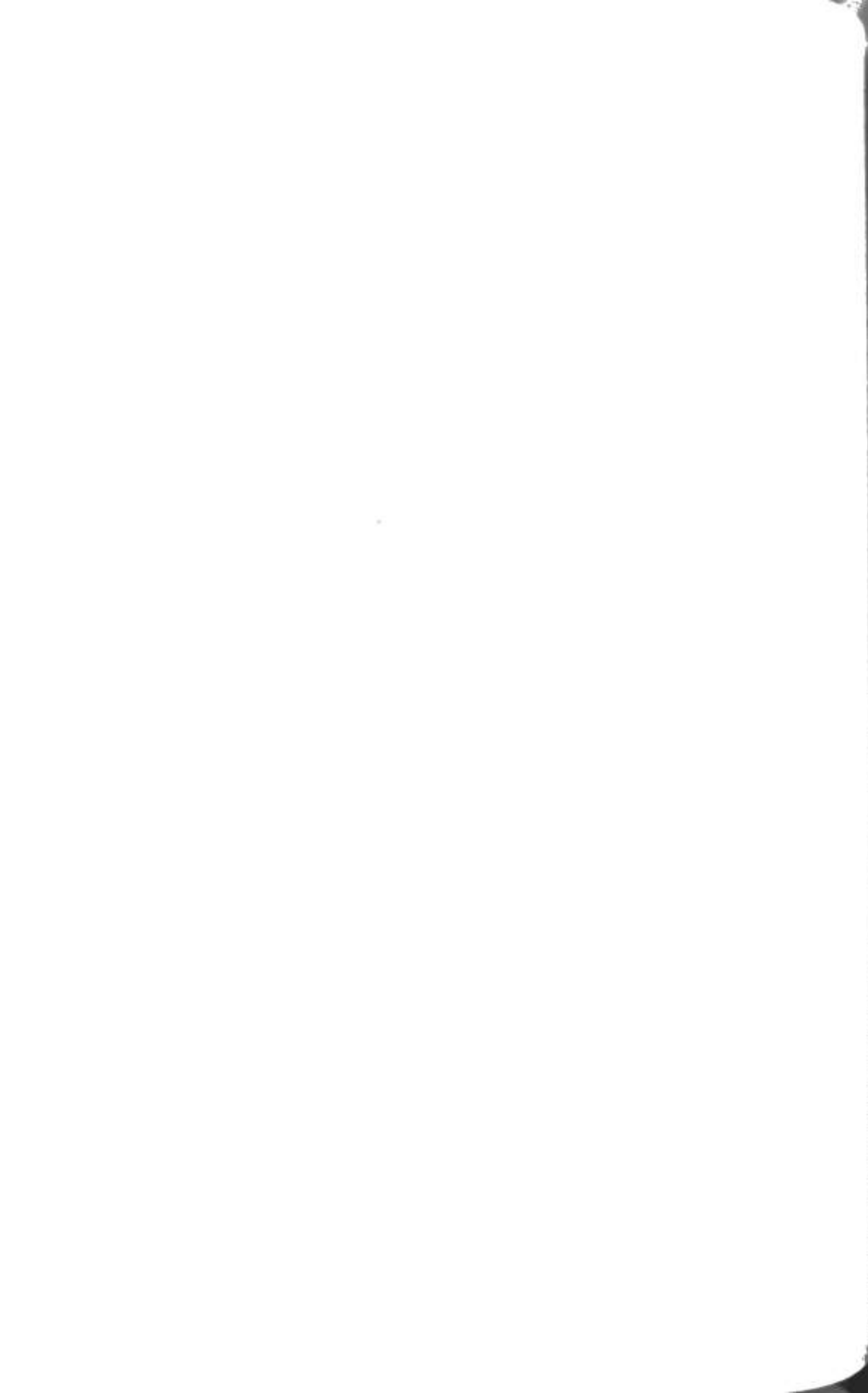
35 Alice G. Dewey, *Peasant Marketing in Java* (Glencoe, Ill: Free Press, 1962).

36 Fernand Braudel, *On History* (Chicago: The University of Chicago Press, 1980), hlm. 83.

mengeluarkan ahli ekonomi dari semata-mata pemecahan masalah ekonomi jangka pendek.

Akhirnya perlu sekali lagi ditekankan bahwa gejala ekonomi dan gejala politik adalah produk dari interaksi timbal balik kekuatan-kekuatan, yang sebagian bersifat ekonomis dan sebagian non-ekonomis. Kiranya perlu disadari bahwa teori sosial tidak dapat lepas dari sejarah. Sensifitas ahli-ahli ekonomi memperhatikan juga segi-segi non-ekonomis. Demikian pula seharusnya bagi sejarawan ekonomi dan ekonomi pedesaan terlebih lagi.³⁷

³⁷ G. N. Clark, "The Study of Economic History," dalam Harte (ed.), *The Study of Economic History*, hlm. 83.



SEJARAH WANITA:

Dari Sejarah Androcentric Ke Sejarah Androgynous¹

SEJARAH KONVENSIONAL, REKONSTRUKSI ANDROCENTRIS

Penulisan Sejarah Indonesia ketinggalan dari ilmu-ilmu sosial lainnya — seperti sosiologi — dalam penelitian tentang wanita, sekalipun “Woman Studies” juga belum mempunyai kedudukan tersendiri dalam ilmu-ilmu sosial di negeri ini. Kebanyakan tulisan sosiologi atau demografi membicarakan peranan wanita dalam sektor-sektor sosial, seperti karangan Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*,² dan banyak karangan lain tentang ketenagakerjaan dan keluarga berencana. Sementara itu dalam ilmu sejarah, belum ada disertasi yang secara khusus membahas sejarah wanita, sekalipun dalam beberapa skripsi S-1 maupun S-2 sudah mulai tampak perhatian ke arah itu. Kita ingin mengejar ketinggalan di dalam negeri — dari ilmu-ilmu sosial lainnya; dan secara umum, kita pun ingin mengejar ketinggalan dari penelitian-penelitian sejarah di luar Indonesia. Dalam kajian sejarah di Amerika, misalnya, sejarah wanita sudah menjadi spesialisasi tersendiri, di samping

1 Bahasa Yunani: *andro* = laki-laki; *gyne* = wanita.

2 Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: Penerbit C. V. Rajawali, 1985).

cabang-cabang sejarah lainnya. Hal terakhir ini tampak dalam terbitan American Historical Association (AHA), *Teaching Women's History* yang merupakan buku panduan untuk pengajaran sejarah wanita di SLTA dan tahun-tahun pertama universitas.³

Meskipun demikian, baik ilmu-ilmu sosial di Indonesia maupun sejarah mempunyai kekurangan masing-masing. Sosiologi, demografi, dan ekonomi paling-paling membicarakan wanita sebagai penyumbang, seperti tampak dalam judul-judul karangan untuk seminar, penelitian, dan kebijakan sosial. Karangan-karangan itu selalu memakai “peranan” sebagai tema pokoknya, seolah-olah wanita hanya penyumbang terhadap jalannya sektor-sektor sosial-ekonomi. Bahkan nama departemen, Menteri Urusan Peranan Wanita, menunjukkan kecenderungan umum semacam itu. Wanita rupanya tidak pernah berdiri sendiri. Memang, kita tahu dunia ini terdiri dari separuh laki-laki dan separuh perempuan, tetapi dengan kata “peranan” kita mengartikannya secara konotatif bahwa wanita “hanyalah” penyumbang, sedangkan dunia ini adalah dunia laki-laki. Disiplin sejarah sebenarnya mempunyai keunggulan dari ilmu sosial lainnya, sekalipun ketinggalan dalam kuantitas dan kesadaran pentingnya wanita. Sejarah sudah menganggap bahwa wanita adalah pribadi yang bisa berdiri sendiri, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya buku yang ditulis tentang tokoh-tokoh wanita. Biografi merupakan hasil terpenting dari sejarah — sekalipun kenyataannya tidak juga ditulis oleh sejarawan. Selain itu sejarah juga sudah menghasilkan buku-buku gerakan wanita, seperti buku Konggres Wanita Indonesia, *Sejarah Setengah Abad Wanita Indonesia* — yang juga tidak ditulis oleh sejarawan profesional.⁴ Itulah sebabnya, dalam awal makalah ini disebutkan ketertinggalan penulisan sejarah dan sejarawan.

3 Gerda Lerner, *Teaching Women's History* (Washington: American Historical Association, 1981).

4 Konggres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: P. N. Balai Pustaka, 1978).

Mengapa sejarawan ketinggalan? Sejarah kita yang konvensional rupanya dipenuhi dengan tema-tema sejarah politik dan militer, jenis sejarah yang paling menarik perhatian umum. Sejarah politik dan militer adalah sejarah tentang kekuasaan dan keperkasaan, dua hal yang selalu menjadi milik kaum laki-laki. Oleh karena itu rekonstruksi sejarah kita bercorak *androcentric*, karena sejarah berpusat pada kegiatan kaum lelaki saja. Gambaran masa lalu semacam itu tentu saja tidak adil, karena melihat wanita sebagai *second sex* semata-mata. Biografi dan sejarah pergerakan yang sudah ditulis dapat memberi sedikit hiburan atas ketidakadilan itu, tetapi belum dapat menghilangkan kesan yang sesungguhnya, sebab kedua jenis tulisan itu justru menekankan seolah wanita hanya mengurus kepentingannya sendiri, sebuah dunia yang *exclusive*. Makalah ini akan mencoba untuk menjelaskan pentingnya sejarah wanita, dengan tujuan supaya gambaran sejarah menjadi seimbang — masa lalu adalah masa lalu laki-laki dan perempuan bersama-sama. Kita akan mulai dengan mengemukakan beberapa pendekatan tema-temanya.

PENDEKATAN SEJARAH SOSIAL, SEJARAH KEBUDAYAAN, DAN SEJARAH POLITIK

Sebagai spesialisasi dalam kajian sejarah, sejarah wanita dapat dimasukkan dalam sejarah sosial. Tulisan tentang wanita dapat mencerminkan dengan jelas sistem sosial tempat dan waktu wanita itu. Sebuah contoh yang bagus ialah buku Leonard Blusse, *Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*.⁵ Dalam Bab VIII, yang merupakan bab terpanjang dalam buku ini, diceritakan tentang para wanita peranakan, terutama tentang Cornelia van Nijenroode. Kisahnya dimulai ketika Cornelia van Nijenroode menjadi kepala dagang VOC di Hirado, Jepang, tahun-tahun 1623 sampai 1633, sebelum orang-

5 Leonard Blusse, *Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan Belanda di Batavia VOC* (Jakarta: Pustaka Azet, 1988).

orang Belanda terpaksa mengalihkan pusat dagangnya ke Deshima. Cornelia memelihara dua orang nyai Jepang, dan dari mereka lahir anak-anak perempuan, Hestar dan Cornelia. Ketika Cornelia meninggal ia membuat wasiat supaya anak-anaknya dikirim ke Batavia untuk mendapatkan dunia yang lebih beradab daripada pemukiman Belanda di Hirado. Maka anak-anak itu pun dipisahkan dari ibu-ibu mereka setelah semua persyaratan dalam wasiat itu dilaksanakan oleh pejabat yang menggantikan van Nijenroode. Selanjutnya kisah-kisah para wanita peranakan di Batavia ini, Hester dan terutama Cornelia, mencerminkan kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Batavia pada abad ke-17. Kisah Cornelia mirip dengan novel, tetapi tidak menghidangkan dunia imajinasi. Dari sumber-sumber yang luar biasa lengkapnya, dari Dagh Register, catatan gereja, akta notaris, keputusan pengadilan, surat-surat resmi, surat-surat pribadi, dan peninggalan berupa benda-benda dan gambar, penulisnya sanggup mengungkap Cornelia sebagai tokoh yang penuh kegemilangan dan duka sekaligus dalam dunia barunya di Batavia, yang sesekali manis tetapi seringkali kejam terhadap wanita peranakan. Wanita yang dibesarkan di rumah yatim Batavia itu akhirnya menikah dengan orang-orang terhormat di Batavia, yaitu Pieter Cnoll dan Johan Bitter. Perkawinannya itu penuh dengan kisah sosial. Persoalan sekitar keuangan, hukum, pergaulan, ritual, semuanya terungkap lewat kisah Cornelia. Juga kekejaman Batavia sebagai kota Belanda di daerah tropis tampak dalam kisah itu. Sepanjang hidupnya Cornelia melahirkan sepuluh anak selama 18 tahun, sehingga bisa dibayangkan bahwa ia terus-menerus dalam keadaan hamil selama itu. Perkawinan pertama dengan Pieter Cnoll meninggalkan kenangan indah, tetapi tidak demikian perkawinan keduanya dengan Johan Bitter. Cornelia pasti bukan orang berbahagia, karena anak-anaknya meninggal, kecuali seorang yang hidup sampai dewasa. Demikian juga Bitter telah memberinya kesulitan-kesulitan yang luar biasa, tetapi rupanya ia seorang perempuan yang penuh keberanian. Ia hidup dalam rumah yang dilayani oleh 50 budak, tetapi

masyarakat Batavia tidak mampu menciptakan ketenteraman untuk warganya. Pasang-surut nasib Cornelia menunjukkan bahwa nasib wanita tidak banyak mendapat perlindungan, jika dibandingkan dengan kaum laki-laknya. Cornelia akhirnya harus meninggalkan Batavia untuk hidup di negeri Belanda, tempat yang lebih asing lagi baginya. Kisah Cornelia adalah mikrokosmos Batavia, sejarah sosial kota Belanda di daerah tropis. Apa yang penting bagi pendekatan sejarah sosial ialah kenyataan bahwa sejarah wanita adalah sejarah itu sendiri. Pendekatan sejarah sosial semacam ini, yang sebenarnya juga merupakan sejarah keluarga, akan memperkaya pengetahuan kita tentang masyarakat di masa lampau, terutama tentang sisi-sisinya yang tak terungkap dalam sejarah dengan cara lainnya.

Kita belum menemukan bagaimana sejarah wanita didekati dengan pendekatan sejarah kebudayaan, kecuali dengan menunjuk pada buku Johan Huizinga, *The Waning of the Middle Ages*.⁶ Buku yang menceritakan kehidupan pada Jaman Pertengahan akhir dari negeri Perancis-Burgundia ini banyak bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak secara khusus bercerita tentang wanita, tetapi ketika melukiskan soal percintaan, pinangan, dan kehidupan istana, kita pun mendapat gambaran tentang kehidupan para wanitanya. Pendekatan budaya Huizinga ialah "*cultural morphology*", suatu usaha untuk melukiskan pola-pola kehidupan, kesenian, dan pikiran secara keseluruhan. Pemahaman morfologis atas budaya mencoba untuk menumbuhkan "*historical sensation*", "*historical contact*", "*historical imagination*" atau "*historical vision*" tentang masa lalu, sehingga kehadiran masa lalu itu terasa benar. Sebuah periode kultural yang menjadi objek kajian sejarah mempunyai kualitas yang mempersatukan seluruh hasil budaya dari sebuah zaman dan tampak homogenitasnya.⁷ Dalam hal ini jika kita menulis sejarah wanita dalam

6 Johan Huizinga, *The Waning of the Middle Ages* (New York: Anchor Books, 1954).

7 Lihat Johan Huizinga, *Men and Ideal: History, the Middle Age, the Renaissance* (New York: Meridian Books, Inc., 1959), hlm. 17-76; Karl J. Weintraub, *Visions of Culture* (Chicago: University of Chicago Press, 1966), hlm. 208-246.

artian kultural, kita dapat melukiskan morfologi budaya wanita dalam berbagai bentuk dan fungsinya, sebagaimana tampak dalam simbol-simbol budaya, motif, tema, konsep, cita-cita, gaya, dan sentimen. Kita dapat bercerita tentang wanita-wanita di istana, penginapan, pasar, gedung-gedung pertunjukan, dan tempat-tempat hiburan. Sejarah budaya mementingkan bentuk-bentuk sosial. Bagaimana dunia wanita muncul dalam simbol-simbol budaya pada suatu masa adalah permasalahan yang ingin digarap oleh sejarah budaya. Peranan imajinasi dalam hal ini menjadi sangat penting, demikian juga peranan gaya tulisan dalam sejarah budaya. Sejarah budaya yang mencoba menggambarkan sensibilitas sebuah periode, terutama sensibilitas wanitanya, perlu mendapat dukungan dari gaya penceritaan yang penuh perasaan. Pemahaman simpatetik pada objek kajian sebagaimana dianjurkan dalam ilmu-ilmu sosial perlu mendapat penekanan yang utama dalam sejarah budaya. Tulisan Huizinga mempunyai gaya yang luar biasa indahnyanya, sehingga kita merasa hanyut dalam lukisan-lukisannya tentang akhir Jaman Pertengahan. Kita dibawa ke dunia imajinasi yang historis dan faktual. Sejarah menjadi semacam "*romantic art*".

Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan politik. Istilah politik di sini agak berbeda artinya dengan kamus konvensional ilmu politik. Dalam sejarah wanita, pendekatan politik artinya ialah politik seks, di mana kaum wanita berhadapan dengan kaum laki-laki memperebutkan hegemoni dan kekuasaan. Pendekatan politik tentu saja muncul dari kalangan gerakan Pembebasan Wanita, yang mencoba untuk melepaskan diri dari dunia yang dikuasai laki-laki. Mereka melawan gambaran dunia yang *sexist*, dalam hubungan sosial, ekonomi, politik, bahkan keagamaan. Mereka menggambarkan wanita sebagai kaum tertindas, sebagaimana halnya kaum buruh dan orang-orang kulit hitam di Amerika. Dalam buku *Teaching Women's History* banyak contoh diberikan tentang sejarah emansipasi wanita, baik yang tanpa atau dengan ideologi gerakan feminisme. Kaum feminis mempunyai filsafat sendiri yang mencoba untuk menggugat *phallic morality*,

seperti misalnya buku Mary Daly, *Beyond God the Father*.⁸ Buku ini tidak muncul sebagai buku sejarah, tetapi memberikan gambaran tentang perkembangan sejarah pemikiran kaum feminis yang mencoba menggugat penindasan terhadap kaum wanita dalam alam pikiran dunia Barat dan "Tuhan Sang Bapa". Dalam hal ini kita dapat menunjukkan bagaimana mereka menginterpretasikan pembentukan simbol di Amerika dalam kaitannya dengan gerakan pembebasan wanita, dan gerakan mengembalikan kepercayaan kepada wanita. Gloria Steinem, seorang tokoh terkemuka gerakan feminis, dalam sebuah artikel yang dibuat oleh Charlene Spretnak, *The Politics of Women's Spirituality*, mengatakan bahwa film seri *Wonder Woman* yang diputar di Amerika di tahun 1970-an, yang melukiskan seorang wanita titisan Puteri Amazon, turun ke dunia untuk menyelamatkan planet ini dari kejahatan dan kekejaman yang ditimbulkan oleh kaum lelaki.⁹ Buku ini selanjutnya penuh dengan artikel yang berusaha meyakinkan bahwa dalam *pre-patriarchal society* masyarakat dikuasai oleh wanita, sebagaimana ditunjukkan dalam mitologi primitif tentang pemujaan terhadap dewa-dewa wanita. Akhirnya mereka menuntut adanya sejarah yang *gynocentric*, berpusat pada wanita. Perdebatan yang timbul mengenai sejarah, *androcentric* atau *gynocentric*, merupakan konsekuensi dari gerakan feminisme radikal. Pendekatan politik tidak hanya berhenti pada filsafat dan sejarah, tetapi juga menjadi aksi. Dalam buku Wendy Collins *et al.* (Eds.), *Women: The Directory of Social Change*, program-program pembebasan wanita ditunjukkan dengan jelas.¹⁰ Pusat-pusat Gerakan Pembebasan Wanita (Women's Liberation Centers) akan memberi konsultasi tentang hubungan kerja, gaya hidup, kesenian, seks, kesehatan, perihal mengasuh anak, pertahanan terhadap kejahatan, perlindungan

8 Mary Daly, *Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation* (Boston: Beacon Press, 1973).

9 Charlene Spretnak, *The Politics of Women's Spirituality: Essays on the Rise of Spiritual Power within the Feminist Movement* (New York: Anchor Books, 1982), hlm. 114-120.

10 Wendy Collins *et al.* (Eds.), *Women: The Directory of Social Change* (London: Wildwood House, 1978).

hukum, dan bagaimana mendirikan kelompok-kelompok wanita. Gerakan feminis yang radikal mencoba menyadarkan wanita akan *sisterhood* untuk menggantikan istilah *brotherhood*. Mereka bahkan membenarkan lesbianisme dengan dalih politik. Wanita hanya bisa membebaskan diri dari penindasan kaum lelaki jika mereka meninggalkan apa yang disebut *vaginal politics* yang menjadikan wanita tergantung pada pria dan menganut gerakan politik baru, yaitu *clitoral politics* yang dapat membebaskan wanita dari ketergantungan.

Uraian tentang ketiga pendekatan itu menunjukkan keragaman dalam sejarah wanita. Pendekatan pertama dan kedua kiranya dapat diterima sepenuhnya, sedangkan pendekatan ketiga tentu dengan hati-hati sekali kita pertimbangkan. Gerakan Pembebasan Wanita sangat erat hubungannya dengan konteks sosial, ekonomis, dan historis dunia Barat. Kita tidak tahu, misalnya, apa kata mereka jika melihat masyarakat Minangkabau dengan *matriarchy* atau *gynocracy*-nya. Yang penting, kita tahu bahwa sewajarnya kita memberikan tempat lebih adil pada wanita dalam penulisan sejarah. Di bawah ini akan diberikan contoh-contoh tentang tema-tema yang dapat dikerjakan ke arah pembenahan sejarah itu.

TEMA-TEMA SEJARAH WANITA

Banyak tema dapat dikerjakan sehubungan dengan penulisan sejarah wanita. *Pertama*, tema tentang peranan wanita dalam berbagai sektor sosial-ekonomi, sebagaimana biasa dikerjakan oleh ilmuwan sosial lain. Topik-topik seperti, “wanita dalam dunia usaha”, “wanita dalam kesenian”, “wanita dalam politik”, “wanita dalam perang gerilya”, “wanita dalam dunia pendidikan”, dan sebagainya. Dengan memberikan gambaran mengenai peranan wanita, sumbangan wanita dalam berbagai sektor itu akan menjadi jelas, dan lengkaplah gambaran kita mengenai sejarah masing-masing sektor. Bahkan dalam sektor tertentu, wanita dapat merupakan tulang punggung sebuah sektor. Tesis S-2 Soedarmono, *Munculnya Kelompok Pengusaha*

Batik di Laweyan Pada Awal Abad XX, sebenarnya merupakan kisah tentang peranan wanita dalam dunia usaha.¹¹ Dalam puncak hirarki dunia usaha di Laweyan, ternyata wanita mempunyai kedudukan tertinggi sebagai pengusaha, sedangkan pria hanya membantu isteri jika diperlukan. Pengusaha batik di Laweyan pada waktu itu, dan di Surakarta pada umumnya pada waktu yang sama, mempunyai gelar *mbok mase*, suatu kehormatan sendiri bagi kaum wanita. Barangkali karena kekhasan jelas usaha itu, wanita mempunyai peranan lebih besar dari pria dalam perusahaan batik. Dengan demikian sektor ekonomi sebenarnya bukan saja milik kaum laki-laki, tetapi dalam banyak kasus justru kaum wanitalah yang memegang peranan lebih penting. Gambaran kita menjadi berubah dengan tulisan-tulisan semacam itu. Tentu masih banyak lagi jenis-jenis usaha lainnya, seperti dalam kesenian, di mana wanita mempunyai peranan penting. Penari-penari *bedaya* di kraton, penari-penari *tayub*, penari-penari *gambyong*, semuanya adalah wanita.

Kedua, jika kita tidak puas dengan hanya membicarakan peranan, kita dapat menuliskannya sebagai biografi atau prosopografi wanita yang mempunyai konotasi kemandirian. Biografi wanita sudah amat banyak ditulis orang. Nama-nama terkenal seperti Kartini, Dewi Sartika, Walandouw Maramis, S.K. Trimurti, sudah banyak menghias kepustakaan kita. Demikian juga nama-nama pahlawan seperti Cut Nyak Din, Nyi Ageng Serang, dan akhir-akhir ini dari Aceh muncul nama Pocut Meurah Intan dalam tulisan *Pocut Meurah Intan: Srikandi Nasional dari Tanah Rencong*.¹² Wanita dengan selendang sutra di badan dan rencong di tangan merupakan gambaran kepahlawanan, yang ternyata juga bukan dunia laki-laki semata. Pahlawan ini meninggal dalam pembuangan di Blora, 20 September 1937, dimakamkan di Tegal Sari, sebuah desa di pinggir kota itu.

11 Soedarmono, "Munculnya Kelompok Pengusaha Batik di Laweyan pada Awal Abad XX" (Tesis S-2, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1987).

12 Yayasan T. P. Aceh, *Pocut Meurah Intan: Srikandi Nasional dari Tanah Rencong* (Jakarta: Yayasan T. P. Aceh, 1987).

Masih banyak lagi nama-nama wanita yang patut diteladani dan dibuatkan biografinya. Di sini ternyata bahwa wanita bukan hanya sebuah tambahan, seorang penyumbang, tetapi pribadi yang sungguh mandiri.

Ketiga, tema tentang gerakan wanita. Barangkali setiap kita berbicara tentang sejarah wanita, sejarah pergerakanlah yang ada dalam pikiran sehingga sejarah wanita sering disamakan dengan sejarah pergerakan wanita. Mengenai sejarah pergerakan ini juga sudah mulai banyak ditulis. Cora Vreede-de Stuers sudah menulis *The Indonesian Woman, Struggle and Achievement*.¹³ Demikian juga sejarah dari pergerakan wanita di lingkungan Muhammadiyah sudah ditulis oleh Baroroh Baried, sekalipun masih berupa artikel saja.¹⁴ Tentulah masih banyak lagi gerakan-gerakan wanita yang sedang ditulis atau menulis sejarahnya sendiri. Dari gerakan wanita yang ada kita bisa membedakan ke dalam dua kategori. Gerakan wanita yang mandiri, dalam arti gerakan wanita yang *sui generis*, dan gerakan wanita yang merupakan kelengkapan lembaga pria. Darma Wanita dan Darma Pertiwi sebenarnya adalah gerakan wanita yang muncul sebagai pendamping dari pegawai negeri sipil dan militer. Dalam hal ini kita teringat ungkapan Jawa, "*suwarga nunut, neraka katut*", yang sekalipun tidak sedap didengar, dapat diberikan pada dua gerakan wanita itu. Ini tentu tidak mengurangi arti pentingnya gerakan wanita dalam dua tipe itu secara keseluruhan. Konggres Wanita Indonesia yang merupakan penjelmaan dari Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia telah mempunyai sejarah yang panjang dan mempunyai peranan politik yang penting sebagai sarana mobilisasi peran serta wanita. Belum terhitung di sini gerakan-gerakan wanita yang afiliasi dengan gerakan-gerakan laki-laki lain, seperti halnya

13 Cora Vreede-de Stuers, *The Indonesian Woman: Struggle and Achievement* (Gravenhage: Mouten and Co., 1960).

14 Baroroh Baried, "Islam and the Modernization of Indonesian Women", Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Islam and Society in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1983), hlm. 139-154.

'Aisyiah untuk Muhammadiyah, Fatayat untuk Nahdlatul Ulama, Wanita Taman Siswa, Wanita Katolik, dan sebagainya.

Keempat, tema tentang gambaran wanita. Kita dapat mencari gambaran wanita dalam prasasti, historiografi tradisional, sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra lisan. Sebagai contoh di sini dapat disebutkan misalnya, tulisan I Nyoman Kutha Ratna, "Protagonis Wanita dalam Roman Sastra Indonesia Sebelum Perang: Analisa Semiotik", sebuah tesis S-2.¹⁵ Dalam tulisan ini dibicarakan tentang tokoh-tokoh wanita dari sembilan pendekatan yang ditulis oleh para pengarang, laki-laki maupun wanita. Karena pendekatan kritik sastranya, tulisan ini tidak banyak mengkait dengan sejarah yang aktual, tetapi dapat menjadi contoh bagaimana wanita digambarkan dalam sastra. Apakah realitas sastra sama dengan realitas sosial? Sastra biasanya lebih longgar dalam menyampaikan gagasan yang penuh muatan ideologi, sedangkan sejarah terikat oleh adanya pembuktian-pembuktian. Apakah kisah wanita dalam sastra tipikal untuk zamannya atau "dunia yang lebih baik"? Di sinilah tugas dari sejarawan untuk membuktikan kebenaran sastra dan kebenaran sejarah dari gambaran-gambaran tentang wanita. Bagaimana wanita menggambarkan laki-laki, dan laki-laki menggambarkan wanita? Dari tulisan-tulisan yang ada dalam majalah wanita, seperti *Sarinah*, *Kartini*, *Femina*, kita tahu banyak hal tentang kesadaran diri wanita. Demikian juga dari majalah seperti *Matra* kita tahu kesadaran diri laki-laki, dan apa gambaran laki-laki tentang wanita. Dengan analisis ini kita dapat mengetahui banyak.

Kelima, tema sejarah keluarga. Kedudukan wanita dalam keluarga biasanya tampak dalam Sejarah Keluarga, sebuah cabang dari sejarah sosial. Dalam penelitian sejarah Indonesia belum banyak dikenal sejarah keluarga, tetapi dalam ilmu-ilmu sosial lain keluarga menjadi bagian penting dalam pembicaraan. Soal seperti perkawinan,

¹⁵ I Nyoman Kutha Ratna, "Protagonis Wanita dalam Roman Sastra Indonesia Sebelum Perang: Analisis Semiotik". (Tesis S-2, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1985).

kehidupan keluarga, kekerabatan sudah banyak ditulis oleh ahli antropologi. Sejarawan Indonesia belum mulai dengan kajian ini. Di Amerika, buku John Demos, *A Little Commonwealth: Family Life in Plymouth Colony* merupakan contoh yang baik.¹⁶ Dalam buku ini diceritakan di antaranya tentang struktur rumah-tangga yang didalamnya ada pasal mengenai hubungan suami dan isteri dan hubungan orang tua dengan anak-anak. Dalam buku lain yang lebih awal, Philippe Aries, *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life* yang menceritakan tentang kehidupan anak di masa *ancient regime* dapat ditemukan bagaimana orang menemukan masa anak-anak sebagai bagian hidup yang tersendiri.¹⁷ Anak-anak (laki-laki dan perempuan) pada mulanya hanyalah dianggap sebagai miniatur orang dewasa, sehingga mereka harus juga memakai pakaian dan kebiasaan orang dewasa. Pada waktu masa kanak-kanak ditemukan, mereka mempunyai kehidupan sendiri yang unik. Dalam hal ini kita teringat, misalnya, tentang bagaimana gadis-gadis dibesarkan di kalangan istana dan keluarga aristokrat. Buku kenangan hidup *Partini* dapat dipakai sebagai contoh bagaimana anak-anak bangsawan disosialisasikan.

Keenam, tema tentang budaya wanita. Munculnya sekolah-sekolah khusus untuk wanita, pers wanita, mode pakaian, perkumpulan arisan, sport khusus wanita, semuanya dapat menjadi topik bagi budaya wanita. Kita sudah menyebutkan bagaimana majalah wanita kelas menengah dan atas muncul pada tahun 1970-an dan menjadi bagaian penting dari bisnis pers. *Kartini*, *Sarinah*, *Femina*, *Gadis*, *Nova* adalah majalah wanita. Demikian juga majalah seperti *Selera*, *Laras*, *Asri*, ditujukan untuk pembaca wanita. Di masa dulu sudah ada pers wanita, tetapi lebih merupakan pers perjuangan, yaitu di antaranya *Poetri Hindia* di Bandung, *Poetri Merdeka* di

16 John Demos, *A Little Commonwealth: Family Life in Plymouth Colony* (Oxford: Oxford University Press, 1970).

17 Philippe Aries, *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life* (New York: Vintage Books, 1962).

Jakarta, *Soenting Melayu* di Bukit Tinggi, dan *Suara Aisyiyah* di Yogyakarta. Dengan adanya majalah hiburan untuk wanita, dan menurunnya majalah perjuangan wanita, apakah sejarah wanita menjadi lain? Apakah wanita Indonesia menjadi narsistik?

Ketujuh, tema hubungan laki-laki dan wanita. Tema ini menyangkut tema politik yang dalam konteks Indonesia tidak perlu mempunyai konotasi pembebasan wanita. Sejarah kriminalitas, seperti pemerkosaan, pelacuran, dapat menjadi topik dalam kategori ini. Demikian juga sejarah pembagian kerja secara seksual dalam masyarakat maupun dalam rumah-tangga. Apakah dalam dunia yang dikuasai laki-laki wanita hanyalah tukang masak, pelahir dan pemeliharaan anak, objek seks? Kapan perempuan mendapatkan hak untuk memilih, menjadi kepala desa, menjadi menteri? Mengenai contoh kepustakaan kita dapat mengembalikannya ke tema-tema lainnya dalam makalah ini. Kita dapat mengangkat tema hubungan laki-laki dan wanita dari novel-novel sastra Indonesia maupun daerah. Novel *Siti Nurbaya*, misalnya, menceritakan nasib wanita di tengah masyarakat Minangkabau yang sedang mengalami perubahan. Dalam sastra Jawa klasik *Rara Mendut* dapat menjadi kasus bagaimana hubungan antara laki-laki dan wanita, nasib wanita di tengah masyarakat yang penuh permusuhan dan dendam. Sehubungan dengan hubungan laki-laki dan wanita kita ingin menyebut adanya cita-cita kemajuan di kalangan priyayi Jawa pada awal abad ke-20, yang melahirkan buku pamflet yang menentang poligami, seperti buku Suwara, *Bab Alaki Rabi: Wayuh Kaliyan Mboten*¹⁸ sebagai usaha untuk mengatur hubungan yang terhormat antara laki-laki dan wanita.

Kedelapan, tema kelompok-kelompok wanita. Berbagai macam kelompok sosial wanita, seperti penulis wanita, wanita profesional, pekerja wanita, dapat kita tulis sebagai bagian dari sejarah sosial. Cara penulisannya dapat berupa prosopografi atau biografi kolektif,

18 Suwara, *Bab Alaki Rabi: Wayuh Kaliyan Mboten* (Semarang: H. A. Benjamins, 1913).

tetapi juga dapat berupa sejarah sosial biasa. Penggolongan wanita berdasarkan pekerjaannya merupakan cara termudah dalam pemilihan topik. Sebuah skripsi S-1 di Jurusan Sejarah, UGM, yaitu tulisan Fatia Nadia, "Tenaga Kerja Wanita di Perkebunan Teh Malaber — *Afdelingen* Cianjur *Regentschapen* Priangan tahun 1880-1900", adalah contoh topik yang membicarakan para pekerja wanita di perkebunan.¹⁹ Banyak lagi topik yang bisa dikerjakan, seperti kapan mulai muncul wanita dalam militer, polisi, politisi? Pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti perawat misalnya rupanya adalah khas pekerjaan wanita, tetapi kita tidak tahu sejarah kelompok kerja ini.

Kesembilan, tema etnisitas. Tema ini tentu saja dapat digabung dengan tema-tema lainnya, seperti sejarah keluarga. Penekanan pada soal etnisitas ini muncul mengingat setidaknya masalah adat merupakan kendala yang perlu diperhitungkan jika kita ingin berbicara tentang sejarah wanita. Bagaimana reaksi sebuah kelompok etnis tertentu dengan adat tertentu terhadap perubahan? Apakah perubahan juga terjadi terhadap kaum wanitanya? Mengingat bahwa di banyak daerah juga timbul gerakan-gerakan wanita dengan ciri etnis dan keagamaan, kita dapat memberikan tempat tersendiri bagi topik yang menyangkut wanita Bali, wanita Aceh, serta topik dengan ciri keagamaan, seperti wanita Islam, wanita Hindu, wanita Kristen. Skripsi S-1 Ni Ketut Santini, "Munculnya Elite Wanita Modern di Bali, 1923-1924", merupakan usaha untuk menjelaskan bagaimana dalam konteks etnis, agama, dan stratifikasi sosial Bali dapat muncul gerakan nasionalisme di kalangan wanita.²⁰

Kesepuluh, tema ekonomi. Tema ini sekarang banyak diperlukan oleh badan-badan pengambil kebijakan. Sektor informal, industri kecil, pembantu rumah tangga, adalah pekerjaan wanita. Pekerjaan-

19 Fatia Nadia, "Tenaga Kerja Wanita di Perkebunan Teh Malabar — *Afdelingen* Cianjur *Regentschapen* Priangan Tahun 1880-1900" (Skripsi S-1, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, 1987).

20 Ni Ketut Santini, "Munculnya Elite Wanita Modern di Bali, 1923-1943" (Skripsi S-1, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, 1986).

pekerjaan wanita yang mendatangkan pemasukan bagi keluarga memang dapat diperhitungkan dalam ekonomi. Akan tetapi, pekerjaan rumah tangga tidak pernah dimasukkan sebagai "pekerjaan", padahal kalau dihitung akan merupakan jumlah yang luar biasa banyaknya bagi ekonomi keluarga dan GNP. Di sini kita ingat keadaan buruh-buruh wanita di pasar-pasar, pabrik-pabrik, yang merupakan angkatan kerja tidak-terdidik. Dalam pendekatan ekonomi lebih pada partisipasinya dalam ketenagakerjaan. Buku semacam tulisan Zainab Bakir dan Chris Manning (Ed.), *Angkatan Kerja di Indonesia: Partisipasi, Kesempatan, dan Pengangguran*²¹ dapat dipakai sebagai contoh sebagaimana sejarah angkatan kerja wanita ditulis. Buku ini adalah hasil penelitian demografis, lebih dari masalah ekonomi, tetapi jika kita dapat mengumpulkan data-data soal upah, kita akan mendapatkan gambaran tentang perekonomian juga.

Kesebelas, penerbitan sumber. Kita belum banyak tahu tentang sumber-sumber sejarah wanita. Jika kita berhasil mengumpulkan data-data tertulis, baik berupa angka-angka, surat-surat, biografi, otobiografi, sejarah wanita. Penerbitan tulisan-tulisan Kartini merupakan sumbangan besar pada sejarah wanita pada awal abad ke-20. Kelangkaan sumber ini sebenarnya bisa dikejar dengan sejarah lisan. Untuk menuliskan soal wanita dari tiga generasi angkatan wanita, kita masih dapat menuliskannya dengan memakai wawancara. Demikian juga pengalaman gerilya di masa revolusi fisik. Untuk kelompok sosial seperti *abdi dalem* sejarah lisan akan sangat membantu. Contoh penerbitan semacam ini di Amerika ialah buku yang disunting Gerda Lerner, *Black Women in White America: A Documentary History*.²² Buku ini berisi terbitan surat-surat yang berasal dari manuskrip yang tersimpan di berbagai perpustakaan Amerika. Isinya ialah pengalaman wanita kulit hitam sejak zaman

21 Zainab Bakir dan Chris Manning (ed.), *Angkatan Kerja di Indonesia: Partisipasi, Kesempatan, dan Pengangguran* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).

22 Gerda Lerner (ed.), *Black Women in White America: A Documentary* (New York: Vintage Books, 1973).

pra-pembebasan sampai tahun 1970-an ketika wanita kulit hitam pun sudah berbicara soal *womanhood*, seperti halnya rekan mereka orang kulit putih.

Kiranya masih banyak lagi yang bisa dikerjakan dengan sejarah wanita. Daftar “menu” di atas semata-mata untuk menunjukkan betapa luasnya sejarah wanita, sehingga sejarah wanita dapat menjadi bidang kajian tersendiri.

MENUJU SEJARAH ANDROGYNOUS

Setelah kita melakukan banyak penelitian tentang sejarah wanita kita akan mempunyai gambaran bahwa wanita ada dalam sejarah. Selama ini kita telah meninggalkan wanita, seolah-olah kaum “lemah” ini tidak ada dalam sejarah. Tujuan kita tentu saja bukan sejarah yang *gynocentric*, sejarah dengan wanita sebagai pusat, tetapi sejarah yang lebih adil. Sejarah yang baik kaum laki-laki maupun wanita bersama mengambil bagian di dalamnya ialah sejarah yang *androgynous*. Gambaran ini baru akan terjadi ketika kita sudah membangunnya dari bawah, yaitu dengan menuliskan sejarah wanita sebanyak-banyaknya, untuk mengimbangi gambaran yang sekarang cenderung pada peranan kaum laki-laki. Tuhan mencipta manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, mengapa sejarah hanya diciptakan oleh laki-laki?

PENDEKATAN GENDER

Perkembangan mutakhir sejak 1985, yaitu dengan adanya Konferensi PBB ketiga di Nairobi (Commission on the Status of Woman), dan diperkuat dengan Konferensi PBB keempat di Beijing pada 1995, ialah masuknya istilah “gender”. Dan sejak itu pusat-pusat studi wanita merebak di Indonesia. Sebenarnya “Woman Studies” sudah lama ada di universitas-univeritas di Barat, tapi tidak memakai istilah “gender”.

Kiranya penelitian sejarah gender, menambah satu lagi perspektif dalam sejarah wanita. Namun, perlu diingat bahwa tujuan penulisan sejarah bukanlah untuk merencanakan sebuah aksi sosial atau gerakan perempuan. Bahwa penelitian sejarah berguna untuk perencanaan sebuah aksi sosial bisa saja terjadi. Sebegitu jauh belum ada penelitian sejarah yang dengan sadar memakai pendekatan gender.

Ada perbedaan antara pendekatan sejarah dan aksi sosial. Sejarah itu ibarat orang naik bus menghadap ke belakang: ia bisa melihat ke belakang dan ke kanan-kiri, tetapi tak bisa melihat ke depan. Tentu saja ini tidak berarti bahwa sejarah hanya mengurus masa lalu yang jauh, sebab apa yang terjadi kemarin juga sudah termasuk masa lalu. Aksi sosial dan gerakan perempuan, sebaliknya, melihat ke depan saja dengan serentetan program aksi, dan tidak perlu secara formal melihat ke belakang.

Di bawah ini akan dipaparkan tiga hal, yaitu tentang pengertian gender, sumber-sumber sejarah, dan kemungkinan-kemungkinannya.

Gender. Istilah gender berbeda dengan istilah perempuan dan laki-laki yang sifatnya biologis, sebagai kodrat yang dibawa sejak lahir. Gender merujuk pada sekumpulan aturan, tradisi, dan hubungan sosial-budaya yang menentukan kategori “feminin” dan “maskulin”. (Lihat, Mandy Macdonald, *et al.*, *Gender & Perubahan Organisasi: Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik* [Yogyakarta: Insist dan REMDEC, 1999, xxii]). Femininitas dan maskulinitas itu bentukan sosial-budaya, dan sama sekali bukan bawaan yang tak dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari sebuah tempat ke tempat lain sebagaimana laki-laki dan perempuan yang sudah pasti secara biologis.

Kalau dalam sejarah wanita, tekanan utama ialah wanita sebagai gejala biologis, maka dalam sejarah gender tekanan utama ialah pada hubungan sosial-budaya, konsep femininitas, dan konsep maskulinitas dalam masyarakat dan budaya tertentu.

Sejarah menjadi sangat penting, karena studi gender mengharuskan orang untuk melihat “naskah” (“*script*”) sosial-budaya yang ada (Lihat, Julia Cleves Mosse dalam *Gender & Pembangunan* [Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, 2]) . “Naskah” itu paling tersedia dalam studi sejarah, meskipun penelitian sosial-budaya juga dapat mencapainya.

Dalam hal ini, antara penelitian sejarah dan penelitian sosial-budaya tetap ada bedanya. “Naskah” penelitian sejarah dapat menjangkau naskah-naskah lama dan bahan-bahan arsip, sedangkan penelitian sosial-budaya secara formal tidak dituntut sampai ke sana. Penelitian sejarah dan penelitian sosial-budaya dapat tumbuk/bertemu, misalnya dalam penelitian tentang arsip kontemporer, tradisi lisan, dan penggunaan metode sejarah lisan yang dalam penelitian sosial-budaya disebut metode interview.

Syarat terpenting bagi studi sejarah gender ialah kemampuan **mengidentifikasi** kelompok sosial pengguna konsep gender yang aktual dan spesifik. Dengan kata lain, studi sastra klasik, studi sastra, dan studi agama yang hanya mengenai teks, bukanlah studi sejarah. Kemampuan untuk identifikasi itulah yang menyebabkan studi sejarah berharga untuk disebut sejarah.

Sumber. Sudah dikemukakan bahwa naskah-naskah lama (secara formal studi klasik yang memerlukan Filologi tidak masuk dalam studi sejarah), arsip, tradisi lisan, dan sejarah lisan menjadi sumber sejarah utama. (Mengenai tradisi lisan dan sejarah lisan baca Bab 2). Secara khusus dapat dipastikan bahwa studi sejarah gender dapat ditujukan kepada gerakan-gerakan keagamaan (Islam) yang ada, serta institusi-institusi diwahnya (madrasah, sekolah, perkumpulan pengajian). Akan tetapi, penelitian sejarah kontemporer semacam itu hanya mungkin terjadi kalau kendala sosial dapat diatasi Kiranya melalui “pembacaan” teks, arsip-arsip, tradisi lisan, dan sejarah lisan penelitian ke arah itu mudah dilakukan.

Namun, terhadap naskah berupa fiksi yang seolah-olah menjadi saksi mata kita harus hati-hati untuk menjadikannya sebagai sumber sejarah. Novel *Gadis Pantai* karya Pramoedya Ananta Toer dan lirik Linus Surjadi AG, *Pengakuan Pariyem* yang menceritakan supremasi laki-laki dan subordinasi wanita hanyalah imajinasi pengarangnya, dan bukan fakta sejarah yang disebabkan oleh relasi sosial-budaya.

Kemungkinan-Kemungkinan. Tulisan-tulisan sejarah, seperti disertasi Darsiti Soeratman, "*Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*" (UGM, 1989) dapat dipercaya sebagai sumber subordinasi perempuan atas dasar budaya, demikian pula, sebaliknya, tesis Soedarmono, "*Munculnya Kelompok Pengusaha Batik di Laweyan pada Awal Abad XX*" (UGM, 1987) dapat menjadi contoh tentang supremasi perempuan.

Sampai sekarang, kita belum melihat adanya penelitian sejarah gender yang mengeksplorasi teks, tradisi lisan, dan sejarah lisan. Dengan demikian, sekalipun sudah banyak penelitian gender berdasar kitab-kitab kuning, seperti penelitian terhadap tafsir dan hadits misogini yang dihasilkan PSW di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga, tetap bukan studi sejarah karena tidak mengidentifikasikan penggunaannya. (Lihat, Sahiron Syamsuddin, "Pembacaan Muhammad Syahrur terhadap Beberapa Ayat Alquran tentang Gender" (2000), dan Nur Khoirin YD, "Telaah terhadap Otentisitas Hadits-Hadits Misogini" [2000]).*

SEJARAH KEBUDAYAAN

I

Dalam historiografi Indonesia masih sangat jarang sejarawan yang tertarik untuk menulis sejarah kebudayaan. Rupanya dimensi budaya dilupakan karena tekanan yang besar dalam penulisan — mula-mula pada sejarah politik, kemudian pada sejarah sosial-ekonomi. Jika benar bahwa Kebangkitan Nasional II akan dimulai, maka kebangkitan itu tentu menitikberatkan pembangunan budaya yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan martabat manusia. Seminar HIPHIS 1990 dan Pidato Kenegaraan Presiden malam menjelang 17 Agustus 1990 rupanya merupakan isyarat bahwa budaya akan menempati kedudukan sentral di masa mendatang. Oleh karena itu, sejarawan, demi pengembangan disiplinnya dan pembangunan bangsa, seharusnya ikut dalam arus utama kehidupan ilmu dan pembangunan bangsa. Di tengah arus globalisasi budaya dan universalisasi nilai-nilai, adalah suatu keharusan bila sejarawan menyumbangkan ilmunya kepada bangsanya dalam usaha mengenal diri sendiri agar supaya rekayasa masa depan tetap berpijak pada jati diri bangsa. Dalam kaitan inilah sejarah kebudayaan mempunyai peranan yang penting, karena hanya dengan melihat ke masa lalu kita akan dapat membangun masa depan dengan lebih baik. Selebihnya,

sejarah juga menawarkan cara pandang yang kritis mengenai masa lalu, sehingga kita tidak akan terjebak pada archaisme dan makronisme, sekalipun kita berpijak pada jati diri yang terbentuk di masa lampau sejarah kita.

Sudah banyak tulisan tentang manusia dan budaya diterbitkan, terutama dari kajian-kajian antropologi, filsafat, dan jurnalisme. Hampir semua suku di Indonesia yang besar-besar sudah mendapatkan perhatian. Akan tetapi, kajian-kajian itu merupakan pengamatan kontemporer masa kini atau berupa uraian tentang patokan-patokan budaya secara ideal. Pengamatan kontemporer sering melupakan sejarah masa lalu, sedang pendekatan "ideal type" tidak merujuk pada kenyataan historis. Oleh karena itu kajian secara historis memberi gambaran bagaimana tipe ideal budaya tertentu diaktualisasikan. Studi Darsiti Suratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939* adalah usaha ke arah sejarah kebudayaan, dengan tekanan utama pada kehidupan, kostum, dan upacara-upacara kraton.¹ Disertasi yang cukup panjang itu masih belum sempat membicarakan aspek budaya lain seperti kesenian dan kesusastraan, sehingga lebih merupakan kajian sosiologi daripada kebudayaan. Selebihnya, kita sudah banyak memperoleh kajian sejarah tentang cabang tertentu dari kebudayaan, seperti misalnya tari. Soedarsono sudah menulis tentang wayang orang di kraton Yogyakarta, dan banyak sudah skripsi S-2 dalam bidang ini.² Kajian-kajian ini sudah mendekati sejarah kebudayaan dalam tema, tetapi masih belum berupa sejarah kebudayaan dalam pendekatan.

Tulisan ini akan mencoba memberikan gambaran mengenai batasan bidang kajian sejarah kebudayaan dan masalah-masalah metodologisnya. Batasan menjadi penting, karena selain menjelaskan apa yang sudah dikerjakan juga dapat memberikan gagasan baru apa

1 Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939* (Disertasi doktor, Universitas Gadjah Mada, 1989).

2 Soedarsono, *Wayang Wong: The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984).

yang dapat dikerjakan. Selanjutnya metodologi penting karena setiap jenis penulisan sejarah memerlukan metodologi yang khusus pula. Sayang, tulisan ini tidak akan membicarakan masalah teori yang juga amat penting peranannya dalam rekonstruksi sejarah.³

II

Dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara istilah *culture* dan *civilization*, dalam bahasa Indonesia terdapat *budaya* dan *peradaban*, dan dalam bahasa Melayu ada istilah *tamadun*, yang dapat membuat pembicaraan tentang sejarah kebudayaan menjadi sulit, semata-mata karena terbentur pada peristilahan. Istilah Jerman *cultur* dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *civilization* karena kata *cultur* dalam bahasa Jerman bersifat lebih inklusif daripada *culture* dalam bahasa Inggris. Demikianlah misalnya buku Jacob Burckhardt, *Die Cultur der Renaissance in Italien* diterjemahkan dengan *The Civilization of the Renaissance in Italy*.⁴ Istilah *peradaban* dan *tamadun* juga mempunyai implikasi inklusif semacam *civilization*. Kita tidak akan membedakan dengan jelas kedua istilah itu, tetapi ingin memberi batasan tentang masalah terpenting dalam kajian terhadap gejala kebudayaan atau peradaban. Jika kita memakai pendekatan idealis, maka masalah pokoknya ialah *the informing spirit* dalam kebudayaan atau peradaban (selanjutnya disebut kebudayaan saja) yang tampak dalam pendekatan materialis yang kita temukan ialah *a whole social order* di mana produk estetik dan intelektual hanyalah ekspresi dari kegiatan-kegiatan sosial.⁵ Jadi kalau kita memberi batasan kebudayaan sebagai dimensi simbolik dan ekspresif kehidupan sosial, kita tidak perlu bersusah payah membedakan antara kebudayaan dan

3 Pengantar ke arah teori-teori analisis budaya kontemporer dapat ditemukan di antaranya dalam buku Robert Wuthnow *et al.*, *Cultural Analysis: The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Foucault, and Jueqen Habermas* (London: Routledge and Kegan Paul, 1984).

4 Jacob Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy* (New York: Harper Torchbooks, 1958).

5 Raymond Williams, *Culture* (Glasgow: Fontana Paperbacks, 1983), hlm. 11-12.

peradaban, sekaligus kita melakukan sintesa tentang berbagai definisi kebudayaan menurut berbagai disiplin. Sistem pengetahuan, misalnya, adalah bagian dari budaya yang dapat dikaitkan dengan sistem simbol lainnya dalam pendekatan antropologi simbolis, tetapi dapat pula dikaitkan dengan sistem sosial dalam pendekatan sosiologi pengetahuan. Hanya dengan mengikuti bagaimana para penulis sejarah kebudayaan telah bekerja, kita dapat mengetahui tradisi historiografinya dan sekaligus mencari lapangan baru dalam kajian sejarah jenis ini.

Banyak cara telah dilakukan oleh sejarawan kebudayaan dalam mendekati objeknya. Buku Karl J. Weintraub, *Visions of Culture* memuat tradisi historiografi kebudayaan dari sejarawan Eropa.⁶ Dari sekian banyak sejarawan, buku ini memuat pendekatan-pendekatan Voltaire, Guizot, Burckhardt, Lamprecht, dan Huizinga, masing-masing sebagai wakil dari sebuah pendekatan atau zaman. Tidak semua penulis itu dikenal sebagai semata-mata penulis sejarah kebudayaan, seperti misalnya Guizot, bahkan buku itu juga memasukkan seorang penulis filsafat, yaitu Ortega Y. Gasset.

Voltaire (1694-1778) mewakili tradisi Pencerahan. Ia mencoba untuk mengungkapkan *esprit humain*, yang merupakan sebuah “benang di tengah labirin sejarah”, sekalipun ia tidak dikenal sebagai pembuat sistematika sejarah. Ia tidak mempunyai teori tentang kebudayaan, tetapi berusaha mencari kriteria bagaimana sebuah bentuk kehidupan disebut beradab. Ia menemukan berbagai ukuran untuk menyebut masyarakat, bangsa, atau rakyat beradab, seperti *civilise*, *politesse*, *raffinement*, *humanite*. Peradaban adalah gabungan dari *esprit* dan *moeurs*, yaitu semangat dan sikap, serta cara-cara yang menuntun kehidupan sosial dan perilaku masyarakat. Ia dikenal sebagai pejuang peradaban dan kemanusiaan dalam tulisan-tulisan sejarahnya, sekalipun ia banyak juga mendapat kritik.

6 Karl J. Weintraub, *Visions of Culture: Voltaire, Guizot, Burckhardt, Lamprecht, Huizinga, Ortega Y Gasset* (Chicago: University of Chicago Press, 1966).

Guizot (1787-1874) seorang politisi dan sejarawan, berusaha mencari apa yang disebut sebagai “Akal dan Kehendak Tertinggi” yang menyatakan diri dalam sejarah, yaitu keajegan yang dapat dilihat melalui fakta-fakta sejarah. Apa yang dicari bukanlah “anatomi sejarah” yang menguraikan fakta-fakta belaka, tetapi anatomi, fisiologi, dan fisiognomi sejarah. Karyanya berupa sejarah berfilsafat, dengan menekankan faktor manusia dalam menuju kemajuan. Apa yang disebutnya sebagai kekuatan-kekuatan yang menggarisbawahi proses sejarah dan struktur proses itu. Cara sejarawan ialah mengemukakan hubungan-hubungan dalam konteks sejarah yang kongkret, tidak berupa hukum-hukum yang abstrak dari hukum-hukum sosiologis ataupun struktur sistematis para ahli filsafat.

Burckhardt (1818-1897), seorang yang memberikan hidupnya pada sejarah, berusaha mencari struktur dan tata dalam sejarah kebudayaan. Setiap detil yang kecil dan tunggal sebenarnya adalah simbol dari keseluruhan dan satuan yang lebih besar. Hanya dengan pengetahuan tentang keadaan umum itu orang akan terhindar dari perangkap kejadian-kejadian yang tak terhingga jumlahnya. Oleh karena itu bagi Burckhardt, kebudayaan ialah sebuah kenyataan campuran. Tugas sejarawan ialah mengkoordinasikan elemen-elemen ke dalam gambaran umum, tetapi bukannya mensubordinasikannya semata kepada kaidah-kaidah hukum. Idealnya penulisan sejarah ialah seperti lukisan, yang komposisinya memberikan gambaran utuh sekaligus gambaran detilnya. Namun, sejarawan yang menulis dengan kata, terikat dengan penuturan secara berurutan, sehingga komposisinya linear. Burckhardt berusaha melukiskan kesenian, agama, *festivals*, negara, mitos, puisi, dan bentuk ekspresi kejiwaan lainnya dari kebudayaan ke dalam bagian yang berimbang dari kesatuan yang menyeluruh. Cara yang dipakai ialah dengan “paralelisasi fakta-fakta”, yaitu membandingkan dan melawankan, mencari persamaan dan perbedaan, sehingga antara fakta-fakta ditemukan kaitannya. Burckhardt yang terlatih dalam sejarah kesenian, menggambarkan tulisan sejarah sebagai sebuah *integrated equivalents* yang menyuguhkan pemandangan menyeluruh, tetapi

yang bagian-bagiannya masing-masing sama pentingnya, tidak ada yang sentral. Sejarah harus disuguhkan sebagai gambaran kongkret, tidak sebagai kenyataan umum. Sejarawan tidak menggunakan kata-kata seperti individualisme, religiositas, tetapi memberikan gambaran kongkret bagaimana sesuatu dikerjakan.

Lamprecht (1856-1915), juga seorang sejarawan profesional, melanjutkan pandangan sejarawan zaman Pencerahan yang melihat sejarah sebagai kisah kemajuan dan sejarah sebagai ilmu "genetik" juga mewarisi tradisi Romantik tentang *Volk* dan *Volkgeist*, bangsa dan jiwa bangsa. Selain itu juga ia terpengaruh gerakan ilmu pada zamannya, yaitu biologi, terutama perkembangan psikologi. Penulisan sejarah, bagi Lamprecht, ialah penulisan manusia dalam kolektivitas, bukan manusia individual. Manusia secara individual harus ditempatkan dalam konteks manusia secara kolektif, sejarah bukanlah kumpulan biografi. Sejarah kebudayaan ialah sejarah dari *Seeleleben*, kehidupan rohaniah sebuah bangsa, *Volksseele*. Tidak seperti Voltaire, yang hanya mengakui apa-apa yang tinggi sebagai kebudayaan atau peradaban, Lamprecht menyatakan bahwa *Seeleleben* kolektif itu dapat berupa apa saja, di mana ada jiwa bangsa, di situ ada kebudayaan. Dengan membedakan dua kategori, yaitu jiwa yang terbelenggu dan jiwa yang bebas, Lamprecht mencoba membuat pembabakan sejarah peradaban Jerman. Sebelum abad ke-15, kehidupan jiwa Jerman dikungkung oleh batas-batas internal dan ikatan-ikatan kolektif. Kehidupan mental dan emosional orang tidak jauh dari situasi yang ditemuinya, orang berhubungan dengan dunia-dalam dan dunia-luar berturut-turut dengan simbol, tipe, dan konvensi. Ketiga-tiganya mewakili kurun-kurun dalam sejarah. Dalam zaman simbolis orang Jerman hidup di bawah pengaruh alam, dan dewa-dewanya adalah kekuatan alam yang dilukiskan dalam bentuk manusia. Dalam kesenian ada dominasi pola geometrik yang dinamik. Dalam zaman tipe, gambar-gambar binatang dan tumbuhan mulai muncul, tetapi masih belum jelas bentuk binatang dan tumbuhannya, sehingga pengalaman dengan alam masih belum sempurna. Pada

zaman konvensi, abad ke-13 dan ke-14, pengalaman dunia-dalam dan dunia-luar berwujud pada konvensi-konvensi. Sudah ada kesadaran tentang klasifikasi pengalaman. Para satria dan *burger* adalah wakil dari zaman ini, sebuah masyarakat yang penuh konvensi. Zaman berikutnya, ialah zaman individualis dan subjektivis, yaitu zaman-zaman ketika individu sudah mulai dihargai dan ketika individu mempunyai hak untuk menjadi diri sendiri. Lamprecht dihargai karena usahanya untuk membuat analisis perjalanan sejarah, meskipun pendapatnya sekarang banyak tidak dihiraukan lagi. Berbeda dengan Burckhardt yang berhasil dalam menjelaskan sejarah kebudayaan dalam fragmen-fragmen, Lamprecht berusaha melangkah lebih jauh dengan sistemnya.

Huizinga (1872-1945) juga menyebut-sebut kebudayaan sebuah struktur, sebuah bentuk. Demikian juga, sejarah adalah bentuk kejiwaan dengan apa sebuah kebudayaan menilai masa lalunya. Sejarah adalah ilmu, bukan mitologi atau roman. Seperti halnya ilmu alam, sastra, dan teologi, sejarah adalah cara mengenal dunia, sebuah ilmu yang sah. Sejarah harus kritis, dalam arti mempunyai komitmen kepada kejujuran dan ketekunan dalam mengenal objeknya. Sejarah bukanlah ilmu alam, kurang eksak jika dibanding dengan ilmu-ilmu lain, tidak dapat menghindarkan subjektivitas. Namun, dengan metodenya sendiri, sejarah adalah sumbangan penting bagi kebudayaan. Sama seperti pendahulu-pendahulunya, Huizinga juga berpendapat bahwa sejarah perlu mencari hubungan-hubungan sehingga realitas dapat dipahami. Dengan metode tidak-eksaknya, yang menggabungkan studi kritis dengan subjektivisme, sejarawan melihat pada fakta-fakta dengan usaha mencari sinar matahari yang menebus detil-detilnya. Sejarah kebudayaan adalah usaha mencari “morfologi budaya”, studi tentang struktur. Berbeda dengan sosiologi, yang melihat objeknya melalui paradigma, morfologi budaya melihat gejala-gejala sebagai mempunyai makna yang jelas dalam dirinya. Setiap detil mempunyai maknanya sendiri, tidak semata-mata sebagai ilustrasi dari konsep umum.

III

Dari semua penulis itu, barangkali Burckhardt dan Huizinga patut menjadi perhatian, karena keduanya dianggap sebagai penulis klasik sejarah kebudayaan. Burckhardt yang menulis *The Civilization of the Renaissance in Italy* sebenarnya telah mendahului studi antropologi dalam pemahamannya tentang kebudayaan. Para antropologis yang mempelajari suku-suku primitif mempunyai perhatian yang sama dengan Burckhardt yang mempelajari masyarakat kota. Apa yang ditulis Burckhardt tentang Italia ialah ciri-ciri cara berpikir dan pola-pola motivasi orang Italia pada abad ke-14, ke-15, dan ke-16. Ia sengaja melupakan narasi yang kronologis-diakronik dari Italia, tentang evolusi ekonomi, politik, institusi keagamaan, perkembangan intelektual, kegiatan-kegiatan artistik, dan memusatkan perhatian pada studi tentang “jiwa” dan “budaya” Renaissance. Bukunya lebih berupa kajian sistematis dan sinkronik daripada diakronik. Dalam bukunya Jilid I, ketika ia menulis mengenai Negara pada abad ke-14 dan ke-15, yang dikemukakannya ialah sistem-sistem, yaitu tirani, dinasti, dan republik. Negara disebutnya sebagai “karya seni” karena merupakan mekanisme yang dengan cermat dibentuk dan dimanipulasikan. Negara mempunyai hubungan dengan budaya, sebagai pendorong munculnya bentuk budaya dan sebaliknya, negara adalah bagian dari sebuah sistem budaya. Uraian tentang politik luar negeri negara-negara Italia, tentang perang, dan tentang Tahta Suci lebih berupa studi tentang pola daripada kronologi. Pencarian pola dikerjakan juga ketika ia membahas tentang perkembangan individualisme. Dalam bab itu ia menguraikan tentang hubungan negara dengan individu, penyempurnaan individu, cita-cita tentang kemasyhuran, dan ungkapan-ungkapan *wit* dan satire. Burckhardt lebih mendekati apa yang kemudian dalam historiografi disebut sejarah mentalitas atau sejarah sensibilitas oleh Febvre.⁷ Bab selanjutnya yang membahas

⁷ Lucien Febvre, *A New Kind of History and Other Essays* (New York: Harper & Row, Publishers, 1973).

kebangkitan zaman klasik merupakan sejarah intelektual juga tampak dalam bab selanjutnya tentang penemuan dunia dan manusia. Bab terakhirnya tentang festival adalah sejarah sosial-budaya, mirip dengan cara antropologis menyajikan bahannya.

Dari segi metodologis, Burckhardt telah menunjukkan bahwa sejarah kebudayaannya telah mendahului bermacam jenis penulisan sejarah sesudahnya, dalam setidaknya dua hal. Pertama, pendekatannya sinkronis, sistematis, tetapi tanpa kesalahan kronologi dalam sajiannya. Kedua, usahanya memperluas bahan-bahan kajian sejarah kebudayaan dengan memberi gambaran tentang keseluruhan.

Huizinga, sama dengan Burckhardt, juga menekankan pentingnya *general theme*. Dalam tulisan yang secara khusus membicarakan tugas sejarah kebudayaan, "The Task of Cultural History", yang dimuat dalam bukunya *Men and Ideas*, ia menyatakan bahwa tugas sejarah kebudayaan ialah mencari pola-pola kehidupan, kesenian, dan pemikiran secara bersama-sama.⁸ Tugas itu ialah pemahaman secara morfologis dan deskripsi dari kebudayaan secara aktual, tidak dalam bentuk yang abstrak, ia menggunakan istilah "*historical sensation*", "*historical contact*", "*historical imagination*", "*historical vision*", dan "*historical presentment*" untuk menjelaskan bahwa gambar kebudayaan yang diungkapkan harus aktual dan kongkret. Gambar yang kongkret itu disebutnya sebagai morfologi budaya, untuk membedakannya dengan sekadar psikologi. Setiap gejala budaya harus disuguhkan sesuatu yang menarik dalam dirinya sendiri. Ia menolak kalau sejarah kebudayaan disamakan dengan sosiologi, sebab sosiologi berbicara tentang paradigma, lebih daripada tentang gejala-gejala partikular. Morfologi tentang yang partikular harus digambarkan dahulu sebelum menarik sebuah gambaran umum.

Gambaran umum dapat dicapai dengan menemukan *central concept* sebuah kebudayaan, meskipun ada kalanya sebuah

8 Johan Huizinga, *Men and Ideas: History, the Middle Ages, the Renaissance* (New York: Meridian Books, Inc., 1959).

kebudayaan mempunyai banyak pusat (*plural centers*). Kalau orang akan menulis bagian-bagian dari kebudayaan, tanpa mengkaitkan dengan konsep sentral, hasilnya bukanlah sejarah kebudayaan, tetapi sejarah yang tertentu yang khusus. Sejarah kesenian, misalnya, yang ditulis tanpa mengingat tema umum budayanya, adalah sejarah kesenian, bukan sejarah kebudayaan.

Buku Huizinga, *The Waning of the Middle Ages* adalah contoh bagaimana ia menulis sejarah kebudayaan.⁹ Bukunya yang terdiri dari 23 bab itu diberi sub-title, "A Study of the forms of Life, Thought, and Art in France and The Netherlands in the Dawn of the Renaissance." Buku itu memuat tentang kehidupan emosional, sensitivitas, keagamaan, simbolisme, dan kesenian. Dalam membicarakan tentang konsep satria (*chivalry*), misalnya ia menulis tentang konsepsi tentang hirarki, cita-cita kesatria, impian tentang heroisme dan cinta, persekutuan kaum satria dan sumpah satria, dan nilai-nilai militer dan politik dari cita-cita kesatria. Ia menulis dua bab tentang cinta, dua bab tentang visi kehidupan dan kematian; enam bab tentang agama, yaitu tentang imaji, tipe-tipe agama, sensibilitas dan imajinasi keagamaan, keruntuhan imajinasi keagamaan, akibat realisme, dan pikiran-pikiran agama di luar batas-batas imajinasi; satu bab tentang bentuk-bentuk pikiran dan kehidupan praktis; serta lima bab tentang kesenian. Dengan kata lain, Huizinga, sama seperti Burckhardt, juga menulis sekitar sejarah mentalitas, sejarah kesenian, sejarah agama, dan sejarah intelektual. Yang paling menarik dari Huizinga ialah nilai literer dari bukunya. Bukan saja bahasa yang bagus, tetapi sama kuatnya dengan panggilan sastra, Huizinga dapat memancing imajinasi pembaca tentang Zaman Pertengahan Akhir dengan cara yang hampir-hampir sempurna. Apa yang disebutnya sebagai *general themes* sangat terasa dalam semua

9 Johan Huizinga, *The Waning of the Ages: A Study of the Forms of Life, Thought, and Art in France and the Netherlands in the Dawn of the Renaissance* (Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc., —).

bagiannya, tetapi semua bagiannya sungguh mempunyai nilai menggugah sendiri. Itulah yang dimaksudkannya dengan sensasi sejarah atau imajinasi sejarah.

IV

Penulisan sejarah yang memenuhi persyaratan Burckhardt dan Huizinga bukan hanya mungkin untuk kehidupan masa lalu. Bahkan kebudayaan kontemporer pun dapat dituliskan sejarahnya. Tantangan terbesar sejarawan justru pada penulisan sejarah kebudayaan kontemporer, sebab dengan penulisan itu kita akan dapat melihat masa kini kita dengan jelas. Masa kini kita memang masih menjadi milik banyak orang, tetapi sejarawanlah sebenarnya yang mempunyai posisi paling menguntungkan. Sebab, sejarawan dapat melakukan refleksi kritis melintas waktu; masa lalu, masa kini, dan masa depan.

SEMINAR SEJARAH LOKAL 1984

Penulisan sejarah Indonesia telah diperkaya dengan adanya Seminar Sejarah Lokal, 17-20 September 1984, di Medan. Dalam Seminar itu telah dikemukakan lima tema pokok, yaitu: (1) Dinamika masyarakat pedesaan, (2) Pendidikan sebagai faktor dinamisasi dan integrasi sosial, (3) Interaksi antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk, (4) Revolusi nasional di tingkat lokal, dan (5) Biografi tokoh lokal. Makalah-makalah dalam Seminar itu menunjukkan adanya semangat interdisipliner di kalangan sejarawan Indonesia masa kini. Kesadaran dalam penggunaan teori dan konsep ilmu-ilmu sosial telah melahirkan tulisan-tulisan yang sanggup menjelaskan sejarah secara struktural dalam pola-pola sosial dan dinamika-dalam yang terdapat di lokalitas yang dibicarakan. Menerangkan perubahan sosial dan peristiwa sejarah dengan cara ini ternyata telah memberi gambaran betapa kaya sebenarnya sejarah lokal kita. Tentang kausalitas sejarah para penulis kebanyakan telah mampu melihat arus-bawah yang mendasari peristiwa, lebih dari sekadar gejala-gejala di permukaan. Rupa-rupanya Seminar Sejarah Lokal 1984 telah mengisyaratkan bahwa historiografi Indonesia sudah mulai *take-off*, dalam arti bahwa sejumlah sejarawan telah berbagi pengetahuan dan ketrampilan secara merata, setelah sekian lama dirintis melalui seminar-seminar, proyek-proyek penulisan,

dan penerbitan. Kita menyebut secara khusus karya kolektif ini, lebih daripada menunjuk pada jasa perintis sejarawan ilmiah seperti Professor Sartono Kartodirdjo, untuk menunjukkan bahwa penulisan sejarah adalah pekerjaan kolektif, tanggung-jawab semua sejarawan — dan bukan-sejarawan.

Sengaja kita menyebut peranan bukan-sejarawan dalam penulisan sejarah, sebab dalam Seminar ini beberapa ahli dari disiplin di luar sejarah ternyata telah tampil dengan sumbangan yang secara potensial sangat memberi harapan. Dalam keterbatasannya, sumbangan-sumbangan itu justru menyiratkan sebuah inovasi metodologis. Tulisan T.A. Ridwan, "Integrasi: Sekedar Tinjauan Kebahasaan di Sumatera Utara" yang menggambarkan integrasi linguistik, dapat menjadi contoh bagaimana sebuah disiplin di luar sejarah mampu menerangkan proses sejarah. Sebagai sebuah sejarah interdisipliner tulisan Ridwan perlu mendapat substansi lanjutan supaya sifat diakronis sejarah semakin jelas. Analisa penggunaan bahasa di lapangan perlu dirunut penggunaannya secara empiris dalam kajian mengenai sejarah pemakaian bahasa melalui koran, majalah, penerbitan, bahkan manuskrip. Lebih jelas lagi kalau pemakai bahasa juga mendapat pengamatan secukupnya, demikian pula lingkungan sosio-kultural dan ekonomi pemakai. Kedudukan linguistik di sini lalu merupakan alat bantu sejarah, yaitu sejarah tentang integrasi sosial. Kritik semacam ini dapat pula ditujukan kepada tulisan Sanusi, "Pemukiman Sebagai Salah Satu Sarana Komunikasi Antar Suku Bangsa dan Pembauran". Secara umum tulisan ini melukiskan bagaimana pemisahan pemukiman berdasar suku dan bangsa yang terjadi di masa lalu telah menyulitkan integrasi sosial menuju masyarakat majemuk. Tulisan ini mempunyai prospek yang baik dalam sejarah demografis. Tulisan Sulaiman Lubis dan Dharmansyah, "Masalah Asimilasi Antara Pelajar Pribumi dan Non-Pribumi pada Beberapa SMTA di Kodya Medan", lebih merupakan karya sosiologi atau antropologi sosial karena sifatnya yang meruang. Munculnya sekolah-sekolah pembauran barangkali merupakan pengalaman

sejarah kota Medan yang penting, sehingga pengalaman ini dapat menjadi sebuah sejarah kota, jika kesadaran waktu sebagai ciri khas kesejarahan ditambahkan. Demikian juga tulisan Darmono, "Budaya Masyarakat Jawa dan Peranannya dalam Integrasi Etnik di Sumatera Utara" telah mengungkapkan bagaimana toleransi etnik masyarakat Jawa telah memudahkan integrasi antar suku. Pengembangan tulisan ini dapat berupa sejarah demografi atau geografi sosial Sumatera Utara, yang pada gilirannya barangkali akan mengungkapkan lebih banyak mengenai orang-orang Jawa di Sumatera Utara.

Kesadaran mengenai dimensi waktu dalam penulisan sejarah tampak dalam dua tulisan mengenai pendidikan, yaitu karangan U.M. Napitupulu, "Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial dalam Masyarakat Tapanuli Utara Selama Kurun Waktu Satu Dasawarsa Menjelang Berakhir Perang Dunia Kedua dan Setelah Kemerdekaan", dan B.A. Simanjuntak, "Kemajuan Pendidikan dan Cita Kemerdekaan di Tanah Batak (1861-1940)." Tulisan pertama sebenarnya lebih banyak menuturkan mengenai pengaruh sosial dari pendidikan atau sosiologi pendidikan. Tulisan ini tidak banyak didukung dengan fakta, lebih sebagai suatu generalisasi. Lebih spesifik dan historis ialah tulisan kedua, oleh Simanjuntak. Tulisan ini dapat dikembangkan menjadi sejarah sosial atau sejarah intelektual. Sejarah sosial, jika konseptualisasi, seperti masalah mobilitas sosial, lebih ditekankan. Sejarah intelektual, jika konsep "humajuon" menjadi fokus tulisan.

Sebagai catatan kita melihat bahwa Sumatera Utara, khususnya Medan, sungguh kaya akan permasalahan sejarah, seperti tampak dalam beberapa tulisan dalam seminar ini. Tema hubungan antar etnis mendapat sorotan paling banyak. Tulisan Nani Rusmini, "Corak Interaksi Antar-Etnis dalam Bidang Ekonomi di Medan", adalah sejarah sosial tentang pemisahan pemukiman dan distribusi kesempatan kerja. Dalam hal ini kiranya tulisan Usman Pelly, "Hubungan Antar Kelompok Etnis: Beberapa Kerangka Teoritis dalam

Kasus Kota Medan”, dapat memberikan kerangka pemahaman dan penjelasan sejarah. Tulisannya yang membandingkan keadaan tahun 1930 dengan 1980 memberikan gambaran mengenai konflik antar kampung, antar etnis, dan antar jenis kerja. Rekomendasinya mengenai pengelolaan konflik dan kebijaksanaan pemukiman merupakan contoh bagaimana ilmu sosial dapat memberi sumbangan dalam memecahkan masalah sosial. Tulisan ini merupakan contoh bagaimana sejarah dapat diperkaya dengan pendekatan antropologis, yang untuk sejarah lokal Sumatera Utara rupanya tidak dapat ditinggalkan.

Banyak lagi garis-depan sejarah tersingkap dalam Seminar. Perubahan sosial dan mobilitas sosial mendapat tempat dalam beberapa sumbangan. Pengaruh pendidikan dalam perubahan dan mobilitas sosial tampak dengan lebih terperinci dan kesadaran waktu yang lebih dalam berbagai karangan. Dari Indonesia bagian Timur, diungkapkan oleh R.Z. Leirissa dalam “Midras dan Ambonsche Burgerschool: Dua Bentuk Sekolah yang Bertolak Belakang di Maluku Tengah dalam Masa Penjajahan”. Tulisan ini mengemukakan dikotomi sosial dan pendidikan, juga dikotomi bahasa dan modus beragama yang terjadi di Ambon. Semuanya dijelaskan dalam rangka dinamika hubungan antara desa dan kota, suatu contoh yang baik bagaimana sejarah itu dapat bersifat lokal; atau, bagaimana sejarah lokal itu mungkin. Demikian juga tulisan Mestika Zed, “Kolonialisme, Pendidikan dan Munculnya Elit Minangkabau Modern: Sumatera Barat Abad Ke-19”, dengan sadar menggunakan konsep dan teori ilmu-ilmu sosial untuk menerangkan sejarah. Pendidikan mendapat sambutan yang berbeda dari kelas-kelas sosial dalam masyarakat, sehingga pendidikan juga dapat berarti pergeseran sosial. Tulisan Mestika dapat menjelaskan bagaimana di masa Revolusi timbul perbedaan dan ketegangan antara elite lama dalam Dewan Kerapatan Negeri dengan elite baru dalam Dewan Perwakilan Negeri sebagaimana diungkapkan oleh J.R. Chaniago dalam “Kaum Adat dan Revolusi: Dewan Perwakilan Negeri di Awal Revolusi”. Seperti

Mestika, Chaniago juga melukiskan mobilitas sosial dan proses demokratisasi dalam masyarakat Minangkabau. Bahwa pendidikan mempunyai dampak lebih luas di luar masalah peningkatan kecerdasan, tampak pula dalam tulisan Rusdi Sufi, "Muhammadiyah dan Dinamisasi Aceh (1927-1942)". Dikenalkannya sistem pendidikan baru oleh Muhammadiyah yang kebanyakan dipelopori oleh kalangan *uleebalang* setempat, pendatang Jawa yang kebanyakan pegawai, dan para pedagang dari Minangkabau rupanya telah menimbulkan perubahan dalam masyarakat. Kaum ulama kemudian mulai berusaha untuk mengadakan pembaharuan pendidikan. Sekalipun barangkali disangsikan apakah pembaharuan pendidikan para ulama itu memang akibat dari atau reaksi terhadap Muhammadiyah, namun peta politik lokal kemudian memang mengalami perubahan sesudah datangnya Muhammadiyah. Pembaharuan pendidikan rupanya merupakan simbol legitimasi dari dua elite yang saling berebut pengaruh dalam masyarakat Aceh. Tidak seperti di Aceh, rupanya di Sulawesi Selatan keadaannya mirip dengan di Minangkabau. Pendidikan menjadi sarana mobilitas sosial dan menimbulkan elite baru. Hal ini dikemukakan oleh Edward L. Poelinggomang dalam "Profil Pendidikan dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan". Sekalipun rupanya tulisan ini dibuat dengan agak tergesa-gesa, tetapi untuk penggunaan sejarah lisannya patut dipuji. Metode sejarah lisan juga digunakan oleh para penulis lain dalam seminar ini.

Hubungan migrasi dan perubahan sosial mendapat perhatian dari beberapa tulisan. Hamid Abdullah dalam "Dinamika Sosial Kelompok Imigran Masyarakat Bugis di Linggi, Malaysia" mengungkapkan perubahan-perubahan struktural yang dialami masyarakat Bugis di tempat pemukiman yang baru, bagaimana orang-orang Bugis muncul di Malaysia sebagai kekuatan politik. Tulisan ini secara sadar mempertemukan pendekatan struktural dan prosesusual dengan banyak mengambil teori dan konsep antropologi atau etnologi orang Bugis dalam menerangkan perilaku masyarakat. Djohar Noor, "Mobilitas

Sosial Orang Kerinci pada Perempat Pertama Abad XX", juga meneliti tentang migrasi dan akibat sosialnya. Mobilitas vertikal orang Kerinci ternyata telah membawa mobilitas horisontal, mereka yang merantau pulang sebagai orang kaya, golongan sosial baru dalam masyarakat migrasi, dalam hal ini migrasi karena dipaksa, dibicarakan dalam tulisan Ida Bagus Sidemen, "Penjara di Tengah Samudera: Studi tentang Nusa Penida sebagai Pulau Buangan". Dalam studi ini dibicarakan bagaimana orang-orang buangan dari berbagai kelas sosial atau kasta di Bali memperoleh status baru di tempat pembuangan dan bagaimana pengaruhnya pada masyarakat setempat. Kiranya studi mengenai migrasi mempunyai harapan untuk dikembangkan, sebab kota-kota migran seperti Medan dan Samarinda mempunyai permasalahan sendiri-sendiri yang patut mendapat perhatian dari sejarawan. Migrasi, bagi pelaku-pelakunya, bagi masyarakat yang didatangi, dan bagi penjumlahan semua itu masih merupakan daerah baru dalam sejarah Indonesia.

Untuk Jawa, perubahan sosial di pedesaan banyak dipengaruhi oleh perubahan agraria. A.M. Djuliali Surojo dalam "Perubahan Struktur Sosial di Pedesaan pada Abad XIX: Studi Kasus di Kabupaten Magelang dan Temanggung" melukiskan proses melonggarnya hubungan patron-client antara elite desa dengan petani sejak diterapkannya *landrente* di Zaman Raffles sampai Tanam Paksa. Demikian juga tulisan Suhartono, "Kecu: Potret Perbandingan Sosial di Vorstenlanden 1850-1900" mempunyai cakupan sama, mengenai perubahan sosial di tingkat pedesaan sebagai akibat masuknya *cash-crops* dan perubahan struktural dalam agraria. Dalam perubahan sosial-ekonomis itu, demikian Suhartono melukiskan, ada golongan petani yang tercampak ke bawah dan menjadi golongan yang tidak beruntung, lalu menjadi bagian dari dunia-bawah di pedesaan. Tulisan ini hampir secara mendetil melukiskan dunia-bawah itu, struktur dan budayanya. Tulisan yang lain, Djoko Utomo dalam "Pengaruh Perkebunan Tebu Ceper Setelah Reorganisasi Tahun 1917" melanjutkan kisah pemiskinan pedesaan di daerah Kejawen setelah

sekali lagi ada perubahan dalam lembaga agraria. Masuknya kapitalisme di Kejawen sama seperti masuknya Tanam Paksa di luar Kejawen, telah menyebabkan kemiskinan penduduk. Kiranya pemiskinan secara kapitalistis ini akan menerangkan banyak kegiatan golongan kiri di Kejawen, sebelum atau sesudah Proklamasi, bahkan di sekitar 1965.

Masih mengenai pedesaan, tetapi lebih mengenai ideologi daripada struktur ialah tulisan-tulisan Muchlis, "Kerusuhan di Pedalaman Makasar", dan Marzuki AB Yass, "Kerusuhan-Kerusuhan di Daerah Pedalaman Kesultanan Palembang pada Abad ke-19". Muchlis menyebutkan adanya ideologi atau mitos mesianistis dalam alam pikiran orang pedalaman Makasar. Mitos tentang datangnya Batara Goa telah memobilisasikan petani untuk melawan pemerintahan kolonial. Yang menarik di sini ialah bahwa pemerintah kolonial berhasil melawan mitos dengan mitos, yaitu bahwa tokoh-tokoh kolonial juga keturunan Batara Goa. Tulisan Marzuki menerangkan bagaimana ideologi nativisme muncul di pedesaan Palembang setelah mundurnya kerajaan Palembang. Tulisan lain, "Gerakan Protes di Pedalaman Jawa Tengah: Studi Kasus Perlawanan Kyai Kajoran terhadap Amangkurat I dan VOC" dari Ahmad Adaby Darban merupakan tinjauan terhadap asal-usul ketegangan antara birokrasi dan ulama di Jawa Tengah, konflik yang barangkali masih tampak sisa-sisanya jauh setelah Indonesia merdeka. Sekalipun tulisan ini diambil dari sumber-sumber sekunder, tetapi telah menjelaskan bagaimana sebuah budaya politik lahir di Jawa Tengah. Dapat dimasukkan di kelompok ini tulisan Suripan Sadi Hutomo, "Samin Surosentika dan Ajaran-ajarannya". Makalah ini dimaksudkan sebagai biografi, tetapi sebenarnya mengandung banyak hal mengenai ideologi petani yang berada di tengah-tengah perubahan sosial, dengan latar belakang budaya Islam dan Jawa. Sebagai tulisan sejarah karya Suripan penting dalam pendekatannya, karena ia banyak menggunakan tradisi lisan di samping penggunaan sejarah intelektual, sebuah sumbangan baru untuk memahami gerakan Samin yang selama ini ditulis dengan pendekatan sejarah sosial.

Teori dan konsep dari antropologi politik juga tampak secara implisit dalam dua tulisan mengenai Indonesia bagian timur, yaitu dari Frans Hitipeuw, "Interaksi antara Gowa-Bima-Manggarai (1600 -1930)". Tulisan Frans kaya dengan informasi, sebagai tulisan yang dikerjakan oleh orang dalam, dan dengan kesadaran yang lebih terhadap konsep-konsep ilmu sosial tulisan ini akan memberi lebih banyak penjelasan di bawah permukaan. Kita dapat berpikir tentang kemungkinan menggunakan pendekatan Fernand Braudel untuk hubungan perdagangan dan politik di Indonesia bagian timur ini. Barangkali Syamsuddin yang juga menulis mengenai daerah yang belum dijamah ini dengan rentangan waktu begitu panjang akan dapat menunjukkan pola-pola interaksi jangka panjang, menengah, dan peristiwa-peristiwa. Kita boleh bergembira dengan "gerakan menuju ke timur" ini.

Untuk Jawa, tema yang sangat jarang ditemukan di kalangan sejarawan ialah sejarah kebudayaan, sementara sejarah sosial sudah menjadi mode dalam kajian sejarah Jawa. Darsiti Soeratman dengan "Pengaruh Pendidikan Barat Terhadap Gaya Hidup di Istana: Studi Kasus Kraton Surakarta dalam periode 1900-1904" telah merintis kajian sejarah kebudayaan. Dalam bentuknya yang lebih luas, tulisan semacam ini akan menyangkut lebih banyak daripada sekadar etiket, menu makanan, dan bangunan. Satu hal yang perlu dalam sejarah kebudayaan ialah tentang apa yang oleh Johan Huizinga disebut sebagai pemahaman morfologik sejarah kebudayaan.

Sejarah Revolusi diwakili oleh beberapa tulisan. Suyatno, dalam "Revolusi Indonesia dan Pergolakan Sosial di Delanggu" secara sadar menggunakan konsep-konsep dari sosiologi revolusi, satu plus yang membuat tulisan mengenai revolusi ini menjadi begitu berharga. Ternyata dalam Revolusi Kemerdekaan terdapat banyak masalah sosial tersangkut yang membuat wajah revolusi nasional yang kita mengerti sekarang terbaca lain. Tulisan Riyadi Gunawan, "Dunia Grayak dan Revolusi Lokal", mengemukakan "identitas kedua" dari

revolusi yang selama ini tidak kita sadari. Bersama dengan tema yang semacam, seperti mentalitas revolusioner, tulisan ini dapat masuk ke dalam sejarah mentalitas, juga sebuah garis-depan baru dalam historiografi Indonesia. Mengenai revolusi, masih ada satu tulisan lain dari Darto Harmoko, "Kegiatan Pemuda Minyak pada awal Proklamasi" yang merupakan deskripsi yang belum selesai mengenai kegiatan pemuda pada kurun ini. Untuk tulisan-tulisan di atas, sejarah lisan mempunyai peranan penting. Juga tulisan biografi dari Supriyo Priyanto, "Biografi Amir Fatah Wijayakusuma; Tokoh Pencetus Revolusi Islam di Dataran Kali Pemali" menggunakan sumber-sumber lisan dan dokumen. Pertanyaan kita mengenai ketepatan sebuah biografi ialah bagaimana seseorang itu sanggup mencerminkan lingkungan sosial di sekitarnya, satu hal yang tidak terjangkau dalam sebuah tulisan singkat tentu saja. Di luar Jawa kita mendapatkan tulisan Ratna R., "Perang Cumbok di Aceh Tahun 1945", yang mengulang dikotomi struktural masyarakat Aceh sebagai penyebab utama dan arus bawah dari peristiwa-peristiwa. Seperti kita tahu, tulisan mengenai dikotomi ini akan selalu jatuh pada masalah "moral judgement", persoalan yang bagi sejarawan kadang-kadang tak terhindarkan. Dalam Seminar ini tampak bahwa pembicaraan tentang sejarah Aceh akan selalu diwarnai masalah kepada siapa kita bersimpati, sehingga sejarawan dapat terkena subjektivisme yang berlebihan jika tidak sangat hati-hati. Penggunaan bahasa sehari-hari yang emotif sangat tampak dalam tulisan Tengku Luckman Sinar, "Revolusi Sosial Pihak Kiri 1946 di Serdang". Tulisan ini sungguh cermat dalam uraian diakronis dan penuh dengan fakta-fakta baru yang digali dari kesaksian sumber pertama yang bersifat lisan. Kita jadi ingin tahu lebih banyak sebenarnya mengenai latar belakang sosial dari partisipan revolusi itu dan bagaimana mereka mengalami kemunduran, lebih daripada sekadar pengetahuan bahwa para pemimpin revolusi itu ternyata mempunyai hasrat hidup mewah dan mengalami demoralisasi. Dalam hal ini tulisan Pajung Bangun, "Perang Kemerdekaan di Sumatera Utara: Motivasi untuk

Berperanserta Rakyat”, memberi latar belakang sosial-ekonomi partisipasi rakyat dalam revolusi. Kita tahu bagaimana masuknya kapital asing telah menyebabkan rakyat kehilangan sumber ekonomi berupa tanah, sehingga perang kemerdekaan juga merupakan konflik ekonomi. Sekalipun tulisan ini lebih banyak berupa generalisasi, analisa dengan sedikit dukungan fakta, kita menjadi tahu garis besar persoalan. Namun masalah konflik internal di kalangan pendukung revolusi juga tidak terjelaskan dari makalah ini. Untuk daerah Minangkabau, konflik internal, tetapi yang tidak menyebabkan pertumpahan darah, terjadi antara kaum adat dan orang-orang berpendidikan, seperti tampak dalam tulisan J.B. Chaniago yang telah kita bahas di atas.

Sejarah politik, terutama sejarah politik kontemporer, masih saja merupakan pantangan bagi sejarawan, dan masih merupakan kajian ahli-ahli ilmu politik. Kita hanya mencatat satu tulisan dari M. Habib Mustopha, “Aksi Teror PKI Pasca G-30 S di Blitar Selatan”. Banyak informasi dikemukakan dalam karangan ini, terutama mengenai strategi bawah-tanah komunis. Kajian tentang keperluan ketahanan nasional, selain mempunyai nilai intrinsik sebagai kajian sejarah.

Kajian biografi juga menampilkan beberapa tulisan yang menambah kekayaan pemahaman tentang sejarah dari berbagai aspek. Tulisan Ayatrochaedi, “Pangeran Wangsakerta Sang Sejarawan” hampir-hampir merupakan sebuah sensasi ketika kita menyadari bahwa tradisi sejarah sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17, di samping penulisan babad, hikayat, tambo, dan sebagainya. Sampai seberapa jauh kebenaran sejarah dari tulisan sejarawan yang ditokohkan itu kiranya kita masih ingin tahu lebih banyak. Demikian pula terhadap tulisan Simuh, “Aspek Kesejarahan dalam Kehidupan dan Karya Ranggawarsita” kita dihadapkan pada semacam sejarah intelektual. Mengenai tokoh-tokoh yang lebih dekat dengan masa sekarang, tulisan Nazief Chatib Z. Pangaduan Lubis, “Studi Awal Sutan Kumala Lubis”, yang merupakan contoh baik penggunaan

sejarah lisan dalam penulisan biografi. Biografi ini dapat memberi gambaran tentang sejarah sosial lingkungannya, politik dan sosial yang sezaman. Tulisan Muhammad Ibrahim, "Teuku Chik Muhammad Thayeb Peureulak: Uleebalang untuk Rakyat", sebagai judulnya melukiskan seorang uleebalang yang progresif pada zamannya, yang berhadapan dengan konservatisme lingkungan sosialnya di satu pihak dan kekuatan kolonial di lain pihak. Tulisan Fakhrrur Rozy Dalimunthe, "Haji Zainal Arifin Abbas: Ulama Pejuang pada Masa Revolusi (1945-1950)" dapat menjadi sebuah biografi politik atau biografi intelektual dari seorang tokoh lokal yang juga muncul dalam politik nasional. Sementara itu, tulisan Edi S. Ekajati, "Raden Ema Bratakusuma: Tipe Tokoh Sejarah Lokal", mencoba mengungkapkan tipe seorang pemimpin yang memutuskan diri menjadi tokoh lokal sekalipun beberapa kali mempunyai kesempatan menjadi tokoh nasional. Dari semua biografi itu, kita belum melihat pendekatan yang sekarang cukup mendapat tempat dalam penulisan sejarah, yaitu psikohistori. Barangkali tokoh-tokoh nasional dan tokoh lokal kita tidak mudah untuk di-psikoanalisa, sebab hidup mereka lebih banyak diwarnai oleh budaya masyarakat daripada psikologi perorangan. Untuk ini barangkali semacam biografi dengan pendekatan psikologi antropologik atau etnopsikologi dapat membantu menerangkan perilaku tokoh sejarah.

Betapapun terbatasnya, seperti terbatasnya sebuah makalah, kita sudah menyaksikan kesadaran yang lebih tinggi dalam penggunaan teori dan konsep ilmu-ilmu sosial yang mempertajam analisa sejarah. Di antara penulis itu ialah Usman Pelly, R.Z. Leirissa, Hamid Abdullah, Mestika Zed, Suyatno, dan Ida Bagus Sidemen. Tulisan Harlem Siahaan, "Pembauran di Kalimantan Barat: Prospek dan Perspektif Sejarahnya" selain sebagai satu-satunya tulisan yang membicarakan etnik Cina, juga merupakan tulisan yang dengan cermat mendekati masalah sejarah secara sinkronik dan diakronik. Ia juga mencoba mengutarakan generalisasi sejarah dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa secara interdisipliner. Dalam tulisan-

tulisan mereka kita sudah melihat kejelasan konseptualisasi, dengan menghindarkan diri dari kerancuan bahasa sehari-hari, sehingga historiografi Indonesia sudah memperkaya diri dengan peralatan ilmu-ilmu sosial, kalau tidak dapat dikatakan sudah menjadi *social-scientific history*.

Sebagai catatan akhir, kita melihat bahwa sejarah lokal dalam bentuknya yang mikro telah tampak dasar-dasar dinamikanya, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah dapat diterangkan melalui dinamika internal yang di tiap daerah mempunyai kekhasan tersendiri yang otonom. Kita sudah melihat adanya pendekatan interdisipliner yang membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam historiografi, berupa pembukaan tema-tema baru. Banyak tema baru muncul di kalangan sejarawan, sehingga kita dapat mengharapkan adanya sebuah seminar sejarah komparatif yang membicarakan satu-dua tema, sambil membandingkan sejarah tema itu dari berbagai daerah di Indonesia. Seminar sejarah komparatif yang demikian akan membuka pengertian kita mengenai masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya akan berguna bagi para penentu kebijakan nasional.

SEJARAH AGAMA

Di bawah ini akan dijelaskan pertama-tama soal perbedaan antara sejarah dengan fiksi, ilmu-ilmu sosial lain, dan ilmu agama. Kedua, apa yang dimaksud dengan agama dalam penelitian ilmiah. Dan ketiga, akan dikemukakan beberapa model pendekatan sejarah agama.

SEJARAH

Kaidah pertama, sejarah itu fakta. Perbedaan pokok antara sejarah dengan fiksi ialah sejarah menyuguhkan fakta, sedangkan fiksi menyuguhkan khayalan, imajinasi, atau fantasi. Buku-buku Ki SH Mintardja, *Api di Bukit Menoreh* dan *Naga Sasra dan Sabuk Inten*, bukan fakta sejarah dan tidak dapat menjadi sumber sejarah untuk zaman Sultan Agung atau zaman yang lain, sebab buku itu adalah fiksi. Tetapi, buku itu dapat menjadi fakta sejarah sosial bahwa pada tahun-tahun 70-an, 80-an, dan 90-an cerita silat yang bertema sejarah Jawa sangat populer di kalangan masyarakat kelas bawah di Jawa. Begitu populer, sehingga meskipun ceritanya sudah dimuat di *Kedaulatan Rakyat*, sudah dibukukan berjilid-jilid, dimuat kembali di *Kedaulatan Rakyat* setelah pengarangnya meninggal dunia. Sementara itu, buku Umar Kayam, *Para Priyayi* (Jakarta: Grafiti, 1992), bukan fakta sejarah untuk zaman kolonial, Jepang, Revolusi,

dan 1965, dan bukan pula sumber sejarah, tetapi buku dapat menjadi fakta sejarah intelektual tentang persepsi pengarang mengenai zaman-zaman yang disebut dalam buku itu. Berlainan dengan itu, buku-buku otobiografi bukan fiksi tetapi berisi fakta, bila kita dapat menyisihkan imajinasi, persepsi, pembelaan, dan kesimpulan pengarangnya. Demikianlah buku Raden Mas Harya Purwa Lelana, *Cariyos Bab Lampah-Lampahipun Raden Mas Purwa Lelana* (Semarang: Van Dorp & Co., 1877) adalah cerita perjalanan dengan kereta berkuda seseorang dari daerah Gubernemen ke Surakarta pada paro ke-2 Abad XIX, dan buku Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi, *Hikayat Abdullah* (1840-1843) yang memuat kisah pelayaran Abdullah pada waktu yang sama. Adapun terhadap kronik, hikayat, "sejarah", syair, dan babad yang kebanyakan ditulis jauh sesudah kejadian, harus diterapkan prosedur standar dari kritik sejarah. Demikianlah, misalnya, buku A.A. Cense, *De Kroniek van Banjar, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Syair Perang Mengkasar* (penulis istana Goa), dan *Babad Tanah Jawi*. Bagi sejarawan, tidak satu pun sumber sejarah yang luput dari kritik sejarah.

Kaidah kedua, sejarah itu diakronis, ideografis, dan unik. Sejarah itu diakronis, sedangkan ilmu sosial itu sinkronis. Artinya, sejarah itu memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu sosial meluas dalam ruang. (Lihat Bab Sejarah Sosial, dalam buku ini, Gambar 1). Sejarah akan membicarakan satu tempat dari waktu A sampai waktu B. Misalnya, sejarah akan membicarakan "Agama Katolik di Kodya Yogyakarta, 1920-1950"; "Sarekat Islam Solo, 1911-1920"; "Nahdlatul Ulama, 1926-1945"; "Muhammadiyah, di Yogyakarta dan Sumatera Barat, 1930-1950". Tentu saja orang bisa menulis tentang studi kasus yang berlangsung dalam hitungan hari, asal dibicarakan sebelum, prosesnya, dan akhirnya. Demikianlah misalnya tulisan Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Condition, Course and Sequences* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966).

Sejarah berusaha melihat segala sesuatu dari sudut rentang waktu. Artinya, melihat perubahan, kesinambungan, ketertinggalan, dan loncatan-loncatan. Sementara itu, ilmu sosial bersifat sinkronis, artinya meluas dalam ruang. Ruangnya luas tapi waktunya pendek. Ibarat meneliti sebuah pohon, ilmu-ilmu sinkronis tertarik untuk membicarakan penampangnya, strukturnya, dan lingkaran-lingkaran yang membentuknya. Sejarah punya pekerjaan lain. Ia tertarik untuk membicarakan asal bibit, kapan pohon itu tumbuh, kapan bercabang dan beranting, bagaimana keadaan cabang dan ranting, apa sebab satu cabang tumbuh subur dan yang lain kurus, apa sebab tidak berbuah.

Akan tetapi, pemikiran tentang metodologi sejarah tidak berhenti di situ. Pada awal dasawarsa kedua abad ke-20 ini di Amerika sudah berkembang *The New History* yang menganjurkan pemakaian penemuan ilmu-ilmu sosial untuk penelitian sejarah. Di Indonesia metodologi itu berkembang pada akhir 1960-an, pelopornya adalah Sartono Kartodirdjo. Maka, dalam penelitian sejarah di Indonesia sekarang ini (termasuk tesis-tesis S-2), kedua pendekatan itu, diakronis dan sinkronis, digabung.

Sejarah itu juga ideografis, artinya melukiskan (menggambarkan, memaparkan, menceritakan) saja. Ilmu sosial itu nomotetis (bahasa Yunani *nomos* berarti hukum) artinya berusaha mengemukakan hukum-hukum. Misalnya sama-sama menulis tentang revolusi, sejarah dianggap berhasil bila ia dapat melukiskan sebuah revolusi secara mendetil, sampai hal-hal kecil. Sebaliknya, ilmu sosial akan menyelidiki revolusi-revolusi dan berusaha mencari hukum-hukum yang umum berlaku dalam semua revolusi.

Karenanya, sejarah itu bersifat unik, sedangkan ilmu sosial itu generik. Penelitian sejarah akan mencari hal-hal yang unik, khas hanya berlaku pada sesuatu, di situ, dan waktu itu. (Untuk itulah sejarah juga disebut sebagai ilmu yang idiografis [bahasa Yunani *idios* artinya pembawaan seseorang, kekhasannya]). Sejarah menulis hal-hal

tunggal dan hanya sekali terjadi. Topik-topik sejarah, misalnya, Revolusi Indonesia, Revolusi di Surabaya, Revolusi di Pesantren X, Revolusi di Desa Y. Revolusi Indonesia tidak terjadi di tempat lain dan hanya terjadi sekali, pada waktu itu, tidak terulang lagi. Topik-topik ilmu sosial, misalnya, Sosiologi Revolusi, Masyarakat Desa, Daerah Perkotaan. Sosiologi Revolusi akan membicarakan hukum-hukum umum yang berlaku pada semua revolusi. Caranya ialah dengan mempelajari banyak revolusi, di banyak tempat, dan waktu yang berbeda-beda.

Kalau diakronis dan sinkronis sudah bergabung, maka sejarah akan menjadi konsumen teori sosial. Sementara itu, unsur-unsur ideografis dan unik masih tetap. Ada lagi penelitian yang berada di perbatasan. Dalam ilmu sosial, pendekatan sejarah selalu ada, seperti dalam penelitian politik, sosial, atau ekonomi. Selebihnya, akhir-akhir ini ada kecenderungan sejarah yang *narrative*, sehingga sejarah mirip dengan novel.

Kaidah ketiga, sejarah itu empiris. Inilah yang membedakan sejarah dengan ilmu agama. Sejarah itu empiris, ilmu agama itu normatif. Empiris berasal dari kata Yunani *empiria*, artinya pengalaman. Maka, sejarah itu empiris, sebab sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh. Ilmu agama itu normatif tidak berarti tidak ada unsur empirisnya, hanya saja yang normatiflah yang menjadi rujukan. Misalnya, batasan najis yang bermula dari hukum normatif. Persis (Hasan Bangil) membolehkan orang memelihara anjing dan punya definisi tentang najis yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. Ada unsur empiris, tetapi dasar hukumnya bersifat syar'iy, soal najis itu normatif. Sementara itu, sejarah itu murni empiris, berdasar fakta tidak berdasar hukum-hukum (baik normatif, ilmiah, atau konstitusional). Tanpa empiri, pengalaman, dan fakta sejarawan tak bisa bicara.

AGAMA

Penelitian tentang agama dari perspektif ilmu-ilmu umum berbeda dengan penelitian agama dari sudut pandang ilmu-ilmu agama. Bedanya ialah ilmu-ilmu umum melihat agama dari sudut empirisnya, sedangkan ilmu-ilmu agama melihat dari segi normatifnya. Maka, sekalipun di sekolah seperti IAIN dan Seminari Tinggi juga dikembangkan ilmu-ilmu empiris, ada baiknya dilihat bagaimana ilmu-ilmu empiris mendefinisikan agama.

Definisi. Semua ahli ilmu sosial mempunyai definisi sendiri tentang agama, sesuai dengan disiplin ilmunya. R.N. Bellah memberikan definisi agama, sebagai berikut, "*a set of symbolic forms and acts which relate man to the ultimate condition of his existence*" (Baca R.N. Bellah, "Religious Evolution" dalam Roland Robertson (ed.), *Sociology of Religion* [Suffolk: Penguin Books, 1971], hlm. 262-292). Definisi ini sangat berwarna antropologi simbolis, yang tentu saja berbeda dengan definisi-definisi ilmu sosial lain dan agama-agama mengenai agamanya sendiri serta agama lain. Dengan definisi itu, Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pastilah termasuk agama, padahal dalam praktik pemerintahan di Indonesia dianggap sebagai kebudayaan dan berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sementara itu, agama-agama institusional, terutama Islam, juga tidak mengakuinya sebagai agama. Marilah kita tanggalkan penilaian normatif atas Aliran Kepercayaan itu dan melihat Aliran Kepercayaan sebagai fakta sosial yang menjadi objek penelitian semata-mata, terlepas dari penilaian subjektif.

Apa yang bisa dikerjakan mahasiswa yang berasal dari ilmu-ilmu agama yang tidak bisa dikerjakan mahasiswa yang berasal dari ilmu-ilmu empiris? Ada banyak hal yang bisa dikerjakan supaya mahasiswa yang berasal dari ilmu-ilmu agama mampu "tampil beda". Banyak masalah agama yang sulit disentuh mahasiswa yang berasal dari ilmu-ilmu empiris. Mahasiswa yang berasal dari ilmu-ilmu empiris hanya peka pada satu dimensi agama, yaitu dimensi konsekuensi sosial.

Padahal, dimensi agama ada lima hal, yaitu keyakinan (*belief system*), praktik keagamaan, pengetahuan keagamaan, pengalaman keagamaan, dan konsekuensi sosial (Baca R. Stark dan C.Y. Glock, "Dimensions of Religious Commitment" dalam Robertson, *ibid.*, hlm. 253-256). Jadi, mereka yang berasal dari ilmu-ilmu agama mempunyai keunggulan komparatif 5 : 1 dibanding mereka yang berasal dari ilmu-ilmu umum.

Taruhlah, misalnya, dimensi pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan, yang sering dianggap sebagai dimensi terpenting dari agama, dalam sosiologi dan antropologi agama akan disebut sebagai mistisisme. Mistisisme (sufisme, tarekat) yang menyangkut juga soal keyakinan, praktik, dan pengetahuan hanya dapat dikerjakan oleh mereka yang berasal dari ilmu-ilmu agama. Mereka yang berasal dari ilmu-ilmu umum paling-paling hanya dapat mencapai aspek sejarah, institusionalisasi, jaringan, dan pengaruh timbal-baliknya dengan masyarakat. Sebagai contoh ialah banyak tulisan kaum Orientalis yang cemerlang dari segi medium, metodologi, dan objektif, masih kentara sebagai tulisan dari luar. Seseorang yang berasal dari ilmu-ilmu agama harus dapat menulisnya dari dalam, meskipun tarekat itu sebuah *secret society*.

MODEL-MODEL PENDEKATAN

Sejarah kontemporer mudah menelitinya. Untuk peristiwa penting berita-berita ada di koran-koran, sumber lisan melimpah, foto-foto masih tersedia, dan orang pun dengan senang bersedia membuka dokumentasi pribadi. Kalau perlu penelitian arsip, juga biasanya peristiwa-peristiwa penting selalu ada laporannya — sekalipun ada batasan waktu tertentu untuk terbuka. Akan tetapi, ada konvensi khusus di UGM bahwa untuk mahasiswa S-2 Program Studi Sejarah disarankan untuk memakai bahan-bahan sebelum PD II, waktu arsip-arsip masih berbahasa Belanda. Anggaplah bahwa konvensi itu berlaku, supaya mahasiswa S-2 UGM punya nilai tambah. Bagi

mereka yang pandai bahasa lain nilai tambah itu akan berlipat. Bahasa Belanda ditambah dengan pengetahuan Bahasa Arab bagi mereka yang berasal dari IAIN pastilah merupakan merupakan keuntungan berganda itu. Sumber-sumber sejarah yang selama ini tak terjangkau dan berbahasa Arab, seperti catatan pribadi tokoh-tokoh beragama Islam, pastilah akan muncul ke permukaan. Topik tentang pemberontakan ulama, seperti sebuah disertasi mahasiswa S-3 di IAIN Sunan Kalijaga tentang KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak (Abdul Djamil, "KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak: Pemikiran dan Gerakan Islam Abad Sembilan Belas, 1786-1878" [1999]), hanya mungkin lahir dari tangan orang yang berbahasa Belanda dan Arab. Ditambah dengan pengetahuan bahasa dan huruf daerah, lengkaplah sudah keunggulan komparatif mereka yang berasal dari perguruan tinggi agama. Namun, contoh-contoh dalam kuliah ini akan merambah ke hal-hal kontemporer, sehingga hanya kemampuan berbahasa Indonesia yang diperlukan.

Pendekatan Sejarah Politik. Dari semua pendekatan, kiranya model inilah yang paling mudah terjangkau, sebab peristiwanya ada di permukaan, sumbernya mudah dicari, dan dari segi publisitas juga paling populer. Buku-buku ilmu politik yang selalu berarti politik kontemporer dengan pendekatan sejarah sangat banyak. Misalnya, buku Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti, 1987) dan buku Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). Buku yang murni sejarah juga banyak, tapi kebanyakan ditulis oleh orang non-Indonesia, seperti buku B.J. Boland yang terjemahan Indonesiannya ialah *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1985) dan Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980). Buku yang ditulis orang Indonesia, di antaranya ialah buku Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985).

Banyak pertanyaan politik yang belum terjawab tuntas. Misalnya, "partai-partai politik Islam dalam pergerakan nasional", "Pan-

Islamisme”, “gerakan khilafah”, dan yang sepenuhnya masih gelap ialah “Sarekat Islam Lokal dan peranan politiknya di tingkat lokal”. Topik-topik lain untuk sejarah politik masih terbuka, terutama kalau kita masukkan birokrasi, perilaku birokrat, dan intrik-intrik politik di dalamnya. Bagaimana para mufti, penghulu, kadi, dan pejabat-pejabat dalam kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia diangkat? Hirarkinya dan sistem penggajiannya? Apa sudah ada “korupsi birokratis”? Juga soal-soal diplomasi, misalnya, arsip-arsip tentang haji di Arab Saudi — kalau ada — belum terbaca sampai sekarang. Apa yang terjadi dengan para pelajar di Mesir waktu pergerakan nasional? Itu sekedar beberapa pertanyaan dalam sejarah politik.

Pendekatan Sejarah Ekonomi. Kita belum menemukan tulisan sejarah yang menghubungkan antara agama dan ekonomi. Padahal hipotesisnya jelas. Munculnya Sarekat Islam pertama kali terjadi di Laweyan, Solo, pada 1911. Laweyan waktu itu adalah kecamatan yang banyak hajinya dan maju dalam perdagangan batik. Samanhudi adalah seorang haji dan pedagang batik. Pada 1912 Muhammadiyah muncul di kampung Kauman Yogyakarta, yang juga maju perdagangan batiknya. Ahmad Dahlan adalah haji, khatib, penghulu, dan pedagang batik. Mitsuo Nakamura, seorang antropolog, yang menulis tentang Kotagede, Yogyakarta, mengatakan dalam *The Crescent Arises Over the Banyan Tree* (Yogyakarta: Percetakan Universitas Gadjah Mada, 1983) bahwa sebelum PD II para pedagang Islam reformis itu biasa mengirim anak-anaknya untuk sekolah di Mesir. Haji Bilal yang menyediakan perumahan untuk para pegawai RI pada 1946 ketika pemerintahan pindah ke Yogyakarta adalah seorang haji dan pedagang batik. Tempat-tempat lain yang diduga agama berkaitan dengan ekonomi ialah Karangakjen, Pekajangan dan Majalaya. Kebetulan semuanya ada kaitan dengan tekstil.

Clifford Geertz, juga seorang antropolog, dalam *Peddlers and Princes: Social Changes and Modernization in Two Indonesian Towns* (Chicago: Chicago University Press, 1963) mengatakan bahwa di Mojokuto (Pare,

Kediri) para pedagang reformislah yang mengubah ekonomi *bazaar* ke ekonomi firma. Kalau kesimpulan itu benar, maka ada hubungan antara etika agama dan etika ekonomi. Rupanya Geertz ingin menerapkan teori Max Weber mengenai hubungan antara Protestantisme dan kapitalisme, kebetulan data lapangan mendukung teori Weber itu. Bahwa kebangkitan Islam terkait dengan perubahan ekonomi ternyata gejala lama. Christian Dobbin dalam bukunya, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah, 1704-1847* (Jakarta: INIS, 1992) menunjukkan hal itu.

Namun, etika ekonomi santri reformis bukan tidak ada batasnya. Nakamura (dia mengadakan riset di akhir 1960-an) mencatat bahwa ada proses *priyayinisasi*, yaitu anak-anak kaum santri memilih jadi pegawai negeri daripada wiraswasta sesudah PD II. Kiranya priyayinisasi itu gejala umum di lingkungan santri reformis. Orang lalu menengarai matinya etos kelas menengah pedagang di lingkungan Muhammadiyah, dan gerakan itu sekarang didominasi oleh pegawai negeri dengan waktu dan keuangan yang terbatas. Dengan kata lain, pada waktu industrialisasi awal dengan ekonomi komersial dan manufaktur serta sekarang urban sederhana, mereka bisa berada di garis depan ekonomi, tetapi kedudukan itu telah digantikan kelompok lain dalam ekonomi industrial dan masyarakat kota besar dan metropolitan. Siapa penggantinya? Jawabannya dapat kita temukan dalam buku Lance Castle, juga seorang antropolog, yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, yaitu *Religion, Politics and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry* (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies Cultural Report Series No. 15, 1967). Menurut Castle para pengusaha santri itu tidak mau berspekulasi, sehingga kalah dengan pengusaha Cina yang berani berspekulasi.

Sejarah, lebih dari segalanya, adalah "*a science of change*", begitu kata Marc Bloch. Jadi penelitian sejarah harus memperhatikan perubahan-perubahan. Untuk meneliti agama dari perspektif sejarah

ekonomi, seorang sejarawan harus melihat korelasi antara perubahan keagamaan masyarakat dengan perubahan ekonomi, atau sebaliknya.

Pendekatan Sejarah Sosial. Selain yang normatif, agama adalah sebuah institusi sosial. Sebagai institusi sosial inilah agama jadi bahan kajian sejarah. Banyak tema dan topik yang bisa dikerjakan, tetapi kuliah ini ingin menekankan perlunya mengenai perubahan sosial. Ada dua model dalam perubahan sosial, yaitu model evolusi sejarah dan model kekuatan sejarah. Pertama, model evolusi sejarah, umpamanya, (1) perubahan birokrasi: tradisional, kolonial, dan nasional; (2) perubahan kelas pemeluk: kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah; (3) perubahan lokasi: desa, kota, dan metropolitan; (4) perubahan pendidikan: pesantren, madrasah, dan sekolah. Kedua, model kekuatan sejarah, umpamanya, (1) agama dan modernisasi; (2) agama dan penetrasi agama lain; (3) agama dan pribadi kreatif; dan (4) agama dan masyarakat pasca industrial.

Contoh kongkret bagaimana penelitian telah dikerjakan, dari model evolusi sejarah diambil perubahan pendidikan. Karel A. Steenbrink telah menulis *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994). Kita tahu bahwa bentuk modern pendidikan agama itu tidak berjalan lurus. Artinya, ketiganya tidak *mutually exclusive* tapi bercampur dan tidak merupakan proses yang bertahap tapi berdampingan. Namun, model evolusi mempunyai kegunaan heuristik, memberikan ilham dan arah penelitian. Contoh dari model kekuatan sejarah adalah buku Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998). Buku itu, sebagaimana judulnya, merupakan contoh bagaimana sebuah kekuatan sejarah telah menggerakkan Islam di Indonesia.

Pendekatan Sejarah Intelektual. Model ini mendekati sejarah agama dengan melihat pada perkembangan intelektualitasnya. Dalam sejarah intelektual dikemukakan hasil pemikiran perorangan, berbeda dengan sejarah mentalitas (lihat bawah) yang mementingkan

pemikiran kolektif. Agar supaya tidak hanya deskriptif tapi ada analisis, dalam sejarah intelektual perlu dikemukakan adanya korespondensi antar tokoh, yaitu reaksi atas pemikiran terdahulu. Jadi ada kesinambungan pemikiran. Selain itu, perlu dijelaskan latar belakang sosial dari pemikiran masing-masing (kalau ada).

Tidak hanya sejarah dengan rentang waktu, tetapi studi kasus juga dapat menjadi sasaran penelitian sejarah intelektual. Contoh dari sejarah intelektual yang membicarakan sejarah dengan rentang waktu ialah penelitian Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Quran di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996). Sementara itu, studi kasus contohnya ialah buku Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatra Thawalib* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990).

Kita lihat bahwa sejarah intelektual tidak jauh dari jangkauan ilmu-ilmu agama. Dengan bekal ilmu agama dan pengetahuan tentang metodologi sejarah, tidak ada alasan bagi mereka yang berasal dari disiplin ilmu-ilmu agama untuk mengatakan bahwa menulis topik sejarah itu jauh dari bekal yang sudah ada.

Pendekatan Sejarah Kebudayaan. Kebudayaan adalah simbol, nilai, dan perilakunya. Tugas sejarah kebudayaan, menurut Johan Huizinga dalam "The Task of Cultural History", *Men and Ideas: History, the Middle Ages, the Renaissance* (New York: Meridian Books, Inc., 1959) ialah mencari pola-pola kehidupan, kesenian, dan cara berpikir secara bersama-sama dari suatu zaman. "Secara bersama-sama" artinya tidak terpisah satu dengan lainnya. Untuk keperluan itu harus dicari *central concept* yang dapat merangkai ketiganya.

Kuliah ini menganjurkan untuk menekankan soal pola-pola kehidupan, yaitu mitologi, mistisisme, upacara siklus kehidupan, upacara-upacara semi ritual, *splinter groups*, busana muslim-muslimah, sekularisasi, dan privatisasi. Sebagai *central concept* akan dikemukakan adanya Islam *budaya pedesaan* dan *budaya perkotaan*.

Untuk empat gejala pertama (mitologi, mistisisme, upacara siklus kehidupan, upacara-upacara semi-ritual) dapat dimasukkan dalam budaya *pedesaan*, dan untuk empat gejala terakhir (*splinter groups*, busana muslim-muslimah, sekularisasi, dan privatisasi [agama bagi keperluan pribadi]) kita masukkan dalam budaya perkotaan.

Contoh kajian mengenai mistisme yang baik ialah buku Martin von Bruinessen tentang tarekat. Sekalipun buku mengenai mistisisme itu bukanlah karya sejarah tapi antropologi, ada juga unsur sejarahnya, jadi agak komprehensif. Kita ingin sejarah kebudayaan yang komprehensif. Selama ini, buku-buku Sejarah Kebudayaan Islam hanya menyoroti masalah kesenian saja (kebanyakan berupa buku-buku teks), sehingga sering mengurangi makna kebudayaan. Padahal, selain kesenian masih ada pola-pola kehidupan dan cara berpikir. Kalau perkuliahan ini ingin menekankan masalah pola-pola kehidupan, karena hal itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh mereka yang berasal dari ilmu-ilmu agama. Barangkali kendalanya terletak dalam soal pengumpulan sumber. Selain sumber-sumber tertulis juga sumber lisan diperlukan.

Pendekatan Sejarah Kesenian. Buku-buku sejarah kesenian yang ada, kebanyakan berupa buku teks zaman kejayaan Islam, juga hanya melukiskan seni (arsitektur, lukis, sastra) zaman klasik. Sudah ada skripsi dan disertasi mengenai arsitektur istana dan makam, dan tata kota Islam Indonesia dari abad ke-17 dan abad ke-18, tetapi belum disebarluaskan, lagi pula hanya berhenti di situ. Pada 1998 ada sebuah panitia bekerja sama dengan IAIN Sunan Kalijaga untuk meneliti sastra Jawa Islam dari abad ke-19 yang ada di kraton kesultanan Yogyakarta, tetapi hasilnya juga belum dipublikasikan.

Walhasil, pengetahuan kita tentang seni Islam sangat minimal. Dapat dikatakan bahwa belum ada kajian tentang seni Islam modern di Indonesia, padahal seni Islam merupakan *living tradition* yang banyak menarik perhatian orang akhir-akhir ini. Seniman Islam lahir dan berkembang. Seni lukis, musik, film, dan sinetron maju pesat, dan mendapatkan lahan yang subur. Tetapi, kajian mengenai

perkembangan itu tidak ada sama sekali, hampir semua buku adalah buku politik.

Sebenarnya, kajian sejarah kesenian (Islam) tidak jauh dari jangkauan mereka yang berlatarbelakang ilmu-ilmu agama. Dengan ketrampilan metode sejarah lisan, dapat dikumpulkan sumber sejarah dengan interval 20 tahun, kira-kira satu generasi. Sekedar sebagai contoh, misalnya, kita dapat melakukan riset tentang "Islam dalam Musik: Pandangan Pemusik, Pengamat, Pemilik Toko Rekaman, dan Penikmat". Kita dapat melakukan interviu dengan empat generasi pemusik, pengamat, pemilik toko rekaman, dan penikmat musik Islam, yaitu mereka yang mencapai kematangan pada 1940, 1960, 1980, dan 2000. Taruhlah responden kita berjumlah 16 orang, empat orang per generasi dengan minat masing-masing. Secara hipotetis kita akan mendapatkan bahwa ada proses semakin kentalnya nuansa santri (santrinifikasi) dalam musik, baik lirik maupun lagunya.

Pendekatan Sejarah Mentalitas. Sejarah mentalitas, menurut arti kata "mentalitas" sebenarnya dapat mencakup manyangkut banyak hal, yaitu hal-hal yang termasuk dalam sejarah intelektual, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, sejarah kesenian, dan sejarah sensibilitas (lihat bawah). Sangat pervasif, karena itu kita perlu definisi kerja, supaya penelitian efektif. Michele Vovelle, sejarawan Perancis (lahir 1933), dalam terjemahan Belanda, *Mentaliteitsgeschiedenis: essays over leef-en beeldwereld* (Nijmegen: SUN, 1985) mengemukakan tiga istilah pokok dalam sejarah mentalitas, yaitu pikiran kolektif (ideologi, *attitude*), perasaan kolektif, dan imajinasi kolektif; ketiganya dengan ketentuan sudah ada *sociabilité* (tersosialisasikan).

Di sini tekanan kita ialah pada pikiran kolektif, sebab dua yang lain (perasaan kolektif, imajinasi kolektif) akan dimasukkan dalam Sejarah Sensibilitas. Pikiran kolektif itu, umpamanya, ialah nasionalisme, anti-feodalisme, kemerdekaan, konsep negara, dan demokrasi. Taruhlah kita akan melakukan riset tentang gagasan anti-feodalisme pada orang-orang Sarekat Islam. Kita dapat membuka

arsip tentang SI (CSI, SI Lokal), *Adviseur voor Inlandsche Zaken*, laporan para residen, koran SI seperti *Oetoesan Hindia*, dan penerbitan-penerbitan lain. Praktis kita juga bisa melakukan penelitian apa saja asal selalu diingat definisi kerja kita, tentang pikiran kolektif itu.

Pendekatan Sejarah Sensibilitas. Lucien Febvre dalam *A New Kind of History* (London: Harper Torchbook, 1973) mengatakan bahwa sejarah sensibilitas ialah sejarah kandungan emosional manusia dalam suatu kurun. Sejarah sensibilitas adalah bagian dari sejarah mentalitas atau sebagai spesialisasinya. Maka, supaya nyambung dengan sejarah mentalitas, di sini kita akan menunjuk pada perasaan kolektif dan imajinasi kolektif. Untuk mudahnya, kita ambil contoh aktual tentang “Peristiwa Jawa Timur”, yang berupa amuk massa pasca Memorandum I DPR pada Presiden 2001.

Amuk massa itu disebabkan oleh perasaan terancam, kecewa, kosong, putus asa, frustrasi, dan ketidakpastian. Padahal sebelumnya mereka sangat menaruh harapan bahwa kekuasaan politik akan mendatangkan kejayaan. Selain tu, ada sakralisasi, mitologisasi, dan kultus pribadi dalam imajinasi mereka. Mengenai imajinasi kolektif itu dapat dibuktikan ketika seorang di antara 36 ulama yang datang ke DPR pada 24 Januari 2001 mengatakan bahwa ada malaikat di dada Sang Pujaan. Demikianlah, Islam juga telah jadi *folk religion*.

Setiap orang tahu bahwa antara tahun 1945-1950 ada perasaan kebencian kolektif dari umat terhadap kolonialisme Belanda, umat paling banyak menderita, dan umat juga dipersangkakan paling banyak menumpahkan darah. Tetapi, itu hanya kenangan, buku-buku tentang revolusi tidak mencatat peranan umat itu. Untunglah baru-baru ini terbit buku tentang Hizbullah-Sabilillah, yaitu *Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang* (Yayasan Bhakti Utama Surakarta, 1997).

Dengan modal ketrampilan sejarah lisan, kita dapat meneliti sensibilitas umat pada Zaman Jepang, Revolusi, 1948, 1966, dan 1998.

Sejarah lisan sangat tergantung pada memori, memerlukan saksi mata yang masih hidup.

Pendekatan Biografi, Psycho-history, Prosopografi. Biografi (dan otobiografi) menekankan pengalaman pribadi, proses “menjadi”, dan karakter seorang tokoh. Sudah banyak biografi ditulis, kebanyakan mengenai tokoh politik dan dari sudut pandang politik. Bahkan banyak yang menyebutkan buku-nya sebagai biografi politik. Dari tokoh agama yang sudah ditulis biografinya ialah KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, dan KH Ahmad Dahlan. Semuanya tokoh besar dalam Islam, sedangkan dari tokoh bisnis dan dermawan ada Haji Sulchan. Selebihnya adalah tokoh-tokoh Islam dalam politik. Kuliah ini ingin melihat lebih banyak lagi tokoh (dan bukan tokoh) non-politik ditulis biografinya.

Psychohistory (sejarah kejiwaan) adalah paduan psikoanalisis dan sejarah. Pertama kali dimulai oleh Erik H. Erikson dengan *Gandhi’s Truth* dan *Young Man Luther*. Jejak Erikson, seorang neo-freudian, di Amerika diikuti diantaranya oleh Bruce Mazlish (*In Search of Nixon: A Psychohistorical Inquiry* [New York: Basic Books, Inc., 1972]). Sebagai seorang neo-freudian ia berpendapat bahwa persaingan dengan saudara-saudaranyalah yang menjadi pendorong Nixon untuk sukses. Di Indonesia sejarah kejiwaan dalam penelitian sudah dimulai oleh James L. Peacock yang membuat perbandingan antara dua reformer, KH Ahmad Dahlan dan Haji Rasul (“Dahlan and Rasul: Indonesian Muslim Reformers”, dalam A.L. Becker dan Aram Yengoyan (eds.), *The Imagination of Reality: Essays in Southeast Asian Coherence System* [Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation, -]). Tetapi, sesudah Peacock kemudian berhenti.

Prosopography atau biografi kolektif, berasal dari bahasa Yunani *prosopon*, artinya orang. Biografi kolektif belum berakar dalam historiografi Indonesia. Biografi kolektif dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu kurun sejarah tertentu, melahirkan para tokoh yang mempunyai semangat yang sama. Dalam sejarah agama, biografi

kolektif dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa ada semangat yang sama pada para tokoh agama. Sebagai contoh dapat disebut buku terjemahan karya Ali Rahmena (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1995). Meskipun buku itu tidak sengaja ditulis sebagai biografi kolektif, tetapi buku itu dapat dipakai sebagai contoh. Dalam sejarah Indonesia dapat ditulis, misalnya, biografi kolektif dari KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Achmad Chatib, dan KH. Nawawi Al-Banteni yang dipersangkakan semuanya pernah bertemu di Mekah.

Dari pendekatan sejarah agama di atas, Sejarah Lisan dan Sejarah Kuantitatif belum dimasukkan. Keduanya perlu pembicaraan tersendiri, sehingga rasanya tidak proporsional untuk dibicarakan dalam kuliah ini. Selain itu, pendekatan berdasar kepada spesialisai sejarah, seperti Sejarah Kota, Sejarah Kriminalitas, Sejarah Maritim, dan Sejarah Demografis, yang selalu dapat dikembalikan ke induknya, juga tidak dibicarakan.

SEJARAH POLITIK

POLITIK

Politik didefinisikan bermacam-macam, sesuai dengan sudut pandang pemberi definisi. Tetapi, pada umumnya definisi politik menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Perhatian ilmu politik ialah pada gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, massa dan pemilih, budaya politik, sosialisasi politik, dan sebagainya. (Bacalah mulai dari buku-buku pengantar yang paling elementer, supaya tahu persis politik itu apa).

SEJARAH

Perbedaan pokok dari ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial (termasuk ilmu politik) ialah bahwa *sejarah itu memanjang dalam waktu*, sedangkan *ilmu-ilmu sosial meluas dalam ruang*. Ibarat pohon, sejarah meneliti pertumbuhan dan perkembangannya, sedangkan ilmu sosial menggarap penampang-nya. (Tentu saja selalu ada duplikasi, misalnya, ilmu politik yang memakai metode historis pasti mirip dengan cara kerja sejarah). Pohon yang air dan sinar

mataharinya cukup, pertumbuhan dan perkembangannya akan subur, dan sebaliknya. Padahal, penampang pohon itu akan punya susunan yang sama dengan penampang sejenisnya. Atau, dengan kata-kata Johan Galtung dalam *Theory and Method of Social Research* (New York: Columbia University Press, 1969) sejarah itu *diachronic* (menekankan proses), sedangkan ilmu-ilmu sosial (sosiologi, ilmu politik, antropologi, ekonomi) itu *synchronic* (menekankan struktur).

Maka dalam perkembangan selanjutnya, ada pendekatan *multidispliner* dan *interdisipliner*. Bila *seorang* peneliti memakai banyak ilmu untuk menganalisis suatu masalah itulah yang disebut pendekatan multidisipliner. Bila *beberapa ilmuwan* menggunakan ilmunya sendiri-sendiri untuk meneliti masalah yang sama itulah yang disebut pendekatan interdisipliner. Tetapi, umumnya kedua istilah itu *interchangeable*, dan cenderung istilah interdisipliner yang dipakai. Misalnya, pada ungkapan "*Historian is the ultimate interdisciplinarian*" (Sejarawan adalah ilmuwan interdisipliner yang paling tuntas). Ungkapan itu betul, karena teks-teks sejarah sekalipun tidak eksplisit selalu mengandung sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebabnya, peristiwa sejarah itu multidimensional dan *multi-interpretable*. Lalu muncul istilah *interdisciplinary history*.

SEJARAH POLITIK

Pada mulanya politik adalah tulang-punggung sejarah (*politics is the backbone of history*). Oleh karenanya, buku-buku teks sejarah berisi rentetan kejadian-kejadian mengenai raja, negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan, kelompok-kelompok kepentingan (militer, partai, ulama, bangsawan, petani), dan interaksi antara kekuatan-kekuatan itu dalam memperebutkan kekuasaan. Ada ungkapan "*history is past politics, politics is present history*" (ucapan Sir John Robert Seeley, sejarawan Inggris, 1834-1895) yang dengan pasti menunjukkan keterkaitan antara politik dan sejarah. Dominasi

politik dalam penulisan sejarah itu menjadi kewajaran untuk waktu yang lama.

Namun, menjelang PD II sejarawan Perancis yang tergabung, dalam aliran *Annales* — sejarawan di sekitar majalah *Annales*, terbit sejak 1929 — meragukan keterkaitan antara sejarah dan politik semacam itu. Kalau sejarah hanyalah sejarah politik, sejarah akan menjadi sempit. Mereka ingin memperluasnya dengan memajukan *sejarah sosial*, *sejarah struktural*, atau sejarah total. Di negara-negara seperti Amerika dan Inggris, ada perkembangan serupa, politik tidak lagi dianggap sebagai tulang-punggung sejarah. Kemudian muncul spesialisasi baru dalam sejarah, seperti sejarah kota, sejarah kriminalitas, sejarah pendidikan, sejarah lokal, sejarah intelektual, sejarah ilmu, prosopografi (biografi kolektif), sejarah militer, sejarah psikologis (*psychohistory*), sejarah mentalitas, sejarah kesehatan, sejarah kuantitatif, dan sebagainya.

Sementara itu, kemajuan-kemajuan yang dicapai ilmu sosial juga mempengaruhi ilmu sejarah, ada *rapprochement* (pendekatan kembali) antara ilmu sejarah dengan ilmu sosial. Penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam penelitian sejarah sebenarnya sudah dianjurkan oleh *The New History* di Amerika menjelang PD I (1912), tetapi baru menjadi populer pada 1960-an. Sejarah yang semula bersifat *diachronic* ditambah dimensi *synchronic*. Sejarah politik tidak terkecuali, pendekatan ilmu-ilmu sosial juga menjadi penting.

Ada lagi perkembangan baru. Sejarah yang semula hanya mempelajari masa lalu yang jauh, mempelajari juga masalah-masalah kontemporer. Akibatnya, objek penelitian sejarah berhimpitan dengan objek ilmu-ilmu sosial. Untuk menghindari duplikasi antara tugas sejarawan dengan tugas ilmuwan sosial itu, sebaiknya — menurut hemat saya — sejarawan tetap menekankan aspek diakronisnya. Definisi sejarah sebagai *a science of change* dari waktu ke waktu hendaknya tetap dipertahankan. Dengan cara itu, sejarah politik kontemporer Indonesia dapat saja menulis masalah yang sangat

kontemporer, misalnya perubahan politik yang terjadi baru-baru ini. Jadi, duplikasi dapat dihindari dengan menekankan kembali aspek waktu, perubahan, perkembangan, dan kesinambungan. Dengan cara ini, sejarah sebagai kecerdasan bersama akan lebih bermanfaat dalam proses pencerdasan bangsa.

DARI SEJARAH POLITIK KE SEJARAH KEKUASAAN

Supaya sejarah politik dapat memanfaatkan penemuan dan pendekatan ilmu-ilmu sosial, sejarah politik perlu mengubah orientasi. Perubahan itu di antaranya dengan mengubah objek penelitian. Kalau semula sejarah politik ialah sejarah kegiatan yang berhubungan dengan masalah pemerintahan dan kenegaraan, kemudian sejarah politik didefinisikan sebagai *history of power*. (Lihat Jacques Le Goff, "Is Politics Still the Backbone of History"?, dalam Felix Gilbert and Stephen Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1972, hlm. 337-355). Sejarah politik bukan lagi semata-mata menulis mengenai politik, tetapi tentang kekuasaan pada umumnya.

Keuntungan dari redefinisi itu ialah meluasnya ruang lingkup sejarah. Kekuasaan pasti ada di mana-mana, bukan hanya milik pemerintah dan negara. Di setiap institusi pasti ada sistem kekuasaannya. Kita pun ingin menggunakan redefinisi itu untuk menarik ke bawah, ke sejarah politik tingkat-lokal.

PENDEKATAN

Sejarah politik dapat menggunakan berbagai pendekatan, sesuai dengan topik yang akan dikerjakan. Setidaknya ada delapan macam pendekatan. Berikut adalah pendekatan-pendekatan dan contoh-contohnya. Antara pendekatan yang satu dengan lainnya sering tidak *mutually exclusive*, tetapi tumpang-tindih. (Contoh-contoh

diambilkan dari buku-buku orang Indonesia, buku-buku terjemahan, atau buku-buku asing yang mudah didapat di perpustakaan).

(1) Sejarah Intelektual

Asumsi pokok dari sejarah intelektual ialah adanya *Zeitgeist* (jiwa zaman) dan pandangan sejarah idealistis yang berpendapat bahwa pikiran-pikiran mempengaruhi perilaku. Demikianlah maka Herbert Feith dan Lance Castle (eds.) mengumpulkan berbagai macam ideologi politik yang berkembang dari 1945-1965 dalam *Pemikiran Politik Indonesia, 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988). Muhammad Kamal Hassan menulis *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987).

Dari sejarah intelektual kemudian berkembanglah *sejarah mentalitas*, yaitu “sejarah intelektual” dari massa yang anonim. Jadi, kalau sejarah intelektual itu membicarakan mengenai pemikiran individual, maka sejarah mentalitas membicarakan pemikiran kolektif. Tulisan Sartono Kartodirdjo (tentang Periode Pergerakan Nasional) “Literature and History: Soewarsih’s *Buiten het Gareel*, a Piece of l’Histoire Mentalié” dalam *Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora III* (Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 1996), hlm. 293-301 adalah sebuah contoh. Artikel itu berisi kesadaran kelompok kecil guru-guru dalam pergerakan nasional.

(2) Sejarah Konstitusional

Dari konstitusi suatu bangsa kita mengetahui filsafat hidup, dasar pemikiran waktu membangun bangsa, dan struktur pemerintahan yang dibangun. Dalam setiap konstitusi juga terlihat kepentingan, konsensus yang dibuat, dan konsesi yang diberikan kepada masing-masing kepentingan itu. Contohnya ialah buku Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1962); buku H. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara*

Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekular" tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959 (Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman ITB, 1981); dan buku Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante, 1956-1959* (Jakarta, PT Intermasa, 1995).

Termasuk dalam pendekatan konstitusional ialah pembicaraan sekitar Tap MPR, Undang-Undang, Keppres, PP, dokumen-dokumen seperti Manifes Kebudayaan, AD/ART partai-partai, dan sebagainya.

(3) Sejarah Institusional

Semua sistem politik mempunyai perangkat (lembaga, struktur, institusi), baik negara (kabinet, birokrasi, parlemen, militer) dan non-negara (ormas, orsospol, LSM). Paling banyak ditulis orang mengenai partai.

Partai-partai Islam mendapat porsi yang cukup menonjol dalam kajian sejarah politik kontemporer di Indonesia. Deliar Noer menulis *Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987). Ahmad Syafi'i Ma'arif menulis *Islam dan Politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988). Abdul Aziz Theba menulis *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Selain Islam, peranan militer dalam politik juga banyak ditulis. Harold Crouch menulis *Militer dan Politik* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986). Yahya Muhaimin menulis *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia, 1945-1966* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982). Daftar tulisan ini dapat diperpanjang.

Meskipun kebanyakan buku dimaksudkan sebagai kajian politik, setidaknya perspektif sejarah selalu tampak. Sudah banyak memang yang ditulis, tapi masih lebih banyak lagi yang belum ditulis. Sayang, bahwa sejarawan Indonesia, yang jumlahnya sedikit itu, tidak berminat pada kajian-kajian kontemporer.

(4) Sejarah Behavioral

Istilah ini belum lumrah, tidak baku, tidak dikenal dalam ilmu sejarah, karenanya untuk keperluan *heuristic* (membantu menemukan) bahan kajian sendiri saja, meskipun memang ada istilah pendekatan *behavioral* dalam studi sejarah. Perilaku (*behavior*) negara dan partai-partai politik dalam sosialisasi gagasan, rekrutmen pimpinan/anggota, dan pelaksanaan tindakan politik termasuk dalam sejarah perilaku.

Tulisan Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Glencoe: The Free Press, 1960), sekalipun banyak dikritik, tetapi telah membuka wacana baru dalam kajian politik Indonesia dengan menjelaskan bahwa politik di Indonesia semua didasarkan pada nilai budaya. Buku Donald K. Emmerson, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1976) telah membuat terang perilaku politik Indonesia, 1945-1965, terutama adanya nilai budaya *santri* dan *abangan*, dengan politik *aliran*-nya.

Mengenai perilaku politik Indonesia antara 1950-1965, rupanya kajian tentang Komunisme cukup banyak. Di antaranya ialah buku Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia, 1951-1963* (Berkeley: University of California Press, 1964); Rex Mortimer, *The Indonesian Communist Party and Landreform, 1969-1965* (Monash University, 1972); Sartono Kartodirdjo, "Peasant Mobilization and Political Development in Indonesia" (Makalah SEADAG, New York, September 1975) yang dimuat kembali dalam Sartono Kartodirdjo, *Modern Indonesia: Tradition & Transformation* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm. 30-54; Kuntowijoyo, "Radikalisasi Petani" dalam *Radikalisasi Petani* (Yogyakarta: Bentang, 1993); D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI dkk.* (Bandung: Mizan, 1995). Buku terakhir berisi dokumen perilaku politik PKI dalam kebudayaan.

(5) Sejarah Komparatif

Kajian perbandingan belum populer di Indonesia, itu pun tidak dengan perspektif sejarah tapi ilmu politik. Kita hanya mencatat kajian-kajian dari R. William Liddle, "Ethnicity and Political Organization: Three East Sumatran Case dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1972) dan *Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesian Case Study* (New Haven: Yale University Press, 1970).

Kajian komparatif sangat menjanjikan. Misalnya, perbandingan Golkar di Jawa dan di Indonesia Timur (Iramasuka Nusantara), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa dan di luar Jawa, dan perbandingan afiliasi politik antara beberapa faksi dari etnik minoritas Tionghoa. Kenapa pengikut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di luar Jawa-Bali pasca Orba tidak sama fanatiknya dengan mereka yang di luar Jawa-Bali? Itu semua memerlukan jawaban, dan pendekatan sejarah sangat tepat dipakai untuk menjelaskan.

(6) Sejarah Sosial

Kelompok-kelompok sosial (ulama, santri, pengusaha, buruh, petani, mahasiswa, pemuda) juga mempunyai aspirasi politik sesuai dengan kepentingannya. Sudah banyak ditulis orang mengenai golongan-golongan sosial di Indonesia, tetapi tidak semuanya berperspektif sejarah, bahkan banyak yang tidak berperspektif ilmu politik.

Baca misalnya, buku-buku Heru Cahyono, *Peranan Ulama dalam Golkar, 1971-1980, dari Pemilu sampai Malari* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992); buku yang tidak berperspektif sejarah tapi sosiologi dari Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: SIPRESS, 1992; Francis Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru, 1966-1975* (Jakarta: LP3ES, 1985); Robert W. Heffner, "Islam, State and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle

Class", *Indonesia*, 56 (Oktober 1993) yang diterjemahkan jadi *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

Kajian yang sangat penting ialah buku Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (North Sydney: Allen & Unwin, Pte., Ltd., 1986). Buku ini membahas munculnya militer dalam bisnis dan naiknya konglomerat Cina selama Orde Baru. Dimulai dengan menelusuri hubungan antara negara dan pemodal sebelum 1965 dan diakhiri dengan membeberkan munculnya kelas kapitalis pada masa Orde Baru. Dalam buku ini juga dibahas konsep "bureaucratic capitalism".

(7) Studi Kasus

Banyak yang sudah dikerjakan orang mengenai kasus-kasus politik, seperti soal munculnya partai-partai dan kajian tentang hasil pemilu-pemilu. Pada umumnya, studi kasus semacam itu datang dari ilmuwan politik, tidak dari tangan sejarawan. Baca, misalnya, Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, *Evaluasi Pemilu Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1997).

Studi kasus yang datang dari sejarawan, dengan sumber tertulis dan lisan, kebanyakan masih tersimpan sebagai skripsi. Artikel Kuntowijoyo, "Angkatan Oemat Islam: Beberapa Catatan Mengenai Gerakan Islam Lokal, 1945-1950" (Makalah Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 26-29 Agustus 1970, yang diterbitkan kembali dalam *Paradigma Islam* [Bandung: Mizan, 1991] hlm. 103-122) ialah mengenai reaksi santri atas kekuasaan kaum abangan, atau reaksi ulama atas priyayi pada pasca-kemerdekaan di Kebumen, Jawa Tengah Selatan. Kemudian kasus Peristiwa Tiga Daerah di Jawa Tengah Utara yang ditulis dengan cara yang nyaris sempurna oleh Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989) dan menceritakan reaksi dari *wong cilik* atas kekuasaan priyayi pada pasca-kemerdekaan.

Kiranya kasus-kasus pada pasca-kemerdekaan selalu bertemakan perang antar kelompok sosial. Perang Cumbok di Aceh adalah antara ulama dan uleebalang, dan Revolusi Sosial di Sumatra Timur adalah antara orang kebanyakan dan bangsawan. Mungkin masih banyak lagi yang belum ditulis.

(8) Biografis

Tidak banyak buku biografi yang dengan jelas berupa biografi politik. Di antara yang sedikit itu ialah buku J.D. Legge, *Sukarno: A Political Biography* (London: The Penguin Press, 1972) dan buku Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990).

Pasti karena pertimbangan ongkos produksi dan pemasaran, sampai saat ini hanya biografi dari tokoh-tokoh nasional saja yang diterbitkan; itu pun hanya tokoh-tokoh populer yang mempunyai nilai-jual. Namun, dari buku-buku biografi yang umum selalu ada pasal yang berhubungan dengan politik. Belum ada mahasiswa sejarah yang menjadikan biografi tokoh kontemporer sebagai skripsi. Rupanya masih ada keraguan apakah biografi masuk dalam kategori sejarah.

ILMU-ILMU BANTU

Di luar ilmu politik, ilmu bantu yang banyak gunanya dalam penelitian sejarah politik ialah sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi (psiko-analisis). Teori dan konsep ilmu-ilmu itu tidak harus dinyatakan secara eksplisit, tetapi jelas dapat memberi arah, kerangka pemikiran, dan analisis. Orang tidak perlu menunggu sampai menjadi ahli dalam salah satu ilmu di luar sejarah itu untuk bisa menggunakan ilmu bantu. Kita adalah sejarawan, bukan ahli sosiologi, antropologi, ekonomi, atau psikologi.

(1) Sosiologi

Menulis sejarah politik dengan pendekatan sejarah institusional, sejarah behavioral, dan sejarah sosial hampir-hampir tidak mungkin tanpa latar belakang pengetahuan sosiologi yang cukup. Masalah-masalah elite, kelas, petani, konflik, kepemimpinan, patrimonialisme, priyayi, *wong cilik*, dan sebagainya adalah terminologi sosiologi atau sosiologi politik. Kajian seperti karya Nico Schulte Nordholt, *Ojo Dumeh: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987) pasti memakai pendekatan sosiologi. Buku Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat* (Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 1990) yang menekankan soal komunikasi politik tidak mungkin ditulis tanpa pengetahuan yang cukup tentang sosiologi. Juga karya Amir Santosa, "The Ulama as Political Elite" (Tesis M.A. Universiti Sains Malaysia, Penang, 1980).

(2) Antropologi

Perbedaan antara antropologi sosial dan sosiologi sangat tipis, hanya saja — menurut hemat kami — patokannya ialah kalau masalah-masalah sosial dikembalikan pada nilai, itu antropologi sosial. Sementara itu, sosiologi selalu mengembalikan permasalahan pada posisi sosial orang.

Ada dua buku mengenai politik di Madura, yaitu Iik Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990); dan Elly Touwen-Bouwsma, *Staat, Islam en Lokale Leiders in West Madura, Indonesië: Een Historisch-Anthropologische Studie* (Kampen: Uitgeverij Mondiss, 1988).

(3) Ekonomi

Menulis buku seperti Mochtar Mas'oed, *Ekonomi dan Politik Orde Baru, 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989) tidaklah mungkin terjadi tanpa pengetahuan minimal tentang ilmu ekonomi. Juga buku

Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia, 1950-1980* (Jakarta: LP3ES, 1991).

Bahwa seorang sejarawan tidak perlu menjadi ahli ekonomi itu sudah jelas. Buku seperti karangan G.R. Hawke, *Economics for Historians* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980) kiranya sudah mencukupi, sehingga seorang sejarawan tidak usah ragu-ragu untuk menulis sesuatu tentang ekonomi.

(4) Psikologi

Semua biografi yang berusaha mengetahui kejiwaan seseorang, pastilah memerlukan psikologi. Tulisan Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Pejuang sampai Pemberontak* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) memerlukan bekal *ethnopsychology*, gabungan etnologi dan psikologi. Buku itu menggunakan konsep *sirik* untuk menjelaskan kejiwaan Qahhar Mudzakkar.

Buku-buku lain juga memakai pendekatan non-Barat dengan mengembalikan kejiwaan pada nilai-nilai budaya etnis. Buku Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: LP3ES, 1987) dan O.G. Roeder, *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto* (Jakarta: Gunung Agung, 1982) mempunyai kesamaan, yaitu mencoba menerangkan psikologi tokohnya pada Jawaisme.

Kesempatan masih terbuka bagi sejarawan yang ingin menulis biografi KH Abdurrahman Wahid dari psikologi santri, Megawati dari psikologi Jawa, Akbar Tanjung dari psikologi Tapanuli, atau Amien Rais dari psikologi *amar makruf nahi munkar* Islam.

SEJARAH POLITIK TINGKAT-LOKAL

Kita ingin menggabungkan sejarah lokal dan sejarah politik. Sejarah nasional selalu membicarakan kejadian-kejadian yang mempunyai dampak ke seluruh negara. Sejarah nasional membicarakan para elite nasional; presiden, menteri, politisi, militer, birokrat,

bisnis, dan intelektual. Akhir-akhir ini juga muncul di tingkat nasional, ulama, pemuda, buruh, mahasiswa, dan aktivis. Sejarah nasional adalah sejarah dari atas.

Sejarah lokal bekerja sebaliknya. Ketika ada revolusi nasional dan Proklamasi, di Jawa Tengah Utara ada Peristiwa Tiga Daerah, balas dendam dari *wong cilik* pada priyayi; dan di Jawa Tengah Selatan ada Angkatan Oemat Islam, santri yang menggugat kekuasaan *abangan*. Demikian juga, ketika gerakan gugatan terhadap Orba 1996/1997 di tingkat atas sedang gencar, di Banyuwangi ada kasus pembunuhan dukun santet, di Situbondo ada geheran yang bermula dari ketidakpuasan masyarakat pada aparat penegak hukum, dan di Tasikmalaya ada kerusuhan yang disebabkan ketidakpuasan santri pada ABRI. Semua itu termasuk dalam kategori sejarah lokal, yaitu sejarah desa, kecamatan, kabupaten, kodya, dan provinsi. Sejarah lokal adalah sejarah dari bawah.

Akan tetapi, kita ingin membedakan politik tingkat-lokal dengan politik lokal. Peristiwa Tiga Daerah dan Angkatan Oemat Islam adalah politik tingkat-lokal (*local-level politics*), sedangkan peristiwa-peristiwa di Banyuwangi, Situbondo, dan Tasikmalaya adalah politik lokal (*local politics*). Bedanya, politik tingkat-lokal adalah kepanjangan dari peristiwa nasional, sedangkan politik lokal hanya berhenti di tempat itu saja.

Maka, pemilihan kepala desa (*pilkades*), peraturan desa (*perdes*), peraturan daerah (*perda*), pemilihan bupati, pemilihan walikota, pemilihan gubernur, pemilu, dan aktivitas partai-partai mungkin termasuk politik tingkat-lokal, mungkin hanya politik lokal. Mungkin bisa diterangkan dari atas dengan menghubungkannya pada politik nasional, mungkin hanya bisa diterangkan dengan melihat ke bawah ke lokalitas sendiri.

Ada perbedaan-perbedaan dalam perkembangan berbagai kasus. Kasus antar etnis di Sambas antara orang Madura dengan orang Dayak dan kasus antar agama di Poso antara orang Islam dengan

orang Kristen tetap menjadi kasus lokal, kasus bawah. Kasus Maluku yang bermula dari kasus etnis antara orang Ambon dengan BBM (Bugis, Buton, Makasar) berkembang menjadi kasus antar agama antara orang Islam dengan orang Kristen. Sementara itu, kasus Maluku juga naik jadi kasus nasional melibatkan negara, orang Jakarta, dan mengundang datangnya Lasykar Jihad. Bahkan, ada percobaan ke arah internasionalisasi dengan mengundang campuran PBB. Kasus Aceh, Papua, dan Riau yang menuntut merdeka semula hanya masalah nasional, tetapi ada usaha ke arah internasionalisasi dengan pembentukan aliansi Aceh-Papua-Riau.

Kali ini yang kita inginkan hanya satu, yaitu makalah-makalah sejarah politik tingkat-lokal itu, yaitu peristiwa nasional yang menjadi peristiwa lokal, bukan peristiwa-peristiwa lokal yang tetap lokal, lokal yang meningkat jadi nasional, atau nasional yang meningkat jadi internasional. Jadi, misalnya bagaimana Proklamasi, nasionalisme, pertentangan antara abangan dan santri, pertentangan antara santri tradisional dengan santri modernis, partai-partai di zaman Orba, partai-partai politik pasca-Orba, hubungan ABRI dengan rakyat, dan gerakan Reformasi yang semuanya merupakan isu nasional menjadi isu lokal.

TOPIK-TOPIK SEJARAH POLITIK TINGKAT-LOKAL

Pergunakan imajinasi sejarah (imajinasi berdasar fakta sejarah) Anda untuk mendapatkan topik-topik. Topik-topik itu, misalnya, "Pilkades di desa X: 1991 dan 1999", "Partai-Partai Politik di Kodya Y, 1990-2000", "Perda dan Kelompok Kepentingan di Kodya Z pada 1995", dan "Kekerasan Politik Sekitar Pemilu 1999 di Kabupaten A: Latar Belakang, Kejadian, dan Akibatnya". Pilihlah topik yang panjang-pendeknya sesuai untuk sebuah makalah. Topik harus memberi kesempatan secukupnya untuk menunjukkan kemampuan Anda dalam menerapkan teori dan konsep ilmu-ilmu sosial. Topik

yang terlalu kompleks hanya cocok untuk sebuah skripsi, sedangkan topik yang terlalu sederhana tidak akan memberi banyak kesempatan untuk analisis sejarah. Selebihnya, carilah topik yang memberi Anda kesempatan untuk mempergunakan banyak sumber sejarah, tertulis dan lisan. Ingat, Anda adalah sejarawan bukan ahli ilmu politik, ilmuwan bukan politisi.



SEJARAH PEMIKIRAN

PENGERTIAN

Sejarah pemikiran adalah terjemahan dari *history of thought*, “*history of ideas*, atau *intellectual history*. Sejarah pemikiran dapat didefinisikan sebagai *the study of the role of ideas in historical events and process*.¹

Semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi pemikiran. Misalnya, gerakan koperasi dipengaruhi oleh pemikiran Mohammad Hatta, gerakan pendidikan Taman Siswa dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hadjar Dewantoro, dan gerakan Muhammadiyah dipengaruhi oleh pemikiran KH Ahmad Dahlan.

Karenanya, sebagai “daging yang berpikir” manusia tidak bisa lepas dari dunia pemikiran. Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari pun seseorang tidak lepas dari ide. Seorang saleh tidak bisa lepas dari ide teologi agamanya, orang sekuler tidak bisa lepas dari ide sekularisme, seorang kafir tidak bisa lepas dari ide ateisme. Tekanan pada ide itu lebih kuat lagi pada perbuatan dan peristiwa bersejarah. Untuk itulah para patriot mati (patriotisme), pejuang muslim berjihad untuk tanah air (*hubbul wathon minal iman*), serdadu NICA berperang (imperialisme).

¹ Roland N. Stromberg, *European Intellectual History Since 1789* (New York: Meredith-Century-Croft, 1968), hlm. 3.

Mengenai sejarah pemikiran R. G. Collingwood dalam *The Idea of History* mengatakan, di antaranya, bahwa (1) semua sejarah adalah sejarah pemikiran, (2) pemikiran hanya mungkin dilakukan oleh individu tunggal, dan (3) sejarawan hanya melakukan kembali (*re-enactment*) pikiran masa lalu itu.² Oleh para pengritiknya Collingwood nampak melebih-lebihkan pemikiran daripada bentuk kesadaran lain (seperti kesadaran beragama), seorang reduksionis yang menyusutkan sejarah hanya pada sejarah pemikiran (padahal ada bermacam jenis sejarah, seperti sejarah ekonomi), dan seorang individualis karena sejarah pemikiran hanya dibatasi pemikiran perorangan. Akan tetapi, marilah kita menganggapnya sebagai penekanan betapa pentingnya sejarah pemikiran itu, karena dahulu ada dominasi sejarah politik ("Sejarah adalah politik di masa lampau").

Jenis pemikiran itu bisa bermacam-macam. Pemikiran bisa mengenai politik, agama, ekonomi, sosial, hukum, filsafat, budaya, dan sebagainya yang akan kita sebut sebagai pemikiran teoretis. Sementara itu, sejarah sains sudah berdiri sebagai sebuah spesialisasi dengan tujuan dan metodologi sendiri.³

PERMASALAHAN

Dalam bagian ini akan dibahas dua hal, yaitu siapa pelaku dan apa tugas sejarah pemikiran.

Pelaku. Pemikiran dilakukan oleh perorangan (Sukarno, Natsir, John Locke), isme (nasionalisme, sosialisme, pragmatisme), gerakan intelektual (Aliran Frankfurt, Strukturalisme, Pasca Modernisme),

2 R.G. Collingwood, *The Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1956), hlm. 302-315. Selanjutnya lihat, Louis O. Mink, *Mind, History & Dialectic: The Philosophy of R.G. Collingwood* (Bloomington: Indiana University Press, 1969), hlm. 159-160.

Pendapat bahwa hanya seorang pribadi yang mempunyai gagasan juga nampak dalam buku M. C. Lemon, *The Discipline of History and History of Thought* (New York: Routledge, 1995), hlm. 176.

3 Thomas Kuhn, "The Relation Between History and History of Science" dalam Felix Gilbert and Stephen Graubard, *Historical Studies Today* (New York: W.W. Norton & Company, 1972), hlm. 159-192.

periode (*the Age of Belief*, Renaissance, Pencerahan), dan pemikiran kolektif (MUI, Muhammadiyah, NU).⁴

Tugas. Tugas sejarah pemikiran ialah (1) membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah, (2) melihat konteks sejarahnya tempat ia muncul, tumbuh, dan berkembang (sejarah di permukaan), dan (3) pengaruh pemikiran pada masyarakat bawah, yaitu mencari "*hubungan antara para filsuf, kaum intelektual, para pemikir, dan cara hidup yang nyata (aktual) dari jutaan orang yang menjalankan tugas peradaban*", kata Crane Brinton dalam *The Shaping of Modern Thought*.⁵

Tugas ketiga ini akan berarti mencari hubungan antara atas dan bawah. Oleh karena itu, sejarah pemikiran tidak bisa hanya dibatasi pada kaum intelektual (pikiran abstrak ke pikiran abstrak yang lain) atau hanya ke sejarah di permukaan, tetapi juga ke masyarakat di bawah dengan perbuatan nyata.

Tugas ketiga itu tidak mudah. Kalau pikiran-pikiran besar mempunyai dokumentasi yang jelas karena ditulis oleh hanya beberapa orang, sejarah dapat dijumpai dalam tulisan-tulisan, tapi jejak (pikiran, perkataan, tindakan) orang banyak itu dokumentasinya tersebar di banyak tempat. Dokumentasi tentang orang banyak tersebar: di masyarakat, di institusi-institusi, dan di koran-koran yang penuh dengan prasangka, rumor, dan kebohongan. Untuk meneliti pemikiran yang tersebar itu sejarawan harus hati-hati, melakukan seleksi, dan verifikasi.

METODOLOGI

Untuk menghadapi tugas-tugasnya, sejarah pemikiran mempunyai tiga macam pendekatan, yaitu kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan antara teks dan masyarakatnya.

4 Tap-Tap MPR sebagai produk politik tidak dimasukkan pemikiran kolektif.

5 Crane Brinton, *The Shaping of Modern Thought* (Englewood, N.J.: Prentice-Hall, inc., 1963), hlm. 4.

Teks. Pertama, genesis pemikiran. Kata orang bijak, "Tidak ada yang baru di bawah kolong langit". Karenanya, pengaruh pemikiran sebelumnya pasti kita lihat pada semua pemikiran. Marxisme yang menganggap diri sebagai sosialisme ilmiah terpengaruh oleh pendahulunya, yaitu pemikiran sosialisme utopis. Demikian juga seterusnya Komunisme terpengaruh oleh Marxisme. Cita-cita politik Marhaenisme Sukarno dipengaruhi oleh pemikiran materialisme historis (bukan materialisme filosofis) Marx. Kemungkinan besar pada gilirannya Marhaenisme berpengaruh pada ideologi Partai Pelopor pimpinan Rachmawati Sukarnoputeri. Tjokroaminoto yang menulis *Islam dan Socialisme* pada 1924 terpengaruh buku-buku agama tentang kesalehan para pemimpin Islam dahulu. Kemudian *Islam dan Socialisme* mempengaruhi tokoh-tokoh Masjumi, karena kemudian buku itu berkali-kali dicetak kembali oleh penerbit "Masjumi".⁶

Kedua, konsistensi pemikiran. Dalam buku Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik* kita melihat betapa konsistennya Hatta dalam bersikap terhadap komunisme.⁷ Pada tahun 1931 waktu masih studi di Belanda, Hatta dipecat dari Perhimpunan Indonesia (PI) yang pernah dipimpinnya selama tiga tahun, setelah PI dikuasai oleh orang-orang komunis yang mengikuti garis Partai Komunis Belanda. Demikian juga buku itu menggambarkan bahwa ia seorang puritan dan demokrat. Bahwa ia seorang puritan sudah nampak ketika ia belajar di Belanda, kemudian nampaknya menjadi sebab perpisahannya dengan Sukarno (1 Desember 1956). Seperti diketahui Sukarno sering bepergian ke luar negeri sejak 1956 yang Hatta menilai sebagai pemborosan, gunjingan soal seks, dan soal hubungan pribadi Sukarno dengan isteri. Pemikiran demokratis nampak dalam Maklumat Pemerintah 3 November 1945, dan pada penentangannya kepada Konsepsi Presiden (21 Pebruari 1957) dan Demokrasi

6 H.O.S. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954). Buku itu cetakan ke-5.

7 Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990).

Terpimpin (22 April 1959). Dalam tahun 1960 dia menulis *Demokrasi Kita*, dan tahun 1967 berusaha mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Ketika Sukarno percaya betul bahwa PKI mengakui Pancasila, Hatta berkomentar bahwa mengharapkan kaum materialis percaya pada Tuhan sama dengan mengharap seekor ayam bertanduk.

Konsistensi juga nampak dalam pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana. Sejak tahun 1930-an sebagaimana terdokumentir dalam buku yang dieditori Aoh Kartahadimadja, *Polemik Kebudayaan*, waktu itu dia memuji kebudayaan Barat dengan sains dan teknologi. Pemikiran itu masih nampak dalam tahun 1980-an sebagaimana dapat dibaca pada buku dengan editor Denny, J.A., *Transformasi Masyarakat Indonesia*. Hanya saja dia menambahkan bahwa budaya Islam di masa lalu juga menunjukkan kebesarannya dalam sains dan teknologi.⁸

Ketiga, evolusi pemikiran. Sebagai contoh, evolusi nampak jelas dalam pemikiran kemanusiaan Soedjatmoko.⁹ Dalam disertasi Siswanto Masruri di IAIN Sunan Kalijaga itu, "Menuju Humanitarianisme: Studi Evolusi Pola Pemikiran Kemanusiaan Soedjatmoko" digambarkan dengan jelas bahwa pemikiran Soedjatmoko berevolusi dari soal-soal nasionalisme, ke humanisme, dan akhirnya ke humanitarianisme.

Keempat, sistematika pemikiran. Sistematika kita jumpai buku Louis O. Mink, *Mind, History & Dialectic: The Philosophy of R. G. Collingwood*. Dalam studi sejarah pemikiran di Indonesia, sistematika pemikiran kita temukan dalam disertasi Sri Suhandjati, "Ajaran Tatakrama Yasadipura II dalam Serat Sasanasunu: Perpaduan Syariat Islam dengan Budaya Jawa".¹⁰

8 Denny J.A. (ed.), *Transformasi Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Kelompok Studi Proklamasi, 1986), hlm. 4-37.

9 Siswanto Masruri, "Menuju Humanitarianisme: Studi Evolusi Pola Pemikiran Kemanusiaan Soedjatmoko" (IAIN Sunan Kalijaga: Disertasi, 2002).

10 Sri Suhandjati, "Ajaran Tatakrama Yasadipura II: Perpaduan Syariat Islam dengan Budaya Jawa" (IAIN Sunan Kalijaga: Disertasi, 2003).

Kelima, perkembangan dan perubahan. Dalam buku Sukarno *Dibawah Bendera Revolusi* nampak adanya perkembangan dan perubahan dalam konsep dengan pemikiran sesudahnya. Konsep “nasionalisme, Islam, dan Marxisme” dalam buku itu berkembang dan berubah menjadi “Nasakom” pada pra-1965. “Islam” berkembang dan berubah jadi “agama”, dan “Marxisme” jadi “Komunisme”.

Keenam, varian pemikiran. Varian pemikiran “keagamaan” kita temukan pada tulisan Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*.¹¹ Buku itu menyatakan bahwa di Jawa ada tiga varian agama, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Sekalipun buku itu banyak dikritik, tetapi setiap pembicaraan tentang Islam di Jawa pasti memakai buku itu sebagai inspirasi heuristik.

Kemudian ada buku Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*. Buku itu merekam pemikiran-pemikiran tentang pembangunan umat Islam dari sejumlah tokoh muda Islam yang bergerak pada 1980-an.¹² Varian pemikiran yang lain kita jumpai dalam buku yang dieditori oleh Ihsan Ali Fauzi dan Haidar Bagir, *Mencari Islam: Kumpulan Otobiografi Intelektual*.¹³ Sama dengan buku *Merambah Jalan Baru Islam*, buku itu memuat pemikiran keagamaan sejumlah tokoh muda yang bergerak pada 1980-an.

Ketujuh, komunikasi pemikiran. Dalam buku *Dibawah Bendera Revolusi* yang merekam pemikiran Sukarno dalam *Fikiran Rakjat* ada sedikit komunikasi intelektual antara Sukarno dan A. Hassan mengenai najis, tetapi kita belum melihat secara langsung jawaban-jawaban A. Hassan. Juga soal nasionalisme kedua tokoh itu berbeda pendapat. Kita melihat adanya komunikasi pemikiran politik antara

11 Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).

12 Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1992).

13 Ihsan Ali Fauzi dan Haidar Bagir (eds.), *Mencari Islam: Kumpulan Otobiografi Intelektual* (Bandung: Mizan, 1990).

Douwes Dekker dari Indische Partij (IP) pusat di Bandung dengan IP daerah, seperti IP Bandung dan IP Solo.¹⁴

Kedelapan, internal dialectics dan kesinambungan pemikiran, serta intertekstualitas. Buku Herbert Feith dan Lance Castle (eds.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965* mendokumentasikan pemikiran politik dari dua dasawarsa dalam lima belas pokok pikiran.¹⁵ Dalam tradisi pemikiran di dunia Barat dialektika internal dan kesinambungan pemikiran selalu terjadi. Lihat misalnya buku Peter Burke, *The French Historical Revolution: The Annales School 1929-89*.¹⁶

Intertekstualitas berarti perbandingan antar teks. Misalnya kita membandingkan konsep kekuasaan raja dalam *Serat Sasanasunu* dari Yasadipura II (1760-1845) dengan buku-buku yang lebih muda, seperti *Serat Wulangreh* karya Pakubuwono IV dan *Serat Wedhatama* karya Mangkunegara IV.

Konteks. *Pertama*, konteks sejarah. Absurditas manusia seperti digambarkan Albert Camus dalam tokoh mitis Sisyphus adalah absurditas manusia yang mengalami teknifikasi. Sisyphus dihukum para dewa dengan mendorong batu berat ke atas gunung. Bila batu itu sampai ke puncak, batu akan menggelinding kembali ke bawah. Begitu nasib anak manusia yang mengerjakan sesuatu demi kehampaan. *The Myth of Sisyphus and Other Essays* yang ditulis tahun 1944 itu menggambarkan kesia-siaan manusia.¹⁷ Pemikiran itu dilatarbelakangi peristiwa sejarah yang besar, yaitu PD II. Manusia menciptakan teknologi dengan kerja keras, hanya untuk perang yang sia-sia.

14 Kuntowijoyo, "Harmony as Ideologi: Politics Among the Dutch Community in Solo, 1900-1915" dalam *Humaniora*, Volume XIV, No. 3/2002.

15 Herbert Feith and Lance Castle (eds.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965* (Ithaca: Cornell University Press, 1970).

16 Peter Burke, *The French Historical Revolution: The Annales School 1929-89* (Cambridge: Polity Press, 1990).

17 Albert Camus, *The Myth of Sisyphus and Other Essays* (New York: Random House, 1955).

Dalam sejarah Indonesia kelahiran banyak aliran kebatinan mempunyai latar belakang sejarah juga. Ambillah Pangestu (Paguyuban Ngesti Tunggal) dengan pemikiran mengenai Tuhan, manusia, kebenaran, dan etika. Pangestu mempunyai latar belakang kenyataan sejarah: Islam, Teosofi, *Vrijmetselerij*, kebatinan Jawa (Manunggaling Kawula-Gusti), zending, misi, dan modernisme Belanda (skeptisisme pada agama pribumi). Ajaran Pangestu termuat dalam *Serat Sasangka Jati* diwahyukan kepada R. Soenarto Mertowerdoyo pada 1932 di Solo. Ajarannya sangat dekat dengan Teosofi yang sebelum PD II marak di Jawa, terutama di daerah Vorstenlanden. Kami menduga bahwa ajaran-ajaran Teosofilah latar belakang sejarah Pangestu. Pendiri Pangestu adalah orang Solo yang dapat diduga pernah mendengar ceramah-ceramah Teosofi yang waktu ada di Mangkunegaran, Solo.¹⁸

Kedua, konteks politik. Menjelang 1965 ada pertentangan politik antara PKI/Lekra dan Manifestan. Pada hakikatnya pertentangan itu ialah antara politik kebudayaan “realisme sosialis” dan “humanisme universal”. Buku *Prahara Budaya* dengan editor D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail merekam pertikaian politik kebudayaan itu.¹⁹ Seperti diketahui Manifestasi Kebudayaan yang diumumkan 17 Agustus 1963 telah dilarang oleh Presiden Sukarno pada 8 Mei 1964. Sejak itu para Manifestan dianggap “kontra-revolusi” yang waktu itu menjadi kata bertuah yang sangat menakutkan bersama-sama dengan Masjumi dan PSI.

Ketiga, konteks budaya. Pada tahun-tahun 1930-an ada perdebatan budaya yang terkenal dengan sebutan polemik kebudayaan. Polemik itu bermaksud mencari model kebudayaan yang akan diterapkan di Indonesia. Dalam kesempatan itu perdebatan yang

18 Rahnip M.BA, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 129-171.

19 D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail (eds.), *Prahara Budaya: Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI dkk.* (Bandung: Mizan dan HU Republika, 1995).

paling menonjol ialah antara Sutan Takdir Alisjahbana yang menoleh ke Barat dan Sanoesi Pane yang menoleh ke Timur.²⁰

Keempat, konteks sosial. Konteks sosial ini muncul sebagai konsekuensi ambil-alih pendekatan sosiologi pengetahuan yang akan dibicarakan di bawah. Hasil sastra karya RM. Jayadiningrat I, *Serat Mas Jenthuh Inggih Mas Nganten* ditulis oleh seorang priyayi pada zaman "feodal".²¹ Serat itu ditulis oleh seorang wedono kraton dengan maksud menegaskan hirarki sosial. Seorang desa yang kaya punya hajatan mantu dengan mengundang para priyayi. Temanten datang, gamelan berbunyi. Gamelan itu menyuarakan gending yang biasa dipakai dalam perhelatan temanten golongan priyayi. Kontan para priyayi *pacak gulu* (menggeleng-gelengkan kepala menari) sendiri, tanpa memperhatikan pasangan temanten yang datang. Buku itu ditutup dengan kalimat, "*desa cara desa, priyayi cara priyayi*". Ungkapan itu digunakan untuk menegaskan bahwa *wong cilik* tidak bisa memakai adat priyayi. Semua harus menduduki status sosialnya sendiri.

Hubungan. Ada kesulitan untuk membahas hubungan antara pemikiran di atas dengan masyarakat di bawah. Kesulitan pertama terletak pada ketidakjelasan mengenai perantara: siapa pembawa hubungan itu? Kesulitan kedua ialah mengenai sumber transmisi: masyarakat bawah pasti menerima transmisi pemikiran dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu sumber.

Di bawah ini akan dibicarakan empat hal, yaitu pengaruh, implementasi, diseminasi, dan sosialisasi.

Pertama, pengaruh pemikiran. Buku-buku Mohammad Hatta tentang ekonomi, kolektivisme, sosialisme, dan koperasi hanya dibaca oleh *cultural broker* — meminjam istilah Clifford Geertz — tidak

20 Aoh Kartahadimadja, *Polemik Kebudajaan* (Djakarta: Perpustakaan Kementarian P.P. dan K., 1954).

21 RMA. Jayadiningrat I, *Serat Mas Jenthuh Inggih Mas Nganten* (Surakarta: Albert Rusche Co., 1907).

oleh masyarakat di bawah. Koperasi seperti dalam buku *Kooperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi* (1953), *Meninjau Masalah Kooperasi* (1954) *Kooperasi dan Pembangunan* (1956), serta *Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun* (1971) pasti tidak dibaca oleh pengurus koperasi di kampung-kampung. Hanya saja selalu ada satu departemen khusus yang melaksanakan cita-citanya itu. Meskipun demikian kita ingin mencatat bahwa Sarekat Islam jauh sebelum Hatta sudah berpikir dan melaksanakan gagasan koperasi.

Kedua, implementasi pemikiran. Para pemikir pendidikan Taman Siswa, pendidikan Muhammadiyah, pendidikan Al-Ma'arif (NU), pemikir Ekonomi Syariah, pendiri Bank Syariah pasti sadar tentang sumber pemikirannya. Mengenai implementasi pemikiran ini ada satu disertasi tentang pemikiran keagamaan dan pendidikan, yaitu disertasi Achmadi di IAIN Sunan Kalijaga, "Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan".²² Akan tetapi, belum tentu para siswa, mahasiswa, dan pegawai bank tahu pemikir-pemikirnya. Demikian juga halnya para pengamal *ratib Hadad* jarang yang tahu bahwa penciptanya ialah pendiri Thariiqah 'Alawiyah, Allamah Sayyid 'Abdullah Al-Hadad.²³

Ketiga, diseminasi pemikiran. Buku-buku tembang, seperti *Wedhatama* (Mangkunegoro IV) dan *Wulangreh* (Pakubuwono IV), sering ditembangkan dalam acara *macapatan* di daerah Kejawen. Penembangnya pasti tidak sadar bahwa ajaran-ajaran dalam serat-serat itu berasal dari zaman "feodalisme" yang tidak lagi sesuai dengan suasana negara republik dan demokrasi. Demikian juga dengan nasionalisme tidak perlu lagi orang tahu bahwa ada kebangkitan nasional, ada Sarekat Islam, dan seterusnya.

22 Achmadi, "Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan" (IAIN Sunan Kalijaga: Disertasi, 2002).

23 Umar Ibrahim, *Thariiqah 'Alawiyah: Napak Tilas dan Studi Kritis atas Sosok dan Pemikiran Allamah Sayyid 'Abdullah Al-Hadad, Tokoh Sufi Abad ke-17* (Bandung: Mizan, 2001).

Keempat, sosialisasi pemikiran. Kalau diseminasi terjadi melalui proses sejarah yang natural, maka sosialisasi dikerjakan melalui rekayasa sejarah. Di zaman pendudukan Jepang ada “latihan” dengan maksud untuk mendukung perang Asia, zaman Pemerintahan Sukarno ada “indoktrinasi” dengan bahan Tubapi, *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi*, dan dalam rejim Orde Baru ada “penataran” yang dilakukan secara besar-besaran dan sistematis. Adapun bahan “penatarannya” selalu disesuaikan, yang pada 1989 ialah *UUD 45, P-4, GBHN (Tap No: II/MPR/1989), Tap-Tap MPR 1988, dan Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris*. Kepada sosialisasi pemikiran itu dapat ditambahkan “training”, “santiaji”, “kursus”, “pembinaan”, “pengkaderan”, dan lain-lain.

SOSIOLOGI PENGETAHUAN

Orang mengamati, memperoleh, dan menerima pengetahuan tidak secara langsung, tapi melalui simbol-simbol budaya dan sosial. Demikianlah, misalnya, priyayi awal abad ke-20 di Surakarta akan memahami kedudukan diri sebagai priyayi (bangsawan keturunan dan bangsawan pikiran) di antaranya melalui hasil sastra karya Padmasusatra, *Serat Subasita* (Buku Sopan Santun), yang memaparkan etiket bagi para priyayi.²⁴ Di zaman akhir pemerintahan Sukarno, polisi memahami orang-orang Masjumi, PSI, dan Manifestan melalui label yang diberikan sebagai “kontra-revolusi”. Presiden Soeharto menyebut petani Kedungombo yang membangkang sebagai “PKI”. Demikianlah simbol telah menentukan pemahaman orang.

Oleh karena itu, semua kenyataan adalah konstruksi sosial. Pada awal abad ke-20 di Surakarta, *wong cilik* memahami diri sebagai orang kecil karena mereka membayar paling murah di pertunjukan-pertunjukan di alun-alun: bioskop, komedi, dan sirkus; atau jalan-

²⁴ Padmasusatra, *Serat Subasita* (Surakarta: Boedi Oetomo, 1914).

jalan di Taman Sriwedari. Juga pemahaman diri sebagai orang kecil terjadi karena dilarang memakai pakaian tertentu, dilarang berkendara di alun-alun raja, dan harus menyandang nama diri sebagai orang kecil.

Hal-hal itu menjadi perhatian sosiologi pengetahuan juga. Karenanya, sosiologi pengetahuan bisa didefinisikan sebagai ilmu yang “menekuni hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosialnya”, demikian dinyatakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*.²⁵ Dari buku ini kita dapat memperluas pandangan tentang apa yang disebut “pemikiran manusia” itu.

Kalau di atas kita sudah belajar bahwa sejarah pemikiran mempelajari “pemikiran teoretis”, sosiologi pengetahuan juga mencakup apa saja yang “diketahui” masyarakat, pengetahuan sehari-hari, atau “pengetahuan” akal sehat (*common sense*). Maka, kita ingin mendefinisikan kembali *jenis pemikiran* dalam sejarah pemikiran, yaitu (1) pemikiran teoretis (politik, filsafat, agama, ekonomi) dan (2) pemikiran praktis (pengetahuan sehari-hari, pengetahuan *common sense*). Perluasan itu mempunyai konsekuensinya bukan saja dalam *subject matter* sejarah pemikiran, tetapi juga permasalahan (pelaku, tugas), metodologi, dan evidensi. Mengenai pelaku pemikiran, sosiologi pengetahuan menanyakan latar belakang sosial pelaku (orang berpikir “begitu”, karena berasal dari kelompok sosial “ini” dan lingkungan sosial “anu”). Mengenai evidensi, kita harus juga memasukkan semua sistem simbol (mitos, seni, bahasa, sastra, isyarat, bahasa tubuh, rumah, busana, boga, dan sebagainya). Mengenai metodologi, kita sudah memasukkan “konteks sosial”.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa sejarah pemikiran adalah sejarah, mempelajari proses, bukan sosiologi yang mempelajari struktur. Sejarah pemikiran juga tetap sejarah meskipun mempelajari

25 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 6.

pemikiran manusia yang praktis-praktis, bukan mentalitasnya. Jadi bukan sekedar sejarah mentalitas, bukan *the history of collective mentality*, *the history of collective consciousness*, atau *the history of collective unconsciousness*. Perluasan definisi sejarah pemikiran itu sangat perlu, karena pemikiran praktis itu sangat subur di Indonesia; lebih banyak daripada pemikiran teoretis dan lebih otentik.

EVIDENSI

Definisi pemikiran sudah diperluas. Sejarah pemikiran, karenanya, tidak membatasi diri hanya pada pemikiran perorangan (sebagaimana pendapat Collingwood) dan pemikiran-pemikiran teoretis (sebagaimana lazimnya sejarah intelektual), tetapi kita masukkan juga pemikiran praktis (pengetahuan sehari-hari atau pengetahuan *common sense*) dari sosiologi pengetahuan. Adapun pengetahuan praktis ialah petunjuk-petunjuk tentang status, kelas, pekerjaan, etiket (perihal *nyuwito*, *tataran bahasa*, *perkawinan*, *permainan seks*), *ngelmu* pengobatan/perjodohan/keberuntungan (*primbon*, *mujarobat*), dan sebagainya. Bagaimanapun, sejarah pemikiran selalu mulai dari teks, "*Pada mulanya adalah TEKS*".

Maka, sub-bab ini akan menyebutkan juga evidensi anonim seperti tradisi lisan, kepercayaan masyarakat, dan sistem simbol lain.

Pertama, evidensi tertulis. Sumber sejarah ini dapat kita temukan dalam otobiografi, memoir, buku, artikel, pamflet, sastra, dan surat-menyurat. Surat-surat kabar juga merupakan sumber yang baik. Melalui artikel, "debat opini", tajuk, dan kebijakan pelabelan, pemikiran dapat dibaca. Tajuk koran *Indonesia Raya* dengan pemikiran anti-otoritarianisme dan anti-korupsi ditutup oleh rezim Orde Baru. Seperti diketahui, ketika Afghanistan berada di bawah rezim yang pro-Soviet, ada perbedaan pelabelan surat-surat kabar Indonesia untuk menyebut Mujahidin (pemberontak, pasukan, pejuang). Mengenai surat-menyurat kita dapat membaca surat-surat

Soedjatmoko, Dubes RI untuk U.S.A. kepada Presiden, dalam buku dengan editor M. Nursam, *Surat-Surat Pribadi Soedjatmoko kepada Presiden (Jenderal) Soeharto (16 Juni 1968 - 26 April 1971)*.²⁶

Kedua, perilaku. Pakubuwono X melakukan perjalanan “ke luar negeri” dengan maksud menyebarkan “nasionalisme Jawa”, demikian pemikiran *common sense* pejabat-pejabat kolonial. Dr. Tjiptomangoenkoesoemo pada tahun-tahun 1910-an dengan sengaja naik dokar di alun-alun raja untuk menunjukkan anti-”feodalisme”.

Ketiga, perkataan. Pembangkangan umat Islam sudah menjadi mitos sejak lama.²⁷ Menghadapi banyaknya pembangkangan dari umat Islam (rekayasa atau sungguhan) Presiden Soeharto bilang, “Jihad akan saya balas dengan jihad”. Hal yang tersirat dari ucapan itu ialah pemikiran tentang “bahaya laten” ekstrem kanan yang mengancam kekuasaannya.

Keempat, sistem simbol. Hasil sastra *Babad Tanah Jawi* adalah bukti legitimasi raja-raja Mataram. Dalam babad itu diceritakan bahwa raja-raja Mataram adalah keturunan para dewa dan para nabi.

Kelima, tradisi lisan. Mitos tentang Nyi Loro Kidul, jin penunggu gunung Merapi, Sunan Lawu, dan sebagainya, memperkuat teks-teks dengan klaim bahwa raja adalah “Khalifatullah”, “Wakil Hyang Agung”, dan “Sang Amurwa Bumi”.

Keenam, sejarah lisan. Kita dapat melakukan wawancara untuk melakukan verifikasi mengenai teks pemikiran.*

26 M. Nursam (ed.), *Surat-Surat Pribadi Soedjatmoko kepada Presiden (Jenderal) Soeharto (16 Juni 1968 - 26 April 1971)* (Jakarta: Yayasan Soedjatmoko dan PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).

27 Kuntowijoyo, “Serat Cebilek dan Mitos Pembangkangan Islam: Melacak Asal-Usul Ketegangan antara Islam dan Birokrasi dalam *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 123-137.

BIOGRAFI

Biografi adalah sejarah, sama halnya dengan sejarah kota, negara, atau bangsa. Sayang banyak biografi ditulis, tidak oleh sejarawan tetapi oleh pengarang dan jurnalis. Padahal, biografi lebih *marketable* daripada buku-buku sejarah biasa. Ladang yang subur ini belum mendapat perhatian yang memadai dari sejarawan dan mahasiswa sejarah. Mungkin karena kesulitan mencari sumber, sebab wawancara untuk sebuah biografi memerlukan kepercayaan tinggi dari nara sumber yang tentu sukar diperoleh dari mahasiswa atau sejarawan muda. Seperti diketahui, sejarawan adalah detektif yang menyelidik ingin tahu, yang pasti membuat orang tak enak.

BIOGRAFI

Biografi atau *catatan tentang hidup seseorang* itu,¹ meskipun sangat mikro, menjadi bagian dalam mosaik sejarah yang lebih besar. Malah, ada pendapat bahwa sejarah adalah penjumlahan dari biografi. Memang, dengan biografi dapat dipahami para pelaku sejarah, zaman yang menjadi latar belakang biografi, lingkungan sosial-politiknya. Akan tetapi, sebenarnya sebuah biografi tidak perlu menulis tentang

1 John A. Garraty, *The Nature of Biography* (New York: Alfred A. Knopf, 1957), hlm. 3.

hero yang menentukan jalan sejarah, cukup partisipan, bahkan *the unknown*. Namun, tidak menulis seorang tokoh itu tentu mempunyai risiko tersendiri.

Contoh biografi yang baik ialah karya Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya Ananta Toer dalam *Sang Pemula* menceritakan riwayat hidup R.M. Tirto Adhi Soerjo dengan penuh catatan pertanggungjawaban sumber dan lampiran karya-karya fiksi Tirto Adhi Soerjo.² Ia melakukan penelitian yang sungguh-sungguh dengan berbagai sumber.

Biografi harus dibedakan dengan novel biografis. Demikianlah, misalnya, novel biografis Soekarno yang ditulis oleh Ramadhan K.H., *Kuantar ke Gerbang* mengantar kita untuk memahami keadaan Bandung tahun-tahun 20-an, mahasiswa, dan perjuangan kemerdekaan.³ Sebagaimana biografi adalah sejarah, novel biografis adalah novel sejarah. Sebagai novel sejarah, ia memiliki *historical authenticity*, *historical faithfulness*, dan *historicity of local colour* sebagaimana dituntut oleh novel sejarah.⁴ Sekalipun demikian, kita tidak dapat menggunakan detilnya sebagai sumber sejarah, karena memang buku semacam itu adalah hasil sastra yang merupakan produk imajinasi, dan tidak dimaksudkan sebagai sejarah yang faktual. Namun, untuk dapat *mengalami* sejarah buku seperti itu sangat penting.

OTOBIOGRAFI

Selain biografi ada otobiografi. Otobiografi seseorang adalah *biografi yang ditulis sendiri*. Contoh yang baik dari otobiografi adalah buku M. K. Gandhi, *An Autobiography*, dan buku Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*. Dengan otobiografi yang

2 Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula* (Jakarta: Hasta Mitra, tt.).

3 Ramadhan K.H., *Kuantar ke Gerbang: Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).

4 Georg Lukacs, *The Historical Novel* (London: Merlin Press, 1974, 43-59).

dilahirkan dari tangan pertama, diharapkan bahwa sejarah dapat dipahami dengan lebih baik.

Akan tetapi, otobiografi selain mempunyai kekuatan juga mengandung kelemahan. Kekuatan otobiografi terletak dalam keterpaduan yang utuh (*coherency*) sehingga pembaca tahu bagaimana penulis memahami diri, lingkungan sosial-budaya, dan zamannya. Otobiografi merupakan refleksi yang otentik dari pengalaman seseorang.⁵ Karenanya, otobiografi dapat ditulis sebagai usaha membela diri. Demikianlah, misalnya, otobiografi Pramoedya Ananta Toer, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* yang berasal dari masa menjadi tapol (1965-1979). Pramoedya yang waktu masih jaya membunuh demokrasi dengan “membantai” Manifest Kebudayaan, dalam buku itu memposisikan diri sebagai seorang pejuang demokrasi yang ditindas oleh “suatu kejahatan politik”.⁶

Adapun kelemahan otobiografi ialah pandangan yang partial terhadap sejarah zamannya (orang tidak mungkin mengalami sejarah secara keseluruhan), subjektif (pandangan pribadi tentang sejarah), dan proses sejarah yang belum final (ditulis hanya sampai saat dikerjakan).

Banyak mantan pejabat dan konglomerat, seperti Sudomo dan Lim Sioe Liong, otobiografinya ditulis oleh orang lain, tetapi hal itu tidak mengurangi nilai sebagai otobiografi. Di Amerika otobiografi Malcolm X, seorang tokoh kulit hitam, juga ditulis oleh orang lain.

Dekat dengan otobiografi ialah *memoire*. *Memoire* juga ditulis sendiri, biasanya hanya mengenai satu peristiwa saja. Para pejabat Hindia-Belanda dahulu membuat *memoire* mengenai masa jabatannya, yaitu *Memorie van Overgave* (Memori Sertijab, bukan LPJ [Laporan Pertanggung-jawaban] tahunan). Memori semacam

5 Untuk biografi dan otobiografi, baca Wilhelm Dilthey, *Pattern and Meaning in History: Thoughts on History and Society* (New York: Harper Torchbooks, 1962, 83-93).

6 Pramoedya Ananta Toer, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* (Jakarta: Lentera, 1995, hlm. 289). Buku itu sebelumnya sudah terbit di Belanda.

itu terkumpul dengan baik, dan menjadi sumber sejarah yang penting untuk sejarah lokal. Selain tanggapan pribadi, memori juga sering berisi statistik-statistik, peristiwa, dan kaitannya dengan peristiwa sejarah yang lebih luas.

PERMASALAHAN

Setiap biografi seharusnya mengandung empat hal, yaitu (1) kepribadian tokohnya, (2) kekuatan sosial yang mendukung, (3) lukisan sejarah zamannya, dan (4) keberuntungan dan kesempatan yang datang. *Pertama*, kepribadian sangat ditonjolkan bagi mereka yang menganut *Hero in History*. Mereka percaya bahwa sejarah adalah kumpulan biografi. Individulah yang menjadi pendorong transformasi sejarah. Secara mitis dan mistis di Indonesia ada pada kepercayaan akan Ratu Adil. Diponegoro, Tjokroaminoto, dan Sukarno dianggap sebagai Ratu Adil. Sejalan dengan itu, dalam dunia Islam, terutama dalam teologi Syi'ah, ada kepercayaan tentang akan datangnya Imam Mahdi menjelang hari kiamat. Sementara Imam Mahdi belum datang, di dunia Syi'ah kepemimpinan dipegang seorang *Wali al-Faqih*.⁷ *Kedua*, Marxisme sangat mendukung anggapan bahwa kekuatan sosiallah yang berperan, bukan perorangan. Demikianlah, Lenin hanya bisa naik berkat adanya proletariat. Mao hanya mungkin naik karena ada petani. Berdasar anggapan itu, maka dulu PKI sangat menekankan dukungan kaum buruh dan petani. Akan tetapi, karena tidak sabar pimpinan PKI kemudian mengandalkan diri pada kekuatan militer, dan melakukan kudeta. *Ketiga*, melukiskan zaman yang memungkinkan seseorang muncul jauh lebih penting daripada pribadi atau kekuatan sosial yang mendukung. Mengenai hal ini, pertanyaannya ialah mengapa seseorang muncul pada suatu zaman dan bukan zaman yang lain. Misalnya, mengapa Fidel Castro dan Che Guevara yang populis muncul dalam sejarah Amerika Latin pada

7 Ibrahim Amini, *Imam Mahdi: Penerus Kepemimpinan Ilahi* (Jakarta: Islamic Center, 2002).

1960-an pada abad ke-20? Jawabnya, karena pada waktu itu pemerintahan di Amerika Latin kebanyakan otoritarian. Pertanyaan yang sama dapat diajukan pada Imam Khomeini dan Muammar Khadafi. *Keempat*, para tokoh muncul berkat adanya faktor *luck*, *coincidence*, atau *chance* dalam sejarah. Demikianlah, misalnya, Abdurrahman Wahid — yang menurut anggapan sebagian orang sangat eratik, tetapi sebagian orang menganggapnya sebagai tokoh mitis “yang di dadanya ada malaikat” — menjadi presiden karena dia beruntung muncul tepat waktu ketika kebetulan bangsa sedang terpecah-pecah, dan ia dianggap sebagai pemersatu bangsa.

Sehubungan dengan kepribadian tokoh, sebuah biografi perlu memperhatikan adanya latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan sosial-budaya, dan perkembangan diri. Contoh yang sangat jelas bisa dibaca dari buku M. Nursam, *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko*.⁸ Latar belakang sebagai *priyayi* Jawa yang kuat agamanya, pendidikan Belanda, Hindia-Belanda (ELS, HBS, Gymnasium, GHS), pengalaman zaman Jepang, dan perkembangan karir sebagai wartawan, politisi, diplomat, dan intelektual.

Juga penting diceritakan tikungan-tikungan yang menentukan jalan hidup selanjutnya dan membawa perubahan penting. Dalam hal Soedjatmoko, Nursam menulis bahwa sewaktu dilarang sekolah oleh Jepang dan memencilkan diri di Solo, Soedjatmoko mengalami pencerahan, “Kegelapan yang dialaminya akhirnya membawa cahaya”.⁹ Nursam juga menulis bahwa pada 1980 Soedjatmoko menangis ketika sedang shalat di masjid Nabawi di Madinah. Sejak itu tema-tema etika dan agama muncul dalam pemikirannya.¹⁰ Dalam biografi Soedarpo Sastrosatomo yang ditulis Rosihan Anwar,

8 M. Nursam, *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).

9 *Ibid*, hlm. 39.

10 *Ibid*, hlm. 188.

Bertumbuh dalam Arus: Soedarpo Sastrosatomo, Suatu Biografi 1920-2001, diceritakan bahwa Soedarpo mengalami kejadian mistis berupa datangnya pancaran cahaya ("Nur Tuhan") sebanyak dua kali waktu menunaikan ibadah haji pada 1967. Sayang, tidak ada cerita selanjutnya perubahan-perubahan yang terjadi pada kepribadian Soedarpo, mungkin karena jejaknya tak diketahui orang lain.¹¹ Atau, dalam otobiografi Pramodya diceritakan bahwa ia menjadi lebih mistis dan religius pada tahun 1948 (waktu dalam penjara Belanda) dan mendapat pencerahan (*openbaring*).¹² Barangkali "openbaring" itulah yang membuatnya kukuh ketika menjadi tapol.

Namun, banyak pula biografi yang tidak mencantumkan *moment of truth* itu, tetapi hanya menceritakan ketaatan tokohnya pada Tuhan seperti, misalnya, biografi Sjafruddin Prawiranegara yang ditulis Ayip Rosyidi, *Sjafruddin Prawiranegara: Lebih Takut kepada Allah SWT*.¹³ Bagaimanapun juga, gambaran mengenai tokoh yang ditulis itu amat perlu, dengan atau tanpa *moment of truth*.

METODOLOGI

Setidaknya kita temukan dua macam biografi, yaitu (1) *portrayal* (portrait) dan (2) *scientific* (ilmiah), yang masing-masing mempunyai metodologi sendiri. Biografi disebut *portrayal* bila hanya mencoba *memahami*. Termasuk dalam kategori ini *biografi* (politik, bisnis, seni, olah raga, dan sebagainya) dan *prosopography* (biografi kolektif).

Dalam biografi yang *scientific* orang berusaha *menerangkan* tokohnya berdasar analisis ilmiah. Dalam hal ini penggunaan konsep dan teori dari *psychoanalysis* menghasilkan apa yang disebut *psychohistory* (sejarah kejiwaan).

11 Rosihan Anwar, *Bertumbuh dalam Arus: Soedarpo Sastrosatomo, Suatu Biografi 1920-2001* (Jakarta: PUSDOK GUNTUR 49, 2001, hlm. 298).

12 Pramodya Ananta Toer, *Nyanyi Sunyi*, hlm. 27.

13 Ayip Rosyidi, *Sjafruddin Prawiranegara: Lebih Takut kepada Allah SWT* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986).

Seperti diketahui penggunaan teori sosial dalam penulisan sejarah mengubah sejarah sebagai *humanity* dengan pendekatan *hermeneutics* (menafsirkan) yang *memahami* (*understand, verstehen*) sebagaimana diajarkan oleh Wilhelm Dilthey dalam *Pattern and Meaning in History*,¹⁴ menjadi sejarah yang *menerangkan* (*explain, erklären*). Memahami seseorang berarti mengerti “dari dalam” berdasar “makna subjektif” dari tokohnya sendiri sebagaimana sang tokoh menafsirkan hidupnya, “*the rediscovery of the I in the Thou*” kata Dilthey,¹⁵ sedangkan menerangkan adalah “menjelaskan dari luar” dengan menggunakan bahasa ilmu (hubungan-hubungan kausal) terhadap seorang tokoh yang tentu saja di luar kesadaran subjek sendiri.

Kalau dalam pemikiran Dilthey *verstehen* hanya berarti “makna dalam yang subjektif”, maka menurut Max Weber arti *verstehen* itu ada dua, yaitu “subjectively understandable” atau “interpretation in subjective terms” (disebutnya *aktuelle Verstehen*), dan memahami konteks yang lebih luas (disebutnya *erklärende Verstehen*).¹⁶ Dengan kata lain, *verstehen* itu selain berarti memahami sebagaimana sang tokoh memberi makna perbuatannya, juga berarti memahami konteks (hidup, lingkungan sosial-budaya, sejarah) yang bersangkutan.

Kebanyakan biografi yang ditulis cenderung untuk memberi arti “memahami” sesuai dengan pengertian Max Weber, sadar atau tidak.

BIOGRAFI

Biografi politik yang ditulis oleh Bernhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (buku itu sendiri tidak berjudul “biografi politik”) berusaha memahami tokoh Sukarno melalui tokoh-tokoh wayang, yaitu ksatria Bima dan Karna (nama semula Kusno oleh

14 Wilhelm Dilthey, *Pattern*, hlm. 37-50, 77.

15 *Ibid.*, hlm. 39.

16 Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: The Free Press, 1964), hlm. 94. Terjemahan A. M. Henderson dan Talcott Parsons dengan pengantar oleh Talcott Parsons.

ayahnya diganti Sukarno). Bima tak pernah berkompromi kecuali dengan teman seperjuangan, sedangkan Karna adalah “pejuang bagi negaranya dan seorang patriot yang saleh.”¹⁷ Sementara itu, biografi politik dari Mohammad Hatta yang ditulis oleh Deliar Noer mencukupkan penggambaran tokohnya sebagai orang Islam yang taat, disiplin, dan asketis.¹⁸

Penulis biografi Soeharto, O.G. Roeder, *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto* menyebutkan bahwa Soeharto melihat sejarah sebagai “permainan wayang yang diperpanjang” dengan menyebutkan tokoh wayang. Mengenai peristiwa 30 September 1965, misalnya, ia menyebut Subandrio sebagai Durna, orang khianat dari Hastinapura. Sementara itu, Soeharto sendiri adalah pemegang Wahyu Cakraningrat (“wahyu penguasa dunia”),¹⁹ atau “Wahyu Makuto Romo” yang kemudian diubahnya dengan “Semar Mbabar Jati Diri” (Semar membuka jati diri).

Soeharto memang sangat peka dengan kekuasaan dan kehormatan. Misalnya, dia mengakui bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah idenya sendiri, bukan idenya dari Hamengkubuwono IX dan dia pelaksananya. Demonstrasi anti-pembangunan TMII yang mengecam isterinya ditanggapinya dengan sangat emosional, *sak dumuk bathuk*, *sak nyari bumi*, akan dibelanya kehormatan sang isteri “sampai mati”.

Presiden yang banyak ditulis orang adalah B.J. Habibie. Akan tetapi, kebanyakan tulisan-tulisan itu bukan merupakan biografi yang utuh, hanya berupa interviu jurnalis dan “kesan dan kenangan” dari kawan-kawan, termasuk dari Soeharto, guru besar politiknya. Dari

17 Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 32).

18 Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990).

19 O.G. Roeder, *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1969, hlm. 54). Kita kurang mengerti apakah yang dimaksud Wahyu Cakraningrat itu adalah Wahyu Makuto Romo. Wahyu Makuto Romo itu berisi *asthabarta* (laku yang delapan), yaitu ajaran supaya raja itu meniru delapan kebaikan milik para dewa: Indra yang memelihara kehidupan, Yama yang memberi keadilan, Surya yang membawa kerukunan, Candra yang membuat terang, Bayu yang mengetahui kehendak, Cakra yang membuat kesejahteraan, Baruna yang menjalankan tugas dengan baik, dan Brama yang berani membela kebenaran.

sebuah interviu kita dapat menyimpulkan bahwa identifikasi dirinya ialah ayahnya, dan bahwa motivasi terkuatnya ialah agama dan orang tuanya.²⁰

Pelepasan Timor Timur menunjukkan dengan jelas kepribadian Habibie. Mengenai agama, dalam pelepasan Timor Timur pertimbangan halal-haram menempati posisi tertinggi: pencaplokan Timor Timur adalah haram, karena Indonesia ialah bekas Hindia Belanda, sedangkan Timor Timur adalah bekas Portugal. Sebagai orang yang diakuinya pragmatis ia mempertimbangkan untung-rugi: Indonesia rugi karena harus membiayai pembangunan Timor Timur. Sebagai saintis ia tidak mempertimbangkan faktor budaya: mitos "Indonesia Raya" dan patriotisme.

Hanya ditemukan satu biografi yang utuh, yaitu karya A. Makmur Makka, *BJH, Bacharuddin Jusuf Habibie: His Life and Career*. Dalam buku itu diceritakan tentang sakit Habibie di Aachen yang pernah koma selama 24 jam. Ia tiga kali pernah dibawa ke kamar khusus untuk orang mati. Tetapi, keajaiban Tuhan terjadi, dan ia sembuh sama sekali. Itulah, sebabnya maka ia berjanji untuk membaktikan usaha dan pikiran untuk tanah air dan bangsa.²¹

Biografi dan otobiografi tokoh bisnis yang sudah ditulis, di antaranya ialah biografi Nitisemito (pengusaha rokok kretek di Kudus), otobiografi H.M. Sulchan (*Kejutan Seorang Kacung*: penjual air, kacung pabrik beras, pejuang, pengusaha, haji, dan sosiawan dari Semarang), dan akhir-akhir ini ada biografi Soedarpo Sastrosatomo (pejuang, diplomat, pengusaha). Demikian juga biografi (otobiografi?) tokoh pedalangan Ki Manteb Sudharsono yang sayang bukunya tidak ada di pasaran.

20 A. Makmur Makka (ed.), *Habibie: Dari Pare-Pare Lewat Aachen, dan Tulisan-Tulisan Lain* (Jakarta: Gapura Media, 1986), hlm.25, 47.

21 A. Makmur Makka, *BJH, Bacharuddin Jusuf Habibie: His Life and Career* (Jakarta: Cipta Kreatif, 1989), hlm. 68.

BIOGRAFI KOLEKTIF

Biografi kolektif (*prosopography*) adalah penelitian tentang sekelompok orang yang mempunyai karakteristik latar belakang yang sama dengan mempelajari kehidupan mereka.²² Latar belakang yang sama itu berarti zaman (rentang waktu, abad, tahun), persamaan nasib, kedudukan ekonomi, persamaan pekerjaan, persamaan pemikiran, dan peristiwa yang sama. Dalam serba "persamaan", selain persamaan itu sendiri, pasti ditemukan juga perbedaan, kontras, varian, bahkan pertentangan.

Dalam praktik penelitian ada dua pendekatan terhadap biografi kolektif, yaitu pendekatan elitis dan pendekatan massa. Pendekatan elitis bertujuan untuk mengungkap kehidupan tokoh-tokoh sejarah yang terkenal, sedangkan pendekatan massa mengungkap kehidupan massa yang tak dikenal. Pendekatan elitis bertujuan memahami kepribadian tokoh-tokohnya, akar perbuatan dan keputusan, dan kepentingan yang tersimpan di balik retorika. Pendekatan massa berusaha mengungkap perubahan-perubahan struktural, yaitu mobilitas sosial dan kultural.²³

Orang pertama dalam historiografi modern yang menulis prosopografi ialah Charles Beard dengan *The Economic Interest of the Members of the Convention* pada 1913 di Amerika.²⁴ Di Inggris orang pertama ialah Lytton Strachey yang menulis *Eminent Victorian* pada 1918.²⁵ Di dalamnya ia menulis tentang orang-orang yang hidup pada zaman Victoria di abad ke-19, yaitu Cardinal Manning, Florence Nightingale, Dr. Arnold, dan General Gordon.²⁶ Pada masa pemerintahan Victoria yang dikenal penuh etika dan moral, tokoh-tokoh itu telah dinistakan dengan menunjukkan hipokrisi mereka.

22 Lawrence Stone, "Prosopography" dalam Felix Gilbert and Stephen Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W.W. Norton & Company, 1972), hlm. 107.

23 Lawrence Stone, "Prosopography", hlm. 109 ff

24 *Ibid*, hlm. 110.

25 Garraty, *The Nature*, hlm. 121.

26 Lytton Strachey, *Eminent Victorians* (New York: Penguin Books, 1981).

Sumber-sumbernya dinilai kurang layak, tetapi karya itu dipuji, bukan karena isinya tapi gaya literernya yang kuat sehingga biografi dapat menjadi bacaan yang memikat.²⁷

Di Indonesia sebenarnya prosopografi mempunyai harapan untuk berkembang. Buku yang terbit pada zaman pendudukan Jepang oleh *Gunseikanbu* mengenai orang-orang Indonesia terkemuka di Jawa, riwayat-riwayat hidup anggota parlemen (MPR, DPR), buku-buku "Apa dan Siapa", dan buku Leo Suryadinata tentang orang-orang Cina keturunan yang terkenal dapat menjadi pijakan pertama dalam penulisan prosopografi.

Prosografi di Indonesia dapat dilihat dalam sebuah artikel James L. Peacock, "Dahlan and Rasul: Indonesian Muslim Reformers".²⁸ Di dalamnya ia membandingkan dua orang reformis, satu kompromistis dan satu konfrontatif, sama seperti perbandingan antara Muhammadiyah di Yogyakarta dan di Minangkabau.²⁹ Buku yang lain ialah karya Savitri Prastiti Scherer, *Keselarasan dan Kejanggalan*,³⁰ tempat dia membicarakan tiga orang tokoh perjuangan nasional, yaitu Tjiptomangunkusumo, Soewardi Soerjaningrat, dan Soetomo, yang ternyata ketiganya mempunyai perbedaan pandangan. Tjiptomangunkusumo membenci kolonialisme dan "feodalisme", Soewardi Soerjaningrat percaya bahwa nilai-nilai lama dapat hidup dalam dunia modern, dan Soetomo lebih mementingkan kesejahteraan rakyat, tanpa atau dengan pemerintahan asing. Buku yang terbaru ialah karangan Deliar Noer, *Membicarakan Tokoh-Tokoh Bangsa*.³¹ Buku itu membedah riwayat hidup tokoh-tokoh Indonesia sejak

27 *Ibid*, hlm. 122.

28 James L. Peacock, "Dahlan and Rasul: Indonesian Muslim Reformers" dalam A. L. Becker dan Aram Yengoyan *The Imagination of Reality: Essays in Southeast Asia Coherence System* (Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation, 1979), hlm. 245-268.

29 Cf., Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under the Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1969)

30 Savitri Prastiti Scherer, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa pada Awal Abad* (Jakarta: Sinar Harapan, 1975).

31 Deliar Noer, *Membicarakan Tokoh-Tokoh Bangsa* (Bandung: Mizan, 2001).

zaman Hindia-Belanda, khususnya selama empat puluh tahun abad ke-20 dan sejak Indonesia merdeka sampai masa kini. Tujuannya ialah untuk melihat kepemimpinan bangsa guna pelajaran di masa depan. Ia ingin, baik umat Islam maupun kaum nasionalis, belajar dari cara-cara pengkaderan para pemimpin supaya kita belajar “yang baik dan yang tidak, yang sesuai dengan masa selanjutnya dengan yang tidak”.³²

Kita berharap dapat membaca biografi kolektif kaum profesional, seperti dokter, notaris, advokat, jurnalis, dan dosen. Demikian pula biografi kolektif dari banyak jenis pekerjaan, seperti abdi dalem, pemain macam-macam pertunjukan, pembuang sampah, tukang emas, tukang pasah gigi, penjual makanan, kusir dokar, sopir taksi, petani, pelaut, penangkap ikan, pedagang K-5, pemilik warung, dan pengrajin. Juga biografi kolektif para *outcaste*, seperti anak jalanan, pengemis, nara pidana, pencuri, perampok, penjaja seks, dan para preman. Dengan perangkat sejarah lisan kiranya kita dapat menulis biografi kolektif dari *the unknown* itu. Maka tanpa melihat soal pemasarannya, sebenarnya lebih banyak biografi kolektif bisa ditulis, setidaknya sebagai latihan intelektual bagi calon sejarawan.

SEJARAH KEJIWAAN

Sejarah kejiwaan (*psychohistory*) secara substantif sudah dimulai pada 1910 ketika Sigmund Freud melakukan analisis atas kepribadian Leonardo da Vinci. Namun, secara formal sejarah kejiwaan baru dikukuhkan pada 1960-an. Sejarah kejiwaan ialah “*peleburan* psikoanalisis dan sejarah”, kata Bruce Mazlish.³³ Jadi bukan saja penerapan psikoanalisis pada sejarah saja, tetapi peleburan antara keduanya. Dalam studinya tentang kepribadian Nixon, Bruce Mazlish mencari identifikasi peran dirinya, ambivalensinya, dan sebab-

32 *Ibid*, hlm. 364.

33 Bruce Mazlish, *In Search of Nixon: A Psychohistorical Inquiry* (New York: Basic Book, Inc., Publishers, 1972), hlm. 165. Artikel tentang sejarah jiwa dapat ditemukan pada Bab 6, hlm. 149-170.

musabab dari pengingkaran-pengingkaran yang dilakukannya. Dicarinya jawaban dalam latar belakang agama Quaker, pedesaan, budaya California, kehidupan keluarga, pertumbuhan kematangan jiwa dalam budaya Amerika abad ke-20, karier politik, dan sebagainya.

Tokoh paling menonjol dalam sejarah kejiwaan ialah Erik H. Erikson, seorang Neo-Freudian. Buku-bukunya *Gandhi's Truth, Young Man Luther, Childhood and Society, Insight and Responsibility, Identity: Youth and Crisis*, dan *Life Cycle* dapat menjadi acuan bagi sejarah kejiwaan. *Young Man Luther* mencoba menelusuri krisis dan resolusi dalam kepribadian Martin Luther.³⁴ Ia menyimpulkan bahwa Luther muda mengalami empat tingkat krisis identitas, yaitu krisis masa bayi (hubungan dengan ibu), krisis masa kanak-kanak (yang melahirkan kemauan dan kekuatan), krisis inisiatif versus dosa (menurut atau melawan) yang akhirnya mengendap dan menjadikannya "pelawan" (otoritas Gereja), dan krisis yang ditandai dengan belajar secara sistimatis dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya Erikson menyebut bahwa kelanjutannya ialah krisis *intimacy, generativity, integrity* (keintiman, kekuatan kreatif, integritas). Dalam "Epilogue" buku itu dikatakan bahwa dalam masa krisis *intimacy* Luther mempunyai kecenderungan heteroseksual, dan krisis itu terpecahkan dengan perkawinannya. *Intimacy* berbarengan dengan *generativity*-nya, ketika dia sudah berhasil menjadi pengkhotbah ternama dan mempunyai banyak jamaah. Integritas dirinya tercapai dengan menjadi *homo religious*.³⁵

Sejarah kejiwaan belum menjadi mode di Indonesia. Padahal, kesempatan untuk itu tersedia. Kita tinggal mencermati buku-buku *as told to*. Untuk menjawab mengapa Sukarno menjadi seorang revolusioner yang "incurable" kiranya buku *Sukarno: An Autobiography as Told to Cindy Adams* akan banyak memberi

34 Erik H. Erikson, *Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History*, (New York, N.Y.: W.W. Norton & Company, Inc., 1962).

35 *Ibid.*, hlm. 251-267.

jawaban. Sementara itu, buku *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Otobiografi seperti *Dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.*, tentu dapat menjawab mengapa Soeharto begitu berambisi untuk kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan di balik retorika Jawa yang luhur, seperti “mawas diri”, “mulat sariro angrasa wani”, dan “ha-na-ca-ra-ka”?

Penggunaan otobiografi untuk sejarah kejiwaan sudah dilakukan oleh Erikson. Erikson memakai otobiografi Gandhi untuk menulis asal-usul dari keyakinan-keyakinannya. Dalam *Gandhi's Truth* dia menceritakan, di antaranya, keyakinan tentang wadat (tidak menyentuh wanita). Dikatakannya bahwa keyakinan itu berasal dari rasa penyesalan yang sangat dalam. Ketika Gandhi berumur enam belas tahun, ayahnya sakit keras dan ia menungguinya. Kebetulan, suatu hari pamannya datang dan menggantikannya menunggu sang ayah. Gandhi pun bergegas pergi ke kamarnya untuk bercengkerama dengan isteri. Pada waktu dia berada di kamar bersama isteri, seorang pembantu mengetuk pintu dan memberitahu bahwa ayahnya meninggal. Gandhi sangat terpukul perasaannya: Kenapa dia melampiaskan nafsu kepada isteri justru ketika ayahnya sedang sekarat dan meninggal dunia?

Ada satu biografi di Indonesia, yaitu buku Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Pejuang sampai Pemberontak*.³⁶ Tulisan itu tidak memakai psikoanalisis *as such*, tapi, katakanlah, *ethnopsychology*. Ia menggunakan konsep *sirik* sebagaimana lazim berlaku di Sulawesi Selatan. Kalau *ethnopsychology* dapat diterima sebagai analisis kejiwaan pastilah banyak yang bisa diperbuat sejarawan Indonesia. (Sampai saat ini kita hanya mengenal kebudayaan-kebudayaan etnis [Jawa, Minangkabau, Sulawesi Selatan, dan sebagainya], dan bukan *ethnopsychology*).³⁷

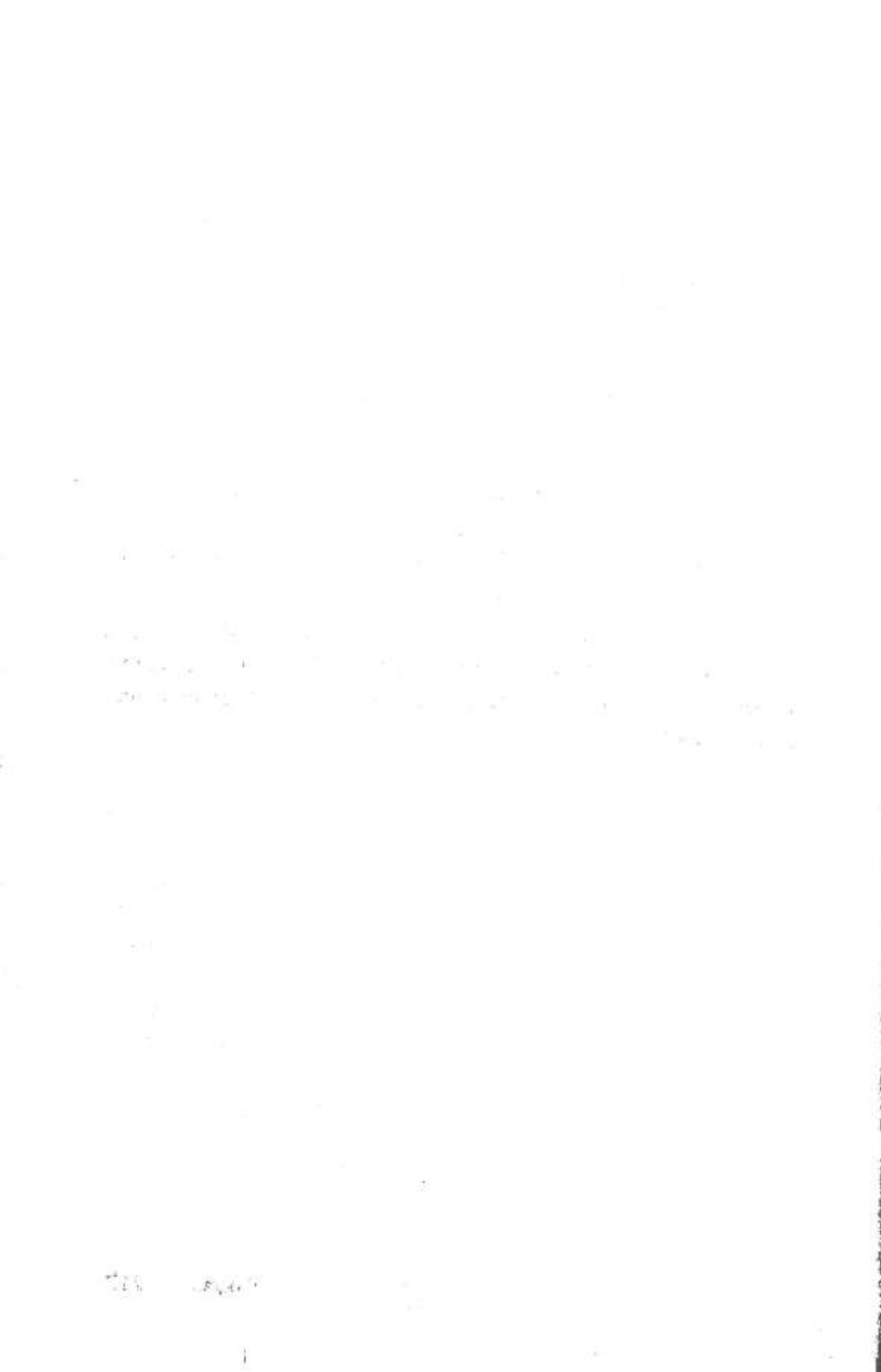
36 Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Pejuang sampai Pemberontak* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

37 Kami baru menemukan satu buku dengan nama *ethopsychology*, yaitu buku Darmanto Jatman, *Psikologi Jawa* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997). Akan tetapi, penggunaan istilah “psikologi” seperti itu belum pernah menjadi pertikaian intelektual.

Kita ingin memakai buku ini untuk lebih memperjelas maksud sejarah kejiwaan. Kalau penulis buku menekankan “makna subjektif” sebagaimana Kahar menafsirkan sendiri pemberontakannya, yaitu “pengkhianatan pemerintah pusat” maka biografi itu menjadi sebuah biografi biasa, bukan sejarah kejiwaan. Seperti diketahui analisis kejiwaan berbicara soal “bawah sadar” yang merupakan “penjelasan dari luar” (*explanation*) yang dipikirkan sejarawan, bukan yang dipikirkan pelaku. *Sirik* adalah penjelasan dari luar itu.

Sebagai sejarah kejiwaan, buku itu mestinya menjelaskan juga pembentukan pribadi, interaksi dengan lingkungan, dan perkembangan jiwanya. Mengapa Kahar mempunyai kepribadian yang keras: Lebih suka menjadi pemberontak daripada pahlawan? Atau, kepahlawanan ialah pemberontakan? Kepribadian apa yang ada di balik retorika “pemerintah pusat mengkhianati kita” sebagaimana sering menjadi alasan sebuah pemberontakan?

Dengan cara yang sama, kita dapat melakukan analisis kejiwaan pada tokoh-tokoh dengan kepribadian “unik” lain, seperti Sukarno, Soeharto, Ali Murtopo, Kartosuwiryo, Daud Beureueh, dan sebagainya.*



SEJARAH KUANTITATIF

Karena sejarah kuantitatif belum ditulis orang di sini, judul tulisan ini mestinya, "Tentang Kemungkinan Menulis Sejarah Kuantitatif di Indonesia". Sejarah kuantitatif ialah penggunaan metode kuantitatif dalam penulisan sejarah. Sejarah kuantitatif berbeda dengan sejarah non-kuantitatif (sejarah kualitatif) dalam *subject matter*, prosedur, dan sumber.

Secara sederhana perbedaan dalam *subject matter* itu begini. Pertanyaan seperti kebangkitan nasional, penggerak Revolusi Indonesia, mengapa Sukarno ingin kabinet kaki empat setelah Pemilu I, mengapa terjadi G-30-S padahal PKI nampak sangat kuat, mengapa Habibie melepaskan Timor Timur, adalah permasalahan kualitatif (non-kuantitatif). Sebaliknya, pertanyaan seperti perkembangan produksi tekstil Tasikmalya 1945-1980, harga dasar gabah selama Orde Baru, inflasi sejak krisis ekonomi, tingkat pengangguran, laju pertumbuhan penduduk, gaji PNS dibanding harga sembako, adalah permasalahan kuantitatif.

Perbedaan prosedur terletak dalam penggunaan teknik matematika pada sejarah kuantitatif. Sejarah kualitatif menggunakan hermeneutika berupa interpretasi terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan, sedangkan sejarah kuantitatif menggunakan teknik

matematika. Dengan teknik matematikanya sejarah kuantitatif lebih objektif, lebih mendekati kebenaran, sebab tidak tergantung interpretasi sejarawan yang bisa subjektif. Sejarah kuantitatif sesuai dengan harapan kaum positivis (seperti Leopold von Ranke) mengenai sejarah, yang menyuguhkan fakta “sebagaimana sebenarnya terjadi”. Bagi sejarawan kualitatif, prosedur sejarah kuantitatif demikian itu nampak sebagai sejarah yang *dehumanized* (meninggalkan unsur manusia), manusia direduksikan menjadi angka-angka.

Perbedaan dalam sumber sejarah terletak dalam penggunaan data sejarah. Kalau sejarah kualitatif datanya berupa deskripsi (berita), peninggalan (bangunan, foto), pikiran, perbuatan, dan perkataan (sejarah lisan), sejarah kuantitatif berupa angka-angka (misalnya: kejahatan, murid), statistik (misalnya: harga sembako, perpajakan), dan sensus (misalnya: penduduk, ternak).

PERMASALAHAN

Untuk mengetahui masalah (*subject matter*) apa saja yang sudah ditulis orang dengan sejarah kuantitatif, marilah kita lihat dua tradisi penulisannya, yaitu tradisi Amerika dan tradisi Perancis. Perbedaan antara dua tradisi itu terletak dalam sejarah kedua bangsa itu. Amerika tidak punya masa lalu yang jauh (tidak ada zaman Klasik, Abad Tengah, Renaissance), sedangkan Perancis punya periode sejarah yang panjang itu.

Tradisi Amerika. Studi kuantitatif dalam sejarah sebenarnya sudah mulai pada pertengahan 1890-an dengan penerbitan Henry Cabot Lodge yang menerapkan analisis statistik terhadap 14.243 nama yang termuat dalam *Appleton's Cyclopedia of American Biography* dan menulis pada suatu majalah di tahun 1891. Tetapi, studi kuantitatif baru mendapat pengakuan secara profesional pada 1900, yaitu ketika Frederick Jackson Turner dalam studinya yang luas menggunakan peta-peta statistik dalam *American Nation* (25 jilid, 1902-1906). Pada

1913 Charles Beard menerbitkan, *An Economic Interpretation of the Constitution*, dan pada 1915 menerbitkan, *Economic Origins of the Jeffersonian Democracy*.

Dalam 1920-an kuantifikasi meluas ke bidang politik, ekonomi, penelitian tentang jurnalisme, bidang-bidang baru dalam sosiologi, dan pertanian. Kemudian (setelah Turner meninggal pada 1932) metode kuantitatif ditinggalkan oleh sejarawan, seolah-olah sudah menjadi masa lalu. Namun, pada pertengahan 1960-an ada minat baru dalam sejarah kuantitatif dengan berbagai seminar, program pelatihan, komite-komite penyedia data, penulisan buku metode kuantitatif, dan mata kuliah reguler di universitas-universitas.¹

Tanpa menyebut nama-nama tokohnya, tema-tema penulisan baru juga berkembang: mobilitas sosial, hubungan mobilitas dengan radikalisme, pemilihan anggota legislatif, partai-partai politik, anggaran belanja kota-kota, dan politik pertanian.²

Tradisi Perancis. *Fernand Braudel* (1902-1985), yang memimpin *Annales* sesudah Lucien Febvre meninggal pada 1956, tidak menulis sejarah kuantitatif *as such*, tetapi ia memberi inspirasi untuk sejarah kuantitatif. Konsepnya tentang waktu dalam sejarah, yang dimuat untuk pengantar bukunya *Le Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II* (1949), membagi waktu sejarah ke dalam tiga macam, yaitu waktu geografis, waktu sosial, dan waktu individual.³ Konsep tentang waktu itu disebutnya sebagai (1) sejarah jangka panjang (*longue durée*, *l'histoire structurale*, sejarah struktural), (2) sejarah *conjuncture*, *l'histoire conjontural*, sejarah siklus dan intersiklus, dan (3) sejarah peristiwa-peristiwa (*l'histoire*

1 Uraian tentang asal-usul sejarah kuantitatif di Amerika diambil dari Charles M. Dollar and Richard J. Jensen, *Historian's Guide to Statistics: Quantitative Analysis and Historical Research* (Huntington, New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1974), Bab I.

2 Lihat, William O. Aydelotte, Allan G. Bogue, and Robert William Fogel (eds.), *The Dimensions of Quantitative Research in History* (Princeton: Princeton University Press, 1972).

3 Peter Burke, *The French Historical Revolution: The Annales School 1929-89* (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 42.

événementielle). Sejarah struktural (*longue durée*) membicarakan organisasi yang koheren dan hubungan yang relatif tetap antara realitas dan masyarakatnya. Sejarah konjunktur ialah perubahan-perubahan (transformasi) yang terjadi secara cepat atau lambat (satu dasawarsa, seperempat abad, satu abad) dalam masyarakat dan ekonomi. Sejarah peristiwa membicarakan tentang sejarah di permukaan, kekacauan-kekacauan, dan gerakan-gerakan yang pendek, tajam, serta dahsyat.⁴ Dengan Braudel sejarah Perancis mendunia.

Konsep Braudel tentang *longue durée* dan *conjonture* itulah yang berpengaruh — secara heuristik — pada penulisan sejarah kuantitatif, terutama sejarah regional dan sejarah serial. Konsepnya tentang *conjonture* itu sebenarnya telah beredar di kalangan sejarawan Perancis sejak 1930-an.

Tradisi penulisan sejarah kuantitatif di Perancis dibagi tiga urutan, yaitu (1) penulisan sejarah harga, (2) penulisan demografi historis dan sejarah demografis, dan (3) sejarah regional dan sejarah serial. *Pertama*, sejarah kuantitatif baru muncul awal tahun 1930-an. Pada 1932 seorang ahli ekonomi, François Simiand, menulis tentang the Great Crash 1929 (depresi). Karena ia bukan sejarawan, bukunya itu hanya dipandang sebelah mata oleh sejarawan. Baru pada 1933 ketika Ernest Labrousse menulis tentang harga dan perpajakan pada abad ke-18 di Perancis, sejarah kuantitatif mendapat pengakuan dan besar pengaruhnya. Sejarah kuantitatif Labrousse membicarakan harga dalam pergerakan jangka panjang (*le mouvement longue durée*) dengan siklus jangka pendek, 'siklus krisis' dan 'antarsiklus'.

4 Fernand Braudel, *On History* (Chicago: The University of Chicago Press, 1980), *passim*. Konsep Braudel tentang waktu sejarah itu diterapkan pada sejarah Indonesia oleh Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Jakarta: PT Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1996) dan Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Dari Emporium sampai Imperium)* (Jakarta: PT Gramedia, 1987).

Kedua, setelah membicarakan soal harga, sejarah kuantitatif dalam tradisi Perancis kemudian dikenal berkat pembicaraan sekitar demografi historis (*historical demography*) dan sejarah demografis (*demographic history*). Keduanya merupakan campuran dari studi sejarah dan studi geografi.

Tetapi, keduanya harus dibedakan. Demografi historis membicarakan tentang pasang-surut jumlah penduduk dalam suatu tempat dan suatu kurun sejarah. Sementara itu, sejarah demografis harus jelas-jelas berupa sejarah, sama seperti sejarah politik dan sebagainya. Sejarah demografis menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah secara koheren, dengan menggunakan demografi sebagai tolok-ukur dan perubahan-perubahan kependudukan sebagai faktor penjelas.⁵ Di Perancis, demografi historis dan sejarah demografis kemudian bergabung ke dalam sejarah sosial.

Ketiga, sejarah kuantitatif selanjutnya mempelajari sejarah regional dan sejarah serial. Tokohnya ialah Pierre Goubert dan Le Roy Ladurie. Goubert yang menulis *Beauvais and the Beauvaisis* menggunakan konsep 'Structure' dan 'Conjoncture'. 'Structure' mengintegrasikan demografi historis ke dalam sejarah sosial daerah, sedangkan 'Conjoncture' membicarakan fluktuasi harga, produksi, dan penduduk selama seabad (1600-1730).⁶

Le Roy Ladurie menulis *The Peasant of Languedoc* (1966) dan dimaksudkannya sebagai "total history", sejarah tanpa batas yang memuat elemen-elemen geografi historis, demografi, sosiologi, dan ekonomi. Dua macam sumber statistiknya ialah daftar pajak tanah (*compoix*) yang memuat perubahan pemilikan tanah dan perhitungan pajak panen untuk mengetahui angka produksi pertanian. Dalam buku itu dikemukakannya tentang periodisasi bagi petani Languedoc

5 T. H. Hollingsworth, *Historical Demography* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1969), hlm. 35-61. Dalam sejarah Inggris, misalnya, periode penting bagi demografi historis ialah 1538-1857, ketika daftar gereja menjadi sumber utama. Sementara itu bagi sejarah demografis tahun-tahun terpenting mungkin 1348-1666 ketika negeri dilanda wabah pes.

6 Peter Burke, *The French Historical Revolution*, hlm. 57.

yang dibaginya ke dalam fase-fase. Fase pertama ialah pra-kondisi untuk maju (abad XI-XV), Fase kedua ialah kemajuan dalam produksi pertanian (abad XV), dan fase ketiga ialah kematangan (sesudah 1600) waktu produksi pertanian meningkat, penduduk bertambah, pajak meningkat tajam, dan negara kuat. Adapun fase keempat ialah masa resesi panjang, waktu produksi pertanian menurun (akhir XVII-akhir XVIII).⁷ Di bagian akhir bukunya dimuat banyak tabel dan grafik hasil kuantifikasi atas *compoix*. Ia mengatakan pada 1969 bahwa 'secara ekstrem dapat dinyatakan sejarah yang tidak dapat dikuantifikasikan tidak dapat mengklaim sebagai sejarah ilmiah'.⁸ Ia sendiri kemudian meneliti tentang rekrutmen tentara pada 1868 (korelasi mobilitas geografis, kenakalan, dan struktur fisik), sewa tanah di Paris (akhir Abad Tengah-Abad XVIII), hutan dan ladang di Normandia, perawatan medis, demografi historis, dan sebagainya.

Catatan. (Karena tema *The Peasant of Languedoc* ialah soal petani, buku itu kita masukkan juga dalam sejarah sosial). Sejarah kuantitatif bagi Le Roy Ladurie rupanya bukan terminal. Kalau *The Peasant of Languedoc* lebih berat ke sejarah kuantitatif, maka ia bergerak ke arah "total history" sebagai ditunjukkannya dalam dua buku, *Montaillou* (1978) dan *Carnival in Romans* (1979). *Montaillou* adalah sebuah desa pendukung sekte sempalan Albigensianisme yang kemudian mengalami inkuisisi oleh gereja.⁹ Di dalamnya ia menceritakan tentang ekologi desa, rumah-rumah, dan keluarga-keluarga penggembala. Juga diceritakannya kehidupan batin warganya, seperti soal seks, mitos, dan ilmu magis. Buku yang lain, *Carnival in Romans* menceritakan tentang pemberontakan di Romans (1579-1580).¹⁰ Di dalamnya ia menceritakan setting pedesaan

7 Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Peasant of Languedoc* (Illinois: The University of Illinois Press, 1976), hlm. 299-311, "Conclusion".

8 Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Territory of the Historian* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), hlm. 15.

9 Emmanuel Le Roy Ladurie, *Montaillou: Cathars and Catholics in a French Village* (New York: Penguin Books, 1981).

10 Emmanuel Le Roy Ladurie, *Carnival in Romans: A People's Uprising at Romans 1579-1580* (New York: Penguin Books, 1981).

dan perkotaan, konflik antara petani dan bagsawan, petisi-petisi, protes-protes, dan pemberontakan petani.

KEMUNGKINAN MENULIS SEJARAH KUANTITATIF

Dengan contoh perkembangan sejarah kuantitatif dalam tradisi Amerika dan Perancis itu, kita mengharap bahwa sekalipun sampai saat ini (2003) sejarah kuantitatif belum berkembang di Indonesia, sejarah kuantitatif tidak lagi asing dan tak terjangkau.

Oleh karena itu, *subject matter* yang dapat dikuantitatifkan, prosedur penelitian melalui kuantifikasi, dan sumber-sumber sejarah kuantitatif di Indonesia perlu dijelaskan untuk meyakinkan bahwa sejarah kuantitatif sangat layak dikembangkan. Demikianlah, di bawah ini akan diungkap sejumlah permasalahan yang bisa dikembangkan dengan mengingat keterbatasan sumbernya. Dengan memakai perangkat ilmu-ilmu sosial kita akan mendapat inspirasi tema-tema yang bisa dikembangkan.

Ekonomi. Penulisan sejarah ekonomi Indonesia yang dibuat oleh sarjana Belanda dan non-Belanda terbagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, tulisan yang dibuat “dari atas geladak kapal”, seperti artikel-artikel dalam 150 tahun *BKI* (*Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde*). Kebanyakan artikel itu memuat peraturan-peraturan, seperti bantuan kesehatan, penyakit, makanan, dan disiplin tentara serta pelaut.¹¹ Juga buku-buku mengenai perdagangan cengkih (Gerit J. Knaap), sejarah maritim (Luc Nagtegaal, Gerit J. Knaap, Jeroen Touwen), industri gula (G.R. Knight, Radin Fernando), dan perdagangan serta ekonomi luar-Jawa (Jeroen Toewen).

Kedua, tulisan yang didominasi oleh pendekatan sosiologis-ekonomis: dualisme masyarakat dari J. H. Boeke, pluralisme ekonomi dari J. S. Furnivall, dan perubahan sosiologi-ekonomi dari D. H.

11 Peter Boomgard, “Historical studies in 150 volumes of *Bijdragen*”, *BKI*, 1994, hlm. 685-702.

Burger, dan buku mengenai depresi 1930-an yang dieditori Peter Boomgard. Tradisi sosiologi-ekonomi juga nampak dalam disertasi-disertasi sarjana Indonesia: pedesaan Jawa waktu Tanam Paksa (Lukman Soetrisno), migrasi buruh waktu Tanam Paksa (Djuliati Soerojo), dan penanaman tembakau (Sugijanto Padmo).

Akan tetapi, rupanya sejarah ekonomi Indonesia (sarjana Belanda dan non-Belanda) pun mulai bergerak ke arah sejarah kuantitatif, sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah seminar pada Juli 1999 di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Forum Kajian Ekonomi Indonesia dan Asia Tenggara, Jurusan Sejarah UGM.¹²

Dengan buku ekonomi yang khusus untuk sejarawan, semacam karangan G. R. Hawke, *Economics for Historians*,¹³ sejarah kuantitatif akan dapat melangkah lebih jauh dari sejarah ekonomi “dari atas geladak kapal” dan pendekatan sosiologi-ekonomi. Keterbatasan sumber, seperti tidak adanya catatan kepemilikan tanah dan pajak penghasilan agraria dalam jangka panjang, jangan membuat kita tidak berani menulis sejarah kuantitatif. Dari buku itu saja, ternyata masih banyak tema-tema ekonomi yang bisa ditulis dengan data-data kontemporer, seperti kepemilikan tanah, harga, pertumbuhan niaga, industri, perusahaan ekspor-impor, dan perbankan. Beberapa macam data bahkan dapat dilacak ke belakang, karena ada laporan-laporan residen, ada dokumen perusahaan-perusahaan, ada *Koloniaal Verslag*, ada dokumen di setiap departemen, ada *Handboek voor Cultuur en Handels-Ondermingen*, ada laporan *Welvaart Commissie*, ada *Indisch Verslag*, di tahun 1930 ada sensus, dan sebagainya. BPS (Biro Pusat Statistik) — semula *Centraal Kantoor voor de Statistiek* yang didirikan secara resmi pada 1934 — mempunyai tangan sampai tingkat kecamatan, dan belum banyak dimanfaatkan oleh sejarawan.

12 “Crisis and Continuity: Indonesian Economy in the Twentieth Century”, *Lembaran Sejarah*, Volume 3, No. 1., 2000.

13 G. R. Hawke, *Economics for Historians* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).

Demografi. Untuk demografi data kuantitatifnya dapat dibaca pada *Koloniaal Verslag, Indisch Verslag*, Sensus 1930, dan beberapa sensus sesudah Kemerdekaan. Data kependudukan tahunan tiap Dati II juga tersedia. Dari data-data itu kita dapat mengolahnya menjadi fakta tentang migrasi (di dalam dan ke luar pulau), struktur ras, struktur seks, piramida kependudukan, pertumbuhan penduduk, mortalitas dan morbiditas, dan migrasi rural-urban.

Dengan mudah kita akan bisa menulis semacam buku Pauline Dublin Milone, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts* dengan mengambil data dari beberapa kota.¹⁴ Hanya saja, yang perlu selalu diingat ialah perbedaan antara demografi dan sejarah: demografi meluas dalam ruang, sedangkan sejarah memanjang dalam waktu. Jangan sampai sejarah lupa akan wilayahnya sendiri, dan merebut wilayah disiplin lain.

Mengenai kota dan laju urbanisasi di Indonesia juga belum ditulis. Ada satu artikel yang dapat menjadi model, yaitu "Urbanization in Thailand 1947-1967" oleh Sidney Goldstein dalam Y.M. Yeung & C.P. Lo (eds), *Changing South-East Asian Cities: Readings on Urbanization*.¹⁵ Di dalamnya ia membuat perhitungan-perhitungan matematis soal distribusi penduduk desa dan kota, distribusi kota dan penduduk kota dalam tahun-tahun tertentu, perubahan kota-kota berdasar besarnya penduduk dalam tahun tertentu, sepuluh kota terbesar berdasar jumlah penduduk, karakteristik ekonomi kota-kota tertentu, dan distribusi kota dan penduduk kota tertentu dalam tahun tertentu.

Sosiologi. Soal mobilitas sosial barangkali paling mudah untuk ditulis. Ada kebangkitan kelas menengah yang dengan mudah dilihat secara kualitatif: kota-kota dihuni oleh kelas menengah baru (pegawai,

14 Pauline Dublin Milone, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts* (Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1966).

15 Sidney Goldstein, "Urbanization in Thailand 1947-1967" dalam Y.M. Yeung & C.P. Lo (eds.), *Changing South-East Asian Cities: Readings on Urbanization* (Singapore: Oxford University Press, 1976), hlm.100-114.

wiraswasta, profesional), perkampungan satelit dengan KPR-BTN yang semula diperuntukkan pegawai kecil tergusur, tanah-tanah pertanian jadi perumahan yang dibangun perusahaan real-estate, dan desa-desa pinggir kota sudah berubah penghuni. Akan tetapi, belum ada data kuantitatif mengenai pertumbuhannya dan laju *embourgeoisement* belum ada data perbandingan antar lokasi.

Hal lain yang patut ditulis ialah soal “agama” dan hubungannya dengan mobilitas pekerjaan. Pembagian “agama” (sebut saja moralitas) Clifford Geertz menjadi tiga kategori — priyayi, santri, abangan — dapat kita hubungkan dengan mobilitas pekerjaan. Moralitas priyayi mengharuskannya memilih pekerjaan birokrasi, moralitas santri ialah berdagang, dan moralitas abangan ialah bertani. Kita dapat melakukan penelitian sejarah kuantitatif melalui sejarah keluarga masing-masing mengenai mobilitas pekerjaan dalam lima dekade sesudah Kemerdekaan: di sebuah desa pertanian, di sebuah pasar, dan di sebuah kantor. Apakah ada yang berubah? Seseorang dari keluarga priyayi menjadi pedagang, seseorang dari keluarga santri menjadi petani, seseorang dari keluarga abangan menjadi pedagang, dan seterusnya. Ataupun pembagian tiga itu tidak ada relevansinya dengan mobilitas pekerjaan?

Selanjutnya, kriminalitas juga dapat menjadi fokus penelitian sejarah kuantitatif. Data-data yang ada di kepolisian, lembaga pemasyarakatan, di kantor kelurahan, di kantor kecamatan, dan kantor-kantor kejaksaan sesudah Kemerdekaan saja sebenarnya sangat cukup untuk menulis sejarah kuantitatif mengenai kriminalitas. Perbedaan bentuk kriminalitas antara desa dan kota, antara daerah satu dan lain, dan antar-etnis.

Politik. Penelitian sejarah kuantitatif pada para anggota Volksraad belum pernah dilakukan. Bahan-bahannya dengan mudah bisa dikumpulkan: kepentingan (agama, ekonomi, imperialisme), latar belakang (pekerjaan, partai, pendidikan), dan *voting behavior* masing-masing anggota berdasar ras, agama, kelas sosial, dan daerah. Dengan

cara yang *mutatis mutandis* sama, penelitian dapat dilakukan pada para anggota DPR-MPR, DPRD I, dan DPRD II. Bagaimana dengan interpretasi ekonomis atas anggota-anggota legislatif?

Khusus mengenai partai-partai, berdasar *voting behavior* para anggota legislatif, dapat diteliti apakah PDI-P masih menjadi partai *wong cilik* (kepentingan orang kecil), partai priyayi (keinginan eksekutif), atau sekedar partai berkuasa (kekuasaan kelompok). PDI-P partai *wong cilik*, anak *wong cilik*, dan cucu *wong cilik*? Partai priyayi, partai santri, atau partai abangan? Partai majikan, partai buruh?

Masalah yang sangat sensitif dan kontroversial ialah soal fundamentalisme Islam (busana, cara ibadah, pergaulan) dan radikalisme Islam (syari'at Islam). Dengan menyerderhanakan persoalan, kita dapat bertanya apakah fundamentalisme berhubungan dengan jenis pengetahuan yang dimiliki? Asumsinya: para pemilik *Natuurwissenschaften* cenderung memilih agama yang "eksak", sedangkan mereka yang dari *Geisteswissenschaften* cenderung memilih agama yang "non-eksak". Apakah radikalisme Islam itu berhubungan dengan agresivitas? Asumsinya: "serbuan" terhadap tempat yang dipandang maksiat sering dilakukan oleh kelompok radikal. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sebagian dapat dikuantifikasikan (frekuensi), sedangkan sebagian lain non-kuantitatif (makna, kebenaran).

Metode kuantitatif memang ada batasnya. Seorang sejarawan Amerika, Arthur Schlesinger, Jr., mengatakan bahwa 'hampir semua pertanyaan penting itu justru menjadi penting karena tidak dapat dikuantifikasikan'.

KEMAMPUAN METODE KUANTITATIF

Kurang populernya sejarah kuantitatif di Indonesia pasti disebabkan karena selama ini — sepengetahuan penulis — belum ada satu jurusan sejarah pun yang sudah mengajarkan pendekatan kuantitatif. Maka, di bawah ini akan diberikan tiga contoh sederhana dari kemampuan metode kuantitatif, yaitu korelasi, *content analysis*, dan *time series*. Contoh-contoh itu diharapkan mampu meyakinkan pentingnya metode kuantitatif dalam penelitian sejarah.

Contoh-contoh ini tidak bermaksud menggantikan metode kuantitatif sebagai bahan ajar: tidak memakai angka-angka, tidak memakai penghitungan statistik, dan tidak memakai gambar-gambar grafik. Padahal, ketiganya adalah substansi metode kuantitatif.

Sejarah kuantitatif seharusnya berdiri sendiri sebagai sejarah seperti yang lainnya. Metode kuantitatif yang hanya menjadi pelengkap sejarah non-kuantitatif akan dicontohkan dalam *korelasi*, metode kuantitatif yang menjadi kunci dari penelitian non-kuantitatif dicontohkan dalam *content analysis*, dan metode kuantitatif yang sepenuhnya menjadi sejarah kuantitatif akan dicontohkan dalam *time series*.

Korelasi. Korelasi berguna bila sejarawan mempunyai data dari dua variabel. Penulis dalam *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura, 1850-1940* pernah menghitung soal migrasi orang Madura ke Jawa: gejala musiman atau gejala permanen. Jawabannya terletak dalam dua data tahunan: penumpang kapal penyeberangan Madoera Stroomtram Maatschappij (Kamal-Surabaya) dan hasil panen padi. Kalau gejala itu bersifat musiman, mesti korelasi koefisiensi antara penumpang dan hasil panen itu positif, dan sebaliknya, kalau negatif berarti bukan gejala musiman. Ternyata hasil kuantifikasinya negatif, artinya penyeberangan tidak ada hubungannya dengan hasil panen, alias bukan gejala musiman.¹⁶ Penghitungan

16 Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura, 1850-1940* (Yogyakarta: MataBangsa, 2002), hlm. 616.

itu hanya dipakai sebagai pelengkap sejarah non-kuantitatif, karenanya pemakaian metode kuantitatif di situ tidak menjadikan buku sejarah itu berhak disebut sebagai sejarah kuantitatif.

Content Analysis. Analisis isi berguna bila sejarawan mempunyai data dokumen tertulis. Analisis isi bertujuan untuk mengetahui sebuah atau serangkain peristiwa di masa lalu. Sekalipun analisis isi hanya menjadi pelengkap dari sejarah yang non-kuantitatif, tetapi amat penting sebab menjadi kunci dari penelitian. Tanpa metode kuantitatif analisis isi hanya bersifat kesan-kesan, intuisi, interpretasi, dan tidak sistematis.

Metode kuantitatif melalui fasilitas komputer berusaha membuat penelitian analisis isi menjadi sistematis dan akurat. Contohnya ialah sebuah penelitian di Amerika oleh Richard Merrit, *Symbols of American Community, 1735-1775* (1966). Merrit menghitung frekuensi sebuah kata yang muncul dalam lima surat kabar kolonial (sebelum Independence). Konsep tentang "kata" itu kemudian berkembang menjadi "istilah" (sesuai dengan pengertian sejarawan) dan menjadi "sistem" (disebut General Inquirer System).¹⁷

Dengan prosedur yang sama kita dapat meneliti artikel-artikel dalam koran dan majalah di Indonesia. Majalah *Sasadara* (1900) yang terbit di Surakarta sudah menunjukkan rasionalitas (mengganti mitos dengan "ilmu kodrat"). Frekuensinya? Majalah *Mas Marco Doenia Bergerak* terkenal sebagai pembela *wong cilik*, anti-feodal, anti-priyayi, dan anti-kolonial. Frekuensinya? Demikian juga dari pembacaan kita tahu bahwa Yasadipura II (1760-1845) dalam *Serat Sasanasunu* sudah rasional dengan melarang orang untuk percaya pada pusaka, pawukon, dan jimat, serta melarang belajar kanuragan. Akan tetapi, seberapa jauh koran-koran di daerah Kejawaen sekarang ini mencerminkan sikap anti-syirik itu?

17 Selanjutnya lihat, Dollar and Jensen, *Historian's Guide to Statistics*, hlm. 207.

Time Series. Guna *time series* ialah untuk menganalisis data tunggal yangurut secara kronologis, seperti angka penduduk, angka ekspor, angka impor, angka hasil panen, jual-beli tanah, dan pengeringan tanah. Dengan analisis *time series* kita dapatkan, di antaranya, *rate of growth* (laju pertumbuhan).

Laju pertumbuhan ialah pertumbuhan tahunan yang konstan. Laju pertumbuhan (yang sederhana disebut *linear trend*) didapat dengan menghitung perbedaan antara data pertama dan data terakhir, lalu dibagi jarak tahun antara keduanya, atau $(B - A)/T$. A adalah nilai dalam tahun 0, dan B nilai di tahun T. Laju pertumbuhan dalam statistik sebenarnya tidak sesederhana itu saja, tetapi biarlah itu menjadi tugas mata ajaran khusus.

Le Roy Ladurie dalam *The Peasant of Languedoc* hampir seluruhnya menggunakan laju pertumbuhan untuk menghitung banyak hal dari Abad Tengah sampai Zaman Pencerahan: penduduk, hasil panen, pendapatan, pemecahan tanah, konsentrasi tanah, pemiskinan, upah, sewa, dan keuntungan. Seperti sudah dikemukakan di atas, bukunya itu bergerak dari sejarah kuantitatif ke *total history*, yaitu dari sejarah kuantitatif ke sejarah intelektual, ke perubahan struktur, ke sejarah mentalitas, dan ke *l'histoire événementielle*.

Bagaimana dengan laju pertumbuhan penduduk sejak Kemerdekaan di Indonesia? Bagaimana dengan alih-tangan tanah, pengeringan, ekspor, impor, perbankan, perusahaan, dan sebagainya? Dan laju urbanisasi (pengkotaan)?

SUMBER

Sekarang ini sumber-sumber statistik di Indonesia melimpah. Selain kantor pusatnya, BPS (Biro Pusat Statistik), ada kantor cabang sampai tingkat kecamatan. Sejarawan yang akan meneliti alih-tangan tanah, pengeringan, sengketa tanah, sertifikasi tanah, dan persoalan tanah lainnya tinggal pergi ke BPN (Biro Pertanahan Nasional) di setiap kabupaten.

Sebuah buku oleh E. A. van de Graaf, *De Statistiek in Indonesië* telah mengumpulkan kandungan informasi statistik pada 1950-an yang ada di pusat.¹⁸ Tetapi, ia juga menyebutkan bahwa sejak VOC sebenarnya statistik sudah dikumpulkan, sehingga sejarawan dapat saja menulis sejarah kuantitatif sampai jauh ke belakang.

Namun, sejarah kuantitatif di Indonesia tidak perlu melihat ke belakang yang sangat jauh, sebab pekerjaan itu merupakan kemewahan yang tidak akan banyak gunanya secara pragmatis. Maka, kalau sejarah kuantitatif tidak ingin menjadi antikuarian, sebaiknya memilih periode sesudah-Kemerdekaan sampai sekarang.*

¹⁸ E. A. van de Graaf, *De Statistiek in Indonesië* (Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, [1954]).

SEJARAH MENTALITAS

Sama dengan sejarah kuantitatif, sejarah mentalitas (*l'histoire mentalité*) masih merupakan sebuah kemungkinan, tapi sebuah kemungkinan yang tidak jauh dari jangkauan. Lihat ini: (1) Sejarah mentalitas dekat dengan tingkat kesadaran masyarakat, (2) sumber sejarah mentalitas tersedia dengan mudah (koran, masyarakat, sejarah lisan), dan (3) sejarah mentalitas tidak memerlukan sumber asing (Belanda), karena topik-topik kontemporer (sesudah 1945) banyak sekali. Kemudahan-kemudahan itu memungkinkan skripsi S-1 memperoleh peringkat akademis yang tinggi. Lagi pula, penguasaan sejarah mentalitas akan mempermudah lulusan S-1 bergabung dalam *collective intelligence* yang sedang berkembang, dengan ilmu tidak sekedar dengan *common sense*.

Sebelum kita mendefinisikan sejarah mentalitas, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut yang menyangkut fakta individual dan fakta sosial.

Pertama, fakta individual. (1). Dalam pertemuan Sarekat Islam (SI) di Yogyakarta 20 April 1914 ada keputusan yang mendudukkan Tjokroaminoto sebagai Ketua dan Samanhudi hanya sebagai Ketua Kehormatan. Pada waktu itu Mas Marco yang mengelola majalah *Doenia Bergerak* di Surakarta menyesalkan peristiwa itu, karena SI

telah berpindah kepemimpinan dari *wong cilik* ke priyayi. Pendapat Mas Marco pribadi itu tidak diperhatikan oleh Samanhudi yang terus menjalin hubungan baik dengan Tjokroaminoto, dan sebaliknya Samanhudi juga tidak peduli dengan sifat pribadi Mas Marco sebab dia berusaha mengumpulkan uang untuk mengirim Mas Marco ke Tweede Kamer di Negeri Belanda.

(2). Dalam studinya tentang kepribadian Joseph V. Stalin, Gustav Buchowski menyimpulkan bahwa Stalin mengidap paranoia.¹ Sebagai anak petani-pengrajin sepatu, Stalin mengalami perlakuan kejam dan tiranikal dari ayahnya, sehingga Stalin belajar untuk memendam kebencian sampai saatnya datang untuk membalas. Setelah ayahnya meninggal, ibunya mengirim dia ke sekolah teologi Gereja Ortodoks supaya bisa menjadi pendeta. Tapi institusi itu ternyata sangat keras dan dogmatis, hal-hal yang membuatnya membenci otoritas. Selanjutnya dikatakan bahwa Stalin secara fisik punya rasa rendah diri: tangan kiri yang lemah, muka bekas-cacar, dan penampilan tak sedap lain. Rasa rendah diri itulah yang menjadikannya melakukan kompensasi yang berlebihan. Psiko-individual Stalin memuluskan jalannya menjadi seorang diktator yang secara brutal melindas lawan-lawannya.

Kedua, fakta sosial. Di sini akan dicontohkan dua kasus mengenai *collective mentality* yang menyangkut *popular art* dan *folk religion*. Keduanya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2001 di Indonesia.

(1). Kasus pertama mengenai *popular art*. Seorang pengarang mengatakan bahwa buku kumpulan cerpen yang diterbitkan penerbit terkenal selama 2 (dua) tahun 1999-2001 hanya laku 376 buku, sedangkan kaset musik pop Sheila On 7 hanya dalam waktu seminggu (pada 2001) terjual 400.000 keping.

¹ Gustav Buchowski, "Joseph V. Stalin: Paranoia and The Dictatorship of the Proletariat" dalam Benjamin B. Wolman (ed.), *The Psychoanalytic Interpretation of History* (New York: Harper Torchbooks, 1973) hlm. 115-149.

(2). Kasus lain menyangkut *folk religion*, agama yang berbaur dengan budaya rakyat. Pada waktu ada gonjang-ganjing politik di bulan September tahun 2001 yang berakhir dengan *impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR, para pengikutnya di Pasuruan ngamuk: pohon-pohon ditebang dan diletakkan melintang jalan, terbentuk pasukan berani mati, dan mereka ngluruk ke Jakarta.

PERMASALAHAN

Asal-Usul. Gejala dalam kasus *popular art* dan *folk religion* di atas itu termasuk *collective consciousness* atau *représentation collectives* dalam peristilahan Emile Durkheim (1858-1917).² Dalam sosiologi Durkheim, mentalitas kolektif bukanlah persoalan psikologi yang membicarakan fakta individual tetapi persoalan sosiologis. Fakta sosial ialah gejala yang dimiliki secara umum oleh anggota-anggota suatu kelompok sosial. Mitos, legenda populer, konsepsi-konsepsi agama, kepercayaan moral, dan sebagainya, mencerminkan fakta sosial. Fakta sosial berada di luar fakta individual. Individu-individu menyetujui dan menyesuaikan diri berdasar keharusan-keharusan sosial. Karenanya, fakta sosial mempunyai kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap individu. Durkheim mengatakan bahwa "fakta sosial adalah semua cara bertindak suatu masyarakat, setuju atau tidak individunya." Masyarakat sanggup membatasi perilaku individual sesuai dengan kemauannya, fakta sosial mempunyai kehidupannya sendiri merdeka dari kehidupan individual.

Sejarah Mentalitas. Kita tidak akan memulai dengan definisi, tapi dengan melihat perkembangan mengenai apa yang sudah dikerjakan. Sejarah mentalitas atau *l'histoire mentalité* berasal dari teori Durkheim mengenai fakta sosial itu. Sejarah mentalitas dikembangkan oleh kelompok *Annales* di Perancis (*Annales*, atau lengkapnya, *Annales d'histoire économique et sociale* adalah nama majalah yang didirikan pada oleh Lucien Febvre dan Marc Bloch pada 1929).

2 Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: The Free Press, 1964).

Sejarah mentalitas muncul pada 1960-an dan 1970-an sebagai reaksi terhadap determinisme. Seperti diketahui, kaum Marxis meletakkan kesadaran sebagai *superstructure* (bangunan atas) yang tidak mempunyai eksistensi sendiri, tetapi ditentukan oleh *structure* (bangunan bawah), yaitu struktur (basis) ekonomi. Orang tidak bebas berkesadaran, sebab kesadarannya ditentukan oleh kondisi material, mentalitas manusia hanyalah bawahan dari kondisi materialnya. Sejarah mentalitas membalikkan pendapat yang deterministik itu. Sejarah mentalitas melihat mentalitas sebagai fakta sosial, merdeka dari determinisme apa pun. Oleh karenanya, dikatakan bahwa sejarah mentalitas telah mengangkat mentalitas dari ruang bawah tanah ke ruang bawah atap (*from cellar to attic*).³

Meskipun banyak nama yang patut disebut dalam rintisan menuju sejarah mentalitas, tulisan ini hanya akan menyebut dua nama, yaitu Lucien Febvre (1878-1956) dengan konsep mengenai *sensibilité* dalam sejarah dan Philippe Ariès dengan buku *Centuries of Childhood*.

Sensibilitas (*sensibilité, sensibility, sensitivity*) adalah kehidupan emosional manusia.⁴ Febvre mengharapkan adanya jenis sejarah yang baru tentang cinta, kesedihan, ampunan, berkah, kematian, belas kasihan, kekejaman, ketakutan, kebencian, dan sebagainya. Secara khusus ia menunjuk pentingnya sastra. Karya sastra, bukan saja mampu memberi bayangan tentang sensibilitas, tetapi juga tentang cara-cara mencipta kemudian menyebarkan bentuk-bentuk sensibilitas kepada massa secara tepat. Juga psikologi disebutnya sangat penting. Sejarah psikologis berbicara tentang festival, upacara, hukuman mati, upacara keagamaan, dan sebagainya. Kita juga dapat menggambarkan bagaimana orang dulu menangis, berdansa, berkelahi, dan bercinta.

3 Peter Burke, *The French Historical Revolution: The Annales School 1929-1989* (Cambridge: Polity Press, 1960), hlm. 67.

4 Peter Burke (ed.), *A New Kind of History: From the Writings of Lucien Febvre* (New York: Harper Torchbooks, 1973), hlm. 12-26, "Sensibility and History: How to Reconstitute the Emotional Life of the Past". Lihat juga artikelnya, "History and Psychology", hlm. 1-11.

Philippe Ariès pada 1960 menerbitkan buku *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life*.⁵ Sekalipun tidak mengaku sebagai sejarah mentalitas (baik asli maupun terjemahan Inggrisnya), tetapi buku itu dianggap karya pertama tentang sejarah mentalitas. Ia seorang sejarawan-demografer yang mencoba mengungkap kehidupan anak-anak dan keluarga pada Abad Tengah sampai abad ke-18 di Perancis. Dia menemukan di antaranya bahwa pemikiran adanya anak-anak baru mulai pada abad ke-18. Itu pun perlu dicatat adanya perbedaan antara anak laki-laki dan wanita, orang kota dan petani, bangsawan-borjuis-petani. Sebelumnya, anak-anak adalah “orang dewasa kecil” yang didandani sebagai layaknya orang dewasa. Sejak abad ke-18 anak kecil mempunyai dandanan, sekolah, dan permainan sendiri.

Selanjutnya tema-tema sejarah mentalitas berkembang, berubah, dan diperluas. Banyak tema-tema baru yang muncul: mentalitas revolusioner, kontrarevolusioner, orang-orang militan, kaum anarkis, perbanditan, pelacuran, petualangan, pembunuhan, kriminalitas, konflik kota-desa, bunuh-diri, ketakwarasan, budaya populer, penindasan wanita, kekerasan, pertenungan, aborsi, homoseksualitas, dan kematian (sikap, “seni”, upacara).

Jadi apa definisi sejarah mentalitas? Michele Vovelle yang sudah menulis tentang sekularisasi (dekristenisasi) di tingkat massa pada abad ke-18 melihat adanya kekaburan bila sejarah mentalitas didefinisikan sebagai “sejarah tentang gambaran-dunia” (*wereldbeelden*) atau “sejarah mentalitas kolektif” saja. Sebab, menurut Vovelle, dalam *collective mentality* harus dibedakan antara pemikiran atau kesadaran kolektif (*bewuste denken, collective consciousness*) seperti yang dimiliki oleh para elite dan orang kota (*burger, bourgeois*) dan ketaksadaran kolektif (*collectief onbewuste, inconscient collectif, collective unconsciousness*). Maka sejarah mentalitas bagi Vovelle

5 Philippe Ariès, *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life* (New York: Vintage Books, 1962). Diterjemahkan dari bahasa Perancis, *L'Enfant et la vie familiale sous l'ancien régime* (1960).

adalah *sejarah ketaksadaran kolektif*, sejarah tentang mentalitas yang pra-verbal dan pra-refleksif.⁶

SEJARAH MENTALITAS DI INDONESIA

Di sini akan dikemukakan tiga tulisan — satu dengan klaim sejarah mentalitas *as such* — dan dua lainnya yang secara substantif dapat menjadi sejarah mentalitas. Kemudian akan dikemukakan sumbangan heuristik (memberi inspirasi) dari psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi budaya.

Sastra dan Sejarah. Usaha ke arah sejarah mentalitas itu sudah dirintis oleh Sartono Kartodirdjo dengan tulisannya “Literature and History: Soewarsih’s *Buiten het Gareel, a Piece of l’Histoire Mentalité*”.⁷ Setting cerita adalah Bandung tahun 1930-an. Di dalamnya diceritakan semangat nasionalisme anggota-anggota Partai Marhaen pimpinan Ir. Sukarno. Kalau kita memakai definisi Michele Vovelle tentang sejarah mentalitas sebagai “sejarah ketaksadaran kolektif”, kiranya nasionalisme para anggota partai tidak termasuk sejarah mentalitas. Nasionalisme mereka adalah *bewuste denken* (pikiran sadar) dan bukan *collectief onbewuste* (ketaksadaran kolektif). Jadi kita pun bisa bertanya, karya sastra Soewarsih itu termasuk sejarah pemikiran atau sejarah mentalitas? Dalam tulisan itu dikatakan bahwa sejarah mentalitas adalah sejarah pemikiran, sebab keduanya berbicara soal *menti-facts*.

Priyayi. Kesulitan serupa (sejarah pemikiran ataukah sejarah mentalitas) juga akan terjadi bila kita meneliti priyayi di Vorstenlanden. Para priyayi di Kasunanan Surakarta, misalnya, mempunyai pikiran sadar akan kepriyaiannya (*bewuste denken*),

6 Michel Vovelle, *Mentaliteits Geschiedenis: Essays over Leefen Beeldwereld* (Nijmegen: SUN, 1985). Lihat, “Inleiding: Ideologieën en mentaliteiten”, hlm. 19-32; “Bestaat er een Collectief Onbewuste?”, hlm. 54-70.

7 Sartono Kartodirdjo, “Literature and History: Soewarsih’s *Buiten het Gareel, a Piece of l’Histoire Mentalité*” dalam *Simposium Internasional III Ilmu-Ilmu Humaniora* (Yogyakarta: Fakultas Sastra, UGM, 1966), hlm. 193-301.

seperti ditunjukkan pada karya-karya Padmasusastra *Serat Subasita* dan RMA. Jayadiningrat I *Serat Mas Jenthuh Inggih Mas Nganten* — seperti kita bahas dalam sejarah pemikiran. Tapi, priyayi yang mana? Seperti diketahui priyayi itu berlapis-lapis. Jadi, masuk akal kalau priyayi alit (dan kawula) berperilaku dan mempunyai ketaksadaran kolektif (*collectief onbewuste*). Bahkan, para priyayi luhur pun mempunyai (*collectief onbewuste*) terhadap raja dengan apa yang disebut *political mysticism*.⁸

Perbanditan. Tulisan-tulisan sekitar perjuangan kemerdekaan sebenarnya banyak bercerita tentang ketaksadaran kolektif. Ambil contoh tulisan Julianto Ibrahim, “Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan di Keresidenan Surakarta pada Masa Revolusi (1945-1950)”.⁹

Tulisan itu memberi gambaran bahwa bandit dan pejuang mempunyai kesamaan, yang menjadi *common denominator* ialah keinginan akan revolusi sosial. Ada pengalaman kolektif yang terbentuk karena proses sejarah: eksploitasi pemerintah Hindia-Belanda, penderitaan selama pendudukan Jepang, dan kekacauan di awal Revolusi. Mereka membenci pemerintah pusat, birokrasi, dan kraton. Kekerasan berupa penganiayaan, penculikan, dan pembunuhan, tak terelakkan.

Meskipun kekerasan dan kemarahan termasuk dalam sejarah mentalitas, tetapi hal yang paling menarik sehubungan dengan sejarah mentalitas ialah pembicaraan tentang bandit. Ternyata kedudukan seorang *benggol* (kepala bandit) diperkuat oleh *folkbelief* tentang adanya *wisik* (perkenan dunia gaib). Seorang *benggol* dipercaya mempunyai *kasekten* (ilmu kebatinan), *kanuragan* (ilmu kebal), *kadurjanan* (ilmu perbanditan), dan *aji-aji* (azimat). *Benggol*

8 Lihat, Kuntowijoyo, “Kekuasaan dan Budaya: Perkumpulan Abipraya di Surakarta pada Awal Abad Kedua Puluh” dalam *Radikalisasi Petani: Esai-Esai Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002), hlm. 144-170.

9 Julianto Ibrahim, “Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan di Keresidenan Surakarta pada Masa Revolusi (1945-1950)” (Yogyakarta: UGM, Tesis S-2, 2002).

mendapat itu semua berkat *laku* (jalan gaib), dan sebaliknya ada pantangan-pantangan serta kelemahan-kelemahannya. *Benggol* juga mempunyai "status sosial" berdasarkan keampuhan ilmu, luas wilayah pengaruhnya, jumlah anggota, perempuan simpanan, dan obral uang di tempat-tempat pelacuran.

Psikologi Sosial. *Pertama*, agresivitas *mob*. Agresivitas *mob* terjadi oleh beragam alasan, di antaranya memburu "ninja" (pembunuh berkedok), memburu tukang tenung (*witch*), dan tawur. Tentang "ninja", misalnya, koran *Kedaulatan Rakyat* (KR) tanggal 20 Oktober 1998 menulis, "Massa semakin tak terkendali, kepala tersangka "ninja" yang sudah dipenggal, ditusuk dengan bambu dan diarak keliling." Korban "ninja" adalah kiai, guru ngaji, dan santri. *Witch-hunting* (memburu tukang tenung) di Indonesia banyak terjadi. Memburu tukang tenung itu terjadi pada Abad Tengah di Eropa dan Abad XVII di Amerika. Tersangka tukang tenung sering menjadi sasaran amukan massa. Mengenai tawur, *Kedaulatan Rakyat* 27 Oktober 1998, menulis tentang 31 orang yang luka-luka akibat tawuran massal antar mahasiswa UII (Universitas Islam Indonesia) dan UJB (Universitas Janabadra) pada waktu ada turnamen sepak bola Janabadra Cup VI. Tawur bisa terjadi antar pelajar, antar kampung, antar pendukung calon jabatan eksekutif, antar preman, dan antar pendukung partai.

Kedua, gerakan massa tak terorganisir. Ada agresivitas antar etnis dan antar agama di Indonesia. Menjelang berakhirnya abad ke-20 ada agresivitas antar etnis (Madura dan penduduk setempat) seperti di Sampit, dan ada agresivitas antar agama (Islam-Kristen) di Maluku dan Poso.

Ketiga, kultus. Adanya aliran-aliran kebatinan (Pangestu, Subud, Bratakesawa, dan sebagainya) terjadi ketika seseorang mengklaim mendapat *wahyu*, dan menuliskannya. Juga bisa terjadi ketika ada dukun terkenal (seperti Mbah Suro pada 1966). Aliran-aliran kepercayaan kepada Tuhan YME sesudah 1978 berkisar pada pribadi yang sangat berpengaruh dan para anggota yang mengelompok di

sekitar orang sakti itu. Kultus juga bisa terjadi pada agama-agama besar. Dalam Islam, misalnya, ada kelompok-kelompok sempalan yang berkumpul di sekitar orang 'alim (tahu) lalu dianggap sebagai imam bagi orang lain.

Sosiologi. *Pertama*, Hollandisasi. Meniru sang penjajah sudah biasa dan menjadi *the psychology of the colonized*. Begitulah kita menemukan Franco-phile dan Anglophile di Afrika. Di Vorstenlanden — dalam hal ini Surakarta — Hollandisasi ditemukan pertama kali pada raja, kemudian pada priyayi, dan mestinya kemudian pada *wong cilik*.

Raja terkena Hollandisasi karena ternyata ia pandai berdansa, toast, dan suka hadir dalam acara dansa bertopeng di Societeit Harmonie, yang khusus untuk orang Belanda. Kepandaianya berdansa terlihat dalam keramaian kraton, waktu dia harus berdansa dengan nyonya residen. *Serat Wedhamadya* yang ditulis oleh Pangeran Suryaningrat dari Pakualaman menunjukkan kepandaian dan keluwesan Pakubuwana X dalam berdansa. Sementara itu, Hollandisasi pada priyayi nampak dalam *Serat Subasita* (Buku Sopan-santun) karangan Padmasusastra. Dikatakannya dengan jelas bahwa ukuran patut dan tak patut dalam etiket ialah kebudayaan Belanda. Tetapi, kapan Hollandisasi itu dilakukan *wong cilik*? Hollandisasi terhadap *wong cilik* ditandai dengan potong rambut (rambut semula digelung), pembangunan rumah *gedhong*, dan pemakaian busana cara Eropa.

Kedua, priyayinisasi. Dalam buku Mitsuo Nakamura *The Crescent Arises over the Banyan Tree* diceritakan adanya proses priyayinisasi ketika anak-anak pedagang Kotagede (Yogyakarta) bersekolah ke Mesir. Sepulang dari sekolah di luar negeri, mereka tidak lagi menjadi pedagang tetapi menjadi pegawai (priyayi). Kiranya kedudukan sebagai pegawai (priyayi) itu untuk waktu yang lama menjadi cara untuk mobilitas sosial. Seperti diketahui, selama masyarakat masih membagi pekerjaan menjadi dua — halus dan kasar — menjadi pegawai (priyayi) tetap menjadi idaman. Sebab, menjadi pegawai

berarti pekerjaan halus, pendapatan tetap, dan ada pensiun.

Ketiga, Amerikanisasi. Nampak terutama dalam busana (*jeans*), bujana (McDonald, KFC, Dunkin' Donuts), entertainment (musik, film), dan olah raga (basket ball, tinju, bowling). Ilmu juga banyak terpengaruh (Freudianisme, Behaviorisme) karena pusat kebudayaan dunia sekarang ini ada di Amerika. Ada Indifikasi, Japonisasi, dan Sinifikasi dalam perfilman dan musik?

Keempat, "refeodalisasi". Dipakainya simbol-simbol "feodal" sudah lama terjadi, misalnya pada upacara perkawinan: gamelan penyambutan temanten, upacara-upacara, dandanan pengantin laki-laki dan perempuan, dan hiasan pelaminan. Pada masa Orde Baru simbol-simbol "feodal" sangat diingini. Rumah-rumah para *sentana* raja dibeli orang kaya, rumah-rumah *joglo* dibangun, upacara sungkeman masuk TV, penyambutan "tamu agung" dengan tarian kraton.

Antropologi Budaya. *Pertama, high culture.* Karena tidak seorang pun menulis, kita tidak tahu bagaimana nasib orkestra dan sanggar-sanggar seni, seperti seni lukis, seni drama, seni tari, seni musik, dan olah vokal. Kita hanya tahu bahwa sudah ada perguruan tinggi yang mengurus soal musik, gamelan, pedalangan, dan sebagainya.

Kedua, popular culture. Bagaimana industri rekaman, keroncong, orkes Melayu, dangdut, dagelan, wayang orang, dan ketoprak. Akhir-akhir ini ada usaha mencampurkan musik etnis dengan musik modern. Juga muncul musik keagamaan. Tetapi, semua itu luput dari pengamatan sejarah. Karena sejarah politik masih dominan?

Ketiga, folk-religion. Terjadinya *folk-religion* itu bermacam-macam, tetapi pada umumnya adalah keterpencilan (sejarah, sosial, ekologi). Mereka adalah agama asli di Tenganan (Bali), agama Hindu di Tengger (Jawa Timur, animisme di Toraja (Sulawesi), agama Badui (Banten), Saminisme di Blora, dan agama suku-suku asli di pedalaman Kalimantan dan Irian. *Folk-religion* juga bisa terjadi bila hegemoni budaya lokal lebih kuat daripada agama universal.

Keempat, folk-belief. Ada sakralisasi dan mistifikasi. Sakralisasi terjadi di banyak tempat. Ketika terjadi tanah longsor di Kalibayem (Yogyakarta) pada awal tahun 2003 yang ternyata ada pancuran air, panitia setempat mengumumkan, “Yang membutuhkan air suci dapat berhubungan” (dengan panitia). Hal itu pasti menambah sakralisasi pada air bekas cucian kereta kraton, sakralisasi barang-barang dari *gunungan* sekaten, sakralisasi Laut Selatan, sakralisasi Gunung Merapi, sakralisasi “tujuh mata air”, sakralisasi *wesi aji*, sakralisasi sendang, sakralisasi binatang, sakralisasi benteng, dan sebagainya. Mistifikasi banyak terjadi di Jawa. Orang menghitung nasib melalui naga dina, kepercayaan pada pawukon, ruwat untuk menghindari nasib sial, pesugihan, azimat, jin, astrologi, dan sebagainya. Seseorang tinggal membuka-buka majalah *Posmo* untuk mengetahui seberapa jauh mistifikasi itu terjadi.

Kelima, folk-healing. Pengobatan pada suku-suku terbelakang dikerjakan dengan mantra, menyembelih binatang, memanggil roh leluhur, dan upacara-upacara. Pijat tradisional, urut, dan *sangkal putung* (urut tulang patah) dapat kita masukkan di sini.

Keenam, folk-art. Tayub menjadi kebanggaan para priyayi di Surakarta awal abad ke-20. Seorang laki-laki yang menari dengan seorang *ledhek* (ronggeng) menyusupkan uang logam lewat *kemben* bagian atas, sambil tangannya bergerak-gerak sekenanya. Seorang ronggeng kadang-kadang menjadi favorit sehingga menyedot banyak uang, sehingga ada usulan berapa maksimum memberi uang sesuai pangkat seseorang. Sekarang ini pun masih banyak rombongan tayub beroperasi.

Ketujuh, pengobatan alternatif. Sekarang pengobatan alternatif seperti wabah. Semboyan “kembali ke alam” sedang berkembang: *herbal medicine*, tusuk jarum, tusuk jari, sengat lebah, aliran listrik, tenaga dalam, dan silat (semacam pengobatan *do it yourself*). Ada mentalitas baru?

METODOLOGI

Selain hermeneutika (menafsirkan) yang menjadi pendekatan umum terhadap semua *Geisteswissenschaften* (ilmu-ilmu kemanusiaan), tulisan ini akan menjelaskan dua pendekatan yang khusus untuk sejarah mentalitas, yaitu *Verstehen* dan imajinasi sejarah.

Verstehen. Kata benda *Verstehen* atau kata kerja *verstehen* dipakai Wilhelm Dilthey sebagai jalan untuk “memahami” (bukan “menerangkan”) sejarah. Sebab, sejarah aktornya ialah manusia yang berpikir dan merasa, kita harus memahami perilaku pelaku sejarah sebagaimana pelaku itu sendiri memberi makna perbuatannya, harus menemukan “*subjective mind*”, makna subjektif, dan tafsir subjektif, pelaku sejarah. Dengan kata lain, “the rediscovery of the I in the Thou”. (Lihat juga pembahasannya dalam Bab 13. “Biografi”).

Adapun proses yang harus dilalui pertama-tama ialah (1) empati (menyatu rasa). Dan karena empati masih menyiratkan adanya dua pihak, yaitu pemakna (orang luar) dan yang dimaknai (pikiran subjektif), maka harus dilengkapi dengan (2) *to relive*. *Relive* berarti hidup *dalam* makna subjektif itu. Kalau kita tidak bisa hidup dalam makna subjektif, sejarawan tidak akan bisa memahami ketaksadaran kolektif, seperti cinta, permainan, dan ketakutan. Seperti diketahui, orang yang tak memahami makna subjektif akan melakukan reduksi: cinta hanya berarti kebahagiaan materiil (status, uang, seks), semua bentuk permainan tidak fungsional, irrasional, serta hanya membuang-buang waktu, dan ketakutan hanyalah ilusi belaka. Akan tetapi, ternyata bahwa peradaban manusia tidak hanya berisi yang serba rasional, yang serba fungsional, dan yang serba serius.

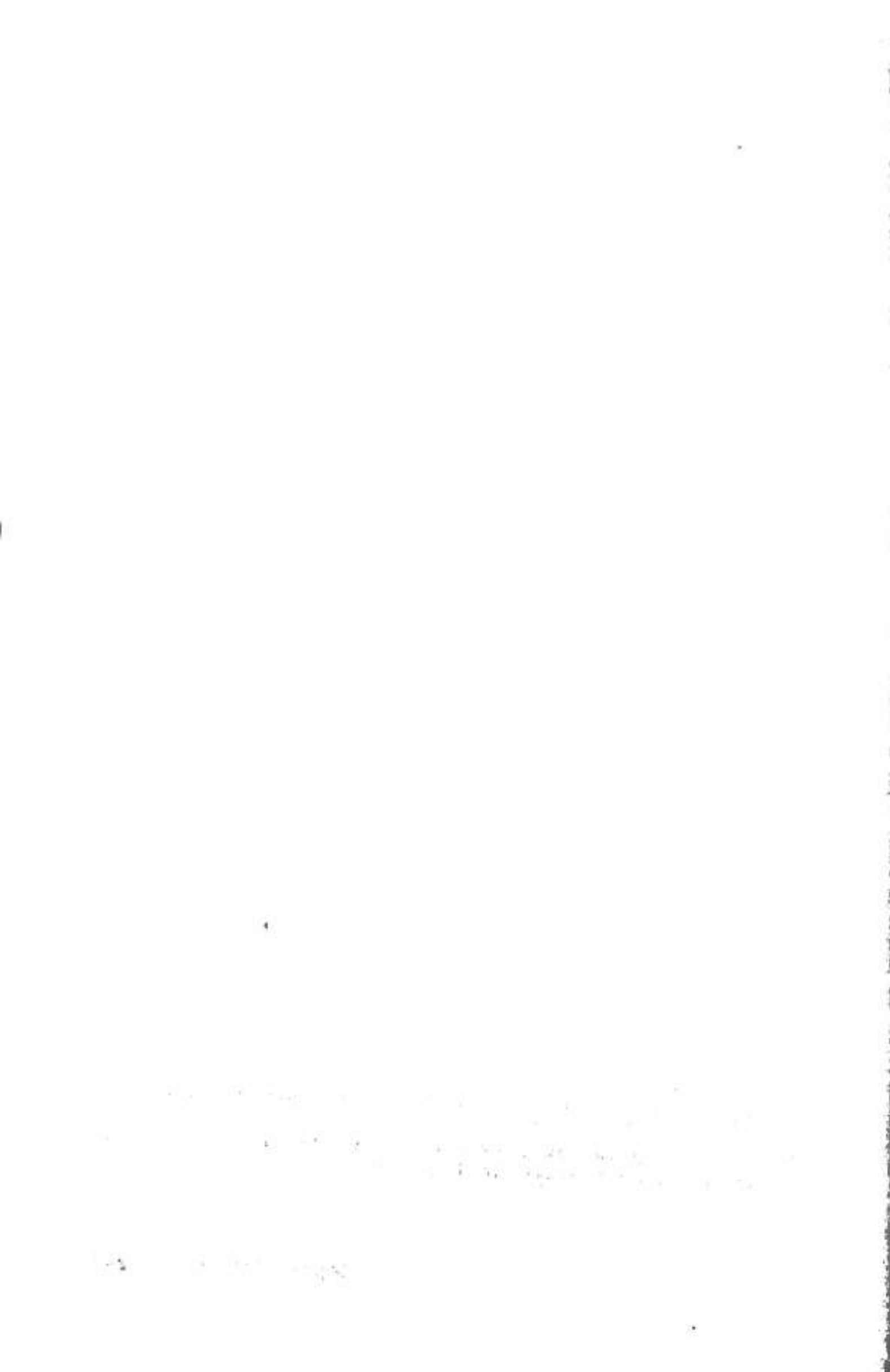
Imajinasi Sejarah. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan imajinasi sejarah dalam meneliti sejarah mentalitas. Apakah imajinasi sejarah itu? Imajinasi sejarah bukanlah imajinasi romantik (“saya cinta Medan, karena saya tahu sejarahnya”) dan juga bukan imajinasi

pragmatik (“Kesadaran sejarah nasional mencegah separatisme”). Menurut Johan Huizinga imajinasi sejarah adalah *historical sensation*, *historical contact*, dan *historical vision*.¹⁰ Selanjutnya, Huizinga menggunakan kata Jerman *Ahnung* yang Inggrisnya ialah *presentment* (keberhadiran). Maka, imajinasi sejarah adalah kamera yang sanggup membuat gambar seperti aslinya, mempunyai kekuatan *evocative* (merangsang, menggoda), bukan hanya ornamental tetapi struktural.¹¹

Sejarah mentalitas harus bisa menghadirkan kembali ketaksadaran kolektif, seolah-olah semua fakta sejarah itu hadir di depan mata.*

10 Baca, Johan Huizinga, “The Task of Cultural History” dalam *Man and Ideas* (New York: Meridian Books, 1959), hlm. 17-76.

11 John Lukacs, *Historical Consciousness or the Remembered Past* (New York: Harper & Row, Publishers, 1968), hlm. 237-244, “About Imagination”.



Daftar Pustaka

- "Crisis and Continuity: Indonesian Economy in the Twentieth Century" ,
Lembaran Sejarah, Volume 3, No. 1., 2000.
- A. H. Nasution, *Sedjarah Perdjuangan Nasional Dibidang Bersendjata*
(Djakarta: Mega Bookstore, 1966).
- , *Sekitar Perang Kemerdekaan*.
- A. Makmur Makka (ed.), *Habibie: Dari Pare-Pare Lewat Aachen, dan Tulisan-Tulisan Lain* (Jakarta: Gapura Media, 1986).
- , *BJH, Bacharuddin Jusuf Habibie: His Life and Career* (Jakarta: Cipta Kreatif, 1989).
- Abdul Aziz Theba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: SIPRESS, 1992).
- Achmadi, "Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan" (IAIN Sunan Kalijaga: Disertasi, 2002).
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante, 1956-1959* (Jakarta, PT Intermedia, 1995).
- Ahmad Adaby Darban, "Sejarah Kauman Yogyakarta Tahun 1900-1950: Suatu Studi Terhadap Perubahan Sosial" (Universitas Gadjah Mada, Skripsi S-1, 1980).
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).
- Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under the Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1969).
- Ali Rahmena (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1995).
- Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998).
- Amin, Samir, *Unequal Development: An Essay on the Social Formation of Peripheral Capitalism* (New York: Monthly Review Press, 1976).

- Amir Santosa, "The Ulama as Political Elite" (Tesis M.A. Universiti Sains Malaysia, Penang, 1980).
- Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Pejuang sampai Pemberontak* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).
- Anton E. Lucas, *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989).
- , dan Abdurrahman Surjomihardjo, "Peristiwa Tiga Daerah: Sebuah Interpretasi Sejarah. Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan". *Prisma*, No. 8 (Agustus 1981), hlm. 52-61.
- Aoh Kartahadimadja, *Polemik Kebudajaan* (Djakarta: Perpustakaan Kementarian P.P. dan K., 1954).
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta, LP3ES, 1985).
- Ariès, Philippe, *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life* (New York: Vintage Books, 1962). Diterjemahkan dari bahasa Perancis, *L'Enfant et la vie familiale sous l'ancien régime* (1960).
- Ashley. W. J., "On the Study of Economic History", N. B. Harte (ed.), *The Study of Economic History: Collected Inaugural Lectures, 1893-1970* (London: Frank Cass)
- Ashton, T. S., "The Relation of Economic History to Economic Theory," dalam N. B. Harte (ed.), *The Study of Economic History: Collected Inaugural Lectures, 1893-1970* (London: Frank Cass).
- Ashworth, W., "The Study of Modern Economic History", dalam N. B. Harte (ed.), *The Study of Economic History: Collected Inaugural Lectures, 1893-1970* (London: Frank Cass).
- Aydelotte, William O., Allan G. Bogue, and Robert William Fogel (eds.), *The Dimensions of Quantitative Research in History* (Princeton: Princeton University Press, 1972).
- Ayip Rosyidi, *Sjafruddin Prawiranegara: Lebih Takut kepada Allah SWT*. (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986).
- Bachtiar Rivai, "Bentuk Milik Tanah dan Tingkat Kemakmuran: Penyelidikan Pedesaan di Daerah Pati, Djawa Tengah. " (Disertasi, 1958).
- Ballard, Martin, (ed.), *New Movements in the Study and Teaching of History* (Bloomington: Indiana University Press, 1971).
- Baroroh Baried, "Islam and the Modernization of Indonesian Women", dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Islam and Society in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1983), hlm. 139-154.

- Baum, Willa K., *Oral History for the Local Historical Study* (Nashville, Tennessee: American Association for State and Local History, 1971).
- Becker, A. L., and Aram A. Yengoyan (eds.), *The Imagination of Reality: Essays in Southeast Asian Coherence System* (Norwood, N. J. : Ablex Publishing Corporation).
- Bellah, R. N., "Religious Evolution" dalam Roland Robertson (ed.), *Sociology of Religion* (Suffolk: Penguin Books, 1971), hlm. 262-292).
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Bloch, Marc, *French Rural History: An Essay on Its Basic Characteristics* (Berkeley: University of California Press, 1970).
- Blusse, Leonard, *Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan Belanda di Batavia VOC* (Jakarta: Pustaka Azet, 1988).
- Boeke, J. H., *Economic and Economic Policy in Dual Societies as Exemplified by Indonesia* (Haarlem: Tjeenk Willink and Zoon, 1953).
- , "Ekonomi Timur", dalam *Oosterse Economie* (Den Haag: Servire: 1955).
- Boland, B. J., *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1985).
- Boomgard, Peter, "Historical studies in 150 volumes of *Bijdragen*", *BKI*, 1994, hlm. 685-702.
- Braudel, Fernand, *On History* (Chicago: The University of Chicago Press, 1980).
- Brinton, Crane, *The Shaping of Modern Thought* (Englewood, N.J.: Prentice-Hall, inc., 1963).
- Buchowski, Gustav, "Joseph V. Stalin: Paranoia and The Dictatorship of the Proletariat" dalam Benjamin B. Wolman (ed.), *The Psychoanalytic Interpretation of History* (New York: Harper Torchbooks, 1973) hlm. 115-149.
- Buku-laporan, Seminar Persoalan-persoalan Masa Kini dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: LIPI, 28-30 Maret 1985 dan 16-17 April 1986).
- Buku-laporan, Seminar Sejarah* (Universitas Gadjah Mada, 1957)
- Buku-laporan, Seminar Sejarah Lokal I* (Bali, 1982).
- Buku-laporan, Seminar Sejarah Lokal II* (Medan, 1984).
- Buku-laporan, Seminar Sejarah Nasional II* (Yogyakarta, 1970).
- Buku-laporan, Seminar Sejarah Nasional III* (Jakarta, 1981).

- Burger, D. H., *Desa Ngablak (Regenschap Pati) in 1869 en 1928*, dalam *Koloniale Studien*, 17: 1933.
- , *Laporan Mengenai Desa Pekalongan dalam Tahun 1869 dan 1928* (Jakarta Bhratara, 1971).
- , *Rapport over de desa Pekalongan in 1869 en 1928* (Weltervreden: Folif, 1928).
- , "Report over de Desa Pekalongan in 1868 en 1928" *Economische Beschrijving*, I., hlm. 1-12.
- , "Structuurveranderingen in de Javaanse Samenleving", *Indonesië*, II: hlm. 381-398, 521-537; III: hlm. 1-18, 101-123, 225-250, 381-389, 512-534.
- Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatra Thawalib* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990).
- Burke, Peter, (ed.), *A New Kind of History: From the Writings of Lucien Febvre* (New York: Harper Torchbooks, 1973).
- , *The French Historical Revolution: The Annales School 1929-89* (Cambridge: Polity Press, 1990).
- Burckhardt, Jacob, *The Civilization of the Renaissance in Italy* (New York: Harper Torchbooks, 1958).
- Callow, Alexander B., Jr. (ed.), *American Urban History: An Interpretive Reader with Commentaries* (New York: Oxford University Press, 1973).
- Camus, Albert, *The Myth of Sisyphus and Other Essays* (New York: Random House, 1955).
- Castle, Lance, *Religion, Politics and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry* (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies Cultural Report Series No. 15, 1967).
- Clapham, J. H., "The Study of Economic History", dalam N. B. Harte (ed.), *The Study of Economic History: Collected Inaugural Lectures, 1893-1970* (London: Frank Cass).
- Clark, G. N., "The Study of Economic History," dalam N. B. Harte (ed.), *The Study of Economic History: Collected Inaugural Lectures, 1893-1970* (London: Frank Cass).
- Clelland, D. C., *The Achieving Society* (New York: Collier Macmillan, 1967).
- Cochran, Thomas C., *Social Change in America: The Twentieth Century* (New York: Harper & Row, Publishers, 1972).
- Cole, FW. A., "Economic History as a Social Science", dalam N. B. Harte (ed.), *The Study of Economic History: Collected Inaugural Lectures, 1893-1970* (London: Frank Cass).

- Collingwood, R.G., *The Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1956).
- Collins, Wendy, *et al.* (Eds.), *Women: The Directory of Social Change* (London: Wildwood House, 1978).
- Crouch, Harold, *Militer dan Politik* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986).
- D. S. Moeljanto dan Taufiq Ismail (eds.), *Prahara Budaya: Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI dkk.* (Bandung: Mizan dan HU Republika, 1995).
- Dahm, Bernhard, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Dalton, George, (ed.), *Economic Development and Social Change* (Garden City, New York: Natural History Press, 1971).
- Daly, Mary, *Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation* (Boston: Beacon Press, 1973).
- Darmanto Jatman, *Psikologi Jawa* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997).
- Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939* (Disertasi doktor, Universitas Gadjah Mada, 1989).
- Davis, Cullom, Kathryn Back, dan Maclean, *Oral History: From Tape to Type* (Chicago: American Library Association, 1977).
- Deliar Noer, *Membicarakan Tokoh-Tokoh Bangsa* (Bandung: Mizan, 2001).
- , *Mohammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990).
- , *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti, 1987).
- Demos, John, *A Little Commonwealth: Family Life in Plymouth Colony* (Oxford: Oxford University Press, 1970).
- Denny, J.A. (ed.), *Transformasi Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Kelompok Studi Proklamasi, 1986).
- Dersott, Lyle W., *The Pendergast Machine* (New York: Oxford University Press, 1968).
- Dewey, Alice G., *Peasant Marketing in Java* (Glencoe, Ill: Free Press, 1962).
- Dilthey, Wilhelm, *Pattern and Meaning in History: Thoughts on History and Society* (New York: Harper Torchbooks, 1962).
- Dobbin, Christian, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah, 1704-1847* (Jakarta: INIS, 1992).
- Dollar, Charles M., and Richard J. Jensen, *Historian's Guide to Statistics: Quantitative Analysis and Historical Research* (Huntington, New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1974).

- Dumont, Rene, "Agriculture as Man's Transformation of the Rural Environment", dalam Theodor Shanin *Peasant and Peasant Societies* (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd; 1973), hlm. 141-149.
- Durkheim, Emile, *The Rules of Sociological Method* (New York: The Free Press, 1964).
- Elson, R. E., "Sugar and Peasants: The Social Impact of Western Sugar Industry on the Peasantry of the Pasuruan Area, East Java, From the Cultivation System to the Great Depression" (Disertasi Ph. D. Monash University, 1979).
- Emmerson, Donald K., *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1976).
- Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekular" tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1959* (Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman ITB, 1981).
- Erikson, Erik H., *Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History*, (New York, N.Y.: W.W. Norton & Company, Inc., 1962).
- Evans, George Ewart, *Tools of Their Trade: An Oral History of Men at Work c. 1900* (New York: Taplinger Publishing Company, 1971).
- Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1992).
- Fatia Nadia, "Tenaga Kerja Wanita di Perkebunan Teh Malabar - Afdelingen Cianjur *Regentschapen* Priangan Tahun 1880-1900" (Skripsi S-1, Fakultas Satra, Universitas Gadjah Mada, 1987).
- Febvre, Lucien, *A New Kind of History and Other Essays* (New York: Harper & Row, Publishers, 1973).
- Federspiel, Howard M., *Kajian Al-Quran di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1962).
- , and Lance Castle (eds.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965* (Ithaca: Cornell University Press, 1970); diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Pemikiran Politik Indonesia, 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Foster, George M., *Traditional Societies and Technological Change* (New York: Harper & Row, Publishers, 1973).
- Frederick, William H., dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi* (Jakarta: LP3ES, 1982).

- Galtung, Johan, *Theory and Methods of Social Research* (New York: Columbia University Press, 1969).
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).
- , *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1974).
- , *The Social History of an Indonesian Town* (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1965).
- , *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns* (Chicago: University of Chicago Press, 1963).
- , *The Religion of Java* (Glencoe: The Free Press, 1960).
- Gilbert, Felix, and Stephen R. Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1972).
- Goff, Jacques Le, "Is Politics Still the Backbone of History"?, dalam Felix Gilbert and Stephen Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1972, hlm. 337-355).
- Goldstein, Sidney, "Urbanization in Thailand 1947-1967" dalam Y. M. Yeung and C. P. Lo (eds.), *Changing South-East Asian Cities: Readings on Urbanization* (Singapore: Oxford University Press, 1976), hlm.100-114.
- H.O.S. Tjokroaminoto, *Islam dan Sosialisme* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), cetakan ke-5.
- Haar, Ter, *Adat Law in Indonesia* (New York: Institut of Pacific Relation, 1946).
- Harlem Siahaan "Kolonisasi dan Kongsi Cina di Kalimantan Barat: Pembentukan dan Perkembangannya, 1772-1854," (Universitas Gadjah Mada, Tesis S-2).
- Harte, N.B., (ed.), *The Study of Economic History: Collected Inaugural Lectures, 1893-1970* (London: Frank Cass)
- Hasan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan* (1961).
- Hawke, G. R., *Economics for Historians* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).
- Heilbroner, Robert L., *The Making of Economic Society* (Englewood Cliff, N. J.: Prentice Hall, Inc, 1962).
- Heffner, Robert W., "Islam, State and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class", *Indonesia*, 56 (Oktober 1993), diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

- Heru Cahyono, *Peranan Ulama dalam Golkar, 1971-1980, dari Pemilu sampai Malari* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992).
- Hindley, Donald, *The Communist Party of Indonesia, 1951-1963* (Berkeley: University of California Press, 1964).
- Hobsbawm, E. J., "From Social History to the History of Society", dalam Felix Gilbert and Stephen R. Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W. W. Norton & Company, Inc. , 1972), hlm. 1-26.
- Hoesein Djajadiningrat, *Critische Beschouwing van de Sadjarah van Banten* (Leiden, 1913).
- Hollingsworth, T. H., *Historical Demography* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1969).
- Holt, Claire, (ed.), *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1972).
- Huizinga, Johan, *Men and Ideal: History, the Middle Age, the Renaissance* (New York: Meridian Books, Inc. , 1959).
- , *The Waning of the Ages: A Study of the Forms of Life, Thought, and Art in France and the Netherlands in the Dawn of the Renaissance* (Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc. , 1954).
- Hunt, David, *Parents & Children in History: The Psychology of Family Life in Early Modern France* (New York: Harper & Row, Publishers, 1972).
- Hüsken, Frans, "Perkembangan Historis di Daerah Pedesaan Pantai Utara Jawa", *Cakrawala Majalah Penelitian Sosial*, 8, 5, hlm. 441-462.
- I Nyoman Kutha Ratna, "Protagonis Wanita dalam Roman Sastra Indonesia Sebelum Perang: Analisis Semiotik". (Tesis S-2, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1985).
- Ibrahim Amini, *Imam Mahdi: Penerus Kepemimpinan Ilahi* (Jakarta: Islamic Center, 2002).
- Ibu A. Yani, *Ahmad Yani: Sebuah Kenang-kenangan* (Jakarta: 1981).
- Ihsan Ali Fauzi dan Haidar Bagir (eds.), *Mencari Islam: Kumpulan Otobiografi Intelektual* (Bandung: Mizan, 1990).
- Iik Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990).
- Jackson, Karl D., *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat* (Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 1990).
- Jay, R. R., *Javanese Villagers: Social Relations in Rural Modjokerto* (Cambridge, Mass. : The M. I. T. Press, 1969).

- Jensen, and Dollar, *Historian's Guide to Statistics*.
- John A. Garraty, *The Nature of Biography* (New York: Alfred A. Knopf, 1957).
- Julianto Ibrahim, "Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan di Karesidenan Surakarta pada Masa Revolusi (1945-1950)" (Yogyakarta: UGM, Tesis S-2, 2002).
- Kerblay, Basile, "Chayanov and the Theory of Peasantry as a Specific Type of Economy", dalam Theodor Shanin *Peasant and Peasant Societies* (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd; 1973).
- Koentjaraningrat (ed.), *Villages in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1967).
- , *Anthropology in Indonesia: A Bibliographical Review* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975).
- , *Rintangan-rintangan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1969).
- Komite Ranggawarsitan, *Serat Babad Carios Lelampahipun Suwargi Raden Ngabehi Ranggawarsita Pujangga Ageng ing Nagari Surakarta* (Surakarta: Komite Ranggawarsitan, 1931-1932), 2 jilid.
- Konggres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: P. N. Balai Pustaka, 1978).
- Kuhn, Thomas, "The Relation Between History and History of Science" dalam Felix Gilbert and Stephen Graubard, *Historical Studies Today* (New York: W.W. Norton & Company, 1972), hlm. 159-192.
- Kuntowijoyo, "Harmony as Ideologi: Politics Among the Dutch Community in Solo, 1900-1915" dalam *Humaniora*, Volume XIV, No. 3/2002.
- , "Social Change in an Agrarian Society: Madura, 1850-1940" (Disertasi Ph. D, Colombia University, 1980).
- , *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991).
- , *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura, 1850-1940* (Yogyakarta: MataBangsa, 2002).
- , *Radikalisasi Petani: Esai-Esai Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002).
- Kwantes, R. C., *De Ontwekking van de Nationalistische Rowaging in Nederlandsche Indie: Bronnenpublikatie* (Groningen: H. D. Tjeenk Willink, B. V. ; 1975).
- Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, *Evaluasi Pemilu Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1997).

- Ladurie, Emmanuel Le Roy, *Carnival in Romans: A People's Uprising at Romans 1579-1580* (New York: Penguin Books, 1981).
- , *Montaillou: Cathars and Catholics in a French Village* (New York: Penguin Books, 1981).
- , *The Peasant of Languedoc* (Illinois: The University of Illinois Press, 1976).
- , *The Territory of the Historian* (Chicago: University of Chicago Press, 1979).
- Leach, E., *Political Systems of Highland Burma* (Cambridge: Harvard University Press, 1954).
- Legge, J. D., *Sukarno: A Political Biography* (London: The Penguin Press, 1972).
- Leff, Gordon, *History and Social Theory* (Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc., 1971).
- Lembaran Berita Sejarah Lisan* (Arsip nasional RI).
- Lemon, M. C., *The Discipline of History and History of Thought* (New York: Routledge, 1995).
- Lerner, Gerda, (ed.), *Black Women in White America: A Documentary* (New York: Vintage Books, 1973).
- , *Teaching Women's History* (Washington: American Historical Association, 1981).
- Lewis, Oscar, *The Children of Sanchez: Autobiography of a Mexican Family* (New York: Vintage Book, 1961).
- Liddle, R. William, "Ethnicity and Political Organization: Three East Sumatran Case dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1972).
- , *Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesian Case Study* (New Haven: Yale University Press, 1970).
- Lockridge, Kenneth A., *A New England Town: The First Hundred Years, Dedham Massachusetts, 1636-1736* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1970).
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Jakarta: PT Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Lukacs, Georg, *The Historical Novel* (London: Merlin Press, 1974).
- Lukacs, John, *Historical Consciousness or the Remembered Past* (New York: Harper & Row, Publishers, 1968).

- M. Nursam, (ed.), *Surat-Surat Pribadi Soedjatmoko kepada Presiden (Jenderal) Soeharto (16 Juni 1968 - 26 April 1971)* (Jakarta: Yayasan Soedjatmoko dan PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- , *Pengumpulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Macdonald, Mandy, et al., *Gender & Perubahan Organisasi: Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktik* (Yogyakarta: Insist dan REMDEC, 1999).
- Manuel, Frank E., "The Use and Abuse of Psychology in History", dalam Felix Gilbert and Stephen R. Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1972), hlm. 211-239.
- Mason, Elizabeth B., and Louis M. Starr (eds.) *The Oral History Collection of Columbia University*, Edisi 1979.
- Mathias, Peter, "Economic History-Direct and Oblique," dalam Martin Ballard (ed.), *New Movements in the Study and Teaching of History* (Bloomington: Indiana University Press, 1971).
- Mazlish, Bruce, *In Search of Nixon: A Psychohistorical Inquiry* (New York: Basic Book, Inc., Publishers, 1972).
- Milone, Pauline Dublin, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts* (Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1966).
- Mindere Welvaart Commissie, *Onderzoek naar de Windere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera* (1906-1916).
- Mink, Louis O., *Mind, History & Dialectic: The Philosophy of R.G. Collingwood* (Bloomington: Indiana University Press, 1969).
- Mochtar Mas'oeed, *Ekonomi dan Politik Orde Baru, 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Mohammad Roem, et al. (eds.), *Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwana IX* (Jakarta: Penerbit P. T. Gramedia, 1982).
- Mortimer, Rex, *The Indonesian Communist Party and Landreform, 1969-1965* (Monash University, 1972).
- Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987).
- Nakamura, Mitsuo, *The Crescent Arises Over the Banyan Tree* (Yogyakarta: Percetakan Universitas Gadjah Mada, 1983).
- Naroll, Raoul, and Ronald Cohen (eds.), *A Handbook of Method in Cultural Anthropology* (New York: Columbia University Press, 1970).

- Nash, Manning, *Primitive and Peasant Economic Systems* (San Fransisco, California: Chandler Publishing Company, 1966).
- Nelli, Humbert S., "The Italians and Organized Crime", dalam Alexander B. Callow, Jr. (ed.), *American Urban History: An Interpretive Reader with Commentaries* (New York: Oxford University Press, 1973).
- Ni Ketut Santini, "Munculnya Elite Wanita Modern di Bali, 1923-1943" (Skripsi S-1, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, 1986).
- Nichterlein, Sue, "Historicism and Historiography in Indonesia", *History and Theory*, Vol. XIII, No. 3, 1974, hlm. 253-272.
- Nordholt, Nico Schulte, *Ojo Dumeh: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
- Nugroho Notosusanto, "Problems in the Study and Teaching of National History in Indonesia", *Journal of Southeast Asian History*, Vol. VI, No. 1, 1965, hlm. 1-16.
- , *Sedjarah dan Hankam* (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Sedjarah Hankam, 1968).
- Padmasusastra, *Serat Subasita* (Surakarta: Boedi Oetomo, 1914).
- Peacock, James L., "Dahlan and Rasul: Indonesian Muslim Reformers", dalam A. L. Becker and Aram A. Yengoyan (eds.), *The Imagination of Reality: Essays in Southeast Asian Coherence System* (Norwood, N. J. : Ablex Publishing Corporation), hlm. 245-268.
- Pelzer, K. J., *Pioneer Settlement in Asiatic Tropics: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia* (New York: American Geographical Society, 1945).
- , *Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra 1863-1947*, VKI Vol. 84, (s-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1978).
- Poeze, Harry A., *Tan Malaka: Strijder voor Indonesie's Vrijheid, Levensloop van 1893 tot 1945* ('s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1976).
- Polanyi, Karl, Conrad M. Arensberg, and Henry W. Pearson (Eds.), *Trade and Market in Early Empires* (Chicago: Henry Regny Company, 1971).
- , *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press 1957).
- , "The Economy as Instituted Process," dalam Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg, and Henry W. Pearson (Eds.), *Trade and Market in Early Empires* (Chicago: Henry Regny Company, 1971), hlm. 243-270.

- Pramoedya Ananta Toer, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* (Jakarta: Lentera, 1995, hlm. 289).
- , *Sang Pemula* (Jakarta: Hasta Mitra, tt.).
- Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, *Buku Petunjuk Seminar Sejarah Lokal*, tanggal 17 s/d 20 September 1984, di Hotel Tiara Medan, Jakarta, 1984.
- Pudjiwati Sajogya, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: Penerbit C. V. Rajawali, 1985).
- Rachmawati Soekarno Puteri, *Bapakku Ibuku: Dua Manusia Yang Kucintai dan Kukagumi* (Jakarta: Garuda Metropolitan Press, 1984).
- Raden Slamet Prajoedi Atmosoedirdjo, *Vergelijkende Adatrechtelijke Studie van Oostjavaansche Madoerezen en Oesinger* (Amsterdam: Student-endrukkerij "Poortpers", N. V., 1952).
- Rahnip M.BA, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984).
- Raillon, Francis, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru, 1966-1975* (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Ramadhan K. H., *Kuantar ke Gerbang: Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).
- Resink, G. J., "Eoropocentric, Regiocentric, and Indocentric Historiography", *Indonesian History Between the Myth* (The Hague: W. van Hoeve Publishers, Ltd., 1968).
- Rickleffs, M. C., *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java* (London, 1974).
- Riyadi Gunawan, "Jagoan dalam Revolusi Kita", *Prisma*, No. 8 (Agustus 1981), hlm. 41-50.
- RMA. Jayadiningrat I, *Serat Mas Jenthuh Inggih Mas Nganten* (Surakarta: Albert Rusche Co., 1907).
- Robertson, Roland, (ed.), *Sociology of Religion* (Suffolk: Penguin Books, 1971).
- Robison, Richard, *Indonesia: The Rise of Capital* (North Sydney: Allen & Unwin, Pte., Ltd., 1986).
- Roeder, O.G., *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto* (Jakarta: Gunung Agung, 1982).
- Rosihan Anwar, *Bertumbuh dalam Arus: Soedarpo Sastrosatomo, Suatu Biografi 1920-2001* (Jakarta: PUSDOK GUNTUR 49, 2001, hlm. 298).
- Rostow, Walt W., *The Stages of Economic Growth* (Cambridge: Cambridge University Press, 1959).

- Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).
- , *Sumatera Barat Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).
- Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: PT. Gramedia, 1982).
- , *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 (Dari Emporium sampai Imperium)* (Jakarta: PT Gramedia, 1987).
- , *Modern Indonesia: Tradition & Transformation* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983)
- , *Peasants' Revolt of Banten in 1888. Its Conditions, Course and Sequel. A Case Study of Social Movements in Indonesia* ('s-Gravenhagen Martinus Nijhoff, 1966).
- , "Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah Indonesia", *Lembaran Sejarah*, No. 4 (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, 1969).
- , "Literature and History: Soewarsih's *Buiten het Gareel*, a Piece of l'Histoire Mentalité" dalam *Simposium Internasional III Ilmu-Ilmu Humaniora* (Yogyakarta: Fakultas Sastra, UGM, 1966), hlm. 193-301
- Savitri Prastiti Scherer, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa pada Awal Abad XX* (Jakarta: Sinar Harapan, 1975).
- Schrieke, B. J. O., (ed), *The Effect of Western Influences on Native Civilization in the Malay Archipelago* (Batavia: G. Holff & Co. , 1929).
- Selo Soemardjan, *Social Changes in Jogjakarta* (Ithaca, N. Y. : Cornell University Press, 1962).
- Shanin, Theodor, *Peasant and Peasant Societies* (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd; 1973).
- Simposium Internasional III Ilmu-Ilmu Humaniora* (Yogyakarta: Fakultas Sastra, UGM, 1966).
- Siswanto Masruri, "Menuju Humanitarianisme: Studi Evolusi Pola Pemikiran Kemanusiaan Soedjatmoko" (IAIN Sunan Kalijaga: Disertasi, 2002).
- Sjafri Sairin, "Organisasi Trah: Pelukisan Awal Sebuah Organisasi Sosial Orang Jawa", stensil ceramah pada Pusat Penelitian dan Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 30 Juni 1981.
- Sjoberg, Gideon, *The Preindustrial City: Past and Present* (New York: The Free Press, 1965).

- Skinner, G. W., *Local, Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium* (New York: Harper & Row, Publishers, 1972).
- Smail, John R. W., "On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia", *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 2, No. 2 (July 1961), hlm. 72-102.
- Smelser, Neil J., *The Sociology of Economic Life* (New Delhi Prentice Hall of India Ltd. , 1965).
- , "Sociological History: The Industrial Revolution: and the British Working-Class Family", Neil J. Smelser, *Essays in Sociological Explanation* (Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, Inc. , 1968), hlm. 76-91.
- Soedarmono, "Munculnya Kelompok Pengusaha Batik di Laweyan pada Awal Abad XX" (Tesis S-2, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1987).
- Soedarsono, *Wayang Wong: The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984).
- Soedjatmoko *et al.* (eds), *An Introduction to Indonesian Historiography* (Ithaca: Cornell University Press, 1965).
- Spencer, J. L., *Shifting Cultivation in Southeastern Asia*. (Barkeley's University of California Press, 1977).
- Spretnak, Charlene, *The Politics of Women's Spirituality: Essays on the Rise of Spiritual Power within the Feminist Movement* (New York: Anchor Books, 1982).
- Sri Suhandjati, "Ajaran Tatakrama Yasadipuro II: Perpaduan Syariat Islam dengan Budaya Jawa" (IAIN Sunan Kalijaga: Disertasi, 2003).
- Stark, R., and C.Y. Glock, "Dimensions of Religious Commitment" dalam Roland Robertson (ed.), *Sociology of Religion* (Suffolk: Penguin Books, 1971), hlm. 253-256.
- Starr, Louis M., "Oral History", *Encyclopedia of Library and Information Science*, Vol. 20, hlm. 440-463.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Stone, Lawrence, "Posopography" dalam Felix Gilbert and Stephen Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W.W. Norton & Company, 1972).
- Strachey, Lytton, *Eminent Victorians* (New York: Penguin Books, 1981).
- Stromberg, Roland N., *European Intellectual History Since 1789* (New York: Meredith-Century-Croft, 1968).

- Stuers, Cora Vreede-de, *The Indonesian Woman: Struggle and Achievement* (Gravenhage: Mouten and Co. , 1960).
- Supple, Barry E., (ed.), *The Experience of Economic Growth: Case Studies in Economic History* (New York: Random House, 1963).
- Suwara, *Bab Alaki Rabi: Wayuh Kaliyan Mboten* (Semarang: H. A. Benjamins, 1913).
- Swierenga, Robert P., (ed.), *Quantification in American History: Theory and Research* (New York: Atheneum, 1970).
- Tahi Bonar Simatupang, *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Pradjurit Selama Perang Kemerdekaan* (Djakarta: Pembangunan, 1960).
- Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1979).
- , and Sharon Siddique, *Islam and Society in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1983).
- Tawney, R. H., "The Study of Economic History", dalam N. B. Harte (ed.), *The Study of Economic History: Collected Inaugural Lectures, 1893-1970* (London: Frank Cass).
- Terra, G. J. A., "Some Sociological Aspects of Agriculture in S. E. Asia", *Indonesia*, VI 1952-53, hlm. 297-315, 437-463.
- Tester, George, Mr., *Traditional Societies and Technological and Technological Change* (New York: Harper & Row, Publishers, 1973).
- Thernstrom, Stephan, *Poverty and Progress: Social Mobility in a Nineteenth Century City* (New York: Athonoum, 1970).
- , "Reflections on the New Urban History", *Daedalus*, 100: Spring 1971, hlm. 359-75.
- Thompson, Paul, *The Voice of the Past: Oral History* (Oxford: Oxford University Press, 1978).
- Thorner, Daniel, "Peasant Economy as a Category in Economic History", dalam Theodor Shanin *Peasant and Peasant Societies* (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd; 1973).
- Todaro, Michael, *Economic Development in the Third World* (New York: Longman, 1982).
- , *Economica for a Developing World* (New York: Longman, 1982).
- Touwen-Bouwisma, Elly, *Staat, Islam en Lokale Leiders in West Madura, Indonesië: Een Historich-Anthropologische Studie* (Kampen: Uitgeverij Mondiss, 1988).

- Twantes. R. C., *De Ontwekking van de Nationalistische Rowaging in Nederlandsche Indie: Bronnenputlikatie* (Groningen: H. D. Tjoank Willink, B. V., 1975).
- Umar Ibrahim, *Thariiqah 'Alawiyyah: Napak Tilas dan Studi Kritis atas Sosok dan Pemikiran Allamah Sayyid 'Abdullah Al-Hadad, Tokoh Sufi Abad ke-17* (Bandung: Mizan, 2001).
- van de Graaf, E. A., *De Statistiek in Indonesië* (Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve, [1954]).
- van der Kolff, G. H., "De Historische Ontwikkeling van de Arbeidsverhoudingen bij de Rijscultuur in een Afgelegen Streek op Java: Voorlopige Resultaten van Platselijk Onderzoek", *Volkscredietwezen*, 1937, hlm. 3-70.
- van der Wal, S. L., *Officiële Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950* (s-Gravenhage, 1971), Vol. I-VII.
- van Mook, H. J., "Kota Gede", *KT*, XV: 1926, hlm. 353-400.
- Vansina, Jan, *Oral Tradition: A Study in Historical Methodology* (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1965).
- , "Culture Through Time", dalam Raoul Naroll and Ronald Cohen (eds.), *A Handbook of Method in Cultural Anthropology* (New York: Columbia University Press, 1970), hlm. 165-179.
- , "Once Upon a Time: Oral Traditions as History in Africa", dalam Felix Gilbert and Stephen Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W.W. Norton & Company, 1972), hlm. 413-439.
- Vovelle, Michel, *Mentaliteits Geschiedenis: Essays over Leefen Beeldwereld* (Nijmegen: SUN, 1985).
- W. Bonar Sidjabat, *Ahu Si Singamangaraja: Arti Historis, Politis, Ekonomis dan Religius Si Singamangaraja XII* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982).
- Warner, Jr., Sam Bass, *Streetcar Suburbs: The Process of Growth in Boston* (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1962).
- , *The Private City: Philadelphia in Three Periods of Its Growth* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973).
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: The Free Press, 1964), hlm. 94. Terjemahan A. M. Henderson dan Talcott Parsons dengan pengantar oleh Talcott Parsons.
- Weintraub, Karl J., *Visions of Culture: Voltaire, Guizot, Burckhardt, Lamprecht, Huizinga, Ortega Y Gasset* (Chicago: University of Chicago Press, 1966).

- Wertheim, W. F., *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* (The Hague: van Hoove, 1956).
- Williams, Raymond, *Culture* (Glasgow: Fontana Paperbacks, 1983).
- Wolman, Benjamin B. (ed.), *The Psychoanalytic Interpretation of History* (New York: Harper Torchbooks, 1973).
- Wuthnow, Robert, et al., *Cultural Analysis: The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Foucault, and Jueqen Habermas* (London: Routledge and Kegan Paul, 1984).
- Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia, 1950-1980* (Jakarta: LP3ES, 1991).
- , *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia, 1945-1966* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982).
- Yayasan T. P. Aceh, *Pocut Meurah Intan: Srikanth Nasional dari Tanah Rencong* (Jakarta: Yayasan T. P. Aceh, 1987).
- Yeung, Y. M., and C.P. Lo (eds.), *Changing South-East Asian Cities: Readings on Urbanization* (Singapore: Oxford Univerdity Press, 1976).
- Zainab Bakir dan Chris Manning (ed.), *Angkatan Kerja di Indonesia: Partisipasi, Kesempatan, dan Pengangguran* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).
- Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982).

Sumber Tulisan

- Bab 1. Penulisan Sejarah di Indonesia, makalah untuk Musyawarah Kerja Sejarah Ke IX Se Jawa dan Bali, di Jember, tanggal 21 23 Maret 1988. Makalah ini adalah revisi dengan beberapa penyesuaian dari makalah yang pernah disajikan dalam the Southeast Asian Summer Institute (SEASSI) Seminar, di the University of Michigan, Ann Arbor, 1 3 Agustus 1985).
- Bab 2. Sejarah Lisan, dari *Analisis Kebudayaan Tahun II* Nomor I 1981/1982, hlm. 68 74, makalah untuk Seminar Sejarah Nasional ke III, Jakarta 1981.
- Bab 3. Sejarah Sosial, makalah untuk Pekan Pengarahan Tenaga Penulis/Peneliti Biografi dan Kesejarahan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Tanggal 5 s/d 9 Juni 1983 di Wisata Hotel Internasional, Jakarta.
- Bab 4. Sejarah Kota, paper disampaikan dalam Seminar Sejarah Lokal (Proyek IDSN), Denpasar, 1 5 September 1982.
- Bab 5. Sejarah Pedesaan, makalah disusun untuk Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, 1982/1983. Seminar Sejarah Nasional IV, Yogyakarta 7 10 Juni 1982.
- Bab 6. Sejarah Ekonomi Pedesaan, paper untuk Seminar Sejarah Lokal yang diselenggarakan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional di Medan, tanggal 17 20 September 1984.
- Bab 7. Sejarah Wanita, makalah untuk Seminar Sejarah Wanita yang diselenggarakan oleh MSI Cabang Yogyakarta bersama Balai Kajian Sejarah DITSENITRA, Yogyakarta, tanggal 22 23 Desember 1988 di Yogyakarta. Sub bab "Pendekatan Gender" merupakan materi baru.

- Bab 8. Sejarah Kebudayaan, makalah Seminar Sejarah Nasional V, Semarang, 27 30 Agustus 1990.
- Bab 9. Seminar Sejarah Lokal 1984, makalah untuk Diskusi Sejarah yang diselenggarakan oleh MIS Cabang Jakarta, 23 Februari 1985, Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta.
- Bab 10. Sejarah Agama, *handout* kuliah.
- Bab 11. Sejarah Politik, *handout* kuliah.
- Bab 12. Sejarah Pemikiran, ditulis khusus.
- Bab 13. Biografi, ditulis khusus.
- Bab 14. Sejarah Kuantitatif, ditulis khusus.
- Bab 15. Sejarah Mentalitas, ditulis khusus.

Indeks Nama

A

A. H. Nasution 12, 13
 A. Hassan 194
 A. M. Djuliali Surojo 150
 A. Makmur Makka 211
 Abdul Aziz Theba 178
 Abdul Djamil 163
 Abdul Munir Mulkhan 180
 Abdul Qahhar Mudzakkar 184, 216
 Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi 158
 Abdullah, kisah 158
 Abdurrahman Surjomihardjo 30n
 Abdurrahman Wahid, KH 184, 207, 237
 Achmad Chatib, KH 172
 Achmadi 198n
 Adinegoro 15
 Adnan Buyung Nasution 178
 Ahmad Adaby Darban 69n, 151
 Ahmad Dahlan, KH 34, 69, 171, 172, 189
 Ahmad Rifa'i Kalisalak, KH 163
 Ahmad Syafi'i Ma'arif 178
 Ahmad Yani, Jenderal
 Pahlawan Revolusi 15
 Ibu 15
 Aine 105
 Akbar Tanjung 184
 Alfian 213n
 Al-Hadad, Allamah Sayyid 'Abdullah 198
 Ali Murtopo 217
 Ali Rahmena 172
 Alwi Shihab 166
 Amangkurat I 151
 Amien Rais 184
 Amir Fatah Wijayakusuma 153
 Amir Santosa 183
 Amir, Samin 105n
 Anhar Gonggong 184, 216
 Anton E. Lucas 30n, 181
 Aoh Kartahadimadja 193
 Aqib Suminto 16, 163
 Aries, Philippe 41, 82n, 124n, 239n

Arnold, Dr. 212
 Ashley, W. J. 94
 Ashton, T. S. 108n
 Ashworth, W. 104n
 Ayatrochaedi 154
 Aydelotte, William O. 221n
 Ayip Rosyidi 16, 208

B

B. J. Habibie 210, 211, 219
 B.A. Simanjuntak 147
 Bachtiar Effendy 194
 Bachtiar Rivai 52
 Back, Kathryn 29n
 Baroroh Baried 122
 Baum, Willa K. 29n
 Beard, Charles 212, 221
 Becker, A. L. 171, 213n
 Bellah, R. N. 161
 Benda, Harry J. 163
 Berger, Peter L. 200
 Bitter, Johan 116
 Bloch, Marc 39, 43, 74, 165, 237
 Blusse, Leonard 115
 Boeke, J. H. 96, 105, 225
 Boland, B. J. 163
 Boomgard, Peter 225n, 226
 Braudel, Fernand 56, 110, 152, 221, 222
 Brinton, Crane 191n
 Buchowski, Gustav 236n
 Burckhardt, Jacob 135n, 136, 137, 139,
 140, 141, 142, 143
 Burger, D. H. 52, 74, 83, 226
 Burhanuddin Daya 167
 Burke, Peter 195, 221n, 223n, 238n

C

Callow, Alexander B. 70n
 Camus, Albert 195
 Carey, Peter 14

Castle, Lance 165, 177, 195

Castro, Fidel 206

Cense, A. A. 158

Chayanov 95

Cindy Adams 216

Clapham, J.H. 103n

Clark, G. N. 108, 110

Clelland, David C. 107

Cnoll, Pieter 116

Cochran, Thomas C. 57

Cole, F.W.A. 93n

Collingwood, R. G. 190, 193, 201

Collins, Wendy 119

Crouch, Harold 178

Cut Nyak Din 121

D

D. S. Moeljanto 179, 196

da Vinci, Leonardo 214

Dahm, Bernhard 184, 209, 210n

Dalton, George 104n, 105

Daly, Mary 119

Darmanto Jatman 216n

Darmono 147

Darsiti Suratman 131, 134, 152

Darto Harmoko 153

Daud Beureueh 217

Davis, Cyllom 29n

Dekker, Douwes 195

Deliar Noor 16, 163, 178, 182, 192, 210, 213

Demos, John 124

Denny J. A. 193

Dersott, Lyle W. 71n

Dewey, Alice G. 110

Dewi Sartika 121

Dharmansyah 146

Dilthey, Wilhelm 205n, 209, 246

Diponegoro 206

Djohar Noor 149

Djoko Utomo 150

Djuliati Soerojo 226

Dobbin, Christian 165

Dollar, Charles M. 221n, 231n

Dumond, Rene 92n

Durkheim, Emile 237

E

Edi S. Ekajati 155

Edward L. Poelinggomang 149

Elson, R. E. 81

Emmerson, Donald K. 179

Erikson, Erik H. 34n, 171, 215, 216

Evans, George Ewart 87

F

Fachry Ali 194

Fakhrur Rozy Dalimunthe 155

Fatia Nadia 126

Fatmawati 15

Febvre, Lucien 39, 140, 170, 221, 237, 238

Federspiel, Howard M. 167

Feith, Herbert 177, 195

Fernando, Radin 225

Fogel 103

Foster, George M. 89n

Frans Hitipeuw 152

Frederick, William H. 2

Freud, Sigmund 33, 214

Furnivall, J. S. 225

G

G. Dwipayana 216

Galtung, Johan 43, 174

Gandhi 171, 204, 215, 216

Garraty, John A. 203n, 212n

Gasset, Ortega Y. 136

Geertz, Clifford 67, 77, 81, 102, 107, 164, 165, 179, 194, 197, 228

cultural broker 197

involusi pertanian 81

Gilbert, Felix 32n, 42n, 73n, 176, 190n

Glock, C. Y. 162

Goff, Jacques Le 176

Goldstein, Sidney 227

Gordon, General 212

Goubert, Pierre 223

Graubard, Stephen R. 32n, 42n, 73n, 176, 190n

Guevara, Che 206

Guizot 136, 137

H

- H. M. Sulchan 211
 Haar, Ter 79n
 Haidar Bagir 194
 Haji Bilal 164
 Haji Rasul 34, 171
 Haji Sulchan 171
 Haji Zainal Arifin Abbas 155
 Hamid Abdullah 149, 155
 Harlem Siahaan 155
 Harte, N. B. 93n, 104n
 Hasan Bangil 160
 Hasan Basry 12
 Hasyim Asy'ari, KH 171, 172
 Hawke, G. R. 184, 226
 Heffner, Robert W. 180
 Heilbroner, Robert L. 100n, 104n, 105n
 Herodotus 26
 Heru Cahyono 180
 Hestar 116
 Hindley, Donald 179
 Hobsbawm, E. J. 42
 Hoesein Djajadiningrat 1
 Hollingsworth, T. H. 223n
 Holt, Claire 180
 HOS Tjokroaminoto 192n
 Huizinga, Johan 117, 118, 136, 139-143,
 152, 167, 247
 keberhadiran (*Ahnung*) 247
 morfologi budaya 117, 118, 139, 141,
 152
 Hunt, David 82
 Hüsken, Frans 52

I

- I Nyoman Kutha Ratna 123
 Ibrahim Amini 206n
 Ida Bagus Sidemen 150, 155
 Ihsan Ali Fauzi 194
 Iik Mansurnoor 183
 Inggit Garnasih 16

J

- J. R. Chaniago 148, 149, 154
 Jackson, Karl D. 183
 Jay, R. R. 88

- Jensen, Richard J. 221n, 231n
 Julianto Ibrahim 241
 Jung
 psikoanalisis 33

K

- Kartini 121, 127
 Kartosuwiryo 217
 Kerblay, Basile 96
 Khadafi, Muammar 207
 Khomeini, Imam 207
 Ki Hadjar Dewantoro 189
 Ki Manteb Sudharsono 211
 Ki SH Mintardja 157
 Knaap, Gerit J. 225
 Knight, G.R. 225
 Koentjaraningrat 67n, 74, 89n
 Kuhn, Thomas 190n
 Kuntowijoyo 77n, 179, 181, 195n, 202n,
 230n, 241n
 Kwantes, R.C. 89n

L

- Labrousse, Ernest 222
 Ladurie, Emmanuel La Roy 40, 49-
 51, 223, 224, 232
 "total history" 40, 175, 223, 224,
 232
 Lampard, Eric 64
 Lamprecht 136
 Laslett, Peter 41
 Leach, E. 78
 Legge, J. D. 182
 Lemon, M.C. 190n
 Lenin 206
 Leo Suryadinata 213
 Lewis, Oscar 27n
 Lerner, Gerda 127
 Liddle, R. William 180
 Lim Sioe Liong 205
 Linus Surjadi AG 131
 Lo, C.P. 227
 Lock, John 190
 Lockridge, Kenneth A. 47, 67n
 Lodge, Henry Cabot 220
 Lombard, Denys 222n

Luckmann, Thomas 200
 Lukacs, George 204n
 Lukacs, John 247n
 Lukman Soetrisno 226
 Luther, Martin 34n, 215

M

M. Habib Mustopha 154
 M. Nursam 202, 207
 MacIver 105
 Maclean 29n
 Mahmud Yunus 167
 Malcolm X 205
 Mangkunegara IV 195, 198
 Manning, Cardinal 212
 Manning, Chris 127
 Manuel, Frank E. 32n
 Mao 206
 Marhaenisme 192. *Lihat juga* Sukarno
 Marx, Karl 53, 192
 Marzuki AB Yass 151
 Mas Marco 231, 235, 236
 Mason Elizabeth B. 28n
 Mathias, Peter 109n
 Mazlish, Bruce 33n, 214
 Mbah Suro 242
 Megawati 184
 Merrit, Richard 231
 Mestika Zed 148, 149, 155
 Milone, Pauline Dublin 60n, 227
 Mink, Louis O. 190n, 193
 Mochtar Mas'ood 183
 Mohammad Hatta 182, 189, 192, 193,
 197, 198, 210
 Maklumat Pemerintah 3 November
 192
 Mohammad Roem 15n
 Mortimer, Rex 179
 Muchlis 151
 Muhammad Ibrahim 155
 Muhammad Kamal Hassan 177

N

Nagtegaal, Luc 225
 Nakamura, Mitsuo 164, 243
 Nani Rusmini 147

Nash, Manning 106, 107n, 109n
 Nawawi Al-Banteni, KH 172
 Nazief Chatib Z. Pangaduan Lubis 154
 Nelli, Humbert S. 70n
 Nevins, Allan 28
 Ni Ketut Santini 126
 Nichterlein, Sue 2
 Nightingale, Florence 212
 Nitisemito 211
 Nixon 214
 Nordholt, Nico Schulte 183
 Nugroho Notokusanto 1n, 12n
 Nyi Ageng Serang 121

P

Padmasusatra 199, 241, 243
 Pajung Bangun 153
 Pakubuwono IV 195, 198
 Pakubuwono X 202, 243
 Pangeran Suryaningrat 243
 Pangeran Wangsakerta 154
 Peacock, James L. 34, 171, 213
 Pearson, Henry W. 108n
 Pelzer, K. J. 36, 81
 Pocut Meurah Intan 121
 Poeze, Harry A. 15
 Polanyi, Karl 100, 105, 108
 Pramoedya Ananta Toer 131, 204, 205, 208
 Pudjiwati Sajogyo 113
 Puteri Amazon 119

Q

Quraish Shihab 167

R

R. Soenarto Mertowerdoyo 196
 R. Z. Leirissa 148, 155
 R.M. Tirta Adhi Soerjo 204
 Rachmawati Sukarnoputeri 15, 192
 Raden Ema Bratakusuma 155
 Raden Mas Harya Purwa Lelana 158
 Raden Mas Purwa Lelana 158
 Raden Slamet Prajoedi Atmosoedirdjo 78n
 Raffles 150
 Rahnip 196n

Raillon, Francis 180
 Ramadhan K.H. 16, 204, 216
 Ranggawarsita 86, 154
 Ratna R. 153
 Resink, G. J. 21
 Rickleffs, M.C. 24n
 Riyadi Gunawan 32n, 152
 RM. Jayadiningrat I 197, 241
 Robertson, Roland 161, 162
 Robison, Richard 181
 Roeder, O. G. 184, 210
 Rosihan Anwar 207, 208n
 Rostow, W. W. 44, 53, 99, 100
 Rusdi Sufi 149
 Rusli Amran 16

S

S. K. Trimurti 121
 Sahiron Syamsuddin 131
 Saifuddin Zuhri 204
 Samanhudi 164, 235, 236
 Samin Surosentika 151
 Sanoesi Pane 197
 Sartono Kartodirdjo 6, 7n, 14, 24n, 40, 75,
 146, 158, 159, 177, 179, 222n, 240
 "sesepuh" sejarawan 6
 Savitri Prastiti Scherer 213
 Schlesinger, Jr., Arthur 229
 Schrieke, B. J. O. 80
 Seeley, Sir John Robert 174
 Selo Soemardjan 36n
 Shanin, Theodor 92n, 95n, 96n
 Shiddique, Sharon 122n
 Simiand, François 222
 Simuh 154
 Sisingamangaraja 17
 Siswanto Masruri 193
 Sjafri Sairin 35n
 Sjafruddin Prawiranegara 208
 Sjoberg, Gideon 60n
 Skinner, G. W. 83
 Slamet Mulyono 14
 Smail, John R. 6, 23n
 Smelser, Neil J. 54, 55, 106, 109
 model tujuh tingkat perkembangan 54
structural differentiation 54
 Soebagjo I. N. 15, 28

Soedarmono 120, 121n, 131
 Soedarpo Sastrosatomo 207, 208, 211
 Soedarsono 134
 Soedjatmoko 6, 193, 202, 207
 Soeharto 184, 199, 202, 210, 216, 217
 dan Habibie 210
 dan Serangan Umum 1 Maret 210
 Soeri Soeroto 2
 Soetjipto Tjiptoatmodjo 57
 Soetomo 213
 Soewardi Soerjaningrat 213
 Spencer, J.L. 77n
 Spretnak, Charlene 119
 Sri Suhandjati 193
 Sri Sultan Hamengkubuwono IX 14
 Serangan Umum 1 Maret 210
 Stalin, Joseph V. 236
 Stark, R. 162
 Starr, Louis M. 27n, 28n
 Steenbrink, Karel A. 166
 Steinem, Gloria 119
 Stone, Lawrence 34n, 212n
 Strachey, Lytton 212
 Stromberg, Roland N. 189n
 Stuers, Cora Vreede-de 122
 Subandrio 210
 Sudomo 205
 Sugijanto Padmo 226
 Suhartono 150
 Sukarno 15, 16, 182, 184, 190,
 192-194, 196, 199, 204, 209,
 210, 215, 217, 240
 dan A. Hassan 194
 dan kabinet kaki empat 219
 dan Nasakom 194
 dan Ratu Adil 206
 Demokrasi Terpimpin 192
 "indoktrinasi" Tubapi 199
 Konsepsi Presiden 192
 politik Marhaenisme 192
 Sulaiman Lubis 146
 Sultan Agung 157
 Supple, Barry E. 94
 Supriyo Priyanto 153
 Suripan Sadi Hutomo 151
 Sutan Kumala Lubis 154
 Sutan Takdir Alisjahbana 193, 197
 Sutherland, Heather 14, 40
 Suwara 125

Suyatno 152, 155
Swierena, Robert P. 103n
Syafuruddin Prawiranegara 16
Syamsuddin 152

T

T. A. Ridwan 146
T. B. Simatupang 12, 30
T. Ibrahim Alfian 14
Tan Malaka 15
Taufik Abdullah 16, 73n, 74n, 122n
Taufiq Ismail 179, 196
Tawney, R. H. 106, 107n
Tengku Luckman Sinar 153
Terra, G. J. A 77
Teuku Chik Muhammad Thayeb
Peureulak 155
Thernstrom, Stephan 64n, 72
Thompson, Paul 26n
Thorner, Daniel 95
Tjiptomangunkusumo 202, 213
Tjokroaminoto 206, 235, 236
Todaro, Michael 103
Toennies 105
Touwen, Jeroen 225
Touwen-Bouwsma, Elly 183
Truman, Harry S. 71
Turner, Frederick Jackson 220

U

U. M. Napitupulu 147
Umar Ibrahim 198n
Umar Kayam 157
Usman Pelly 147, 155

V

van de Graaf, E. A. 103, 233
van der Kolff, G. H. 76
van der Wal, S.L. 30n
van Mook, H.J. 61n
van Niel, Robert 14
van Nijenroode, Cornelia 115, 116
van Vollenhoven, C. 79
Vansina, Jan 25, 45
Voltaire 136, 138

von Bruinessen, Martin 168
von Ranke, Leopold 26, 220
Vovelle, Michele 169, 239, 240

W

W. B. Sidjabat 17
Wahid Hasyim, KH 171
Walandouw Maramis 121
Warner, Jr., Sam Bass 66, 69
Weber, Max 105, 106, 165, 209
Weintraub, Karl J. 117n, 136
Wertheim, W. F. 58, 77
William, Raymond 135n
Wolman, Benjamin B. 236n
Wuthnow, Robert 135n

Y

Yahya Muhaimin 178, 184
Yasadipura II 193, 195, 231
Yengoyan, Aram 171, 213n
Yeung, Y.M. 227

Z

Zainab Bakir 127
Zamakhsyari Dhofier 85n

Indeks Subjek

A

- a whole social order* 135
- abangan 179, 181, 185, 186, 194, 228
- abdi dalem* 27, 61, 127, 214
- ABRI 14, 185, 186
 - Catur Darma Ekakarma 12
 - Darma Pertiwi 122
 - Dwifungsi 12
 - Lembaga Sejarah Hankam 12
 - Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata 12
 - Sapta Marga 12
- Aceh 121, 149, 153, 186
 - dan Muhammadiyah 149
 - dikotomi struktural 153
 - Perang Cumbok 182
 - wanita 126
- Adam dan Arjuna 89
- Adat Osing 78
- Adviseur voor Inlandsche Zaken* 170
- Afrika 92
 - Anglophile 243
 - Franco-phile 243
- Ahnung* 247
- aji-aji* 241
- aliran kepercayaan 161, 242
- amar makruf nahi munkar* 184
- Ambon 148
 - kasus etnis 186
- American Historical Association* 114
- Amerika 66, 69
- Amerika Latin 207
- Amerika Serikat 37, 39, 47-49, 57, 58, 64, 68, 70-72, 113, 119, 124, 127, 171, 175, 205, 206, 212, 215, 229, 231
 - kulit hitam 118
 - memburu tukang tenung 242
 - revolusi 48
 - sejarah kriminalitas 70
 - the New History* 159
 - utopian commune* 47
 - zaman *New Deal* 27
- Amerikanisasi 244
- "anatomi sejarah" 137
- angger* 83
- Angkatan Oemat Islam 185
- Annales (Annales d'histoire economique et sociale)* 39, 175, 195, 221, 237
- antikuarianisme 108
- antropologi 9, 27, 35, 43, 74, 78, 89, 105, 124, 134, 174, 182, 183
 - agama 162
 - budaya 240, 244
 - dan etnopsikologi 155
 - dan kebudayaan 140
 - dan prosopografi 34
 - dan sejarah lokal 148
 - dan sejarah sosial-budaya 141
 - dan tradisi lisan 25
 - konsep 149
 - masyarakat non-pasar 105
 - medical anthropology* 87
 - mistisisme 168
 - penelitian 84
 - politik 152
 - simbolis 136, 161
 - sosial 146, 183
- Arab
 - bahasa 163
 - kelas menengah 97
 - perkampungan 62
- Arab Saudi
 - arsip tentang haji 164
- archaisme 134
- arkeologi 43
- Arsip Nasional 3, 17, 18, 29, 37
 - arsip daerah 37
 - penerbitan sumber sejarah 18
 - proyek sejarah lisan 18, 24
- Asia
 - Asia-centric* 23
 - cara produksi 96
 - perang 199
- Asri*, majalah. *Lihat* pers wanita

B

- babad* 1, 154, 158, 202
Babad Tanah Jawi 158, 202
bakulan 86, 110
 Bali 19, 180
 agama asli 244
 budaya istana 107
 dan gerakan nasionalisme 126
 golongan pendeta dan kstaria 88
 sejarah daerah 20
 sistem kasta 87, 150
 Tabanan 102
 usada 87
 wanita 126
 Bandung 124, 195, 204, 240
 Banten 1, 14, 40, 75, 158
 agama Badui 244
 dan Lampung 79
 dan orang asing 62
 Bappenas 21
 Batak 17, 147
 Batavia 49, 115, 116, 117.
 Lihat juga Jakarta
 kisah wanita peranakan 116
 BBM (Bugis, Buton, Makasar) 186
bedaya 121
behavioral
 pendekatan 179
 sejarah 179, 183
behavioral sciences 57
 Beijing 128
 Belanda 19, 36, 68, 80, 89, 116, 117, 169,
 192, 208, 225, 226, 235, 236, 243
 bahasa 9, 18, 162, 163
 dan kekejaman Batavia 116
 dan sejarah sosial 117
 dokumen perang revolusi 30
 Hindia-Belanda 205, 207, 211, 214, 241
 kebudayaan 243
 kolonialisme 170
 modernisme 196
 pemukiman di Hirado 116
bendara 36
benggol 241, 242
 bersih desa 88
bewuste denken 239, 240
 Bima 209, 210
 biografi 6, 10, 14-16, 28, 121, 171,
 203, 204, 206-211, 213, 216, 217
 biografi intelektual 155
 biografi kolektif (*prosopography*)
 32, 34, 125, 171, 172, 175,
 208, 212-214
 dua kecenderungan 34
 biografi politik 32, 155, 182, 209, 210
 jenis biografi 208
 memoire 205
 novel biografis 204
 otobiografi 16, 28, 171, 201, 204,
 205, 208, 211, 216
 roman biografi 16
 unsur-unsur biografi 206
 birokrasi 62, 65-68, 164, 178,
 228, 241
 dan ulama 151
 elit birokrasi 40
 kendala birokrasi 13
 klasik 105
 perubahan birokrasi 166
 sistem birokrasi 13
 tradisional 66
 Blora 244
 Bogor 18
boss 70, 71
 cukong 71
 Boston 47, 49
bourgeois, burger 239
 BPN (Badan Pertanahan Negara) 232
 BPS (Biro Pusat Statistik) 226, 232
 Bratakesawa 242
 budaya
 desa 59, 86
 Islam 151
 istana 27, 107
 kontemporer kota 36
 kota 59, 63
 pengertian 135
 modern 59
 pedesaan 59, 62, 89, 167, 168
 perkotaan 167
 plural 62
 Renaissance 140
 wanita 118, 124
 Buddha
 pemukiman 65
 Bugis 149, 186
 Bukit Tinggi 125
Buletin Sejarah Lisan 18
 "bureaucratic capitalism" 181
burger 139, 239
 Buton 186

C

Centraal Kantoor voor de Statistiek 226
central concept 141-142, 167
chair 93
 Cina 97
 etnik 155
 kelas menengah 97
 keturunan 213
 konglomerat 181
 pedagang 63
 pemukiman baru 60
 pengusaha 165
 perkampungan 62
city directory 72
civilization 135
cliometrics 102
clitoral politics 120
collectief onbewuste 239-241
collective consciousness 237, 239
collective unconsciousness 239
collective intelligence 235
collective mentality 236, 239.
 Lihat fakta sosial
 Columbia University 28
 koleksi sejarah lisan 28
 mata kuliah sejarah lisan 29
 The Oral History Project 28
Comission on the Status of Woman 128
commercial crops 79
Comparative Study on Society and History 39
compoix 50, 223, 224
conjonture 222
content analysis 230, 231
cultur 135
cultural area 79
cultural broker 197
cultural morphology 117
 historical contact 117, 141
 historical imagination 117, 141
 historical presentment 141
 historical sensation 117, 141
 historical vision 117, 141
 pengertian 117
culture 135

D

Darma Wanita 122
dayah 84
 Dayak 185

Dedham 47-49, 68
 dan Boston 47
 utopian commune 47
 demografi 113, 114, 223
 Den Haag 30
 Departemen Kehutanan 20
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 20
 Departemen Penerangan 20
desa cara desa, priyayi cara priyayi 197
desa mawa cara, negara mawa tata 66
 Deshima 116
 determinisme 238
 Dewi Sartika 121
 diakronisme 52
 diferensiasi struktural
 model 54
 Direktorat Jenderal Kebudayaan 161
 Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional 10
Doenia Bergerak, majalah 231, 235

E

Eindresume 52
 ekonomi politik (*political economy*) 93, 94
embourgeoisement 228
enclave 62
 Eropa 2, 39, 136
 busana cara Eropa 243
 Europe-centric 23
 feodalisme 43
 imigran dari Eropa 47
 memburu tukang tenung 242
 pemukiman baru orang Eropa 60
 sejarah ekspansi 2
 etnologi 149, 184
 etnopsikologi (*ethnopsychology*)
 155, 184, 216, 217

F

fakta individual 235
 fakta sosial 235, 237
 collective mentality 236
 dan sejarah mentalitas 238
 dan sejarah sosial 41, 42
 kemampuan kontrol 237
Femina, majalah. *Lihat* pers wanita
 feminin 129
 feodalisme 43, 95, 104, 213

anti- 169, 202

zaman - 198

Fikiran Rakjat 194

folk religion 237

folk-art 245

folk-healing 245

folk-religion 236, 244

folk-urban continuum 60

folkbief 241, 245

Freudianisme 244

Neo-Freudian 33, 171, 215

G

Gadis, majalah. *Lihat* pers wanita

gambyon 121

Geisteswissenschaften 229

gemeinschaft 105

gender 129. *Lihat* sejarah wanita

general theme 141, 142

geographical time 56

"gerakan menuju ke timur" 152

Gunseikanbu 213

H

Harvard 93

hermeneutika 219

high culture 244

Hindia-Belanda. *Lihat* Belanda

Hindu

agama 244

pemukiman 65

wanita 126

historical mindedness 38

historiografi 2, 4, 7, 8, 21, 40, 145, 156

biografi kolektif 171

kebudayaan 133, 136

mentalitas 140, 153

modern 1, 212

"pribumisasi" 1

"sosiologi historiografi" 2

tradisional 1, 123

history of power. *Lihat* sejarah politik

"history of society" 42

Hollandisasi 243

humajuon, konsep 147

I

ideologi 2, 46, 51, 54, 63, 84, 151

dan sastra 123

demokrasi 48

gerakan feminisme 118

ideologi negara 11

ideologi politik 177

keterbatasan ideologis 11, 21

marhaenisme 192

mesianistik 151

milenarianisme 75

nativisme 151

pikiran kolektif 169

ilmu politik 9, 28, 118, 154, 163, 173,

174, 180, 182, 187

metode historis 173

ruang lingkup 173

ilmu sejarah, jurusan 3, 12, 17

Forum Kajian Ekonomi Indonesia dan

Asia Tenggara, 226

sejarah ekonomi 93

sejarah kuantitatif 230

sejarah lisan 18, 38

individual time 56

Indonesia 6, 9, 16, 19, 23, 30, 34-35,

49, 56, 59, 63-64, 67-69, 71-73,

80, 82, 91, 94, 96-97, 103, 105, 107,

113-114, 125, 128, 134, 151, 156,

159, 161, 163, 165, 166, 177-178,

213-214, 226, 231-232, 236

agama dan kepercayaan 85

agresifitas antar etnis dan agama 242

antropologi politik 152

bahasa 135, 163

dan Timor Timur 211

desa 74, 104

ekosistem 77

gerakan sosial 180

Indonesia Timur 62, 77, 148, 152, 180

Indonesia-centris 7

industrialisasi 55

kajian politik 179

kerajaan Islam 164

memburu tukang tenung 242

metodologi sejarah 159

novel sastra Belanda-Indonesia 68

pemikiran sejarawan 2

penerbit 17

peranan orang Cina 97

perilaku politik 179

revolusi 152, 160, 219

sejarah 2, 4, 23, 24, 41, 51, 52,

57, 60, 62, 81, 113, 123, 145,

150, 172, 196

cakrawala baru 7
 dekolonisasi 23
 hipotesa demografi 52
 otonom 6
 penulisan buku standar 7
 ruang lingkup 24
 sejarah ekonomi 92, 93, 104, 225, 226
 lokal 97
 sejarah kejiwaan 171, 215
 sejarah kota 62, 64
 sejarah kuantitatif 225, 230, 233
 sejarah lisan 28, 29
 sejarah mentalitas 240
 sejarah pemikiran 193, 201
 sejarah politik 175, 178
 sejarah sosial 56
 sensus penduduk 53
 sumber statistik 103, 232
 tata kota Islam 168
 tradisi intelektual sejarawan 6
 tradisi sejarah 154
 urbanisasi 60, 227
Indonesia Raya, koran 201
 Indonesiacentrisme 1
 institusi sosial 42, 166
integrated equivalents 137
 Irian 244
 Islam 14, 16, 84, 163, 166, 168, 169,
 171, 178, 184, 192, 194, 210, 214, 243
 agama institusional 161
 budaya 151, 193
 budaya pedesaan 167
 budaya perkotaan 167
 dan Kristen 185, 186, 242
 dan Pangestu 196
 di Jawa 194
 folk religion 170
 fundamentalisme 229
 gerakan keagamaan 130
 kebangkitan 165
 kerajaan 164
 Pan-Islamisme 163
 partai politik Islam. *Lihat* partai politik
 radikalisme 229
 reformis 164
 sastra Jawa 168
 sejarah kesenian 169
 seni 168
 tata kota 168
 teologi Syi'ah 206
 wanita 126
 Italia 140

J

Jakarta 7, 11, 18, 49, 62, 68, 125,
 186, 237
 kota metropolitan 62
 Manggarai 62
 perkampungan etnis 62
 Jawa 5, 69, 78, 88, 90, 96-97, 107, 110,
 122, 125, 147, 180, 194, 196, 207,
 213, 226, 230
 bagian selatan 78
 budaya Jawa 193
 dan budaya Islam 151
 desa di masa lampau 79
 gerakan protes pedesaan 151
 Jawa-sentris 8
 Jawaisme 184
 kebatinan 196
 kebudayaan etnis 216
 lembaga pendidikan 86
 luar Jawa 8, 96, 97, 153, 180, 225
 mistifikasi 245
 pantai utara 98
 pendatang Jawa 149
 pergeseran stratifikasi sosial 88
 perkampungan 62
 perubahan sosial 150
 psikologi Jawa 184
 retorika 216
 sastra Jawa Islam 168
 sastra klasik 125
 sejarah kebudayaan 152
 sejarah kelas bawah 157
 survai pedesaan 52
 tiga varian agama 194
 toleransi etnik 147
 Jawa, bahasa 66
 gerakan Jowodipo 89
 ngoko 89
 Jawa Tengah 52, 61, 151
 Selatan 181, 185
 Utara 181, 185
 Jawa Timur 78, 244
 "Peristiwa Jawa Timur" 170
 Selatan 76
 ujung timur 82
 Jenggawah 36
 Jerman 135, 247
 kehidupan jiwa 138
 sejarah peradaban 138
 zaman simbolis 138
 jurnalisme 15, 134, 221

K

- kadurjanan* 241
- Kalimantan 77, 244
 - Barat 155
- Kansas City 71
- kanuragan* 241
- kapitalisme 83, 95, 151, 165
- Kartini*, majalah. *Lihat* pers wanita
- kasekten* 241
- Katolik
 - Wanita Katolik 123
- Kedaulatan Rakyat* 157, 242
- Kedungombo 199
- kejawan 90, 151, 198, 231
 - kapitalisme 151
 - kerajaan 27, 97
 - pemiskinan pedesaan 150
 - perkebunan 81
- kelas menengah 40, 59, 60-62, 71, 88, 97, 124, 166, 227
 - kelas menengah asing 97
 - kelas menengah asli 97
 - kelas menengah baru 85, 228
 - kelas menengah desa 84, 88
 - kelas menengah kota 59
 - kelas menengah pribumi 63, 71
 - kelas menengah santri 72
 - kelas menengah terpelajar 71
- kelas sosial 8, 36, 40, 42, 62, 65-66, 69, 82-83, 148, 150, 229
- kelompok kepentingan 174
- kelompok sosial 180, 200
 - dan fakta sosial 237
 - dan konsep gender 130
 - dan sejarah kota 37
 - desa 76
 - kelas menengah kota 59
 - mobilitas 84
 - perang 182
 - sejarah lisan 127
 - wanita 125
- kemit* 27
- kesadaran sejarah 1, 38, 247
- klangenan* 66
- Klaten 89
- kolektivisme 197
- Koloniaal Versla* 227
- kolonialisme 59, 148, 213
 - Belanda 170
- komunis 192
 - industri 102
 - strategi bawah-tanah 154
- komunisme 179, 192
- Kongres Wanita Indonesia 114, 122
- konservatisme 155
- "kontra-revolusi" 199
- koperasi 38, 85, 101, 189, 197-198
- kota
 - negara 60
 - administratif 61
 - dan distribusi penduduk 227
 - dan urbanisasi 227
 - ekologi kota 66
 - induk 60, 61
 - karesidenan 68
 - kolonial 68
 - metropolitan 62, 165
 - migran 150
 - modern 65
 - modern-industrial 66
 - pantai 62
 - pedalaman 62
 - pelabuhan 49
 - pemukiman 61, 65
 - perdagangan 61
 - peta kota 61, 62
 - praindustrial 61, 62, 66
 - provinsial 48, 68
 - retradisionalisasi 37
 - satelit 60, 61
 - stasiun kereta-api 49
 - tanah kota 64
 - tata kota 61, 168
 - tradisional 36-37, 61-63, 65-66, 68
 - tradisional-praindustrial 66
 - utopia 68
- kraton 61, 63, 68, 121, 243
 - dan birokrasi 66
 - konsep negara 66
 - perpustakaan 19
 - upacara 134
 - wayang orang 134
- Kristen
 - dan Islam 186, 242
 - dekristenisasi 239
 - wanita 126
- Kromo dan Suto 89
- Kupang 68

L

- laju pertumbuhan 232
- laku 242
- landrente* 150
- Laras*, majalah. *Lihat* pers wanita

LASWI, peristiwa 31
 Lasykar Jihad 186
ledhek 245
 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 9
 lesbianisme 120
l'histoire conjontural 221
l'histoire événementielle 222, 232
l'histoire mentalité 235, 237
l'histoire stucturale 221
l'histoire événementielle 56
life history 87
longue durée 221, 222
le mouvement longue durée 222

M

macapatan 198
 Madura 82, 185, 242
 adat 78
 dan Jawa Timur 78
 ekosistem tegalan 77
 kejahatan sosial 70
 kerjasama sosial 78
 migrasi ke Jawa 230
 pantai selatan 98
 selat Madura 57
 survei pedesaan 52
 tentang politik 183
 Majapahit 14, 65
 Makasar 186
 makronisme 134
 Malaysia 149
 "Malthusian Renaissance" 50
 Maluku 186, 242
 Tengah 148
mancalima 79
mancapat 79
 Manifes Kebudayaan 178, 196, 205
 Manifestan 196, 199
 Manunggaling Kawula-Gusti 196
 Marxisme 206
 dan Komunisme. *Lihat* komunisme
 dan "nasakom" 194
 dan sosialisme 192
 kaum Marxis 40, 95, 238
 materialisme historis 44
 non-Marxis 44
 Masjumi 192, 196, 199
 penerbit 192
 maskulin 129

Mataram
 kerajaan 97
 legitimasi raja 202
 zaman 52
Matra, majalah 123
mbok mase, gelar 121
 Medan 62, 145-148, 150, 246
 Mekah 172
Memorie van Overgave 18, 205
mendring 86, 110
 MENPORA, Kantor 20
 Menteri Urusan Peranan Wanita 114
menti-facts 240
meunasah 84
 militer 184
 dan bisnis 181
 dan PKI 206
 nilai-nilai militer 142
 peranan dalam politik 178
 publikasi sejarah militer 12, 13
 sejarah politik dan militer 115
 wanita dalam militer 126

Minahasa 97
 mistisisme 162, 167, 168
 mitos 137, 200, 224, 237
 Batara Goa 151
 dan "ilmu kodrat" 231
 "Indonesia Raya" 211
 mesianistis 151
 Nyi Loro Kidul 202
 pembangkangan umat Islam 202
 model kekuatan sejarah 166
 Mojokuto 102
 morfologi budaya 139, 152.
 Lihat juga cultural morphology
 wanita 118
 Mousnier 40
 Muhammadiyah 149, 158, 164-166,
 198, 213
 'Aisyiah 123
 dan Aceh 149
 gerakan 189
 pemikiran kolektif 191
 pendidikan 198
 pergerakan wanita 122

N

Nahdlatul Ulama (NU) 34, 158, 191
 Al-Ma'arif 198
 Fatayat 123
 Nairobi 128

nasionalisasi 1
 nasionalisme 11, 23, 126, 169, 186,
 190, 193-194, 198, 240
 "nasionalisme Jawa" 202
Natuurwissenschaften 229
Neerlandocentrisme 1
New Economic History, gerakan 93
ngedok 76
ngempit 110
 NICA 189
Nova, majalah. *Lihat* pers wanita
nuclear family 66

O

Oetoesan Hindia 170
oral history 87
organized intelligence 75

P

Palembang 61
 kasultanan 151
 Pandergast 71
 Pangestu 196, 242
 Papua 186
 paralelisme sejarah 9
 partai politik 173, 178, 181, 185-186,
 221, 228-229
 AD/ART 178
 dan nasionalisme 240
 dan pemilu 181, 185
 dan perilaku negara 179
 dan tawuran pendukung 242
 Golkar 180
 Indische Partij 195
 partai abangan 229
 partai berkuasa 229
 partai buruh 229
 Partai Demokrasi Islam Indonesia 193
 Partai Komunis Belanda 192
 partai majikan 229
 Partai Marhaen 240
 Partai Pelopor 192
 partai politik Islam 163, 178
 partai priyayi 229
 partai santri 229
 partai *wong cilik* 229
 pasca Orba 186
 PDIP 180
 PKB 180

PKI 154, 179, 193, 196, 199, 206, 219
 PSI 196, 199
 sistem kepartaian 30, 70
 zaman Orba 186
particuliere landrijen 76
 Pati 52
patron-client 150
 PBB, konferensi 128
 pendekatan sejarah
 multidisipliner 24
 sejarah analitis 6
 sejarah interdisipliner 8, 9, 104, 146
 sejarah komparatif 9, 180
 sejarah struktural 6. *Lihat* sejarah
 struktural
 peradaban 135
 pengertian 136
 Perancis 220, 221
 Perhimpunan Indonesia (PI) 192
 Perikatan Perkoempoelan Perempoean
 Indonesia 122
 Peristiwa Tiga Daerah 30, 181, 185
 pers wanita
Asri 124
Femina 123, 124
Gadis 124
Kartini 123, 124
Laras 124
Nova 124
Sarinah 123, 124
Selera 124
 pers perjuangan
Poetri Hindia 124
Poetri Merdeka 124
Soenting Melayu 125
Suara Aisyiyah 125
 PERTAMINA 20
pesanggrahan 66
 Philadelphia 69
Poetri Hindia. *Lihat* pers wanita
Poetri Merdeka. *Lihat* pers wanita
 polemik kebudayaan 196
political mysticism 241
 politik aliran 179
popular art 236, 237
popular culture 244
Posmo, majalah 245
 Poso 185, 242
presentment 247
priyayi 36, 62, 88, 157, 181, 183, 185,
 194, 197, 199, 207, 228-229,
 236, 240-241, 243, 245

anti-priyayi 231
 Hollandanisasi 243
 Jawa 125
 pribumi 68
 priyayi alit 241
 priyayi luhur 241
 priyayisasi 165, 243
 prosopografi (*prosopography*).
 Lihat biografi
 prosopografi wanita 121
 protestantisme 165
 psikologi 138, 141, 155, 182, 184, 237-238
 dan sejarah politik 184
 psikologi Islam 184
 psikologi Jawa 184
 "psikologi pembaharu" 34
 psikologi santri 184
 psikologi Tapanuli 184
 sosial 240, 242
 psychoanalysis 208
 psychohistory 32, 171, 175, 208, 214
 pulung 87
 Pusat Antar-Universitas Studi Sosial 10

Q

Quaker, agama 215

R

ratib Hadad 198
 "refeodalisasi" 244
 Riau 186
rural sociology. *Lihat* sosiologi
rural-urban continuum 60
rural-urban contrast 60

S

Samarinda 150
 Samba 185
sambatan 85
 Saminisme 244
 Sampit 242
 sangkal putung 245
 santri 38, 72, 86, 165, 179-181,
 184-186, 194, 228, 242
 dan kyai 84
 modernis 186
 pengusaha 165
 reformis 165

santrinifikasi 169
 tradisional 186
 Sarekat Islam 88, 158, 169, 198, 235
 dan gagasan koperasi 198
 kemunculan 164
 lokal 88, 164
Sarinah, majalah. *Lihat* pers wanita
Sasadara, majalah 231
scracity, konsep 101
Seeleleben 138
 sejarah agama 142, 157, 172
 dan biografi 171
 pendekatan
 sejarah ekonomi 164
 sejarah intelektual 166
 sejarah kebudayaan 167
 sejarah kesenian 168
 sejarah mentalitas 169
 sejarah agraria 35
sejarah androcentric 113.
 Lihat juga sejarah wanita
sejarah androgynous 113, 128.
 Lihat juga sejarah wanita
 "sejarah baru" 40
 sejarah budaya 6, 37, 118
 sejarah daerah 11, 20
 "sejarah dari bawah" 22, 185
 "sejarah dari bawah ke atas" 37
 sejarah demografis 172, 223
 sejarah desa 32, 36
 sejarah dinas 28
 sejarah diplomasi 37
 sejarah ekonomi 5, 9, 34, 37, 63, 92-93, 96
 dan ekonomi petani 95
 dan ekonomi politik 93
 dan sejarah agama 164
 dan sejarah sosial 39
 konteks ekonomi industrial 95
 konvensional 94
 lokal 97, 98
 lokal dan nasional 92
 pengertian 93, 94
 satuan permasalahan 100
 faktor ekonomi 100
 komoditi ekonomi 100, 101
 lembaga ekonomi 100, 101
 pertumbuhan 100, 101
 problema 100, 101
 sektor ekonomi 100, 101
 satuan waktu 99
 satuan wilayah 98

- studi mikro 92
- studi mikro-makro 93
- studi teoritik 93
- sejarah ekonomi pedesaan 91.
 - Lihat juga* sejarah ekonomi
 - ciri ekonomi petani 95
 - dan teori sosial 104
- sejarah gender 129.
 - Lihat juga* sejarah wanita
 - persyaratan 130
 - sumber 130
- sejarah geografi 36
- sejarah ilmu 175
- sejarah institusional 57, 178, 183
- sejarah intelektual 37, 141-142, 147, 151, 154, 158, 166-167, 169, 175, 177, 232
 - dan sejarah agama 166
- sejarah kebudayaan 115, 133-136
 - 139-140, 142, 152, 168-169
 - dan Islam 168
 - dan sejarah agama 167
 - dan sejarah wanita 117
 - dan sosiologi 141
 - kontemporer 143
 - kraton 134
 - metodologi 141
 - pengertian 139
 - struktur dan tata 137
 - tugas 141, 167
- sejarah kejiwaan 32, 171, 208, 214-215, 217
 - dan otobiografi 216
- sejarah keluarga 32, 35, 82, 117, 123, 126, 228
- sejarah kesehatan 175
- sejarah kesenian 37, 137, 142, 169
 - dan sejarah agama 168
- sejarah kontemporer 5, 28, 130, 162
- sejarah konvensional 113
- sejarah kota 32, 42, 59, 62-64, 147, 172, 175, 203
 - bidang garap
 - ekologi kota 64
 - mobilitas sosial 71
 - problema sosial 68
 - sistem sosial 67
 - transformasi sosial ekonomi 66
 - dan peta sejarah 10
 - dan sejarah lisan 36
 - dan sejarah lokal 63
 - dan sejarah nasional 72
 - definisi 64
 - the new urban society* 64
- sejarah kriminalitas 172, 175
- sejarah kualitatif
 - data 220
- sejarah kuantitatif 25, 175, 219-221, 232
 - dan kaum positivis 220
 - data 220
 - pengertian 219
 - teknik matematika 219
 - tradisi Amerika 220, 225
 - tradisi Perancis 225
 - waktu dalam sejarah, konsep 221
- sejarah kuantitatif, 25
- sejarah lisan 3, 9, 18, 23, 25-29, 32, 34-36, 38, 90, 127, 130-131, 149, 153, 169, 170-172, 202
 - dan Arsip Nasional 18, 24, 29
 - dan biografi 155, 214
 - dan metode interview 130
 - dan sejarah desa 35
 - dan sejarah egalitarian 31
 - dan sejarah keluarga 35, 83
 - dan sejarah mentalitas 235
 - dan sejarah nasional 26
 - dan tradisi lisan 25, 26
 - data 220
 - kritik 26
 - mata kuliah 38
 - mata-pelajaran 38
 - metode pelengkap 28
 - metode tunggal 27
 - pelengkap dokumenter 37
 - pembaharuan metode 24
 - prospek 37, 38
 - "pusat" sejarah lisan 18
 - ruang lingkup 32
 - substansi penulisan sejarah 29-31
 - sumber sejarah 28-29, 33, 67, 127, 130
- sejarah lokal 8, 10, 20-21, 101, 145, 148, 156, 175, 185, 206
 - dan sejarah kota 63
 - dan sejarah politik 184
 - kategori 185
 - luar Jawa 8
- sejarah maritim 172
- sejarah mentalitas 140, 142, 153, 166, 169, 175, 177, 201, 232, 235, 239, 240, 241, 246, 247
 - dan nasionalisme 240
 - dan sejarah agama 169
 - definisi 239
 - imajinasi kolektif 169
 - perasaan kolektif 169, 170

- perkembangan 237, 238
- pikiran kolektif 169
- sejarah ketaksadaran kolektif 240
- sejarah mentalitas kolektif 239, 240
- sensibilitas, konsep 238
- tema 239
- sejarah militer 3, 12-14, 28, 175
 - dan ABRI. *Lihat* ABRI
- sejarah pedesaan 73
 - bangunan fisik 80
 - dan ekonomi agraris 76
 - gejala psiko kultural 80, 88-89
 - hubungan sosial 80, 87
 - lembaga sosial 80, 83-87
 - pengertian 73-75
 - satuan budaya/adat 77, 79
 - satuan ekonomis 77, 79
 - satuan ekosistem 77
 - satuan geografis 77, 78
 - satuan sosial 80, 82
- sejarah pemikiran 240
- sejarah pendidikan 175
- sejarah perang 28, 37
- sejarah politik 37, 164, 173-176, 190, 223-244
 - dan militer 115
 - dan sejarah agama 163
 - dan sejarah ekonomi 93
 - dan sejarah kebudayaan 133
 - dan sejarah kekuasaan 176
 - dan sejarah lokal 184
 - dan sejarah wanita 115
 - history of power* 176
 - ilmu bantu
 - antropologi 183
 - ekonomi 183
 - psikologi 184
 - sosiologi 183
 - kontemporer 154
 - pendekatan
 - biografis 182
 - sejarah behavioral 179
 - sejarah institusional 178
 - sejarah intelektual 177
 - sejarah komparatif 180
 - sejarah konstitusional 177
 - sejarah sosial 180
 - studi kasus 181
 - perubahan orientasi 176
 - tingkat lokal 176, 184, 186
 - topik 186
 - topik-topik 164
- sejarah populer 3, 14
- sejarah psikologis 175
- sejarah sensibilitas 140, 169, 170
 - dan sejarah agama 170
- sejarah siklus 221
- sejarah societal/global 42
- sejarah sosial 5, 11, 18, 27, 36, 37, 39, 40, 75, 84, 117, 126, 147, 151, 157, 169, 175, 180, 183, 223, 224
 - bidang garap
 - fakta sosial 41
 - institusi sosial 41
 - kelas sosial 40
 - peristiwa sejarah 40
 - sosial ekonomi 101
 - sosial-ekonomi 39, 50, 133
 - budaya 141
 - dan biografi 155
 - dan kajian sejarah Jawa 152
 - dan sejarah agama 166
 - dan sejarah ekonomi 102
 - dan sejarah keluarga 123
 - dan sejarah pedesaan 73, 75
 - dan sejarah wanita 115, 117, 125
 - model evolusi 47, 48, 166
 - model interval 47, 52
 - model jangka panjang-menengah-pendek 47, 56
 - model lingkaran sentral 47, 49
 - model sistematis 47, 57
 - model tingkat perkembangan 47, 53
 - pelopor 39
 - tradisi Eropa 39
- sejarah struktural 175, 221
- sejarah total 175
- sejarah wanita 113, 115, 120
 - buku panduan di SLTA 114
 - pendekatan
 - sejarah kebudayaan 117
 - sejarah politik 118
 - sejarah sosial 115, 117
 - pendekatan gender 128, 129
 - tema-tema
 - budaya wanita 124
 - ekonomi 126
 - etnisitas 126
 - gambaran wanita 123
 - gerakan wanita 122
 - hubungan laki-laki dan wanita 125
 - kelompok wanita 125
 - kemandirian 121
 - penerbitan sumber 127
 - peranan dalam sosial-ekonomi 120
 - sejarah keluarga 123
- sejarawan akademis 2, 3, 4, 5
 - bantuan pemerintah 4

- sejarawan kualitatif 220
- sejarawan militer 13
 - sejarawan non-militer 13
 - wajib militer 13
- Selera*, majalah. *Lihat* pers wanita
- Semar Mbabar Jati Diri* 210
- Seminar 8, 9, 145
- Seminar HIPIS 1990 133
- seminar sejarah 3, 4, 9, 10-11, 13, 114, 145-156
 - kuantitatif 221, 226
- Seminar Sejarah Lokal* 8, 95, 145
 - 1984 145-149, 153
 - Kedua 10
 - Pertama 8
 - "problem-oriented" 8
- Seminar Sejarah Nasional* 8
 - Kedua 7, 23, 181
 - Keempat 10
 - Ketiga 7, 26
 - Panel Etno-histori 26
 - Pertama 1, 6, 7, 23
- seminar tentang desa 10
- Seminari Tinggi 161
- sengkeran 66
- Serat Mas Jenthu Inggih Mas Nganten* 197
- Serat Sasanasunu* 193, 195, 231
- Serat Sasangka Jati* 196
- Serat Subasita* 199, 241, 243
- Serat Wedhamadya* 243
- Serat Wedhatama* 195
- Serat Wulangreh* 195
- Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora III* 177
- sinoman 86
- sistem ekonomi 99, 108
 - agraris 48, 76, 102, 104
 - ciri-ciri 110
 - bazaar 165
 - dualistik 96
 - ekspor 106
 - enclave 92
 - exchange 76
 - firma 165
 - industrial 95, 100, 165
 - kapitalistik 92, 96, 110
 - nasional 108
 - pasar 96, 100, 101, 105, 107, 110
 - pedesaan 95, 99-101, 104, 111
 - penukaran 100
 - perintah 100
 - petani 95, 96, 99, 100
 - pra-pasar 100
 - primitif 100, 104, 105, 109
 - redistribusi 100
 - resiprositas 100
 - subsistence 76, 79
 - toko 110
 - toserba 110
 - tradisi 100
 - tradisional 101
 - warung 110
- "sistem sejarah" 42
- sistem sosial, penulisan
 - model diakronis 43, 44, 45, 53
 - model sinkronis 43, 46
- sociabilité 169
- social scientific 6
- social time 56
- social-scientific history 156
- "societal history" 42
- Societeit Harmonie 243
- Soenting Melayu*. *Lihat* pers wanita
- Solo 195-196, 207. *Lihat juga* Surakarta
- sosialisme 95, 190, 197
 - ilmiah 192
 - utopis 192
- sosiologi 53, 56, 74, 89, 106, 113-114, 134, 139, 141, 146, 162, 174, 180, 182-183, 200, 221, 223, 227, 237, 240, 243
 - dan sejarah ekonomi 106
 - dan sejarah kebudayaan 141
 - ekonomi 226
 - historiografi. *Lihat* historiografi
 - hukum 137
 - metode penelitian 72
 - pemikiran sosiologis 54
 - rural sociology 73
 - sejarah sosiologis 54
 - sosiologi ekonomi 105, 106
 - sosiologi pendidikan 147
 - sosiologi pengetahuan 136, 197, 199-201
 - sosiologi politik 183
 - sosiologi revolusi 152, 160
 - urban 60
- spesialisasi, sejarah 175
- splinter groups 167, 168
- Suara Aisyiah*. *Lihat* pers wanita.
- subjective mind 246
- subject matter 200, 219-220, 225
- Subud 242
- Sulawesi 77, 244
 - Selatan 19, 101, 149, 216
- Sumatera
 - Barat 16, 97, 148, 158

Minangkabau 120, 125, 148-149, 154,
213, 216
Tengah 165
Timur 98
Utara 107, 146-148
Sumatra 77

Surakarta 36, 61, 63, 86, 89, 158,
199, 231, 235, 243, 245
Bengawan Solo 98
Karesidenan 241
Kasunanan 19
Laweyan 71, 121, 164
priyayi Kasunanan 240
Susuhunan 89

T

tamadun 135
Taman Siswa 198
Wanita Taman Siswa 123
Tanam Paksa 150, 151
migrasi buruh 226
pedesaan Jawa 226
Peraturan 96, 101
zaman 105
tarekat 84, 162, 168
secret society 162
tayub 121, 245
Tengger 244
teosofi 196
Thariiqah 'Alawiyah 198
the psychology of the colonized 243
time series 230, 232
Timor Timur 12, 91, 211
Baucau 91, 92
Dili 91, 92
pelepasan 211, 219
pencaplokan 211
Toraja 244
total history 232
trah 35
cakal-bakal 35

U

Ulama 180
elit politik 183
pejuang 155
ulama 170, 174, 180, 185
dan birokrasi 151
dan pembaharuan pendidikan 149
dan priyayi 181

dan uleebalang 182
pemberontakan ulama 163
uleebalang 149, 155, 182

V

verstehen 209, 246
aktuelle Verstehen 209
erklärende Verstehen 209
VOC 62, 115, 151
dan statistik 233
Volk 138
Volkgeist 138
Volksraad 228
Volksseele 138
Vorstenlanden 243
vrijmetselerij 196

W

wahyu 242
Wahyu Cakraningrat 210
Wahyu Makuto Romo 210
waktu sejarah
sejarah *conjuncture* 221
sejarah peristiwa 222
sejarah struktural (jangka panjang)
221
wereldbeelden 239
wisik 241
Witch-hunting 242
Woman Studies 128
womanhood 128
wong cilik 181, 183, 185, 197, 199, 229,
231, 236, 243

Y

Yogyakarta 1, 7, 10, 23, 31, 36, 61,
125, 164, 168, 213, 226, 235
Kalibayem 245
Kauman 63, 69, 164
Kota Gede 61, 71, 164, 243
kraton 134
Museum Sasana Budaya 31

Z

Zeitgeist 177

Bahkan kebudayaan kontemporer pun dapat dituliskan sejarahnya. Tantangan terbesar sejarawan justru pada penulisan sejarah kebudayaan kontemporer, sebab dengan penulisan itu kita akan dapat melihat masa kini kita dengan jelas. Masa kini kita memang masih menjadi milik banyak orang, tetapi sejarawanlah sebenarnya yang mempunyai posisi paling menguntungkan. Sebab, sejarawan dapat melakukan refleksi kritis melintas waktu; masa lalu, masa kini, dan masa depan.

(Kuntowijoyo, *'Sejarah Kebudayaan'*, dalam buku ini)

Kesempatan masih terbuka bagi sejarawan yang ingin menulis biografi KH Abdurrahman Wahid dari psikologi santri, Megawati dari psikologi Jawa, Akbar Tanjung dari psikologi Tapanuli, atau Amien Rais dari psikologi *amar makruf nahi munkar* Islam.

(Kuntowijoyo, *'Sejarah Politik'*, dalam buku ini)

Syarat terpenting bagi studi sejarah gender ialah kemampuan **mengidentifikasi** kelompok sosial pengguna konsep gender yang aktual dan spesifik. Dengan kata lain, studi sastra klasik, studi sastra, dan studi agama yang hanya mengenal teks, bukanlah studi sejarah. Kemampuan untuk identifikasi itulah yang menyebabkan studi sejarah berharga untuk disebut sejarah.

(Kuntowijoyo, *'Sejarah Wanita: dari Sejarah Androcentric Ke Sejarah Androgynous'* dalam buku ini)

Buku yang ada di tangan Anda ini semula adalah pertanggungjawaban penulisnya ketika memegang mata kuliah Teori dan Metodologi Sejarah pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra (Fakultas Ilmu Budaya), Universitas Gadjah Mada. Pembahasannya mencakup, di antaranya, sejarah kebudayaan, sejarah politik, sejarah sosial, sejarah wanita, sejarah mentalitas, sejarah kuantitatif, dan biografi.

Buku yang sarat dengan contoh-contoh ini sangat layak dibaca baik dosen dan mahasiswa sejarah, maupun yang tertarik pada penulisan sejarah.

